

**INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAMI DALAM
PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA PADA
SEKOLAH PENGGERAK DI PROVINSI ACEH**



**TETI WAHYUNI
NIM 221002031**

**Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Doktor dalam
Program Studi Pendidikan Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAMI DALAM
PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA PADA
SEKOLAH PENGGERAK DI PROVINSI ACEH**

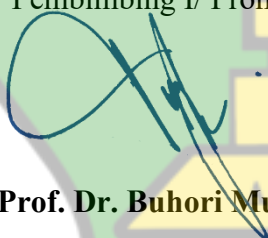
TETI WAHYUNI

NIM 221002031

Program Studi Pendidikan Agama Islam

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Sidang Terbuka.

Menyetujui,
Pembimbing I/ Promotor I,



Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag

Menyetujui,
Pembimbing II/Promotor II,



Dr. Mumtazul Fikri, MA

LEMBAR PENGESAHAN
INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAMI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM
MERDEKA PADA SEKOLAH PENGGERAK DI PROVINSI ACEH

TETI WAHYUNI

NIM 221002031

Program Studi Pendidikan Agama Islam

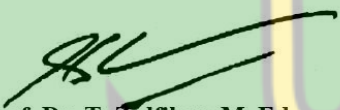
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 16 Maret 2026 M

26 Rajab 1447 H.

TIM PENGUJI

Ketua,


Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed

Sekretaris,


Dr. Mumtazul Fikri, S. Pd.I., MA

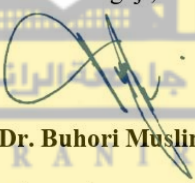
Penguji,


Dr. Silahuddin, M. Ag

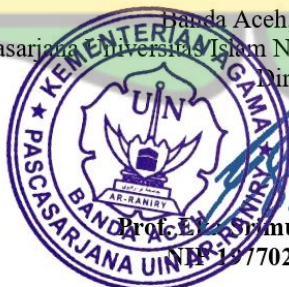
Penguji,


Dr. Sehat Insan Shadiqin, M. Ag

Penguji,


Prof. Dr. Buhori Muslim, M. Ag

Banda Aceh, 16 April 2026
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,




Prof. Dr. Y. Mulyani, M.A., Ph.D
NIP. 19702191998032001

LEMBAR PENGESAHAN
INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAMI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM
MERDEKA PADA SEKOLAH PENGGERAK DI PROVINSI ACEH

TETI WAHYUNI

NIM 221002031

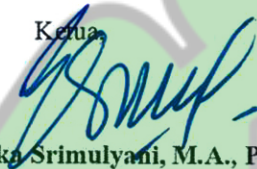
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

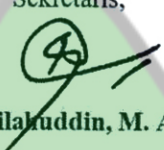
Tanggal: 25 Mei 2026 M
08 Dzulhijjah 1447 H.

TIM PENGUJI

Ketua,


Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

Sekretaris,


Dr. Silahuddin, M. Ag

Penguji,


Prof. Dr. Salami, MA.

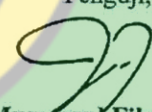
Penguji,


Dr. Sehat Insan Shadiqin, M. Ag.

Penguji,


Dr. Zulfatmi, M.Ag.

Penguji,

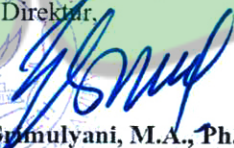

Dr. Mumtazul Fikri, S. Pd.I., MA

Penguji,


Prof. Dr. Buhori Muslim, M. Ag.

Banda Aceh, 16 Juni 2026

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D,
NIP 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Teti Wahyuni
Tempat/Tanggal Lahir : Lambada / 27 Juli 1975
Nomor Mahasiswa : 221002031
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S-3)

Menyatakan bahwa **disertasi** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan dalam **disertasi** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 04 Agustus 2026
Saya yang menyatakan,



Teti Wahyuni
NIM: 221002031

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul "**Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh**" yang ditulis oleh **Teti Wahyuni, S.Si., M.Pd.** dengan Nomor Induk Mahasiswa 221002031 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal 25 Mei 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Juni 2026
Penguji


Dr. Silahuddin, M. Ag

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul "**Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh**" yang ditulis oleh **Teti Wahyuni, S.Si., M.Pd.** dengan Nomor Induk Mahasiswa 221002031 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal 25 Mei 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Juni 2026
Penguji



Prof. Dr. Salami, MA.

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul "**Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh**" yang ditulis oleh **Teti Wahyuni, S.Si., M.Pd.** dengan Nomor Induk Mahasiswa 221002031 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal 25 Mei 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Juni 2026
Penguji



Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag.



جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul "**Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh**" yang ditulis oleh **Teti Wahyuni, S.Si., M.Pd.** dengan Nomor Induk Mahasiswa 221002031 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal 25 Mei 2026.
Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Juni 2026
Penguji


Dr. Zulfatmi, M.Ag.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul "**Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh**" yang ditulis oleh **Teti Wahyuni, S.Si., M.Pd.** dengan Nomor Induk Mahasiswa 221002031 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal 25 Mei 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Juni 2026
Penguji


Dr. Mumtazul Fikri, S. Pd.I., MA

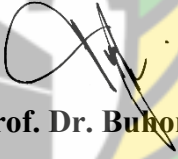
جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul "**Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh**" yang ditulis oleh **Teti Wahyuni, S.Si., M.Pd.** dengan Nomor Induk Mahasiswa 221002031 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal 25 Mei 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Juni 2026
Penguji


Prof. Dr. Buhori Muslim, M. Ag.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi „Ali „Audah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak Disimbolkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	”
خ	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
ك	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	و	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
ش	S	ه	H
ظ	Sy	ء	“

ص	S	ي	Y
ض	D		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

◌َ (fathah) = a misalnya, حدخ ditulis *hadatha*
 ◌ِ (kasrah) = i misalnya, ولف ditulis *wuqifa*
 ◌ُ (dammah) = u misalnya, روي ditulis
ruwiya

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, بين ditulis *bayna*
 (و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, يو ditulis *yawm*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas) (ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas) (و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معمل, جصديك, برهان) ditulis *burhān, tasdiq, ma'lūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t), misalnya (الاولى انْفَهْطَة) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara ta' marbūthah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (دنيَم, انْفِلَاضَة) = *Tahāfut al-Falāsifah, dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ʿ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (خطابية) ditulis khattabiyyah.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah al, misalnya: انكشف, اننفص ditulis al-kasyf, al-nafs.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ("'), misalnya: ملائكة ditulis mala'ikah, جسيء ditulis juz'i. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اخراع: ikhtirā'

Modifikasi

ditulis

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash- Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ad Abd al- Baqi.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Beirut, bukan Beirut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova bukan Qurtubah; dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat-Nya atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua memperoleh syafa'at beliau di yaumil akhir kelak.

Dalam proses penyusunan disertasi ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pertama, kepada Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., atas kepemimpinan beliau yang arif dan bijaksana serta dukungan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Kedua, kepada Promotor I, Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag., dan Promotor II, Dr. Mumtazul Fikri, MA., yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta keteguhan hati telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan disertasi ini.

Ketiga, kepada Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D., yang senantiasa memberikan dukungan akademik dan fasilitas terbaik demi kelancaran proses studi.

Keempat, kepada Wakil Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed., atas arahan, motivasi, dan perhatian yang diberikan

dalam mendukung kelancaran perkuliahan hingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Kelima, kepada Ketua Program Studi PAI (S-3), Dr. Silahuddin, M.Ag., dan Sekretaris Program Studi PAI (S-3), Dr. Sehat Ihsan Shadiqi, M.Ag., atas bimbingan, pengelolaan akademik, serta segala kemudahan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, para Kepala Sekolah, serta para Guru di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh yang telah berpartisipasi memberikan data, informasi, serta kesempatan untuk melakukan penelitian.

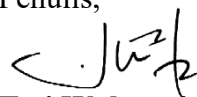
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa S-3 Angkatan 2022 Pascasarjana UIN Ar-Raniry atas kebersamaan, dukungan, serta diskusi-diskusi akademik yang sangat membantu. Tidak lupa apresiasi diberikan kepada rekan seprofesi yang turut memberi semangat dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Penghormatan terdalam saya sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, yang dengan doa, kasih sayang, serta didikan penuh keikhlasan telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Teristimewa, kepada suami dan anak-anak tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan, kesabaran, dan pengorbanan yang menjadi kekuatan terbesar dalam menyelesaikan studi ini.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan Islam, khususnya dalam kajian internalisasi nilai-nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 31 Agustus 2025

Penulis,



Teti Wahyuni

ABSTRAK

Judul Disertasi : Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh

Penulis/NIM : Teti Wahyuni/221002031

Promotor I : Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag

Promotor II : Dr. Mumtazul Fikri, MA

Kata Kunci : Internalisasi nilai Islami, Kurikulum Merdeka, Sekolah Penggerak, Pendidikan Karakter

Ruang pembahasan tentang internalisasi nilai Islami dalam implementasi kebijakan kurikulum nasional masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Kurikulum Merdeka di daerah berciri khas Islam seperti Aceh. Padahal, Kurikulum Merdeka mengedepankan pembentukan Profil Pelajar Pancasila yang dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai Islami melalui keteladanan guru, pembiasaan religius, serta integrasi nilai akhlak dalam pembelajaran. Fenomena inilah yang melatarbelakangi penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam bagaimana internalisasi nilai Islami diintegrasikan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode mixed methods dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 48 responden (guru dan tenaga kependidikan) dan dianalisis dengan uji validitas, reliabilitas, regresi linier berganda, serta uji asumsi klasik. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, serta telaah dokumen (KOSP, modul ajar, RPP, dan catatan kegiatan religius sekolah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) internalisasi nilai Islami berada pada kategori sangat baik dengan skor rata-rata 4,20, di mana indikator keteladanan guru memperoleh skor tertinggi (mean = 4,35), sedangkan disiplin Islami masih relatif rendah (mean = 4,05); (2) pelaksanaan Kurikulum Merdeka berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 4,05, dengan indikator tertinggi pada kesiapan guru (mean = 4,18) dan terendah pada evaluasi berbasis kompetensi (mean = 3,92); (3) hasil uji regresi menunjukkan internalisasi nilai Islami berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka, baik secara parsial maupun simultan, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,62; (4) temuan kualitatif

memperkuat hasil kuantitatif, di mana guru menegaskan bahwa keteladanan, pembiasaan religius, dan integrasi ajaran Islam berperan besar dalam pembentukan karakter siswa, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek asesmen berbasis kompetensi dan keterbatasan fasilitas sekolah.

Adapun novelty dari penelitian ini adalah konsep “Integrasi Nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka berbasis Sekolah Penggerak”, yang menegaskan bahwa nilai-nilai Islami tidak hanya menjadi muatan lokal, tetapi juga dapat menjadi kerangka utama dalam menguatkan profil pelajar Pancasila.



ABSTRACT

Dissertation Title : Internalization of Islamic Values in the Implementation of the Independent Curriculum at Driving Schools in Aceh Province

Author/Student ID : Teti Wahyuni/221002031

Promotor I : Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag

Promotor II : Dr. Mumtazul Fikri, MA

Keywords : Internalization of Islamic values, Independent Curriculum, Driving Schools, Character Education

The discourse on the internalization of Islamic values in the implementation of national curriculum policies remains relatively limited, particularly in the context of the Independent Curriculum in regions with strong Islamic characteristics such as Aceh. In fact, the Independent Curriculum emphasizes the development of the Profil Pelajar Pancasila (Pancasila Student Profile), which can run in harmony with Islamic values through teacher exemplarity, religious habituation, and the integration of moral values into learning. This phenomenon underlies this research, which aims to examine in greater depth how Islamic values are internalized within the implementation of the Independent Curriculum at Driving Schools in Aceh Province.

This study employed a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative strategies. Quantitative data were collected through questionnaires administered to 48 respondents (teachers and educational staff) and analyzed using validity and reliability tests, multiple linear regression, and classical assumption tests. Qualitative data were obtained through semi-structured interviews, and document analysis (School Operational Curriculum, teaching modules, lesson plans, and records of religious activities). The findings reveal that: (1) the internalization of Islamic values is categorized as very good, with an average score of 4.20, where teacher exemplarity scored the highest (mean = 4.35), while Islamic discipline scored relatively lower (mean = 4.05); (2) the implementation of the Independent Curriculum is categorized as good, with an average score of 4.05, with the highest indicator being teacher readiness (mean = 4.18) and the lowest being competency-based evaluation (mean = 3.92); (3) regression analysis indicates that the internalization of Islamic values has a positive and significant

influence on the implementation of the Independent Curriculum, both partially and simultaneously, with a coefficient of determination (R^2) of 0.62; (4) qualitative findings support the quantitative results, highlighting that teacher exemplarity, religious practices, and integration of Islamic teachings play a substantial role in shaping students' character, despite challenges in competency-based assessment and limited school facilities.

The novelty of this study lies in the concept of “Integration of Islamic Values into the Independent Curriculum Based on Driving Schools”, emphasizing that Islamic values should not merely be treated as local content but can serve as a central framework in strengthening the Pancasila Student Profile.



المُلَخَّصُ

عنوان الرسالة: إدماج القيم الإسلامية في تنفيذ المنهج المستقل في المدارس الرائدة بمحافظه آتشيه

اسم الباحثة / الرقم الجامعي: نيتي وحيوي / ٢٢١٠٠٢٠٢٣١

المشرف الأول: الأستاذ الدكتور بوهوري مسلم، ماجستير في أصول الدين

المشرف الثاني: الدكتور ممتاز الفكري، ماجستير في الآداب

الكلمات المفتاحية: إدماج القيم الإسلامية، المنهج المستقل، المدارس الرائدة، التربية الأخلاقية ما زال مجال البحث في موضوع إدماج القيم الإسلامية في تنفيذ السياسات الوطنية للمناهج محدودا نسبيا، وخاصة في سياق "المنهج المستقل" في المناطق ذات الخصوصية الإسلامية مثل آتشيه. ومع أن المنهج المستقل يهدف إلى بناء "ملف المتعلم البانشاسيلاوي" الذي يمكن أن يسير منسجما مع القيم الإسلامية من خلال قدوة المعلم، والاعتقاد الديني، ودمج القيم الأخلاقية في عملية التعليم، إلا أن الدراسات السابقة لم تتناول هذا الموضوع بعمق في السياق المحلي الآتشيهي. من هذا المنطلق، جاءت هذه الدراسة لبحث كيفية إدماج القيم الإسلامية في تنفيذ المنهج المستقل في المدارس الرائدة بمحافظه آتشيه.

استخدم هذا البحث المنهج المختلط (الكمي والكيفي). تم جمع البيانات الكمية من خلال توزيع الاستبيان على ثمانية وأربعين (٤٨) من المربين من المعلمين والعاملين التربويين، وتم تحليلها بواسطة اختبارات الصدق والثبات والانحدار الخطي المتعدد والاختبارات الكلاسيكية للفرضيات. أما البيانات الكيفية فجمعت من خلال المقابلات شبه المنظمة، ودراسة الوثائق مثل الخطة التشغيلية للمدرسة (KOSP)، والوحدات التعليمية، وخطط التدريس اليومية، وسجلات الأنشطة الدينية المدرسية.

أظهرت النتائج أن: (١) إدماج القيم الإسلامية كان في فئة "جيد جدا" بمتوسط قدره ٤,٢٠، حيث حصل مؤشر قدوة المعلم على أعلى درجة بمتوسط ٤,٣٥، بينما كان مؤشر الانضباط الإسلامي الأقل بمتوسط ٤,٠٥. (٢) تنفيذ المنهج المستقل وُجد في فئة "جيد" بمتوسط ٤,٠٥، مع أعلى مؤشر في جاهزية المعلمين بمتوسط ٤,١٨، وأدنى مؤشر في التقييم القائم على الكفاءة بمتوسط ٣,٩٢. (٣) أظهر اختبار الانحدار أن إدماج القيم الإسلامية يؤثر بشكل دال على تنفيذ المنهج المستقل، سواء جزئيا أو كليا، حيث بلغت قيمة معامل التحديد (R^2) ٠,٦٢.

(٤) أما النتائج الكيفية فقد دعمت النتائج الكمية، حيث أكد المعلمون أن القدوة والاعتقاد الديني ودمج التعاليم الإسلامية تلعب دورا كبيرا في بناء شخصية المتعلم، مع بقاء التحديات في جانب التقييم القائم على الكفاءة ونقص المرافق المدرسية. وتتمثل جدة هذا البحث في طرح مفهوم "إدماج القيم الإسلامية في المنهج المستقل القائم على المدارس الرائدة"، الذي يؤكد أن القيم الإسلامية ليست مجرد مادة محلية، بل يمكن أن تكون إطارا أساسيا لتعزيز ملف المتعلم بالانشاسيلاوي.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERBUKA	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PENGUJI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxix
DAFTAR GAMBAR.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
1.7 Kajian Pustaka	10
1.8 Sistematika Pembahasan.....	36
BAB II LANDASAN TEORI	38
2.1 Pendidikan Islam	38
2.1.1 Tujuan Pendidikan Islam	46
2.1.1 Akhlak : Tujuan Utama Pendidikan Islam	49
2.1.2 Prinsip Dasar Pendidikan Islam	53
2.1.3 Unsur-unsur Pendidikan Islam.....	55
2.1.4 Perspektif Pendidikan Islam Menurut Ulama Muslim...58	
2.1.5 Pendidikan Islam dan Tantangan Era Globalisasi	67

2.2 Konsep Dasar Kurikulum	73
2.2.1 Pengertian Konsep Dasar Kurikulum	73
2.2.2 Komponen Pengembangan Kurikulum.....	76
2.2.3 Filosofi Pengembangan Kurikulum	84
2.2.4 Landasan Filosofis Pendidikan Islam	90
2.2.5 Landasan Kebijakan Pendidikan Nasional.....	93
2.2.6 Kurikulum dalam Perspektif Islam	95
2.2.7 Akhlak: Landasan Pengembangan Kurikulum Islam ..	100
2.3 Konsep Kurikulum Merdeka	104
2.3.1 Pengertian Kurikulum Merdeka.....	114
2.3.2 Landasan Kurikulum Merdeka	116
2.3.3 Karakteristik Kurikulum Merdeka	120
2.3.4 Implementasi Kurikulum Merdeka	123
2.3.5 Filosofi Kurikulum Merdeka	142
2.3.6 Harmonisasi Akhlak Islami dengan Profil Pelajar Pancasila	150
2.3.7 Strategi Implementasi di Sekolah Penggerak	154
2.3.8 Kelebihan dan Kelemahan Kurikulum Merdeka	165
2.3.9 Tantangan Implementasi di Aceh	170
2.4 Perkembangan Kebijakan Program Sekolah Penggerak	174
2.4.1 Transformasi Menuju Penerapan Deep Learning	175
2.5 Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Pendidikan Islam.....	181
2.5.1 Ranah Kognitif dan Nilai-nilai Islami.....	192
2.5.2 Ranah Afektif dalam Perspektif Pendidikan Islam	195
2.5.3 Akhlak sebagai Puncak Ranah Afektif	198
2.5.4 Ranah Psikomotorik dalam Pembentukan Karakter Islami	202

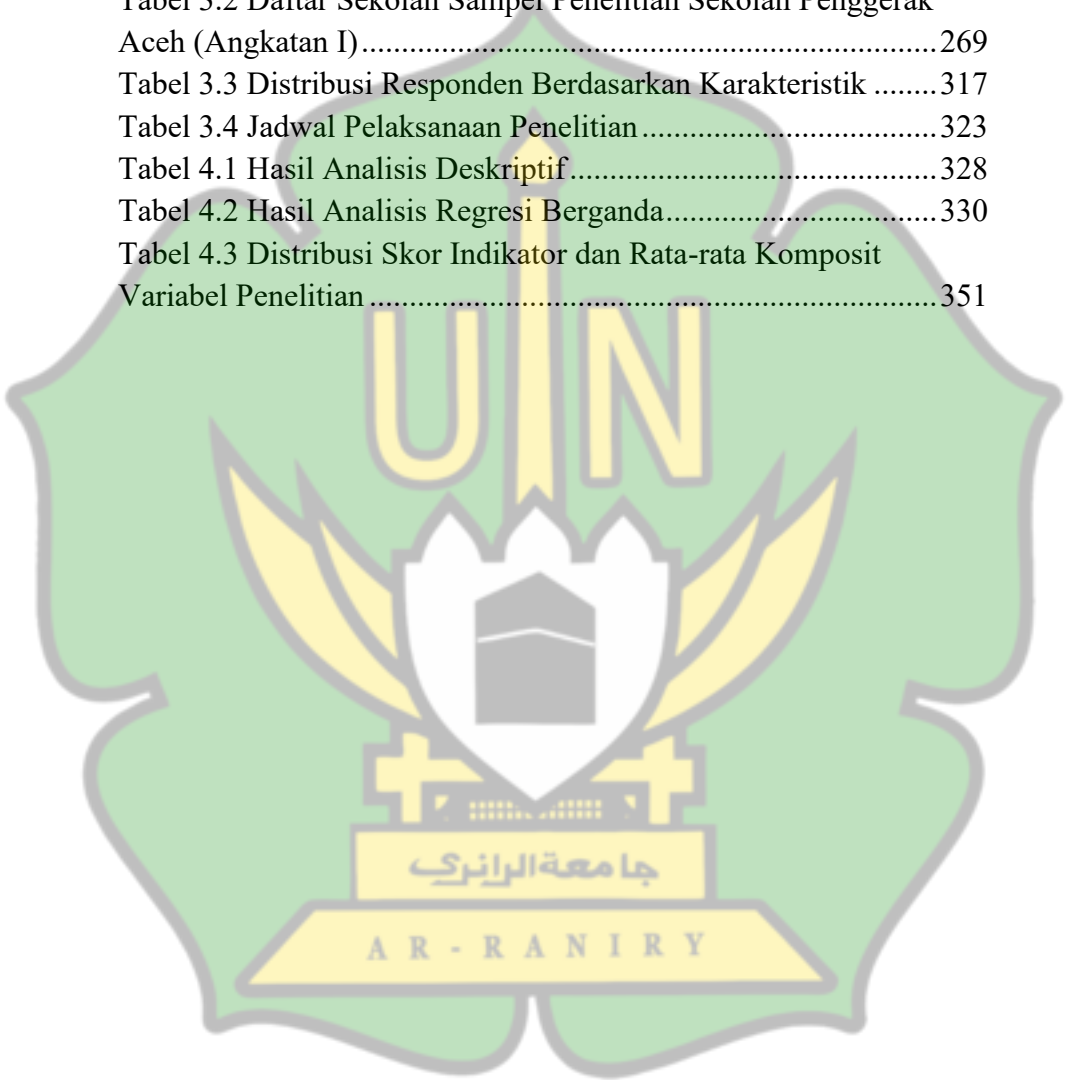
2.5.5 Integrasi Taksonomi Bloom dengan Profil Pelajar Pancasila	204
2.6 Kerangka Teori	206
2.6.1 Pendidikan Islam sebagai Landasan Nilai	207
2.6.2 Teori Kurikulum dan Pengembangannya	210
2.6.3 Teori Pendidikan Karakter dan Internalisasi Nilai Islami	210
2.6.4 Teori Belajar Bloom dan Integrasinya dengan Nilai Islami.....	215
2.6.5 Hubungan Internalisasi Nilai Islami dengan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka.....	215
2.7 Kerangka Konseptual	218
2.8 Pengkajian Hipotesis	221
2.9 Kajian Penelitian Terdahulu	223
2.9.1 Penelitian tentang Kurikulum Merdeka	224
2.9.2 Gap Analysis	229
BAB III METODE PENELITIAN	251
3.1 Metode Penelitian	251
3.1.1 Variabel Penelitian dan Indikator Penelitian	263
3.2 Populasi dan Sampel.....	267
3.2.1 SD Negeri 26 Banda Aceh.....	271
3.2.2 UPTD SMP Negeri 4 Bireuen.....	278
3.2.3 SMP Negeri 5 Seunagan N.....	285
3.2.4 KB Bina Phon	295
3.2.5 SD Negeri Lhok Banie.....	303
3.3 Instrumen Penelitian	311
3.4 Hasil Uji Instrumen	313
3.4.1 Uji Validitas	313

3.4.2 Uji Reliabilitas	314
3.5 Teknik Pengumpulan Data	315
3.6 Karakteristik Responden.....	316
3.6.1 Kuesioner (Angket).....	318
3.6.2 Wawancara Semi-Terstruktur	318
3.6.3 Dokumentasi	319
3.7 Teknik Analisis Data	319
3.7.1 Analisis Deskriptif	320
3.7.2 Uji Instrumen Penelitian	320
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	320
3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda	321
3.7.5 Uji Hipotesis	321
3.7.6 Perangkat Lunak Analisis	322
3.7.7 Jadwal Penelitian	322
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	325
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	325
4.2 Temuan Analisis Deskriptif.....	325
4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel X: Internalisasi Nilai Islami	325
4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Y: Penerapan Kurikulum Merdeka	326
4.2.3 Perbandingan Variabel X dan Y	326
4.3 Hasil Analisis Regresi	328
4.3.1 Model Summary.....	328
4.3.2 Uji F (Simultan)	328
4.3.3 Uji t (Parsial).....	328
4.3.4 Persamaan Regresi	329
4.4 Data Kualitatif Hasil Wawancara	330

4.4.1 Strategi Internalisasi Nilai Islami.....	330
4.4.2 Nilai-Nilai Islami yang Diterapkan.....	334
4.4.3 Tantangan dan Hambatan Implementasi.....	337
4.4.4 Efektivitas Kurikulum Merdeka Berbasis Nilai Islami	343
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	349
4.5.1 Hasil Penelitian Kuantitatif.....	354
4.5.2 Hasil Penelitian Kualitatif.....	357
BAB V PENUTUP.....	372
5.1 Kesimpulan.....	372
5.1.1 Internalisasi Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh	372
5.1.2 Nilai-Nilai Islami yang Diterapkan dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka.....	375
5.1.3 Tantangan dan Hambatan dalam Internalisasi Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka	377
5.1.4 Kebaruan Penelitian: Konsep Integrasi Nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka Berbasis Sekolah Penggerak	381
5.2 Saran	383
5.2.1 Saran bagi Guru	384
5.2.2 Saran bagi Kepala Sekolah	385
5.2.3 Saran bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan.	385
5.2.4 Saran bagi Sekolah dan Lembaga Pendidikan Islam ...	386
5.2.5 Saran bagi Peneliti Selanjutnya	387
DAFTAR PUSTAKA	388
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	422

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel, Indikator dan Sub-Indikator Utama.....	267
Tabel 3.2 Daftar Sekolah Sampel Penelitian Sekolah Penggerak Aceh (Angkatan I).....	269
Tabel 3.3 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik	317
Tabel 3.4 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	323
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif.....	328
Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	330
Tabel 4.3 Distribusi Skor Indikator dan Rata-rata Komposit Variabel Penelitian	351



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum	80
Gambar 2.2 Profil Pelajar Pancasila.....	122
Gambar 2.3 Kurikulum Merdeka dan PMM	129
Gambar 2.4 Falsafah Pendidikan Ki Hajar Dewantara	147
Gambar 2.5 Tahapan Proses Transformasi Sekolah Indonesia	160
Gambar 2.6 Kerangka Konseptual Penelitian	221



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019–2024 merupakan dokumen strategis pembangunan nasional untuk periode lima tahun yang salah satu orientasinya adalah pembangunan sumber daya manusia unggul. Visi tersebut menekankan pentingnya kualitas pendidikan sebagai motor penggerak utama dalam menyiapkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Sejalan dengan itu, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2019–2024 menempatkan kebijakan Merdeka Belajar sebagai pilar utama pembangunan pendidikan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengubah paradigma publik dan para pemangku kepentingan agar menjadi komunitas penggerak pendidikan dalam menata bonus demografi menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan sosial¹.

Sebagai implementasi, Kemendikbudristek meluncurkan Merdeka Belajar Episode 15 berupa Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Kedua inovasi ini dirancang sebagai fasilitas bagi kepala sekolah dan guru untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Kurikulum Merdeka memiliki karakteristik sederhana, fleksibel, dan mendalam dengan memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkannya sesuai kebutuhan peserta didik. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah pencapaian Profil Pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, serta berkebinekaan global².

¹ Kemendikbud, *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019–2024* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019), hlm. 10

² Kemendikbudristek, *Merdeka Belajar Episode 15: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2020), hlm. 33.

Untuk mempercepat penerapannya, pemerintah menggulirkan Program Sekolah Penggerak (PSP) yang difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran secara holistik. PSP berorientasi pada pengembangan hasil belajar peserta didik baik dari aspek kognitif maupun nonkognitif melalui kepemimpinan kepala sekolah yang kuat serta kualitas guru yang profesional. Dengan demikian, sekolah penggerak diharapkan menjadi model transformasi pendidikan dalam mewujudkan pelajar Pancasila³.

Namun demikian, seiring dengan dinamika kebijakan pendidikan nasional, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak. Keputusan yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2025 ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Program Sekolah Penggerak sebagai kebijakan tersendiri. Dalam diktum KEDUA keputusan tersebut ditegaskan bahwa seluruh pelaksanaan program pendidikan yang terkait dengan program sekolah penggerak akibat pencabutan ini dilakukan penyesuaian berdasarkan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pencabutan kebijakan ini tidak serta-merta menghilangkan esensi transformasi pendidikan yang telah dijalankan oleh sekolah-sekolah penggerak. Prinsip-prinsip utama yang menjadi ruh Program Sekolah Penggerak, seperti penguatan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis data, serta implementasi Kurikulum Merdeka secara fleksibel dan kontekstual, tetap menjadi bagian dari program prioritas kementerian. Dengan kata lain, yang berubah adalah nomenklatur program, sementara substansi penguatan mutu pendidikan tetap berlanjut dalam kerangka implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional.

³ Kemendikbudristek, *Program Sekolah Penggerak: Panduan Implementasi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2021), hlm. 33.

Bagi penelitian ini, transformasi kebijakan tersebut tidak mengurangi relevansi objek kajian. Sekolah-sekolah yang menjadi sampel penelitian merupakan sekolah yang pernah ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak pada Angkatan I dan hingga saat ini tetap melaksanakan Kurikulum Merdeka secara penuh. Pengalaman mereka dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islami selama menjalankan program percepatan Kurikulum Merdeka menjadi sumber data yang kaya dan tetap relevan untuk dikaji, terlepas dari perubahan status kebijakan administratifnya. Fokus penelitian tetap pada pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan proses internalisasi nilai-nilai Islami yang berlangsung di dalamnya.

Dalam konteks Aceh, kebijakan nasional ini memiliki nuansa khusus. Aceh memiliki kekhususan di bidang pendidikan yang diatur melalui Qanun sebagai peraturan perundang-undangan daerah berbasis syariat Islam. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa “Sistem Pendidikan Nasional di Aceh diselenggarakan secara Islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan.” Selanjutnya, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (1d) memberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menyusun kurikulum Islami pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, serta Pasal 19 ayat (1b) menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kurikulum nasional pada satuan pendidikan.

Dengan demikian, pendidikan di Aceh tidak hanya berorientasi pada kebijakan nasional, tetapi juga harus menginternalisasikan nilai-nilai Islami sebagai ciri utama. Aspirasi masyarakat Aceh menekankan bahwa sistem pendidikan harus memiliki warna keacehan yang berpadu dengan nilai kebangsaan dan keislaman. Oleh sebab itu, sistem pendidikan di Aceh dikembangkan sebagai pendidikan Islami atau pendidikan berbasis nilai-nilai Islami, yang menitikberatkan pada penanaman akhlak

mulia, pengembangan budaya Islami, dan pembentukan karakter sesuai ajaran Islam ⁴.

Kurikulum, dalam hal ini, merupakan jantung pendidikan formal. Tujuan pendidikan mustahil tercapai tanpa seleksi dan desain kurikulum yang tepat. Perbedaan tujuan pendidikan antar masyarakat akan menghasilkan perbedaan kurikulum ⁵. Oleh karena itu, penyempurnaan kurikulum harus senantiasa dilakukan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika sosial budaya. Kurikulum Merdeka yang digulirkan secara nasional dapat dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Aceh. Di satu sisi, fleksibilitas kurikulum ini memberi ruang untuk mengakomodasi kearifan lokal Islami. Namun di sisi lain, terdapat tuntutan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara konsisten dalam setiap proses pembelajaran.

Transformasi kurikulum ini juga menuntut agar pendidikan lebih responsif terhadap keragaman budaya peserta didik dan pengalaman sosio-kulturalnya. Pendidikan inklusif yang mempertimbangkan keberagaman anak didik merupakan keharusan di era global⁶. Dalam hal ini, pendidikan di Aceh diharapkan mampu melestarikan tradisi Islami sekaligus menyiapkan generasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Namun, realitas pendidikan Islam di Indonesia, termasuk Aceh, masih menghadapi problem serius. Sevea menilai pendidikan Islam sering kali gagal dalam membentuk karakter nasional yang kuat karena belum berhasil mengintegrasikan pengetahuan Islam dengan pengetahuan modern Barat yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kontemporer⁷. Hal ini menyebabkan pendidikan Islam

⁴ Mujiburrahman, "Pendidikan Islami di Aceh dalam Perspektif Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 4, No. 1 (2019): hlm. 45.

⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 33..

⁶ James A. Banks, *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*, Edisi ke-6 (New York: Routledge, 2016), hlm. 33.

⁷ Teren Sevea, "Islamic Education and Modern Challenges: Reform and Continuity," *Journal of Islamic Studies* 22, No. 3 (2011): hlm. 345.

cenderung terjebak pada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum.

Kondisi tersebut mempertegas urgensi penelitian tentang bagaimana nilai-nilai Islami dapat diinternalisasikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya di sekolah penggerak. Internalisasi nilai Islami bukan sekadar pengetahuan kognitif, melainkan proses penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran. Proses ini penting agar peserta didik tidak hanya memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga berkarakter Islami yang mampu menjadi fondasi moral sekaligus bekal menghadapi tantangan global ⁸.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul: “Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya integrasi nilai-nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak.
2. Adanya tantangan dalam mengombinasikan kebijakan nasional Kurikulum Merdeka dengan Qanun Aceh yang bersifat Islami.
3. Guru dan kepala sekolah masih menghadapi kendala dalam internalisasi nilai Islami ke dalam proses pembelajaran.
4. Diperlukan strategi implementasi yang tepat agar Kurikulum Merdeka tidak hanya berorientasi pada capaian kognitif, tetapi juga pembentukan karakter Islami peserta didik.

⁸ R. Hidayat, "Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Kurikulum Pendidikan Nasional," *Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 2 (2018): hlm. 123

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar ke aspek-aspek di luar fokus kajian, maka ruang lingkup penelitian perlu dibatasi secara jelas. Penelitian ini hanya berfokus pada kajian internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas secara keseluruhan implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia maupun aspek lain yang tidak berkaitan langsung dengan nilai Islami.

Adapun batasan penelitian ditetapkan pada tiga aspek utama berikut:

1. Nilai-nilai Islami yang diinternalisasikan

Penelitian ini mengkaji nilai-nilai Islami yang ditanamkan dalam proses pendidikan di sekolah penggerak, baik yang bersifat fundamental seperti keimanan, akhlak, dan ibadah, maupun nilai aplikatif seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial. Internalisasi nilai Islami dipahami sebagai proses integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum, aktivitas pembelajaran, maupun budaya sekolah.

2. Strategi implementasi nilai Islami dalam pembelajaran

Penelitian ini membatasi pada strategi guru dan sekolah dalam menginternalisasikan nilai Islami pada Kurikulum Merdeka. Strategi tersebut mencakup:

- 1) Integrasi nilai Islami dalam penyusunan modul ajar dan RPP.
- 2) Penerapan metode pembelajaran yang kontekstual dan bernuansa Islami.
- 3) Pembiasaan kegiatan religius di sekolah (misalnya doa bersama, membaca Al-Qur'an, shalat berjamaah, dan kegiatan sosial berbasis nilai Islam).

Fokus penelitian tidak membahas secara teknis seluruh model pembelajaran Kurikulum Merdeka, melainkan hanya strategi yang berhubungan dengan nilai Islami.

3. Tantangan dan hambatan dalam proses internalisasi

Penelitian ini dibatasi pada identifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi guru, kepala sekolah, maupun siswa dalam

menginternalisasikan nilai Islami pada pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan pemahaman guru, kurangnya bahan ajar Islami yang sesuai dengan struktur Kurikulum Merdeka, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga faktor lingkungan sosial dan budaya.

Dengan adanya pembatasan ini, penelitian diharapkan lebih fokus, mendalam, dan sistematis dalam menjawab permasalahan utama, yaitu bagaimana internalisasi nilai Islami dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh?
2. Nilai-nilai Islami apa saja yang diintegrasikan dan diterapkan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh?
3. Apa saja bentuk tantangan dan hambatan yang dihadapi sekolah dalam menginternalisasi nilai-nilai Islami pada pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu untuk:

1. Menganalisis proses internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan nilai-nilai Islami yang diintegrasikan serta diterapkan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh.

3. Mengkaji berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi sekolah dalam menginternalisasi nilai-nilai Islami pada pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh.

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, sesuai dengan fokus kajian yang telah dirumuskan. Pertama, berkaitan dengan proses internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai deskripsi dan analisis proses bagaimana nilai-nilai Islami diinternalisasikan dalam kerangka Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan manajemen kurikulum, dengan menyajikan model konseptual tentang tahapan dan mekanisme internalisasi nilai seperti keteladanan, pembiasaan, dan integrasi dalam konteks kebijakan pendidikan nasional yang fleksibel. Temuan ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Secara praktis, bagi guru, penelitian ini memberikan gambaran nyata dan contoh strategi pedagogis yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Islami sehari-hari, tidak hanya pada mata pelajaran agama tetapi juga pada mata pelajaran umum dan kegiatan proyek. Sementara bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan sekolah, menyusun program pembiasaan, serta menciptakan budaya sekolah (school culture) yang kondusif bagi proses internalisasi nilai secara berkelanjutan.

Kedua, berkaitan dengan nilai-nilai Islami yang diintegrasikan dan diterapkan, penelitian ini berguna untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mendokumentasikan secara sistematis nilai-nilai Islami apa saja yang secara konkret diterapkan dan diintegrasikan ke dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Secara teoretis, penelitian ini menyusun tipologi atau peta

konseptual tentang nilai-nilai Islami yang relevan dan aplikatif dalam konteks pendidikan modern di Indonesia, sekaligus menjembatani konsep abstrak nilai-nilai Islam seperti akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab dengan indikator perilaku yang dapat diamati dan dikembangkan di sekolah. Secara praktis, bagi pengembang kurikulum baik di tingkat pusat maupun daerah, penelitian ini memberikan masukan berharga dalam merumuskan muatan lokal dan panduan integrasi nilai agama yang lebih konkret ke dalam Kurikulum Merdeka, khususnya untuk daerah dengan karakteristik religius seperti Aceh. Adapun bagi sekolah lain, hasil identifikasi nilai-nilai tersebut dapat menjadi bank nilai (value bank) atau referensi praktik baik (best practices) yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh sekolah-sekolah lain di Aceh maupun di luar Aceh yang ingin memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan.

Ketiga, berkaitan dengan tantangan dan hambatan internalisasi nilai Islami, penelitian ini berguna untuk memetakan secara komprehensif berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai Islami ke dalam Kurikulum Merdeka. Secara teoretis, penelitian ini menyumbangkan analisis kritis terhadap faktor-faktor penghambat baik pedagogis, struktural, maupun kultural dalam implementasi kebijakan pendidikan berbasis nilai, yang dapat memperkaya studi tentang policy implementation gap dan cultural resistance dalam reformasi pendidikan. Secara praktis, bagi Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah, hasil pemetaan tantangan ini menyediakan data dan informasi penting sebagai dasar untuk merancang program intervensi yang tepat sasaran, seperti pelatihan guru yang lebih spesifik tentang asesmen autentik berbasis nilai, penyediaan fasilitas pendukung, serta penyusunan regulasi yang lebih harmonis antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Sementara bagi peneliti selanjutnya, temuan tentang tantangan dan hambatan ini menjadi pijakan awal (baseline) untuk melakukan penelitian lanjutan,

misalnya tentang strategi mengatasi hambatan spesifik atau studi komparatif dengan daerah lain, guna menemukan solusi yang lebih inovatif dan kontekstual.

1.7 Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu menjadi landasan penting dalam memperkuat argumentasi ilmiah penelitian ini. Beberapa penelitian relevan telah membahas tema internalisasi nilai Islami, pendidikan karakter, serta pelaksanaan Kurikulum Merdeka dari berbagai perspektif, baik klasik maupun kontemporer.

Nur Hamim⁹ dalam penelitiannya menggunakan pendekatan filosofis-komparatif untuk menelaah secara mendalam konsep pendidikan akhlak menurut dua tokoh besar Islam, yaitu Ibnu Miskawaih dan al-Ghazali. Dalam kajiannya, Hamim menguraikan bahwa kedua tokoh tersebut sama-sama menempatkan pendidikan akhlak sebagai inti dari seluruh proses pendidikan Islam. Keduanya menekankan pentingnya pembinaan jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dan pembentukan karakter moral sebagai jalan menuju kesempurnaan manusia (*insan kamil*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan akhlak tidak hanya bertujuan melahirkan individu berilmu, tetapi juga berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Relevansi gagasan ini tampak pada pentingnya integrasi nilai-nilai Islami dalam proses pendidikan masa kini sebagai upaya menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan spiritual peserta didik. Lebih jauh, Hamim juga menyoroti bahwa baik Ibnu Miskawaih dengan teori jalan tengahnya (*the golden mean*) maupun al-Ghazali dengan konsep penyucian jiwa, sama-sama berkesimpulan bahwa akhlak mulia tidak dapat dicapai secara instan, melainkan membutuhkan proses pembiasaan dan latihan yang berkelanjutan. Namun demikian, penelitian Nur Hamim masih bersifat konseptual dan belum menelusuri implementasi empiris nilai-nilai tersebut

⁹ Nur Hamim, *Pendidikan Akhlak: Komparasi Konsep Pendidikan Ibnu Miskawaih dan al-Ghazali*, *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 18, No. 2 (2014), hlm. 391–410

dalam konteks kebijakan pendidikan modern seperti Kurikulum Merdeka. Padahal, gagasan kedua tokoh klasik ini memiliki relevansi yang kuat dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan pembentukan Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melanjutkan gagasan tersebut dengan mengkaji bagaimana nilai-nilai akhlak Islam yang dikemukakan Ibnu Miskawaih dan Al-Ghazali dapat diinternalisasikan secara nyata dalam praktik pembelajaran di sekolah penggerak Aceh. Penelitian ini tidak hanya menguji relevansi pemikiran klasik tersebut, tetapi juga berupaya menjembatani antara konsep filosofis pendidikan akhlak dengan implementasi kebijakan pendidikan nasional yang kontekstual, sehingga melahirkan model internalisasi nilai Islami yang aplikatif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh yang religius.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Lutfi Ayuningtyas dan Didi Pramono¹⁰ menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses internalisasi nilai-nilai karakter dapat diwujudkan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya dalam rangka pembentukan Profil Pelajar Pancasila. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi kegiatan sekolah, wawancara dengan guru dan siswa, serta analisis dokumen program sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila berlangsung melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang dirancang secara sistematis oleh pihak sekolah. Nilai-nilai seperti gotong royong, kemandirian, tanggung jawab, dan toleransi ditanamkan melalui pembelajaran berbasis proyek, kegiatan sosial, serta pembiasaan karakter di lingkungan sekolah. Guru berperan penting sebagai teladan moral dan fasilitator dalam membentuk budaya sekolah yang berkarakter.

¹⁰ Ida Lutfi Ayuningtyas dan Didi Pramono, *Internalisasi Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di SMAN 11 Semarang*, *Journal of Education Research and Evaluation*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 15–23

Temuan ini sekaligus membuktikan bahwa Kurikulum Merdeka dengan pendekatan fleksibelnya memberikan ruang yang luas bagi sekolah untuk mengembangkan strategi internalisasi nilai sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing.

Namun, penelitian ini masih berfokus pada penguatan nilai-nilai universal kebangsaan tanpa mengkaji secara mendalam integrasi nilai-nilai Islami yang menjadi ciri khas masyarakat Muslim di daerah seperti Aceh. Padahal, dalam konteks pendidikan di wilayah yang menerapkan Qanun Pendidikan Islami, internalisasi nilai agama menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari pembentukan karakter siswa. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi yang ditemukan dalam penelitian tersebut sesungguhnya memiliki padanan yang kuat dalam ajaran Islam, namun belum dieksplorasi secara eksplisit sebagai bagian dari integrasi nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, penelitian Ayuningtyas dan Pramono memberikan landasan penting mengenai mekanisme internalisasi nilai karakter secara umum, namun masih menyisakan celah akademik yang signifikan dalam hal integrasi nilai-nilai Islami ke dalam Kurikulum Merdeka, khususnya pada aspek bagaimana nilai-nilai akhlak Islami seperti amanah, ukhuwah, dan ta'awun dapat diinternalisasikan secara sinergis dengan nilai-nilai Pancasila. Celah inilah yang diisi oleh penelitian ini, yaitu dengan mengkaji secara empiris bagaimana nilai-nilai Islami dapat diinternalisasikan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Aceh, sebuah wilayah dengan karakteristik sosial-budaya dan regulasi keagamaan yang khas, sekaligus menawarkan model integrasi yang harmonis antara nilai-nilai keislaman dan kebijakan pendidikan nasional.

Rohmat¹¹ dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilaksanakan pada salah satu sekolah Islam terpadu. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk

¹¹ Rohmat, *Integrasi Kurikulum dan Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Membentuk Sikap Religius Siswa, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 45–60

menggali bagaimana nilai-nilai Islam diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan kurikulum sekolah sebagai sarana pembentukan sikap religius siswa. Data diperoleh melalui observasi kegiatan pembelajaran, wawancara mendalam dengan guru dan kepala sekolah, serta telaah terhadap dokumen kurikulum sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu integrasi konseptual dalam perencanaan kurikulum, integrasi kontekstual dalam kegiatan pembelajaran, dan integrasi kultural melalui budaya sekolah. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian sosial ditanamkan dalam setiap aspek kegiatan belajar mengajar. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai model keteladanan yang menanamkan nilai-nilai akhlak Islam secara konsisten kepada siswa.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Islam yang terintegrasi secara sistematis dalam kurikulum memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan sikap religius peserta didik, terutama dalam meningkatkan kesadaran spiritual dan moralitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pola integrasi yang ditemukan, baik melalui jalur konseptual, kontekstual, maupun kultural, menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai Islam tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh komponen sekolah. Namun demikian, penelitian Rohmat masih memiliki keterbatasan karena belum mengaitkan secara langsung temuan-temuan tersebut dengan konteks kebijakan pendidikan nasional yang lebih mutakhir, yaitu Kurikulum Merdeka. Padahal, Kurikulum Merdeka dengan segala fleksibilitas dan otonomi yang diberikannya kepada satuan pendidikan, membuka peluang besar bagi penguatan integrasi nilai-nilai Islami dalam pembelajaran lintas mata pelajaran dan kegiatan proyek. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengembangkan lebih lanjut temuan Rohmat dengan mengkaji secara empiris bagaimana pola integrasi nilai Islami yang telah teruji dalam konteks sekolah Islam terpadu tersebut dapat diadaptasi dan

diimplementasikan dalam kerangka Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Aceh, sebuah wilayah dengan karakteristik sosial-budaya dan regulasi keagamaan yang khas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat argumentasi tentang pentingnya integrasi nilai Islami dalam kurikulum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa model integrasi yang kontekstual dan aplikatif sesuai dengan semangat Merdeka Belajar.

Dengan demikian, terdapat celah akademik (research gap) yang masih belum terisi, yaitu bagaimana konsep integrasi nilai Islami yang telah terbukti efektif dalam konteks sekolah Islam dapat diterapkan dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang berlaku secara nasional, khususnya di daerah dengan karakter religius yang kuat seperti Aceh. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah lebih jauh bagaimana internalisasi nilai-nilai Islami dapat diimplementasikan secara praktis dan terukur dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak, sehingga menghasilkan model pendidikan yang harmonis antara kebijakan nasional dan nilai-nilai keislaman daerah.

Yanu dan rekan-rekan¹² dalam artikelnya melakukan kajian mendalam melalui metode studi literatur untuk menelaah implementasi pendidikan karakter dalam konteks penerapan Kurikulum Merdeka. Penelitian ini berfokus pada analisis konseptual terhadap kebijakan pendidikan nasional, terutama terkait dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai instrumen utama dalam pembentukan karakter siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter menjadi elemen fundamental dalam Kurikulum Merdeka, dengan tujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga beriman, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Penelitian ini menekankan bahwa implementasi P5 memberikan ruang bagi sekolah untuk

¹² Yanu dkk., *Penguatan Pendidikan Karakter di Era Kurikulum Merdeka*, *Jurnal Pendidikan Karakter*, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 11, No. 2 (2021), hlm. 201–214

mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada nilai, seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, serta kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut dikembangkan melalui proyek lintas disiplin, kegiatan sosial, dan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa secara aktif dan reflektif.

Lebih jauh, Yanu dan rekan-rekan mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar dalam memperkuat karakter peserta didik, terutama karena memberi kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai konteks lokal. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa fleksibilitas yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka bukan hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga membuka peluang bagi penguatan nilai-nilai karakter yang bersumber dari kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan masyarakat setempat. Namun demikian, penelitian ini masih bersifat konseptual dan belum menyentuh aspek empiris mengenai bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan secara konkret di sekolah-sekolah dengan ciri khas keagamaan. Fokus kajian masih terbatas pada nilai-nilai universal kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan tidak secara eksplisit membahas integrasi nilai-nilai Islami, seperti keteladanan guru, disiplin ibadah, pembiasaan religius, dan adab Islami dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Padahal, nilai-nilai Islami tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat dimensi "beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia" yang menjadi fondasi utama Profil Pelajar Pancasila.

Dengan demikian, terdapat research gap penting yang belum diungkap, yakni mengenai bagaimana Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara sinergis dengan nilai-nilai Islam di daerah berciri khas religius seperti Aceh. Kesenjangan ini semakin relevan mengingat Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam dan Qanun Pendidikan yang mewajibkan muatan nilai-nilai Islami dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara empiris bagaimana internalisasi nilai-nilai Islami dilakukan dalam

pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak Aceh. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada pendidikan karakter umum, tetapi juga menekankan dimensi spiritual dan moral Islam sebagai landasan utama pembentukan Profil Pelajar Pancasila yang berkarakter Islami dan kontekstual dengan budaya lokal Aceh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori pendidikan karakter berbasis nilai agama, tetapi juga memberikan model implementasi yang aplikatif bagi daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Sementara itu, Riami, Devy Habibi Muhammad, dan Ari Susandi¹³ dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah karya monumental Ibnu Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq*. Penelitian ini mengkaji konsep pendidikan akhlak yang digagas oleh Ibnu Miskawaih sebagai dasar pembentukan karakter manusia sejak usia dini, dengan fokus utama pada metode pembiasaan (*ta'wid*), keteladanan (*uswah*), dan pengendalian diri (*mujahadah al-nafs*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Miskawaih, pembentukan akhlak yang mulia tidak dapat dicapai secara instan melalui teori, tetapi harus ditempuh melalui proses pendidikan yang berkelanjutan dan praksis. Anak-anak harus dibimbing dengan contoh nyata dari orang dewasa yang berakhlak baik, karena perilaku moral terbentuk melalui pengulangan, interaksi sosial, dan lingkungan yang kondusif. Dalam konteks ini, pendidikan akhlak memiliki peran fundamental dalam membentuk kepribadian dan moralitas anak sejak dini, yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi pembangunan karakter bangsa. Lebih jauh, penelitian ini juga menyoroti bahwa Ibnu Miskawaih menekankan keseimbangan antara aspek rasional dan spiritual dalam proses pendidikan. Ia berpendapat bahwa akal (*'aql*) harus digunakan untuk mengarahkan

¹³ Riami, Devy Habibi Muhammad, dan Ari Susandi, *Penanaman Pendidikan Akhlak pada Anak Usia Dini Menurut Ibnu Miskawaih dalam Kitab Tahdzibul Akhlak, Jurnal Falasifa*, Vol. 12, No. 2 (2021), hlm. 189–200

hawa nafsu dan dorongan emosional agar manusia dapat mencapai *al-khair al-ghayah* (kebaikan tertinggi). Pandangan ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawaih tidak hanya bersifat moralistik, tetapi juga filosofis dan psikologis, karena menyentuh dimensi kejiwaan manusia secara menyeluruh, termasuk aspek motivasi, emosi, dan kesadaran diri. Temuan penelitian ini memperkaya khazanah teori pendidikan Islam dengan menegaskan bahwa pendidikan akhlak bukan sekadar transmisi nilai-nilai moral, melainkan sebuah proses transformatif yang melibatkan seluruh potensi kemanusiaan, baik rasio, hati, maupun perilaku. Konsep pembiasaan dan keteladanan yang digagas Ibnu Miskawaih memiliki relevansi yang kuat dengan pendekatan pendidikan karakter modern yang menekankan pentingnya *habituation* dan *modeling* dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Namun demikian, penelitian Riami dan rekan-rekan masih bersifat konseptual dan belum menjangkau aspek implementatif dalam dunia pendidikan modern. Kajian ini belum menguji secara empiris bagaimana konsep akhlak klasik tersebut dapat diterapkan dalam sistem pendidikan nasional saat ini, terutama dalam konteks Kurikulum Merdeka yang menekankan pembentukan Profil Pelajar Pancasila dengan dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Padahal, gagasan Ibnu Miskawaih tentang keseimbangan jiwa, pembiasaan akhlak, dan peran sentral keteladanan memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam praktik pembelajaran kontemporer.

Dengan demikian, masih terdapat gap penelitian berupa kurangnya studi empiris yang menjembatani teori akhlak klasik Ibnu Miskawaih dengan praktik pembelajaran kontemporer di sekolah. Kesenjangan ini semakin terasa ketika dikaitkan dengan konteks pendidikan di Aceh yang memiliki kekhasan dalam penerapan nilai-nilai Islami melalui Qanun Pendidikan, namun belum banyak dikaji bagaimana nilai-nilai akhlak klasik tersebut benar-benar diinternalisasikan dalam keseharian pembelajaran. Penelitian disertasi ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan

mengkaji bagaimana nilai-nilai akhlak Islami seperti keteladanan, kedisiplinan, dan pembiasaan religius dapat diinternalisasikan secara nyata dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Aceh. Pendekatan empiris yang digunakan tidak hanya menguji pengaruh internalisasi nilai Islami terhadap keberhasilan kurikulum, tetapi juga memperlihatkan relevansi dan keberlanjutan pemikiran Ibnu Miskawaih dalam konteks pendidikan modern berbasis karakter Islami. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori pendidikan Islam, tetapi juga memberikan bukti empiris tentang bagaimana warisan intelektual klasik dapat diaktualisasikan dalam menjawab tantangan pendidikan abad ke-21.

Akmal Hadi dan Silfia Hanani¹⁴ dalam penelitiannya melakukan kajian dengan metode kualitatif-deskriptif berbasis literatur (*library research*) untuk menelaah gagasan pendidikan Islam menurut Ibn Khaldun, khususnya sebagaimana termuat dalam karya monumentalnya *Muqaddimah*. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji relevansi pemikiran Ibn Khaldun dengan sistem pendidikan modern, terutama dalam hal struktur pembelajaran, metode pengajaran, dan peran guru dalam membentuk karakter moral serta intelektual peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Khaldun memandang pendidikan sebagai proses sosial yang bertahap, di mana ilmu pengetahuan tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan harus melalui tahapan pembelajaran yang sistematis dan kontekstual. Ia menegaskan pentingnya prinsip *tadarruj* (pembelajaran bertahap) dalam proses pendidikan, karena menurutnya manusia belajar secara progresif dimulai dari hal-hal konkret menuju konsep yang abstrak, dari hafalan menuju pemahaman, dan dari pengetahuan menuju aplikasi. Pendekatan ini sejalan dengan teori pendidikan modern yang menekankan pentingnya *scaffolding* dan diferensiasi dalam pembelajaran, di

¹⁴ Riami, Devy Habibi Muhammad, dan Ari Susandi, *Penanaman Pendidikan Akhlak pada Anak Usia Dini Menurut Ibnu Miskawaih dalam Kitab Tahdzibul Akhlak, Jurnal Falasifa*, Vol. 12, No. 2 (2021), hlm. 189–200

mana peserta didik diberikan dukungan sesuai dengan tingkat perkembangannya sebelum akhirnya mampu belajar secara mandiri. Selain itu, Ibn Khaldun juga menyoroti peran guru sebagai teladan moral dan intelektual, bukan sekadar pengajar materi. Guru, menurutnya, harus menjadi *murabbi* yang membimbing siswa tidak hanya dalam ranah kognitif, tetapi juga dalam pembentukan kepribadian dan akhlak. Pandangan ini sangat relevan dengan tuntutan pendidikan Islam kontemporer, di mana guru berperan sebagai agen pembentukan karakter Islami dan spiritualitas peserta didik. Ibn Khaldun menilai bahwa metode pengajaran yang keras dan otoriter dapat mematikan potensi berpikir kritis siswa; karena itu, ia mendorong metode pendidikan yang dialogis, humanis, dan partisipatif, selaras dengan pendekatan *student-centered learning* yang kini menjadi dasar Kurikulum Merdeka. Lebih jauh, ia juga mengingatkan bahwa pendidikan yang memaksa dan tidak memperhatikan kesiapan psikologis peserta didik justru akan melahirkan kebencian terhadap ilmu pengetahuan dan menghambat perkembangan potensi kreatif mereka.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep pendidikan Ibn Khaldun memiliki dimensi multidisipliner, menghubungkan antara aspek spiritual, intelektual, sosial, dan politik. Pendidikan bagi Ibn Khaldun tidak hanya bertujuan membentuk manusia yang berilmu, tetapi juga mencetak generasi yang mampu membangun peradaban dan mempertahankan stabilitas sosial. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang kontekstual dengan kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat, sebuah pandangan yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi pendidikan Islam saat ini. Pemikiran Ibn Khaldun tentang keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan peradaban (*'umran*) memberikan perspektif bahwa investasi dalam pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus dirancang tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membekali peserta didik dengan keterampilan hidup dan kesadaran sosial yang

memungkinkan mereka berkontribusi secara aktif dalam masyarakat.

Namun, meskipun penelitian Hadi dan Hanani memberikan kontribusi teoretis yang signifikan terhadap khazanah pemikiran pendidikan Islam, studi ini masih bersifat konseptual dan belum menguji relevansi gagasan Ibn Khaldun dalam konteks empiris di lembaga pendidikan modern. Belum ada pembuktian sejauh mana prinsip-prinsip pendidikan Ibn Khaldun seperti *tadarruj*, keteladanan guru, dan pembelajaran kontekstual dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional, khususnya pada kebijakan Kurikulum Merdeka yang kini berlaku di Indonesia. Padahal, prinsip *tadarruj* yang digagas Ibn Khaldun memiliki keselarasan yang kuat dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan *teaching at the right level* yang menjadi salah satu pilar penting dalam Kurikulum Merdeka. Demikian pula, gagasannya tentang peran guru sebagai teladan moral sejalan dengan tuntutan Profil Pelajar Pancasila yang menempatkan guru sebagai fasilitator dan role model dalam pembentukan karakter peserta didik.

Oleh karena itu, penelitian disertasi ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan mengaitkan nilai-nilai pendidikan klasik Ibn Khaldun ke dalam praktik empiris di lapangan. Dengan mengkaji internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Aceh, penelitian ini berupaya membuktikan bahwa konsep pendidikan Ibn Khaldun tetap relevan dalam pembentukan karakter dan kompetensi siswa masa kini. Pendekatan integratif yang memadukan teori pendidikan Islam klasik dengan praktik kurikulum modern diharapkan dapat memperkaya wacana akademik dan memperkuat landasan filosofis implementasi Kurikulum Merdeka yang bercirikan keislaman dan kearifan lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori pendidikan Islam, tetapi juga memberikan bukti empiris tentang bagaimana warisan intelektual klasik dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam merespons tantangan pendidikan abad ke-21, sekaligus menjaga

identitas keislaman dan kebangsaan peserta didik di tengah arus globalisasi.

Ahmad Teguh Purnawanto¹⁵ Ahmad Teguh Purnawanto dalam penelitiannya melakukan kajian dengan metode kualitatif-deskriptif untuk menelaah bagaimana penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) mampu membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai yang dicanangkan dalam Kurikulum Merdeka. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan P5 sebagai inovasi pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam aktivitas belajar siswa, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan P5 secara efektif dapat menumbuhkan nilai-nilai utama dalam Profil Pelajar Pancasila, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semangat gotong royong, kemandirian, kreativitas, nalar kritis, serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial yang majemuk. Purnawanto menegaskan bahwa proyek-proyek yang dirancang dalam P5 tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran kontekstual, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kepribadian dan karakter peserta didik. Melalui pendekatan kolaboratif dan reflektif, siswa dilatih untuk memahami makna dari setiap nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi pendidikan progresif yang meyakini bahwa pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik terlibat aktif dalam proses penemuan dan pemecahan masalah nyata.

Lebih jauh, penelitian ini menggarisbawahi bahwa Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang luas bagi sekolah dan guru untuk berinovasi dalam menyusun dan melaksanakan proyek P5 sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Dalam praktiknya, P5 diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti proyek sosial, lingkungan hidup, kewirausahaan, dan literasi

¹⁵ Ahmad Teguh Purnawanto, *Pendidikan Karakter melalui Internalisasi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka*, Jurnal Ilmiah Pedagogy, Vol. 23, No. 1 (2024), hlm. 101–120

budaya, yang semuanya bertujuan menumbuhkan sikap tanggung jawab, kepedulian, dan empati sosial. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga secara afektif dan psikomotorik, selaras dengan pendekatan *holistic education* yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Temuan ini sekaligus membuktikan bahwa pendidikan karakter tidak dapat berhasil hanya melalui pembelajaran teoretis di dalam kelas, melainkan membutuhkan pengalaman langsung yang melibatkan siswa secara aktif dalam memecahkan persoalan nyata di lingkungan sekitarnya. Keberagaman tema proyek yang ditawarkan dalam P5 juga memungkinkan sekolah untuk mengangkat isu-isu aktual yang relevan dengan kehidupan siswa, seperti perubahan iklim, toleransi beragama, kearifan lokal, dan literasi digital, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna.

Namun demikian, meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang implementasi Kurikulum Merdeka, terdapat keterbatasan dalam aspek spiritual dan religiusitas. Nilai-nilai yang diangkat masih berfokus pada dimensi moral universal yang bersumber dari Pancasila, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan nilai-nilai Islami yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Padahal, dalam konteks daerah berciri khas Islam seperti Aceh, nilai-nilai keislaman seperti amanah, ikhlas, tanggung jawab, dan ukhuwah merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari pembentukan karakter siswa. Nilai-nilai ini memiliki akar teologis yang kuat dan telah menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat Aceh yang religius. Pengabaian terhadap dimensi keislaman dalam kajian P5 di Aceh berpotensi menghasilkan pemahaman yang parsial tentang pembentukan karakter, karena nilai-nilai religius sejatinya menjadi fondasi utama yang mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat setempat. Dengan demikian, terdapat ruang yang cukup besar untuk mengembangkan penelitian lanjutan yang mengaitkan internalisasi nilai Islami dalam kerangka Kurikulum Merdeka dan P5, terutama dalam hal bagaimana nilai-nilai keislaman dapat memperkuat dan

memperkaya dimensi-dimensi yang telah dirumuskan dalam Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi pertama tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Selain itu, penelitian Purnawanto masih terbatas pada analisis konseptual dan observasi deskriptif terhadap praktik P5 di sekolah-sekolah tertentu, tanpa pengujian empiris mengenai sejauh mana implementasi nilai-nilai tersebut berdampak pada peningkatan karakter religius siswa secara terukur. Belum ada pembuktian statistik maupun kualitatif mendalam tentang seberapa besar kontribusi P5 terhadap pembentukan sikap spiritual dan moral peserta didik, terutama dalam konteks sekolah-sekolah yang berlatar belakang keagamaan. Padahal, integrasi antara nilai-nilai Islami dan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi sintesis ideal dalam membentuk profil pelajar Indonesia yang berakhlak mulia dan kompetitif secara global, sejalan dengan visi pendidikan nasional dan misi Kurikulum Merdeka. Sintesis ini penting karena tidak hanya memperkuat identitas kebangsaan, tetapi juga menjaga akar spiritual peserta didik di tengah derasnya arus globalisasi yang kerap membawa nilai-nilai asing yang tidak selalu sejalan dengan budaya dan agama lokal. Lebih dari itu, pendekatan integratif semacam ini juga dapat menjawab kekhawatiran sebagian kalangan bahwa pendidikan karakter di Indonesia cenderung sekuler dan mengabaikan dimensi transendental, padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila.

Dalam konteks inilah, penelitian disertasi ini hadir untuk mengisi celah (*research gap*) tersebut. Penelitian ini tidak hanya menelaah internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka secara empiris, tetapi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Islam dapat bersinergi secara harmonis dengan Profil Pelajar Pancasila dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dengan mengkaji praktik di Sekolah Penggerak Aceh yang mengintegrasikan nilai Islami, budaya lokal, dan kebijakan nasional, penelitian ini memperluas perspektif bahwa

pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka tidak semata berorientasi pada nilai universal yang bersifat netral, melainkan juga berakar pada nilai-nilai spiritual Islam yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Pendekatan ini sekaligus menjawab kritik bahwa pendidikan karakter di Indonesia sering kali mengabaikan dimensi transendental dan lebih menekankan pada aspek sosiologis semata, sehingga kurang menyentuh kedalaman spiritual peserta didik.

Dengan demikian, hasil kajian Purnawanto menjadi landasan penting bagi penelitian ini untuk melangkah lebih jauh dalam memperkuat dimensi spiritual dan moral dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian ini berupaya menghadirkan model pendidikan karakter Islami yang harmonis dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus menjawab tantangan globalisasi tanpa kehilangan akar keislaman dan keindonesiaan. Model ini diharapkan tidak hanya aplikatif di Aceh, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai agama di daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki kekhasan kultural dan religius masing-masing. Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi pada upaya membangun paradigma pendidikan nasional yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kaya secara spiritual dan kokoh secara moral, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa tentang manusia Indonesia seutuhnya.

Kajian terhadap sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tema internalisasi nilai-nilai Islami, pendidikan karakter, dan implementasi kebijakan kurikulum merupakan isu penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Secara umum, berbagai penelitian terdahulu memiliki kesamaan pandangan bahwa pendidikan harus berorientasi pada pembentukan akhlak mulia, karakter religius, dan kepribadian yang seimbang antara aspek kognitif, afektif, serta spiritual. Nur Hamim, misalnya, melalui pendekatan filosofis-komparatif dalam kajiannya tentang konsep pendidikan Ibnu Miskawaih dan al-Ghazali, menegaskan bahwa pendidikan akhlak merupakan inti dari seluruh proses pendidikan Islam. Pandangan serupa juga muncul dalam penelitian Riami, Devy

Habibi Muhammad, dan Ari Susandi yang menelaah pemikiran Ibnu Miskawaih melalui karya Tahdzib al-Akhlaq, di mana pembentukan akhlak anak usia dini harus dilandasi pembiasaan dan keteladanan. Begitu pula, penelitian Akmal Hadi dan Silfia Hanani mengenai pemikiran Ibn Khaldun menekankan pentingnya peran guru sebagai teladan moral dan intelektual dalam proses pembelajaran bertahap yang membentuk karakter dan spiritualitas siswa. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan konsistensi pemikiran pendidikan Islam klasik yang menempatkan nilai akhlak sebagai inti proses pendidikan, meskipun masih bersifat konseptual dan belum menyentuh implementasi empiris di satuan pendidikan modern.

Sementara itu, penelitian-penelitian yang lebih kontemporer menyoroti secara mendalam upaya internalisasi nilai karakter dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, khususnya dengan hadirnya Kurikulum Merdeka sebagai transformasi paradigmatis dalam sistem pendidikan Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Lutfi Ayuningtyas dan Didi Pramono tentang internalisasi pendidikan karakter dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di SMAN 11 Semarang memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai karakter dapat diinternalisasikan melalui berbagai jalur kegiatan pendidikan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini berhasil mengungkap bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila berlangsung secara efektif melalui tiga jalur utama, yaitu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang dirancang secara sistematis oleh pihak sekolah. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, gotong royong, kemandirian, dan toleransi ditanamkan melalui pembelajaran berbasis proyek, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pembiasaan karakter di lingkungan sekolah. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa guru memiliki peran yang sangat sentral tidak hanya sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai teladan moral dan fasilitator dalam membentuk

budaya sekolah yang berkarakter¹⁶. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Thomas Lickona, yang menekankan bahwa pendidikan karakter yang efektif harus melibatkan seluruh aspek kehidupan sekolah, tidak hanya terbatas pada pembelajaran di kelas, tetapi juga mencakup keteladanan, pembiasaan, dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter¹⁷.

Temuan dari penelitian Ayuningtyas dan Pramono¹⁸ tersebut diperkuat secara signifikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Yanu dan rekan-rekan, yang secara tegas menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan elemen fundamental yang tidak terpisahkan dari Kurikulum Merdeka. Melalui kajian mendalam dengan metode studi literatur, penelitian ini menyoroti bahwa Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi instrumen utama dalam implementasi pendidikan karakter di era Kurikulum Merdeka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P5 memberikan ruang yang sangat luas bagi sekolah untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, serta kepedulian sosial, yang dikembangkan melalui proyek lintas disiplin ilmu, kegiatan sosial, dan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa secara aktif dan reflektif. Lebih jauh, penelitian ini mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki potensi yang sangat besar dalam memperkuat karakter peserta didik, terutama karena karakteristik utamanya yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal, kebutuhan peserta didik, dan perkembangan zaman. Fleksibilitas ini sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang harus selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana

¹⁶ Ida Lutfi Ayuningtyas dan Didi Pramono, "Internalisasi Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di SMAN 11 Semarang," *Journal of Education Research and Evaluation* 7, No. 1 (2023): hlm. 18–20.

¹⁷ Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991), hlm. 52–55.

¹⁸ Yanu dkk., "Penguatan Pendidikan Karakter...", hlm. 208.

peserta didik diberikan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing, namun tetap dalam bimbingan dan arahan yang tepat dari para pendidik¹⁹.

Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Teguh Purnawanto pada tahun 2024 memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam memahami efektivitas Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter peserta didik. Melalui kajian dengan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini menyoroti bahwa penerapan P5 secara efektif dapat menumbuhkan nilai-nilai utama dalam Profil Pelajar Pancasila, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semangat gotong royong, kemandirian, kreativitas, nalar kritis, serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial yang majemuk. Purnawanto menegaskan bahwa proyek-proyek yang dirancang dalam P5 tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran kontekstual yang menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kepribadian dan karakter peserta didik melalui pendekatan kolaboratif, reflektif, dan partisipatif. Melalui pendekatan ini, siswa dilatih untuk memahami makna yang mendalam dari setiap nilai Pancasila dan menerapkannya secara konkret dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat²⁰. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan holistik yang dikemukakan oleh para ahli, bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan seluruh aspek kepribadian manusia, tidak hanya aspek intelektual semata, tetapi juga aspek emosional, sosial, dan spiritual²¹. Ketiga penelitian kontemporer ini secara kolektif memperlihatkan bagaimana Kurikulum Merdeka, dengan segala

¹⁹ Ki Hadjar Dewantara, *Pemikiran tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Taman Siswa, 1936), hlm. 25.

²⁰ Ahmad Teguh Purnawanto, "Pendidikan Karakter melalui Internalisasi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka," *Jurnal Ilmiah Pedagogi* 23, No. 1 (2024): hlm. 108–112.

²¹ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003), hlm. 35.

karakteristik dan keunggulannya, telah memberikan ruang yang sangat luas bagi penguatan nilai-nilai moral universal melalui pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan partisipatif. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa ketiga penelitian tersebut masih terbatas pada eksplorasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai utama, tanpa melakukan eksplorasi yang mendalam terhadap nilai-nilai Islami yang sesungguhnya memiliki potensi sangat besar untuk menjadi landasan spiritual bangsa, terutama dalam konteks daerah dengan karakteristik keislaman yang kuat seperti Provinsi Aceh.

Selain ketiga penelitian kontemporer tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Rohmat pada tahun 2020 memiliki posisi yang sangat strategis karena berhasil menjadi jembatan penghubung antara perspektif klasik pendidikan Islam dan pendekatan modern dalam implementasi kurikulum. Melalui penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus yang dilaksanakan pada salah satu sekolah Islam terpadu, Rohmat mengkaji secara mendalam bagaimana integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum sekolah dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan karakter religius peserta didik dapat dilakukan melalui tiga jalur utama integrasi, yaitu integrasi konseptual dalam perencanaan kurikulum yang mencakup penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah yang bernuansa Islami, integrasi kontekstual dalam kegiatan pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai keislaman, serta integrasi kultural melalui penciptaan budaya sekolah yang Islami dalam interaksi sehari-hari. Penelitian Rohmat membuktikan bahwa nilai-nilai Islami seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian sosial tidak hanya dapat diajarkan secara teoritis, tetapi dapat diimplementasikan secara sistematis dan terukur dalam pendidikan formal, dengan guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai model keteladanan yang menanamkan nilai-nilai akhlak Islam secara konsisten kepada

peserta didik²². Temuan ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan teori pendidikan akhlak yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawaih, yang menekankan bahwa pembentukan akhlak mulia tidak dapat dicapai secara instan melalui teori semata, tetapi harus ditempuh melalui proses pendidikan yang berkelanjutan, pembiasaan yang konsisten, dan keteladanan yang nyata dari para pendidik²³. Namun demikian, meskipun penelitian Rohmat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengintegrasikan perspektif klasik dan modern pendidikan Islam, penelitian ini belum mengaitkan secara langsung temuan-temuannya dengan konteks kebijakan pendidikan nasional yang lebih mutakhir, yaitu Kurikulum Merdeka, yang saat ini menjadi fokus utama transformasi pendidikan di Indonesia. Padahal, Kurikulum Merdeka dengan segala fleksibilitas dan otonomi yang diberikannya kepada satuan pendidikan, justru membuka peluang yang sangat besar bagi penguatan integrasi nilai-nilai Islami ke dalam seluruh aspek pembelajaran dan budaya sekolah, sebagaimana telah dibuktikan dalam penelitian Rohmat pada konteks sekolah Islam terpadu. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Islami dapat diintegrasikan secara sistematis dalam kerangka Kurikulum Merdeka, terutama di daerah dengan karakteristik keislaman yang kuat seperti Provinsi Aceh, sehingga menghasilkan model implementasi kurikulum yang harmonis antara kebijakan nasional, nilai-nilai keislaman, dan kearifan lokal.

Dari seluruh kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak penelitian telah membahas pentingnya internalisasi nilai Islami dan pendidikan karakter, sebagian besar masih bersifat konseptual, filosofis, atau berfokus pada nilai universal tanpa menyinggung konteks lokal yang berciri Islam.

²² Rohmat, "Integrasi Kurikulum dan Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Membentuk Sikap Religius Siswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 8, No. 1 (2020): hlm. 50–55.

²³ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 85.

Penelitian-penelitian yang ada cenderung berhenti pada tataran wacana dan belum banyak yang melakukan eksplorasi empiris di lapangan. Bahkan, studi-studi yang mengangkat pemikiran tokoh klasik seperti Ibnu Miskawaih, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun umumnya masih terbatas pada analisis teks dan belum mengaitkannya secara konkret dengan praktik pendidikan kontemporer, khususnya dalam konteks kebijakan Kurikulum Merdeka yang saat ini menjadi arus utama pendidikan nasional. Di sisi lain, penelitian-penelitian yang menyoroti Kurikulum Merdeka lebih banyak berfokus pada aspek teknis implementasi, kesiapan guru, atau efektivitas pembelajaran berbasis proyek, tanpa secara mendalam mengkaji bagaimana nilai-nilai keislaman dapat diintegrasikan ke dalamnya. Akibatnya, terdapat jurang pemisah antara diskursus pendidikan Islam klasik, kajian kebijakan pendidikan modern, dan realitas praktik di lapangan, terutama di wilayah dengan kekhasan pendidikan Islam seperti Aceh. Di sinilah letak research gap yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara empiris proses internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Aceh. Berbeda dari penelitian terdahulu yang hanya menyoroti aspek karakter secara umum atau teori pendidikan Islam klasik secara filosofis, penelitian ini memadukan keduanya dalam satu kerangka integratif yang utuh dan komprehensif. Nilai-nilai Islami seperti keteladanan guru, pembiasaan religius, disiplin ibadah, dan evaluasi berbasis kompetensi spiritual dikaji tidak hanya sebagai konsep abstrak, tetapi juga sebagai praktik nyata yang teramati dan terukur dalam keseharian pembelajaran di sekolah. Penelitian ini juga berupaya menjawab pertanyaan mendasar tentang sejauh mana nilai-nilai Islam klasik yang digagas oleh para pemikir Muslim dapat diaktualisasikan dalam konteks kebijakan pendidikan nasional yang modern dan fleksibel. Dengan pendekatan mixed methods, penelitian ini tidak hanya mengukur seberapa kuat pengaruh internalisasi nilai Islami terhadap pelaksanaan Kurikulum

Merdeka, tetapi juga menggali secara mendalam bagaimana proses tersebut berlangsung, apa saja nilai-nilai yang dominan, serta tantangan apa yang dihadapi di lapangan.

Lebih dari sekadar mengisi celah akademik, penelitian ini juga menawarkan perspektif baru tentang hubungan antara nilai-nilai keislaman dan kebijakan pendidikan nasional. Selama ini, diskursus tentang integrasi nilai Islam dalam kurikulum nasional sering kali terjebak dalam dikotomi antara yang sakral dan profan, antara ilmu agama dan ilmu umum, atau antara kepentingan lokal dan nasional. Penelitian ini berupaya melampaui dikotomi tersebut dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan Kurikulum Merdeka dapat berjalan secara sinergis dan saling menguatkan. Kurikulum Merdeka dengan fleksibilitas dan otonomi yang diberikannya kepada satuan pendidikan justru membuka ruang seluas-luasnya bagi penguatan nilai-nilai keislaman yang kontekstual, tanpa harus kehilangan orientasi nasionalnya. Sebaliknya, nilai-nilai Islami yang diinternalisasikan secara tepat dapat menjadi fondasi moral dan spiritual yang memperkuat pencapaian Profil Pelajar Pancasila, terutama pada dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Secara keseluruhan, kajian terhadap delapan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai tetap menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter bangsa, namun integrasi nilai Islami dalam kerangka Kurikulum Merdeka masih jarang diteliti secara empiris, apalagi dengan pendekatan yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan model internalisasi nilai Islami yang tidak hanya menyesuaikan dengan kebijakan nasional, tetapi juga mencerminkan identitas spiritual dan budaya Aceh yang khas. Model ini dibangun berdasarkan temuan empiris dari lapangan, sehingga memiliki validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selain itu, model ini juga dirancang agar adaptif dan dapat direplikasi di daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, sehingga kontribusinya tidak terbatas pada konteks Aceh semata.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik pendidikan Islam di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dengan menunjukkan relevansi dan keberlanjutan pemikiran pendidikan Islam klasik dalam merespons tantangan kontemporer. Secara praktis, penelitian ini menawarkan model implementasi yang aplikatif bagi sekolah, guru, dan pemangku kebijakan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam Kurikulum Merdeka. Lebih dari itu, penelitian ini juga berkontribusi pada upaya membangun paradigma pendidikan nasional yang berpijak pada prinsip harmonisasi antara nilai-nilai keislaman, kebijakan kurikulum nasional, dan kearifan lokal. Paradigma ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual dan kompetitif secara global, tetapi juga generasi yang berakhlak kuat, berakhlak mulia, dan memiliki akar spiritual yang kokoh, sehingga mampu menjadi *rahmatan lil 'alamin* di tengah peradaban dunia yang semakin kompleks dan dinamis.

Dalam konteks pendidikan karakter, khususnya yang berbasis nilai-nilai Islami, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara transformasi nilai, transaksi nilai, dan internalisasi nilai. Ketiga konsep ini menggambarkan tingkatan yang berbeda dalam proses penanaman nilai kepada peserta didik. Transformasi nilai merupakan tahap awal di mana pendidik memperkenalkan dan menginformasikan nilai-nilai tertentu kepada peserta didik. Pada tahap ini, komunikasi masih bersifat satu arah, di mana guru menyampaikan konsep-konsep moral dan ajaran Islam kepada siswa, namun belum tentu dipahami atau diterima secara mendalam. Transformasi nilai lebih menekankan pada aspek kognitif, yaitu pengetahuan tentang nilai-nilai baik dan buruk menurut ajaran Islam.

Sementara itu, transaksi nilai merupakan tahap lanjutan yang melibatkan interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Pada tahap ini, terjadi dialog, diskusi, dan tanya jawab yang memungkinkan siswa untuk mempertanyakan, memahami, dan

mulai menerima nilai-nilai yang diajarkan. Transaksi nilai menekankan pada aspek komunikasi timbal balik, di mana guru tidak hanya menyampaikan nilai, tetapi juga membuka ruang bagi siswa untuk mengemukakan pendapat, pengalaman, dan pemahamannya sendiri tentang nilai-nilai tersebut. Dalam konteks pendidikan Islam, transaksi nilai dapat terjadi melalui diskusi tentang ayat Al-Qur'an atau hadis, dialog tentang penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, atau tukar pikiran tentang tantangan moral yang dihadapi siswa di era modern.

Adapun internalisasi nilai merupakan tahap tertinggi dan paling mendalam dalam proses penanaman nilai. Internalisasi nilai adalah proses di mana nilai-nilai yang telah dipahami dan diterima secara dialogis kemudian dihayati, diresapi, dan akhirnya menyatu dalam kepribadian peserta didik sehingga menjadi bagian dari karakter dan cara pandangnya dalam bersikap dan bertindak. Pada tahap ini, nilai tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang berasal dari luar, tetapi telah menjadi keyakinan pribadi yang menggerakkan perilaku secara spontan dan konsisten. Proses internalisasi melibatkan seluruh aspek kejiwaan manusia, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik, sebagaimana dijelaskan dalam Taksonomi Bloom. Peserta didik tidak hanya tahu tentang nilai (knowing), tetapi juga merasakan pentingnya nilai tersebut (feeling), dan mewujudkannya dalam tindakan nyata (acting).

Alasan memilih internalisasi nilai sebagai fokus dalam penelitian ini, transformasi atau transaksi nilai, didasarkan pada beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, tujuan utama pendidikan Islam bukan sekadar mentransfer pengetahuan tentang agama, tetapi membentuk pribadi muslim yang beriman, berilmu, dan beramal saleh secara konsisten. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Miskawaih yang menekankan bahwa akhlak mulia tidak cukup hanya diketahui, tetapi harus dilatih dan dibiasakan hingga menjadi karakter yang permanen. Internalisasi nilai menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut karena menyentuh dimensi terdalam kepribadian peserta didik.

Kedua, transformasi dan transaksi nilai lebih banyak berorientasi pada aspek kognitif dan dialogis, sementara internalisasi nilai menjangkau aspek afektif dan konatif yang lebih menentukan perilaku aktual seseorang. Dalam konteks pendidikan karakter, keberhasilan tidak diukur dari seberapa banyak siswa hafal tentang nilai-nilai kebaikan, tetapi seberapa jauh nilai-nilai tersebut terwujud dalam sikap dan perilaku keseharian mereka. Internalisasi nilai menjamin bahwa nilai yang diajarkan benar-benar menjadi milik pribadi siswa, bukan sekadar tempelan dari luar.

Ketiga, dalam konteks Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila, dimensi "beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia" menuntut adanya internalisasi yang mendalam, bukan sekadar pemahaman kognitif atau dialog semata. Peserta didik diharapkan tidak hanya tahu tentang ajaran agamanya, tetapi juga menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi nilai Islami menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut, terutama di daerah dengan karakteristik religius seperti Aceh.

Keempat, penelitian ini ingin mengkaji sejauh mana nilai-nilai Islami benar-benar terinternalisasi dalam diri peserta didik melalui praktik pendidikan di Sekolah Penggerak. Fokus pada internalisasi memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang proses, strategi, dan dampak penanaman nilai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya. Dengan demikian, internalisasi nilai menjadi konsep yang paling tepat dan relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana nilai-nilai Islami diinternalisasikan, nilai apa saja yang diinternalisasikan, dan apa tantangan yang dihadapi dalam proses internalisasi tersebut.

Temuan awal penelitian ini menunjukkan adanya dua indikator yang menonjol dalam proses internalisasi nilai-nilai Islami di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh, yaitu keteladanan guru sebagai indikator dengan capaian tertinggi dan disiplin Islami sebagai indikator dengan capaian terendah. Keteladanan guru memperoleh

skor rata-rata 4,35 yang termasuk dalam kategori sangat baik, menandakan bahwa guru-guru di Sekolah Penggerak Aceh telah berhasil menampilkan diri sebagai figur panutan dalam mengamalkan nilai-nilai Islami, baik dalam sikap keseharian, kedisiplinan beribadah, maupun interaksi sosial di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan konsep *uswah hasanah* dalam pendidikan Islam yang menempatkan guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai model teladan yang perilakunya diamati dan ditiru oleh peserta didik. Keteladanan guru menjadi fondasi utama dalam proses internalisasi nilai karena peserta didik lebih mudah menyerap nilai-nilai kebaikan melalui pengamatan langsung terhadap figur yang mereka hormati, dibandingkan hanya melalui instruksi verbal semata. Guru yang konsisten menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, sabar, dan religius dalam kesehariannya akan secara alami menanamkan nilai-nilai tersebut dalam diri siswa tanpa perlu pemaksaan atau doktrinasi.

Di sisi lain, indikator disiplin Islami memperoleh skor rata-rata 4,05 yang meskipun masih termasuk dalam kategori baik, namun menjadi yang terendah dibandingkan indikator lainnya. Temuan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menanamkan kedisiplinan yang berlandaskan nilai-nilai Islami secara konsisten di lingkungan sekolah. Disiplin Islami yang dimaksud mencakup kepatuhan terhadap aturan sekolah yang berbasis syariat, seperti ketepatan waktu dalam melaksanakan ibadah, konsistensi dalam berpakaian sesuai syariat Islam, serta kedisiplinan dalam interaksi sosial yang mencerminkan adab Islami. Rendahnya capaian pada indikator ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih beragamnya tingkat pemahaman dan komitmen siswa terhadap nilai-nilai disiplin Islami, pengaruh lingkungan luar sekolah yang belum sepenuhnya mendukung, serta tantangan dalam menegakkan aturan secara konsisten di tengah keterbatasan sumber daya dan pengawasan. Padahal, disiplin Islami merupakan pilar penting dalam pembentukan karakter karena mengajarkan peserta

didik untuk tidak hanya mengetahui nilai-nilai kebaikan, tetapi juga konsisten dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kontras antara tingginya keteladanan guru dan relatif rendahnya disiplin Islami siswa ini menjadi fenomena menarik yang perlu dikaji lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa keteladanan guru saja tidak cukup untuk menjamin tertanamnya disiplin Islami pada diri peserta didik jika tidak didukung oleh sistem, kebijakan, dan lingkungan yang kondusif. Diperlukan upaya yang lebih sistemik dan kolaboratif antara guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk membangun budaya disiplin Islami yang kuat. Selain itu, temuan ini juga mengindikasikan perlunya penguatan pada aspek evaluasi dan monitoring pelaksanaan disiplin Islami, serta pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan berbasis syariat. Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh faktor-faktor yang memengaruhi kedua indikator tersebut, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas internalisasi nilai-nilai Islami, khususnya pada aspek disiplin Islami, dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan disertasi ini disusun agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:...

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Menguraikan teori-teori relevan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta prosedur penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif, analisis data, serta pembahasan temuan berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penelitian, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan proses sadar dan terencana yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga menekankan pada pembentukan akhlak, pengembangan spiritual, serta keterampilan sosial peserta didik. Menurut Tafsir²⁴, pendidikan Islam adalah usaha membimbing dan mengarahkan peserta didik agar seluruh potensi insaniyah yang dimilikinya, baik jasmani, akal, maupun rohani, dapat berkembang secara harmonis dalam kerangka pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian, pendidikan Islam bukanlah sekadar transfer ilmu, tetapi juga internalisasi nilai yang membentuk kepribadian muslim yang kaffah.

Secara historis, pendidikan Islam telah memiliki akar panjang dalam peradaban umat Islam. Dari lembaga kuttab dan madrasah pada masa klasik, hingga perguruan tinggi Islam modern, pendidikan Islam telah berperan besar dalam membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak²⁵. Bahkan, dalam konteks Indonesia, pendidikan Islam berkembang melalui pesantren, madrasah, dan sekolah umum yang mengintegrasikan mata pelajaran agama. Muhaimin menegaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia merupakan sistem pendidikan yang tidak hanya berfungsi untuk mentransfer ilmu keislaman, tetapi juga berperan dalam pembangunan moral bangsa.

²⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 33.

²⁵ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education* (Kuala Lumpur: ABIM, 1980), hlm. 33.

Dalam pandangan Al-Syaibany²⁶, pendidikan Islam adalah proses mempersiapkan manusia untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan Islam, baik dalam aspek akal, spiritual, sosial, maupun fisik. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari visi Islam itu sendiri, yakni membentuk insan kamil, manusia paripurna yang seimbang antara iman, ilmu, dan amal.

Azra²⁷ menekankan bahwa pendidikan Islam juga memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu membentuk masyarakat yang beradab (*civilized society*). Hal ini berarti bahwa pendidikan Islam tidak boleh hanya berorientasi pada kehidupan ukhrawi semata, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan kehidupan duniawi, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial. Sejalan dengan itu, Langgulang²⁸ menggarisbawahi bahwa pendidikan Islam harus mengembangkan tiga dimensi utama manusia: dimensi kognitif (akal), dimensi afektif (hati), dan dimensi psikomotorik (perilaku).

Di Aceh, pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sangat strategis karena didukung oleh Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menegaskan bahwa pendidikan di Aceh harus berbasis Islami. Mujiburrahman²⁹ menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memandang pendidikan Islami sebagai pondasi penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga religius dan berkarakter Islami.

Dengan demikian, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai sebuah sistem integral yang menggabungkan aspek ketuhanan (*hablun minallah*), aspek kemanusiaan (*hablun minannas*), dan aspek lingkungan (*hablun minal 'alam*). Pendidikan ini berfungsi

²⁶ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 33.

²⁷ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 33.

²⁸ Hasan Langgulang, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003), hlm. 33.

²⁹ Mujiburrahman, "Pendidikan Islami di Aceh ...," hlm. 46.

menanamkan nilai-nilai tauhid, membimbing akhlak, dan mempersiapkan manusia agar mampu menjalani kehidupan secara seimbang di dunia dan akhirat. Dalam konteks kurikulum nasional seperti Kurikulum Merdeka, pendidikan Islam memiliki peluang besar untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran lintas mata pelajaran melalui pendekatan karakter, budaya sekolah, dan keteladanan guru.

Dalam kerangka pendidikan Islam, terdapat empat pilar nilai utama yang menjadi fondasi sekaligus tujuan dari seluruh proses pembelajaran, yaitu nilai aqidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Keempat nilai ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing saling melengkapi dan menguatkan dalam membentuk kepribadian muslim yang paripurna (*insan kamil*). Nilai aqidah menjadi dimensi fundamental yang pertama dan utama dalam pendidikan Islam, karena aqidah merupakan keyakinan dasar yang tertanam dalam jiwa seorang muslim sebagai landasan bagi seluruh aktivitas kehidupannya. Aqidah adalah wujud tauhid, yaitu mengimani dan meyakini keberadaan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, serta meyakini segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengenai hal-hal yang gaib, seperti malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Nilai aqidah inilah yang menjadi fondasi normatif pendidikan Islam, karena darinya lahir kesadaran bahwa manusia adalah hamba Allah yang memiliki tujuan hidup untuk beribadah dan mengabdikan hanya kepada-Nya. Penanaman nilai aqidah sejak dini menjadi sangat penting karena akan membentuk cara pandang (*worldview*) seseorang dalam memaknai kehidupan, sehingga ia tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya. Aqidah yang kokoh akan melahirkan ketenangan jiwa, keberanian dalam kebenaran, serta keteguhan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup.

Adapun nilai syariah dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu, warga masyarakat,

maupun sebagai subjek dalam alam semesta. Syariah secara bahasa berarti jalan yang lurus atau sumber air yang jernih, sedangkan secara istilah syariah adalah seperangkat aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui wahyu-Nya untuk mengatur kehidupan manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Syariah memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi aturan tentang hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*) yang disebut dengan ibadah mahdhah, serta aturan tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungannya (*hablun minannas*) yang disebut dengan muamalah. Dalam konteks ini, syariah mengatur bagaimana manusia menjalankan perannya sebagai hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada segala perintah-Nya, sekaligus mengatur bagaimana manusia berinteraksi secara adil dan harmonis dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nilai syariah mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif, yang tidak hanya mengatur urusan ritual keagamaan, tetapi juga memberikan panduan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari masalah pribadi seperti makan, minum, dan berpakaian, hingga masalah publik seperti perdagangan, pemerintahan, dan peradilan.

Selanjutnya, nilai ibadah merupakan representasi pengamalan dari ajaran aqidah Islamiyah yang diyakini oleh setiap muslim. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri, tunduk, dan patuh, sedangkan secara istilah ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan syariat. Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu ibadah mahdhah (ibadah khusus) yang tata caranya telah ditentukan secara rinci oleh syariat, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah ghairu mahdhah (ibadah umum) yang mencakup seluruh aktivitas baik yang dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan ketentuan syariat, seperti bekerja mencari nafkah, menuntut ilmu, tersenyum kepada sesama, dan membantu orang yang kesulitan. Nilai ibadah mengajarkan

bahwa seluruh kehidupan seorang muslim harus diorientasikan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, sehingga tidak ada dikotomi antara kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan ibadah bertujuan untuk membentuk manusia yang tekun beribadah secara benar sesuai ajaran Islam, sehingga ibadah yang dilakukannya tidak sekadar rutinitas tanpa makna, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membentuk kepribadian yang bertakwa.

Sementara itu, nilai akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam pendidikan Islam, bahkan Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa misi utama kenabian beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak secara bahasa berarti budi pekerti, perangai, atau tabiat, sedangkan secara istilah akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan akal yang panjang, karena telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam dirinya. Akhlak merupakan inti dan implementasi dari nilai-nilai aqidah dan syariah, karena aqidah dan syariah yang benar haruslah melahirkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mencakup hubungan manusia dengan Allah, seperti ikhlas, takwa, dan rasa syukur; hubungan manusia dengan sesama, seperti jujur, amanah, adil, dermawan, pemaaf, dan tolong-menolong; serta hubungan manusia dengan lingkungan, seperti menjaga kelestarian alam dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Akhlak yang mulia juga menuntun manusia untuk senantiasa berada pada jalan tengah (*the golden mean*) antara dua ekstrem, sebagaimana diajarkan oleh Ibnu Miskawaih, seperti keberanian yang merupakan pertengahan antara pengecut dan nekat, atau dermawan sebagai pertengahan antara kikir dan boros.

Keempat nilai fundamental ini aqidah, syariah, ibadah, dan akhlak bukanlah entitas yang terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling terkait erat dalam membangun kepribadian muslim yang sempurna. Aqidah menjadi fondasi yang melandasi seluruh bangunan keislaman seseorang; syariah menjadi

jalan atau sistem yang mengatur bagaimana fondasi tersebut dijalankan; ibadah menjadi aktualisasi nyata dari keyakinan dan kepatuhan kepada syariat; dan akhlak menjadi buah atau hasil dari seluruh proses tersebut yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Seorang muslim yang memiliki aqidah yang kokoh akan terdorong untuk menjalankan syariat dengan penuh kesadaran, yang kemudian diwujudkan dalam ibadah-ibadah yang khusyuk, dan pada akhirnya melahirkan akhlak yang mulia dalam kehidupannya. Sebaliknya, jika salah satu dari keempat nilai ini lemah atau tidak berfungsi, maka bangunan keislaman seseorang akan timpang dan tidak sempurna. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mengintegrasikan keempat nilai ini secara holistik dalam setiap aspek pembelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan tentang Islam, tetapi juga memiliki keyakinan yang kokoh, ketaatan dalam beribadah, dan akhlak yang mulia yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tujuan tertinggi pendidikan Islam untuk membentuk insan kamil, manusia yang sempurna secara spiritual, intelektual, dan moral, dapat tercapai secara optimal.

Pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang kompleks dan komprehensif, tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan (transfer of knowledge) semata, tetapi lebih dari itu, ia adalah proses penanaman nilai (transfer of values) yang berlangsung secara sadar dan terencana untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan seluruh potensi insaniyah yang dimiliki peserta didik, baik jasmani, akal, maupun rohani, agar dapat berkembang secara harmonis dan seimbang dalam kerangka pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan sekadar upaya mencerdaskan intelektual, melainkan juga membentuk kepribadian muslim yang kaffah, yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal dalam seluruh aspek kehidupannya.

Pendidikan Islam memiliki landasan yang kokoh, bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran para ulama dan filosof Muslim klasik maupun kontemporer. Para pemikir besar seperti Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses sosial yang bertahap dan sistematis, di mana ilmu pengetahuan diperoleh melalui jenjang pembelajaran yang kontekstual, dimulai dari hal-hal konkret menuju konsep yang abstrak. Sementara itu, Al-Ghazali menekankan pentingnya penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dan pembentukan akhlak mulia sebagai inti dari pendidikan, karena ilmu yang tidak dibarengi dengan akhlak hanya akan melahirkan intelektual yang kering dan tidak membawa kebaikan. Adapun Ibnu Miskawaih, melalui karyanya *Tahdzib al-Akhlaq*, menegaskan bahwa akhlak yang mulia tidak dapat dicapai secara instan, melainkan harus ditempuh melalui proses pendidikan yang berkelanjutan, pembiasaan (*ta'wid*), dan keteladanan (*uswah*), hingga akhirnya nilai-nilai kebaikan tersebut terinternalisasi menjadi karakter yang permanen dalam diri peserta didik. Pemikiran para tokoh ini secara kolektif menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil manusia paripurna yang memiliki keseimbangan antara dimensi spiritual, intelektual, emosional, dan sosial, serta mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah (*'abd Allah*) sekaligus pemimpin di muka bumi (*khalifah fi al-ard*).

Dalam kerangka yang lebih luas, pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari upaya Islamisasi, sebuah gagasan fundamental yang muncul sebagai respons terhadap tantangan modernitas dan sekularisasi ilmu pengetahuan yang memisahkan antara nilai-nilai agama dan kehidupan duniawi. Islamisasi merupakan sebuah proses sadar dan sistematis untuk membangun paradigma keilmuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, baik pada aspek ontologis (hakikat ilmu), epistemologis (sumber dan metode memperoleh ilmu), maupun aksiologis (tujuan dan manfaat ilmu). Gagasan ini pertama kali dicetuskan secara sistematis oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas dan kemudian dipopulerkan oleh Ismail Raji al-Faruqi, yang

melihat bahwa persoalan mendasar dalam dunia pendidikan Islam adalah dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, yang berakibat pada lahirnya dualisme pendidikan . Al-Faruqi menilai bahwa sistem pendidikan yang terbelah ini menghasilkan lulusan yang tidak utuh: di satu sisi ada yang menguasai ilmu agama tetapi gagap terhadap perkembangan sains dan teknologi modern, di sisi lain ada yang cakap dalam ilmu pengetahuan modern tetapi miskin nilai-nilai spiritual dan moral.

Al-Faruqi kemudian menawarkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai solusi, yang ia definisikan sebagai upaya untuk mengislamisasikan disiplin-disiplin ilmu modern dengan menuang kembali disiplin-disiplin tersebut ke dalam wawasan Islam . Bagi al-Faruqi, Islamisasi bukan sekadar memberi label Islam pada ilmu-ilmu produk Barat, melainkan sebuah proses integrasi yang mendalam, di mana ilmu pengetahuan modern harus dipahami, dikritisi, dan direkonstruksi dalam kerangka tauhid. Ia mendasarkan pemikirannya pada konsep Tauhid yang menegaskan kesatuan penciptaan, kebenaran, dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia . Dengan landasan tauhid ini, tidak ada lagi pemisahan antara pengetahuan yang bersifat individual dan sosial, antara sains dan agama, karena semua disiplin ilmu pada hakikatnya bersifat humanistik dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Al-Faruqi merumuskan dua belas langkah konkret untuk merealisasikan Islamisasi ilmu, yang dimulai dari penguasaan disiplin ilmu modern, penguasaan khazanah Islam, penentuan relevansi Islam terhadap disiplin ilmu, analisis kritis, hingga penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam dan penyebaran ilmu yang telah diislamkan .

Dengan demikian, konsep Islamisasi memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pendidikan Islam, karena ia menawarkan sebuah paradigma integratif yang mampu menjawab tantangan dikotomi keilmuan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak lagi dipahami sebagai pendidikan yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga sebagai proses membangun cara pandang

(worldview) Islami terhadap seluruh disiplin ilmu, sehingga setiap bidang pengetahuan yang dipelajari peserta didik, baik sains, sosial, maupun humaniora, selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ketauhidan, akhlak, dan tanggung jawab spiritual. Melalui Islamisasi, peserta didik diharapkan tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan secara kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran bahwa ilmu yang dipelajarinya adalah amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia dan alam semesta, sejalan dengan visi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

Pada akhirnya, antara pendidikan Islam dan Islamisasi terjalin hubungan yang saling menguatkan. Pendidikan Islam menjadi wahana utama untuk mewujudkan cita-cita Islamisasi, yaitu melahirkan generasi muslim yang memiliki integritas intelektual dan moral, serta mampu berperan aktif dalam membangun peradaban tanpa kehilangan identitas keislamannya. Sementara itu, Islamisasi memberikan landasan filosofis dan epistemologis bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam, sehingga ia tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa harus terjebak pada pola-pola lama yang dikotomis atau sekadar mengadopsi secara membabi buta sistem pendidikan modern yang sekuler.

2.1.1 Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam merupakan aspek fundamental yang menjadi arah dari seluruh proses pembelajaran. Pendidikan Islam tidak sekadar dimaksudkan untuk mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Menurut Tafsir³⁰, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia seutuhnya (insan kamil), yakni manusia yang beriman kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu melaksanakan tugas kekhalifahan di muka bumi.

³⁰ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam ...*, hlm. 33.

Al-Attas³¹ menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah melahirkan *manusia yang baik (al-insān al-ṣāliḥ)*, bukan sekadar manusia yang terampil. Perbedaan pokok dengan sistem pendidikan sekuler terletak pada orientasi ini: pendidikan sekuler berfokus pada pencapaian keterampilan untuk kebutuhan duniawi, sementara pendidikan Islam menekankan keterpaduan antara ilmu, iman, dan amal sebagai bekal dunia sekaligus akhirat.

Menurut Al-Syaibany³², tujuan pendidikan Islam meliputi pengembangan seluruh potensi manusia: potensi jasmani, akal, dan rohani, sehingga tercipta keseimbangan dalam diri peserta didik. Hal ini sejalan dengan konsep tauhid yang menjadi dasar dari segala aktivitas pendidikan. Pendidikan Islam diorientasikan untuk mengembangkan manusia yang taat kepada Allah, bermanfaat bagi sesama, dan menjaga keseimbangan dengan alam.

Langgulung³³ menyebutkan bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadian muslim yang utuh, yaitu pribadi yang mampu menyeimbangkan antara aspek individual dan sosial, spiritual dan material, serta duniawi dan ukhrawi. Pandangan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam bersifat integral, holistik, dan universal.

Dalam konteks modern, tujuan pendidikan Islam juga diarahkan untuk menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Azra³⁴ menekankan bahwa pendidikan Islam harus mampu menyiapkan generasi muslim yang kritis, kreatif, dan inovatif, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dengan perkembangan zaman.

³¹ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam* ..., hlm. 33.

³² Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam* ..., hlm. 33.

³³ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam* ..., hlm. 33.

³⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi* ..., hlm. 33.

Di Indonesia, tujuan pendidikan Islam sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Artinya, pendidikan Islam berperan memperkuat nilai-nilai religiusitas di balik tujuan pendidikan nasional tersebut.

Ibnu Miskawaih³⁵ juga mengaitkan tujuan pendidikan dengan pembinaan akhlak. Baginya, pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk kecerdasan intelektual, tetapi lebih pada pembiasaan akhlak mulia sebagai fondasi utama kehidupan manusia. Dengan akhlak yang baik, manusia akan dapat mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat (*sa'ādah*).

Hamim³⁶ menambahkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah memanusiakan manusia sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah. Pendidikan Islam berfungsi mengembangkan potensi peserta didik agar dapat berperan sebagai hamba Allah yang taat (*'abd*) dan khalifah di bumi (*khalīfah fī al-arḍ*). Dengan demikian, orientasi pendidikan Islam selalu terikat dengan visi teologis dan moral.

Dalam perspektif kontemporer, tujuan pendidikan Islam juga diarahkan untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila yang berkarakter Islami. Sejalan dengan gagasan Kemendikbudristek, Kurikulum Merdeka memberi ruang bagi sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan Islam dapat bersinergi dengan kebijakan pendidikan nasional.

Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam dapat disimpulkan mencakup beberapa dimensi utama:

³⁵ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1994), hlm. 33.

³⁶ Nur Hamim, "Pendidikan Akhlak ...", hlm. 392

1. Dimensi Ketuhanan: membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan tunduk kepada Allah SWT.
2. Dimensi Akhlak: membimbing peserta didik agar berakhlak mulia sesuai ajaran Islam.
3. Dimensi Intelektual: mengembangkan potensi akal untuk mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
4. Dimensi Sosial: membentuk individu yang peduli, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.
5. Dimensi Profesional: menyiapkan manusia yang terampil, produktif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.

2.1.1 Akhlak : Tujuan Utama Pendidikan Islam

Meskipun tujuan pendidikan Islam mencakup berbagai dimensi yang komprehensif seperti dimensi ketuhanan yang membentuk keimanan dan ketakwaan, dimensi intelektual yang mengembangkan potensi akal, dimensi sosial yang membentuk kepribadian peduli dan bermanfaat bagi masyarakat, serta dimensi profesional yang menyiapkan keterampilan hidup, para ulama dan pemikir Muslim sepakat bahwa akhlak mulia (*al-akhlaq al-karimah*) merupakan inti sekaligus tujuan tertinggi dari pendidikan Islam. Kesepakatan ini bukan tanpa dasar, melainkan berakar pada pemahaman bahwa seluruh dimensi pendidikan Islam pada akhirnya bermuara pada pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Ilmu tanpa akhlak akan melahirkan kecerdasan yang tidak membawa kebaikan, ibadah tanpa akhlak akan kehilangan esensi ketulusan, dan kecakapan sosial tanpa akhlak akan menjelma menjadi manipulasi dan eksploitasi. Dengan demikian, akhlak menjadi *raison d'être* (alasan fundamental keberadaan) dari seluruh proses pendidikan Islam.

Rasulullah SAW sendiri menegaskan misi kenabiannya dalam sabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang menjadi landasan teologis kuat bagi posisi sentral akhlak dalam pendidikan Islam:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.*” (HR. Ahmad)

Pernyataan ini mengandung makna yang sangat dalam dan fundamental. Penggunaan kata *innamā* (sesungguhnya hanya) menunjukkan pembatasan dan penegasan bahwa misi kenabian Muhammad SAW difokuskan pada penyempurnaan akhlak. Ini berarti bahwa seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, ibadah, maupun muamalah, pada hakikatnya bermuara pada pembentukan akhlak mulia. Dengan kata lain, akhlak bukan sekadar salah satu aspek ajaran Islam, melainkan tujuan akhir dari seluruh ajaran Islam itu sendiri. Implikasinya bagi pendidikan Islam sangat besar: pendidikan tidak dapat dianggap berhasil jika hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual atau terampil secara teknis, tetapi gagal membentuk akhlak mulia pada diri peserta didik.

Ibnu Miskawaih (w. 1030 M), seorang filsuf dan ahli etika Muslim terkemuka, dalam karyanya yang monumental *Tahdzīb al-Akhlaq wa Taḥhīr al-A'rāq*, memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk akhlak mulia yang menjadi fondasi kepribadian manusia. Menurutny, akhlak (*khuluq*) adalah keadaan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan rasional yang panjang, karena telah menjadi kebiasaan yang melekat. Akhlak mulia tidak muncul secara spontan atau bawaan semata, tetapi harus dibentuk melalui proses pendidikan yang berkelanjutan, meliputi pembiasaan (*ta'wīd*), latihan moral, pengendalian hawa nafsu (*mujahadah al-nafs*), serta bimbingan yang konsisten. Ibnu Miskawaih menekankan bahwa akhlak yang baik lahir dari posisi tengah (*wasathiyyah*) antara dua ekstrem, yaitu kekurangan (*tafrīt*) dan kelebihan (*ifrāt*), sebuah konsep yang dikenal dengan *The Golden Mean* (jalan tengah). Dalam konsep ini, setiap kebajikan moral diposisikan sebagai titik tengah antara dua kecenderungan ekstrem yang tercela. Keberanian (*syajā'ah*) misalnya, adalah titik

tengah antara pengecut (*jubn*) dan nekat (*tahawwur*); kedermawanan (*sakhā'*) adalah titik tengah antara kikir (*bukhl*) dan boros (*tabdhīr*); kesucian diri (*iffah*) adalah titik tengah antara rakus dan mati rasa; dan keadilan (*adālah*) adalah titik tengah antara zalim dan tunduk berlebihan. Dengan demikian, pendidikan akhlak bukan sekadar mengajarkan nilai-nilai baik, tetapi juga melatih keseimbangan dalam bersikap dan bertindak.

Al-Ghazali (1058-1111 M), yang dikenal dengan gelar *Hujjat al-Islām* (Pembela Islam), dalam karya-karyanya seperti *Mizān al-'Amal* dan *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, juga menegaskan bahwa pendidikan adalah sarana utama untuk membersihkan jiwa (*tazkiyat al-nafs*), memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baginya, ilmu yang tidak dibarengi dengan akhlak hanya akan melahirkan intelektual yang kering, angkuh, dan tidak membawa kebaikan bagi dirinya maupun masyarakat. Al-Ghazali membagi ilmu menjadi *fardhu 'ain* (wajib dipelajari setiap muslim) dan *fardhu kifayah* (wajib dipelajari sebagian muslim), namun keduanya harus diiringi dengan niat yang benar dan akhlak yang lurus. Ilmu tanpa akhlak bagaikan pohon tanpa buah, atau lampu yang menerangi jalan tetapi membakar tangan yang memegangnya. Dengan demikian, dalam perspektif Al-Ghazali, ranah afektif (pembentukan sikap dan nilai) dalam pendidikan Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan ranah kognitif semata, karena ranah afektif inilah yang menentukan apakah pengetahuan akan membawa kebaikan atau justru kebinasaan.

Pemikiran Ibnu Miskawaih dan Al-Ghazali ini memiliki keterkaitan yang erat dengan teori internalisasi nilai yang dikemukakan oleh para ahli modern. Internalisasi nilai, sebagaimana dijelaskan oleh Koesoema, adalah proses menjadikan nilai sebagai bagian integral dari kepribadian peserta didik, melalui tiga tahapan: transformasi nilai (pengenalan), transaksi nilai (dialog dan interaksi), dan transinternalisasi nilai (penghayatan dan penyatuan). Teori ini sejalan dengan pandangan Ibnu Miskawaih tentang

pembiasaan (*ta'wīd*) dan latihan jiwa (*riyāḍah al-naḥs*) sebagai metode pembentukan akhlak. Demikian pula dengan teori *social learning* Bandura yang menekankan pentingnya observasi, imitasi, dan *modeling* dalam pembentukan perilaku, sejalan dengan penekanan Al-Ghazali pada keteladanan guru (*uswah hasanah*) sebagai metode utama pendidikan akhlak.

Dalam konteks kontemporer, fokus pada akhlak sebagai tujuan utama pendidikan Islam ini menjadi sangat relevan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan penguatan Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi “beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia”. Dimensi ini, yang menjadi fondasi dari seluruh dimensi Profil Pelajar Pancasila lainnya, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep akhlak dalam Islam. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan manifestasi dari akhlak kepada Allah, sementara berakhlak mulia mencakup akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada alam lingkungan. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka, khususnya yang berfokus pada akhlak, bukanlah bentuk pertentangan antara kebijakan nasional dan nilai agama, melainkan wujud sinergi yang saling menguatkan dalam membangun karakter peserta didik yang holistik dan berkepribadian luhur.

Internalisasi akhlak dalam pendidikan, sebagaimana ditegaskan oleh para tokoh pendidikan Islam klasik dan diperkuat oleh temuan penelitian ini, bukan hanya tentang mengajarkan nilai-nilai moral secara teoritis, tetapi merupakan proses transformatif yang melibatkan seluruh potensi kemanusiaan, baik rasio, hati, maupun perilaku. Proses ini menuntut keterpaduan antara ranah kognitif (pemahaman tentang nilai), ranah afektif (penghayatan dan perasaan terhadap nilai), dan ranah psikomotorik (praktik dan pembiasaan nilai). Ketiganya harus berjalan secara simultan dan berkelanjutan. Keteladanan guru menjadi faktor utama dalam proses ini karena menyentuh ketiga ranah sekaligus: siswa memahami nilai melalui penjelasan guru (*knowing*), merasakan ketulusan nilai

melalui keteladanan guru (*feeling*), dan meniru perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari (*acting*).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan akhlak sebagai nilai inti yang menjadi fokus utama dalam mengkaji internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Fokus ini didasarkan pada pemahaman bahwa akhlak adalah tujuan tertinggi pendidikan Islam, sekaligus menjadi titik temu yang paling kuat antara pendidikan Islam dan kebijakan Kurikulum Merdeka. Dengan menjadikan akhlak sebagai fokus, penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana nilai-nilai Islami diinternalisasikan, tetapi juga menawarkan kontribusi teoretis berupa konsep integrasi akhlak dalam Kurikulum Merdeka yang kontekstual dengan karakteristik masyarakat Aceh yang religius. Konsep ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai agama di daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki kekhasan kultural dan religius masing-masing, sekaligus menjawab tantangan globalisasi tanpa kehilangan akar keislaman dan keindonesiaan.

2.1.2 Prinsip Dasar Pendidikan Islam

Prinsip dasar pendidikan Islam merupakan pondasi yang mengarahkan seluruh proses pendidikan agar tetap berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, Sunnah, serta tradisi keilmuan Islam. Prinsip ini menjadi pedoman penting dalam merumuskan tujuan, isi, metode, maupun evaluasi pendidikan agar selaras dengan hakikat penciptaan manusia sebagai hamba Allah (*'abd Allāh*) dan khalifah di muka bumi (*khalīfah fī al-ard*).

Menurut Al-Syaibany³⁷, prinsip pendidikan Islam mencakup tiga aspek utama: pertama, pendidikan harus berlandaskan pada tauhid, yaitu pengakuan bahwa Allah SWT adalah pusat segala ilmu dan tujuan akhir pendidikan; kedua, pendidikan harus mengintegrasikan seluruh potensi manusia (jasmani, rohani, akal,

³⁷ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam ...*, hlm. 33.

dan nafsu) secara seimbang; ketiga, pendidikan harus berorientasi pada pembentukan akhlak mulia.

Al-Attas ³⁸ menekankan bahwa prinsip utama pendidikan Islam adalah pembersihan jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dan penanaman adab (*ta'dīb*). Pendidikan Islam tidak boleh hanya mengutamakan transfer pengetahuan semata, melainkan harus memastikan bahwa ilmu tersebut dipahami, diamalkan, dan menghasilkan akhlak yang benar. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan tidak bernilai jika tidak melahirkan perilaku yang sesuai dengan syariat.

Langgulung ³⁹ menyatakan bahwa prinsip pendidikan Islam harus bersifat integral dan menyeluruh (*syumulīyyah*). Artinya, pendidikan tidak boleh memisahkan antara aspek duniawi dan ukhrawi, rasional dan spiritual, teori dan praktik. Pendidikan Islam menolak dikotomi ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum, karena seluruh ilmu pada dasarnya berasal dari Allah SWT.

Prinsip lain yang juga penting adalah keseimbangan (*tawazun*). Menurut Tafsir⁴⁰, pendidikan Islam harus menyeimbangkan antara pengembangan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Dengan demikian, siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, keterampilan praktis, dan spiritualitas yang mendalam.

Muhaimin⁴¹ menambahkan bahwa prinsip pendidikan Islam juga mencakup relevansi (*muwāfaqah*) dan fleksibilitas (*murūnah*). Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman, namun tetap fleksibel dalam metode dan pendekatan. Meskipun demikian, prinsip ini tidak boleh keluar dari bingkai nilai-nilai Islam yang bersifat absolut.

³⁸ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 33.

³⁹ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam ...*, hlm. 33.

⁴⁰ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam ...*, hlm. 33.

⁴¹ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 33.

Dalam konteks kurikulum nasional, prinsip pendidikan Islam sejalan dengan visi Kurikulum Merdeka yang menekankan pembentukan karakter, integrasi nilai-nilai moral, dan kebebasan inovasi. Hal ini memberi peluang bagi internalisasi prinsip Islam dalam pendidikan modern. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat⁴², prinsip pendidikan Islam harus dapat diintegrasikan dalam kurikulum nasional agar pendidikan tidak kehilangan dimensi spiritualnya.

Secara garis besar, prinsip dasar pendidikan Islam dapat dirumuskan ke dalam beberapa poin utama:

1. Prinsip Tauhid: Menjadikan Allah SWT sebagai pusat, tujuan, dan orientasi akhir dari segala aktivitas pendidikan.
2. Prinsip Keseimbangan: Mengembangkan aspek jasmani, rohani, akal, dan emosi secara harmonis.
3. Prinsip Integralitas: Menyatukan antara ilmu agama dan ilmu umum, serta menghubungkan dunia dengan akhirat.
4. Prinsip Adab: Menanamkan nilai akhlak mulia dan adab sebagai inti dari proses pendidikan.
5. Prinsip Relevansi dan Kontekstualitas: Menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman, tanpa kehilangan akar pada nilai-nilai Islam.
6. Prinsip Keberlanjutan: Pendidikan harus dipandang sebagai proses sepanjang hayat (*lifelong education*) yang tidak berhenti pada pendidikan formal.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, pendidikan Islam akan mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan global dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman.

2.1.3 Unsur-unsur Pendidikan Islam

Unsur-unsur pendidikan Islam merupakan komponen utama yang membentuk keseluruhan sistem pendidikan Islam. Unsur-unsur ini saling berkaitan dan bekerja secara terpadu untuk mencapai

⁴² R. Hidayat, "Internalisasi Nilai-nilai Islami ...", hlm. 124.

tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Tanpa unsur-unsur tersebut, proses pendidikan tidak dapat berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Menurut Al-Syaibany ⁴³, unsur-unsur pendidikan Islam terdiri dari tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, alat, dan lingkungan. Semua unsur ini harus dibingkai dalam nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis, sehingga pendidikan benar-benar berfungsi sebagai sarana pembentukan insan kamil.

1. Tujuan Pendidikan

Tujuan merupakan unsur fundamental yang menentukan arah proses pendidikan. Dalam Islam, tujuan pendidikan bukan hanya untuk mencetak manusia cerdas secara intelektual, tetapi juga beriman dan berakhlak mulia. Halstead & Halstead ⁴⁴ menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah melahirkan insan kamil, yaitu manusia yang seimbang antara dimensi spiritual, moral, intelektual, dan fisik. Dengan kata lain, pendidikan Islam memiliki orientasi duniawi sekaligus ukhrawi.

2. Pendidik

Pendidik memiliki peran sentral dalam pendidikan Islam. Menurut Muhaimin ⁴⁵, pendidik dalam Islam tidak sekadar penyampai ilmu, tetapi juga teladan akhlak. Keteladanan guru (*uswah hasanah*) merupakan bagian penting dari proses internalisasi nilai Islami kepada peserta didik. Rasulullah SAW bahkan disebut sebagai pendidik agung (*mu'allim*) yang memberikan teladan sempurna bagi umatnya.

3. Peserta Didik

⁴³ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam ...*, hlm. 33.

⁴⁴ Mark Halstead dan J. Mark Halstead, "An Islamic Concept of Education," *Comparative Education* 37, No. 1 (2010): hlm. 37, <https://doi.org/10.1080/0305006042000284510>.

⁴⁵ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam ...*, hlm. 33.

Peserta didik merupakan subjek sekaligus objek dalam proses pendidikan. Dalam Islam, anak dipandang sebagai fitrah yang suci, sebagaimana hadis Rasulullah SAW: “*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah...*” (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu mengembangkan seluruh potensi fitrah tersebut secara optimal, baik potensi spiritual, intelektual, maupun sosial⁴⁶.

4. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat materi, pengalaman belajar, dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Mudlofir⁴⁷, kurikulum pendidikan Islam harus menekankan pendidikan agama dan akhlak, seimbang antara ilmu dunia dan akhirat, serta memperhatikan perkembangan individu dan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum Islam harus adaptif, integratif, dan berbasis pada nilai-nilai wahyu.

5. Metode

Metode merupakan cara atau strategi yang digunakan dalam proses pendidikan. Al-Ghazali (1964)⁴⁸ menekankan pentingnya metode yang sesuai dengan perkembangan psikologis anak, serta menekankan pendekatan kasih sayang dan keteladanan. Pendidikan Islam dapat menggunakan berbagai metode, seperti ceramah, diskusi, praktik, kisah, maupun keteladanan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pedagogi Islami.

6. Alat Pendidikan

Alat atau media pendidikan berfungsi sebagai sarana yang membantu penyampaian ilmu. Dalam perspektif modern,

⁴⁶ M. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), hlm. 33.

⁴⁷ Ali Mudlofir, *Aplikasi Pengembangan KTSP dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 33.

⁴⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Mīzān al-‘amal* (Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1964), hlm. 33.

alat pendidikan mencakup buku, teknologi, laboratorium, hingga media digital. Namun, dalam Islam, alat pendidikan juga mencakup lingkungan keluarga, masjid, dan komunitas sebagai media internalisasi nilai Islami⁴⁹.

7. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan dalam Islam sangat luas, mencakup keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sosial budaya. Uddin et al.⁵⁰ menegaskan bahwa pendidikan Islam bersifat holistik sehingga unsur lingkungan harus menjadi bagian dari sistem pendidikan. Lingkungan yang Islami akan memperkuat nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah, sementara lingkungan yang buruk justru dapat melemahkan proses internalisasi akhlak.

Dengan demikian, seluruh unsur pendidikan Islam, tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, alat, dan lingkungan, harus bekerja secara terpadu. Jika salah satu unsur tidak berfungsi, maka proses pendidikan tidak akan berjalan optimal. Pendidikan Islam menjadi sistem yang komprehensif karena tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga sikap, keterampilan, dan akhlak.

2.1.4 Perspektif Pendidikan Islam Menurut Ulama Muslim

Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan, sosiolog, sekaligus pendidik muslim yang pemikirannya sangat berpengaruh dalam khazanah keilmuan Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Muqaddimah*. Dalam pandangannya, pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan peradaban manusia. Pendidikan dipahami sebagai sarana untuk membentuk akhlak, mengembangkan kemampuan berpikir rasional, serta mempersiapkan manusia agar mampu berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.

⁴⁹ R. Hidayat, "Internalisasi Nilai-nilai Islami ...", hlm. 125.

⁵⁰ K. Uddin, A. Alam, M. Aman, dan U. Muzahid, "Informal Islamic Education and Its Role in Human Resource Development in Society: A Theoretical Evaluation," *IJUC Studies*, No. 3 (Desember 2006): hlm. 83.

Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan ke dalam dua kelompok utama, yaitu ilmu naqliyah dan ilmu aqliyah. Ilmu naqliyah mencakup ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu dan tradisi keagamaan, seperti tafsir, hadis, fikih, dan berbagai disiplin ilmu agama lainnya. Sementara itu, ilmu aqliyah meliputi ilmu-ilmu rasional yang diperoleh melalui akal dan pengalaman manusia, seperti filsafat, matematika, logika, ilmu alam, dan kedokteran. Menurut Ibnu Khaldun, kedua jenis ilmu ini harus diajarkan secara seimbang, karena pendidikan tidak boleh hanya menekankan aspek keagamaan semata, tetapi juga harus membekali peserta didik dengan ilmu-ilmu duniawi yang menunjang kehidupan dan kemajuan peradaban.

Selain menekankan keseimbangan ilmu, Ibnu Khaldun juga mengkritik praktik pendidikan pada masanya yang cenderung bersifat keras, menekan, dan mengandalkan hukuman. Ia menegaskan bahwa metode tarbiyah yang efektif harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kondisi psikologis dan tahap perkembangan peserta didik. Pendidikan yang terlalu represif, menurutnya, justru dapat mematikan kreativitas, melemahkan kepribadian, dan menghambat perkembangan potensi anak.

Pandangan Ibnu Khaldun tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan konsep Kurikulum Merdeka, yang menolak pendekatan pendidikan yang kaku dan otoriter. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran yang humanis, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik, sehingga mampu menumbuhkan kreativitas, kemandirian, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan hidup. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun dapat dipandang sebagai landasan filosofis yang selaras dengan upaya pembaruan pendidikan modern yang berorientasi pada pengembangan manusia secara utuh⁵¹

Al-Ghazali, yang dikenal dengan gelar Hujjatul Islam, memiliki pandangan yang sangat mendalam tentang pendidikan dan peranannya dalam kehidupan manusia. Menurut Al-Ghazali,

⁵¹ A. Hadi dan S. Hanani, "Analisis Pemikiran Ibn Khaldun ...", hlm. 155.

pendidikan merupakan sarana utama untuk membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi harus mampu melahirkan manusia yang berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki kesadaran dan kedalaman spiritual yang tinggi.

Dalam karya monumentalnya *Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang berkembang secara utuh baik dari sisi intelektual, moral, maupun spiritual. Ia memandang bahwa kesempurnaan manusia hanya dapat dicapai apabila ilmu pengetahuan selaras dengan pengamalan akhlak dan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, Al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan ke dalam dua kategori utama. Pertama, ilmu fardhu 'ain, yaitu ilmu-ilmu keagamaan yang wajib dipelajari oleh setiap muslim sebagai dasar keimanan dan ibadah. Kedua, ilmu fardhu kifayah, yaitu ilmu-ilmu umum yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, seperti kedokteran, pertanian, matematika, dan berbagai ilmu terapan lainnya.

Al-Ghazali juga menekankan peran strategis guru dalam proses pendidikan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi harus menjadi teladan (*uswah*) bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, dan akhlak. Kepribadian guru, menurut Al-Ghazali, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki integritas moral, keikhlasan, dan tanggung jawab spiritual dalam menjalankan tugasnya.

Dalam aspek metodologi pendidikan, Al-Ghazali menekankan pentingnya pembiasaan yang baik, pengawasan yang bijaksana, serta pendekatan yang dilandasi kasih sayang. Pendidikan yang dilakukan dengan kelembutan dan keteladanan diyakini lebih efektif dalam membentuk kepribadian anak dibandingkan dengan pendekatan yang keras dan penuh paksaan. Konsep pendidikan Al-Ghazali ini sangat relevan dengan pendidikan karakter Islami, karena tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga

menempatkan pembentukan akhlak dan spiritualitas sebagai inti dari keseluruhan proses pendidikan.⁵²

Ibnu Sina, yang dikenal di dunia Barat dengan nama Avicenna, merupakan seorang filsuf, dokter, dan ilmuwan muslim besar yang memberikan kontribusi penting dalam pemikiran pendidikan. Gagasan pendidikannya tertuang dalam karya-karyanya seperti Kitab al-Syifa dan al-Najat, di mana ia menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat holistik dan menyeluruh. Menurut Ibnu Sina, pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi manusia secara seimbang, mencakup aspek jasmani, akal, dan ruhani, sehingga peserta didik tumbuh sebagai pribadi yang sehat secara fisik, cerdas secara intelektual, dan matang secara spiritual.

Ibnu Sina memandang bahwa proses pendidikan harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan usia peserta didik. Pada masa kanak-kanak, pendidikan diarahkan pada penguatan jasmani dan pembentukan akhlak dasar, karena fase ini merupakan fondasi utama bagi perkembangan kepribadian anak. Pada tahap berikutnya, ketika anak memasuki usia sekolah, pendidikan difokuskan pada penguasaan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, mempelajari Al-Quran, serta pengenalan ilmu-ilmu dasar yang mendukung perkembangan intelektual. Selanjutnya, pada masa remaja hingga dewasa awal, pendidikan diarahkan pada pendalaman ilmu pengetahuan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik, sehingga potensi individu dapat berkembang secara optimal dan produktif.

Selain menekankan aspek intelektual dan spiritual, Ibnu Sina juga memberikan perhatian besar pada pengembangan keterampilan praktis. Ia memandang bahwa pendidikan harus mencakup pembelajaran seni, olahraga, dan berbagai keterampilan hidup yang berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan menurut Ibnu Sina tidak semata-mata dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai upaya sistematis untuk

⁵² Nur Hamim, "Pendidikan Akhlak ...", hlm. 393

mengembangkan seluruh potensi anak secara utuh dan seimbang, agar mampu berperan aktif dan bermanfaat dalam kehidupan sosial.⁵³

Syed Muhammad Naquib Al-Attas merupakan pemikir pendidikan Islam kontemporer yang sangat berpengaruh dalam pengembangan konsep pendidikan Islam modern. Dalam karyanya *The Concept of Education in Islam*, Al-Attas menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah ta'dib, yaitu proses penanaman adab yang benar pada diri peserta didik. Menurutnya, esensi pendidikan tidak terletak semata-mata pada transfer ilmu pengetahuan, melainkan pada pembentukan kepribadian yang beradab, memiliki etika, dan berlandaskan nilai-nilai Islami. Adab dipahami sebagai pengenalan dan pengakuan terhadap tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan wujud, sehingga manusia mampu bersikap adil terhadap diri, masyarakat, dan Tuhannya.

Al-Attas secara tegas menolak konsep sekularisasi pendidikan yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ia berpandangan bahwa seluruh ilmu pada hakikatnya bersumber dari Allah dan karena itu harus dipahami dalam kerangka tauhid. Pemisahan ilmu hanya akan melahirkan krisis adab dan kekeliruan dalam memahami hakikat pengetahuan. Pemikiran ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan modern yang kerap terjebak dalam paradigma materialistik dan pragmatis, sehingga mengabaikan dimensi spiritual dan moral.

Dengan demikian, pendidikan Islam modern menurut Al-Attas harus diarahkan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga beradab dan berkepribadian Islami. Pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia yang berilmu, bermoral, dan memiliki tanggung jawab peradaban, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat tanpa kehilangan identitas keislamannya.⁵⁴

⁵³ F. Roji dkk., "Concept of Islamic Education ...", hlm. 323.

⁵⁴ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 33.

Ibnu Miskawaih dikenal sebagai seorang filsuf dan ahli etika Islam yang menempatkan pendidikan akhlak sebagai inti dari seluruh proses pendidikan. Dalam karyanya *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq*, ia menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah pembentukan akhlak mulia (*al-akhlaq al-karimah*) sebagai fondasi kepribadian manusia. Akhlak, menurut Ibnu Miskawaih, tidak muncul secara spontan atau bawaan semata, tetapi harus dibentuk melalui proses pendidikan yang berkelanjutan, meliputi pembiasaan (*ta'wid*), latihan moral, pengendalian hawa nafsu, serta bimbingan yang konsisten.

Lebih lanjut, Ibnu Miskawaih menjelaskan bahwa pendidikan akhlak merupakan perpaduan antara potensi dasar yang dimiliki manusia dan pengaruh lingkungan yang membentuknya. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat, harus diciptakan secara kondusif agar mendukung perkembangan moral peserta didik. Ia menekankan pentingnya suasana yang sarat dengan nilai kebaikan, kedisiplinan, dan keteladanan, karena karakter anak sangat dipengaruhi oleh apa yang ia lihat, dengar, dan alami dalam kehidupan sehari-hari.

Ibnu Miskawaih juga menaruh perhatian besar pada peran guru dalam proses pendidikan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai figur teladan yang mencerminkan nilai-nilai akhlak dalam sikap, ucapan, dan perilaku. Keteladanan guru menjadi sarana pendidikan akhlak yang paling efektif, karena peserta didik cenderung meniru perilaku pendidiknya. Konsep pendidikan akhlak Ibnu Miskawaih ini memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan modern, termasuk dalam implementasi Kurikulum Merdeka, yang menekankan pembentukan karakter siswa melalui integrasi nilai-nilai Islami secara menyeluruh dalam proses pembelajaran dan budaya sekolah⁵⁵.

⁵⁵ N. Rahmaniyah, *Etika Pendidikan Islam Perspektif Ibnu Miskawaih* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 33.

Hassan Langgulung menegaskan bahwa pendidikan Islam dalam konteks modern tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses transmisi ilmu agama, tetapi harus dipandang sebagai upaya menyeluruh untuk membentuk manusia seutuhnya. Manusia yang dimaksud adalah individu yang beriman, berilmu, dan mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan nyata secara bertanggung jawab. Menurut Langgulung, pendidikan Islam harus mengembangkan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga peserta didik tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan kuat secara moral serta spiritual. Pendidikan juga harus mampu menyatukan dimensi duniawi dan ukhrawi agar manusia tidak terjebak pada orientasi material semata, tetapi tetap memiliki tujuan hidup yang transendental.

Lebih lanjut, Langgulung menekankan pentingnya integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Ia mengkritik dikotomi pendidikan yang memisahkan kedua aspek tersebut, karena menurutnya pemisahan ini berpotensi melahirkan generasi yang tidak utuh: cerdas secara intelektual namun miskin nilai spiritual, atau sebaliknya, memiliki semangat keagamaan tetapi kurang kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai wahyu, sehingga peserta didik memiliki daya saing global tanpa kehilangan identitas keislamannya. Pemikiran Langgulung ini sangat relevan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan guru untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, keterampilan abad ke-21, serta nilai-nilai luhur, termasuk nilai-nilai Islami, dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki fondasi moral yang kokoh⁵⁶

⁵⁶ Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam ...*, hlm. 33.

Muhaimin dalam karyanya Paradigma Pendidikan Islam menegaskan pentingnya rekonstruksi kurikulum pendidikan Islam agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman. Ia berpandangan bahwa pendidikan Islam tidak boleh terjebak dalam pola lama yang bersifat statis dan normatif semata, melainkan harus terus berinovasi sehingga mampu merespons dinamika global, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Meskipun demikian, Muhaimin menekankan bahwa inovasi kurikulum tersebut tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai syariat Islam, karena nilai inilah yang menjadi fondasi utama dan identitas pendidikan Islam. Dengan demikian, pembaruan kurikulum harus berjalan seimbang antara tuntutan modernitas dan prinsip-prinsip keislaman.

Lebih lanjut, Muhaimin menegaskan bahwa kurikulum Islami harus dirancang secara holistik dan integratif, mencakup pengembangan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai secara utuh. Kurikulum pendidikan Islam tidak cukup hanya memuat mata pelajaran agama, tetapi harus mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam seluruh mata pelajaran dan aktivitas pendidikan. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, Muhaimin menekankan bahwa rekonstruksi kurikulum harus mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat, sehingga pendidikan Islam benar-benar berkontribusi nyata dalam membangun peradaban dan kesejahteraan bangsa.

Dalam konteks Aceh, pemikiran Muhaimin memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kebijakan Qanun Pendidikan yang menempatkan nilai-nilai Islami sebagai dasar pengembangan kurikulum daerah. Integrasi nilai Islam dalam Kurikulum Merdeka di Aceh menunjukkan adanya kesinambungan antara gagasan teoretis Muhaimin dan implementasi kebijakan pendidikan di tingkat lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa penguatan Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami bukan hanya kebutuhan normatif,

tetapi juga merupakan strategi strategis untuk membentuk generasi yang berakarakter, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri keislamannya.⁵⁷

Pemikiran para tokoh pendidikan Islam, baik klasik maupun modern, menunjukkan bahwa pendidikan Islam secara konsisten menekankan tiga aspek utama, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan akhlak, dan pengembangan keterampilan hidup. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu naqli dan ilmu aqli agar manusia mampu memahami ajaran agama sekaligus realitas sosial. Al-Ghazali menitikberatkan pendidikan pada proses penyucian jiwa dan pembentukan akhlak mulia sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Sina menekankan pentingnya pendidikan yang bertahap dan sesuai dengan perkembangan usia serta potensi peserta didik. Ibnu Miskawaih memusatkan perhatian pada pendidikan akhlak sebagai inti pembentukan kepribadian manusia, sementara Syed Muhammad Naquib Al-Attas menegaskan konsep ta'dib sebagai esensi pendidikan Islam, yaitu penanaman adab yang benar dalam seluruh aspek kehidupan.

Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, khususnya pada implementasi Kurikulum Merdeka, pemikiran para tokoh tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila memberikan ruang yang luas untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islami sebagaimana telah digagas oleh para ulama klasik dan pemikir modern. Integrasi ini memungkinkan proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, spiritualitas, dan keterampilan hidup peserta didik. Dengan demikian, penerapan Kurikulum Merdeka yang diperkaya oleh nilai-nilai pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi Aceh yang unggul secara intelektual, kokoh secara spiritual, dan berakhlak

⁵⁷ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam ...*, hlm. 33.

mulia, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan peradaban.

2.1.5 Pendidikan Islam dan Tantangan Era Globalisasi

Pendidikan Islam di abad ke - 21 menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan derasnya arus globalisasi. Globalisasi ditandai dengan keterhubungan antarbangsa tanpa batas, perkembangan teknologi informasi, serta dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang saling memengaruhi⁵⁸. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dituntut untuk tidak hanya mempertahankan Nilai-nilai tradisionalnya, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman agar tetap relevan dan mampu melahirkan generasi muslim yang berdaya saing sekaligus berakhlak mulia.

Globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan Islam, baik dalam bentuk peluang maupun tantangan. Di satu sisi, globalisasi membuka akses yang sangat luas terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Melalui kemajuan teknologi digital dan komunikasi global, umat Islam memiliki kesempatan besar untuk belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri secara lebih cepat dan efisien. Pendidikan Islam dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar global, memperluas jejaring keilmuan, serta mengadopsi metode pembelajaran modern yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Namun, di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan berbagai ancaman serius bagi pendidikan Islam. Arus budaya asing yang masuk tanpa filter berpotensi melemahkan identitas keislaman, mendorong sekularisasi pendidikan, serta menumbuhkan gaya hidup konsumtif dan materialistik. Nilai-nilai spiritual dan moral Islam dapat terpinggirkan apabila pendidikan lebih menekankan aspek keterampilan teknis dan pencapaian material semata. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan untuk menjaga

⁵⁸ H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 33.

keseimbangan antara keterbukaan terhadap kemajuan global dan pelestarian nilai-nilai keislaman sebagai fondasi pembentukan karakter.

Dalam ranah pendidikan formal, globalisasi juga menciptakan persaingan yang semakin ketat. Peserta didik dituntut tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga memiliki kompetensi abad ke -21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, literasi digital, serta komunikasi lintas budaya. Apabila pendidikan Islam tidak mampu merespons tuntutan tersebut secara adaptif dan inovatif, maka berisiko tertinggal dalam mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing global. Oleh karena itu, pendidikan Islam dituntut untuk melakukan pembaruan kurikulum dan strategi pembelajaran agar mampu melahirkan generasi yang kompeten secara intelektual, kuat secara spiritual, dan siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas keislamannya.⁵⁹

Krisis identitas dan sekularisasi pendidikan merupakan salah satu tantangan paling serius yang dihadapi pendidikan Islam di era globalisasi. Arus budaya global yang masif, terutama melalui media sosial, film, musik, dan berbagai platform hiburan digital, telah membentuk cara berpikir, gaya hidup, serta orientasi nilai generasi muda muslim. Dalam banyak kasus, generasi muda justru lebih akrab dengan simbol, tokoh, dan gaya hidup Barat dibandingkan dengan tradisi Islam maupun budaya lokalnya sendiri. Kondisi ini secara perlahan melahirkan krisis identitas, di mana peserta didik mengalami kebingungan dalam menentukan jati diri, nilai hidup, serta orientasi moral yang seharusnya menjadi pegangan.

Di sisi lain, sekularisasi pendidikan semakin memperparah persoalan tersebut. Sistem pendidikan yang berkembang cenderung memisahkan secara tegas antara ilmu agama dan ilmu umum, seolah keduanya berada dalam dua wilayah yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Padahal, para pemikir Islam klasik seperti Al-Ghazali,

⁵⁹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi ...*, hlm. 33.

Ibnu Khaldun, dan Ibnu Sina justru menegaskan pentingnya integrasi antara ilmu naqli dan ilmu aqli sebagai fondasi pembentukan manusia seutuhnya. Pemisahan ini berdampak pada lahirnya generasi yang unggul secara intelektual dan teknologis, tetapi miskin spiritualitas dan nilai akhlak, atau sebaliknya, generasi yang taat secara ritual namun kurang memiliki kecakapan intelektual dan keterampilan untuk menghadapi tantangan kehidupan modern.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam perlu melakukan reposisi dan revitalisasi peran kurikulum serta praksis pembelajaran. Pendidikan Islam tidak cukup hanya menanamkan pengetahuan keagamaan secara normatif, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh bidang ilmu dan kehidupan. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berperan strategis dalam membentuk generasi yang memiliki identitas keislaman yang kuat, berakhlak mulia, serta mampu beradaptasi dan berkontribusi secara positif di tengah dinamika global tanpa kehilangan jati dirinya.

Pendidikan Islam memiliki potensi yang sangat besar untuk berperan sebagai filter sekaligus penyeimbang terhadap dampak negatif globalisasi. Nilai-nilai Islami seperti tauhid, akhlak mulia, dan konsep insan kamil dapat dijadikan fondasi utama dalam membentuk generasi muslim yang memiliki identitas keislaman yang kokoh, tetapi tetap terbuka dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan landasan tauhid, peserta didik diarahkan untuk memahami bahwa seluruh ilmu pengetahuan dan aktivitas kehidupan berada dalam kerangka pengabdian kepada Allah, sehingga kemajuan teknologi dan arus global tidak menjauhkan mereka dari nilai-nilai spiritual dan moral.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pendidikan Islam perlu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman secara menyeluruh dalam seluruh aspek kurikulum dan praktik pembelajaran. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum menjadi keharusan agar peserta didik tidak memandang keduanya sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Penguatan

pendidikan karakter Islami juga perlu dilakukan secara konsisten melalui pembiasaan akhlak mulia, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Di samping itu, penguasaan teknologi digital menjadi aspek penting agar peserta didik tidak sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi mampu berperan sebagai produsen pengetahuan yang kreatif dan produktif dalam era digital. Pendidikan Islam juga perlu mengembangkan wawasan multikultural yang mengajarkan toleransi, dialog, dan sikap terbuka terhadap perbedaan, tanpa kehilangan prinsip dan identitas keislaman yang menjadi pijakan utama.⁶⁰

Konteks pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di Aceh, menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang khas dalam menghadapi era globalisasi. Aceh sebagai daerah yang memiliki status keistimewaan dalam penerapan syariat Islam mempunyai modal budaya dan religius yang kuat sebagai fondasi pengembangan pendidikan. Keberadaan Qanun Aceh tentang pendidikan menegaskan pentingnya penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai-nilai Islami yang selaras dengan sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam menjaga identitas keislaman masyarakat Aceh, sekaligus menyesuaikan diri dengan arah kebijakan nasional dan tuntutan global yang terus berkembang.

Namun demikian, lembaga pendidikan Islam di Aceh maupun di Indonesia secara umum masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengimplementasikan pendidikan yang ideal di tengah arus globalisasi. Keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas dan pemerataan kompetensi guru yang belum optimal, serta masih minimnya kurikulum yang benar-benar mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islami dengan kompetensi abad ke-21 menjadi tantangan nyata. Kondisi ini berimplikasi pada belum maksimalnya peran

⁶⁰ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 33.

sekolah Islam dalam menyiapkan generasi yang mampu bersaing secara global. Padahal, untuk menghadapi globalisasi, pendidikan Islam dituntut melahirkan lulusan yang tidak hanya religius dan berakhlak mulia, tetapi juga inovatif, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki daya saing dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman.⁶¹.

Namun demikian, lembaga pendidikan Islam di Aceh maupun Indonesia pada umumnya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan fasilitas, kualitas guru yang belum merata, serta minimnya kurikulum yang benar, benar mengintegrasikan nilai Islami dengan kompetensi abad ke - 21. Padahal, untuk menghadapi globalisasi, sekolah Islam harus melahirkan lulusan yang tidak hanya religius tetapi juga inovatif, adaptif, dan kompetitif.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pendidikan Islam perlu merumuskan dan menerapkan strategi yang komprehensif agar tetap relevan sekaligus mampu menjaga nilai dan identitas keislaman. Salah satu strategi utama yang dapat dilakukan adalah rekonstruksi kurikulum pendidikan Islam dengan menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum serta relevansinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum Islam tidak lagi cukup hanya berorientasi pada penguasaan materi keagamaan secara tekstual, tetapi harus mampu membekali peserta didik dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai wahyu sebagai landasan utama.

Strategi berikutnya adalah peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru. Guru pendidikan Islam dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang selaras dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, pelatihan berbasis teknologi digital, penguatan pedagogi Islami, serta pemahaman terhadap pengembangan Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami menjadi sangat penting. Guru yang adaptif terhadap teknologi dan inovasi pembelajaran akan lebih mampu

⁶¹ Mujiburrahman, "Pendidikan Islami di Aceh ...," hlm. 50.

menanamkan nilai-nilai Islam secara kontekstual dan menarik bagi generasi muda.

Selain itu, pemanfaatan media digital Islami perlu dioptimalkan sebagai sarana dakwah dan pembelajaran. Media sosial, platform pembelajaran daring, serta konten digital Islami dapat digunakan secara produktif untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman, memperkaya wawasan keagamaan, dan membangun literasi digital peserta didik. Dengan cara ini, generasi muda muslim tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga produsen pengetahuan dan konten positif yang mencerminkan nilai-nilai Islam.

Strategi lainnya adalah penguatan kolaborasi global antar lembaga pendidikan Islam. Kerja sama internasional melalui pertukaran pelajar, seminar akademik, riset bersama, dan publikasi ilmiah dapat memperluas wawasan global peserta didik dan pendidik, sekaligus memperkuat posisi pendidikan Islam di kancah internasional. Kolaborasi ini memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengembangan pendidikan Islam yang berdaya saing global.

Dengan demikian, tantangan globalisasi bagi pendidikan Islam bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan dihadapi dengan strategi yang cerdas dan terarah. Pendidikan Islam dituntut untuk mampu menjaga nilai dan identitas keislaman sambil beradaptasi dengan dinamika global. Melalui integrasi ilmu agama dan ilmu umum, penguatan pendidikan karakter Islami, penguasaan teknologi digital, serta pembangunan jejaring kolaborasi internasional, pendidikan Islam dapat tetap relevan dan berkontribusi sebagai solusi atas berbagai krisis moral, identitas, dan kemanusiaan di era globalisasi.⁶²

⁶² Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam ..., hlm. 33.

2.2 Konsep Dasar Kurikulum

Kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan, karena ia menjadi arah, pedoman, sekaligus instrumen dalam mencapai tujuan pendidikan. Hakikat kurikulum tidak hanya sebatas daftar mata pelajaran yang harus diajarkan, tetapi merupakan seperangkat rencana, pengalaman belajar, dan Nilai-nilai yang secara sadar dirancang untuk membantu peserta didik berkembang secara utuh dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik⁶³. Dengan kata lain, kurikulum adalah jantung pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem pembelajaran.

2.2.1 Pengertian Konsep Dasar Kurikulum

Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin *currere* yang berarti “lapangan perlombaan” yang memiliki garis start dan finish. Dalam konteks pendidikan, kurikulum diartikan sebagai lintasan atau jalan yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan akhir pendidikan⁶⁴. Pemaknaan ini mengandung makna bahwa pendidikan adalah suatu proses berkesinambungan yang menuntut adanya perencanaan sistematis.

Menurut Undang, Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Definisi ini menegaskan bahwa kurikulum bukan hanya kumpulan materi, tetapi sebuah sistem yang mencakup tujuan, isi, metode, serta evaluasi untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Ornstein dan Hunkins menambahkan bahwa hakikat kurikulum dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu kurikulum sebagai *produk* dan kurikulum sebagai *proses*. Sebagai produk, kurikulum

⁶³ Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (Chicago: University of Chicago Press, 2013), hlm. 33.

⁶⁴ S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum* (Bandung: Bumi Aksara, 2008), hlm. 33.

berupa dokumen tertulis yang berisi tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Sedangkan sebagai proses, kurikulum adalah interaksi nyata antara guru, peserta didik, dan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Konsep kurikulum modern menekankan bahwa hakikat kurikulum tidak lagi dipahami semata sebagai dokumen tertulis atau rencana pembelajaran, tetapi juga sebagai *pengalaman belajar* yang dialami peserta didik⁶⁵. Dengan demikian, kurikulum harus memberi ruang bagi peserta didik untuk mengalami, mengeksplorasi, dan menginternalisasi nilai serta pengetahuan melalui aktivitas nyata.

Hamalik⁶⁶ menyatakan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang dirancang, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa hakikat kurikulum tidak terbatas pada materi formal yang tercantum dalam silabus, melainkan juga kegiatan ekstrakurikuler, interaksi sosial, budaya sekolah, hingga pembiasaan religius yang dialami peserta didik sehari-hari.

Dalam perspektif filosofis, kurikulum merupakan sarana untuk mentransformasikan nilai dan budaya suatu bangsa. Tilaar⁶⁷ menegaskan bahwa kurikulum merupakan manifestasi ideologi, filsafat, dan sistem nilai yang dianut suatu masyarakat. Dengan demikian, kurikulum bukanlah instrumen netral, melainkan representasi kepentingan sosial, politik, dan budaya yang mendasarinya.

Kurikulum pendidikan Islam misalnya, tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga

⁶⁵ Murray Print, *Curriculum Development and Design* (St. Leonards: Allen & Unwin, 1993), hlm. 33.

⁶⁶ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 33.

⁶⁷ H. A. R. Tilaar, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 33.

menanamkan Nilai-nilai Islami seperti tauhid, akhlak mulia, dan ibadah. Hal ini sesuai dengan pandangan Al- Attas⁶⁸ yang menyebut bahwa hakikat kurikulum Islam adalah upaya menanamkan *adab* sebagai inti dari pendidikan, yakni penempatan segala sesuatu pada tempatnya yang benar berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah.

D. Kurikulum dalam Perspektif Nasional dan Global

Dalam konteks Indonesia, kurikulum memiliki hakikat ganda: di satu sisi sebagai pedoman pencapaian tujuan pendidikan nasional, dan di sisi lain sebagai sarana pembentukan karakter bangsa. Hal ini tercermin dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang menekankan pentingnya pengembangan iman, takwa, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, serta keterampilan peserta didik.

Secara global, kurikulum juga dipahami sebagai instrumen untuk mempersiapkan generasi menghadapi tantangan abad ke - 21. Tomlinson ⁶⁹ menekankan bahwa hakikat kurikulum di era globalisasi harus adaptif, diferensiatif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian akademik, melainkan juga literasi digital, keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah.

E. Hakikat Kurikulum dalam Islam

Dalam perspektif Islam, kurikulum memiliki hakikat yang lebih luas, yakni sebagai wahana untuk membentuk insan kamil (manusia sempurna) yang seimbang antara aspek duniawi dan ukhrawi. Al- Syaibany ⁷⁰ menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus mencakup aspek jasmani, akal, dan rohani; mengintegrasikan kebutuhan individu dan masyarakat; serta menyeimbangkan tujuan dunia dan akhirat.

⁶⁸ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 33.

⁶⁹ Carol A. Tomlinson, *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners* (Alexandria: ASCD, 2014), hlm. 33.

⁷⁰ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam ...*, hlm. 33.

Dengan demikian, hakikat kurikulum dalam pendidikan Islam tidak hanya sebagai instrumen pembelajaran, melainkan juga sebagai sarana pembinaan iman, ibadah, akhlak, serta keterampilan hidup. Ini sejalan dengan pandangan Muhaimin bahwa kurikulum pendidikan Islam berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi khalifah Allah di bumi sekaligus hamba Allah yang bertakwa.

2.2.2 Komponen Pengembangan Kurikulum

Dalam kajian pendidikan, kurikulum dipahami sebagai suatu sistem yang memiliki komponen, komponen yang saling berkaitan dan berfungsi secara integral untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa memahami komponen, komponen utama kurikulum, proses pendidikan akan berjalan tanpa arah yang jelas, bahkan dapat kehilangan relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu, para ahli kurikulum seperti Tyler ⁷¹, Print ⁷² menekankan bahwa pengembangan kurikulum harus selalu melibatkan komponen dasar yang menjadi fondasi perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum.

1. Tujuan Pendidikan

Tujuan merupakan komponen pertama dan paling fundamental dalam pengembangan kurikulum. Tujuan menentukan arah seluruh kegiatan pendidikan, baik dalam penyusunan materi, pemilihan metode, maupun evaluasi hasil belajar. Menurut Tyler⁷³, tujuan kurikulum harus dirumuskan secara jelas karena menjadi pedoman utama bagi guru dalam merancang pengalaman belajar siswa.

Dalam konteks pendidikan nasional, tujuan pendidikan telah diatur dalam Undang, Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu

⁷¹ Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* ..., hlm. 33.

⁷² Murray Print, *Curriculum Development and Design* ..., hlm. 33.

⁷³ Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* ..., hlm. 33.

“mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.” Tujuan ini tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga mencakup spiritual, sosial, dan moral.

Sedangkan dalam pendidikan Islam, tujuan kurikulum merujuk pada pembentukan insan kamil yang mampu menjalankan fungsi kekhalifahan di bumi, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Al- Attas⁷⁴ menegaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan mengintegrasikan ilmu dengan Nilai-nilai adab sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral dan berjiwa spiritual.

2. Isi atau Materi Pembelajaran

Isi kurikulum merupakan kumpulan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Materi pembelajaran harus disusun secara sistematis dan relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun tuntutan perkembangan masyarakat.

Nasution⁷⁵ menyebutkan bahwa isi kurikulum hendaknya memenuhi prinsip relevansi (sesuai kebutuhan siswa dan masyarakat), kontinuitas (berkesinambungan), fleksibilitas (dapat disesuaikan dengan kondisi), serta efektivitas (mampu mencapai tujuan). Dalam Kurikulum Merdeka, isi materi lebih menekankan pada kompetensi esensial yang dianggap penting untuk masa depan peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter melalui proyek *Profil Pelajar Pancasila*.

⁷⁴ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 33.

⁷⁵ S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum ...*, hlm. 33.

Dalam pendidikan Islam, isi kurikulum tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan umum, tetapi juga mencakup ajaran Al-Qur'an, Hadis, Fiqh, Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Menurut Al-Syaibany⁷⁶, pengembangan isi kurikulum Islam harus mempertimbangkan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia, sehingga peserta didik mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya.

3. Strategi atau Metode Pembelajaran

Strategi pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan isi kurikulum kepada peserta didik. Pemilihan metode pembelajaran harus mempertimbangkan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, serta konteks sosial budaya.

Ornstein & Hunkins⁷⁷ menekankan pentingnya penggunaan metode yang variatif, mulai dari ceramah, diskusi, simulasi, hingga pembelajaran berbasis projek dan teknologi. Dalam Kurikulum Merdeka, strategi pembelajaran didesain agar berpusat pada peserta didik (student, centered learning), sehingga siswa memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya.

Dalam perspektif Islam, metode pembelajaran tidak hanya menekankan transfer ilmu, tetapi juga keteladanan (*uswah hasanah*) dan pembiasaan (*ta'dib*). Rasulullah SAW sendiri menjadi teladan utama dalam pendidikan, sehingga metode keteladanan guru menjadi unsur penting dalam kurikulum Islami⁷⁸.

4. Organisasi Kurikulum

⁷⁶ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam ...*, hlm. 33.

⁷⁷ Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues* (7th ed.). New York: Pearson.

⁷⁸ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 33.

Organisasi kurikulum menyangkut bagaimana isi dan pengalaman belajar disusun, diatur, dan diintegrasikan sehingga dapat disampaikan secara efektif. Tyler⁷⁹ menekankan prinsip kontinuitas, urutan (sequence), dan integrasi dalam organisasi kurikulum.

Ada beberapa bentuk organisasi kurikulum, antara lain:

- 1) Subject, Centered Curriculum – kurikulum berfokus pada mata pelajaran yang terpisah, pisah.
- 2) Learner, Centered Curriculum – kurikulum dirancang berdasarkan kebutuhan dan minat siswa.
- 3) Problem, Centered Curriculum – kurikulum berfokus pada pemecahan masalah nyata dalam kehidupan.

Dalam Kurikulum Merdeka, organisasi kurikulum lebih fleksibel dan adaptif dengan memberi ruang pada sekolah untuk menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). Hal ini memungkinkan adanya integrasi Nilai-nilai lokal dan agama dalam proses pembelajaran, termasuk di Aceh yang memiliki kekhususan dalam penerapan Qanun Pendidikan.

5. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi merupakan komponen penting dalam kurikulum karena berfungsi untuk menilai sejauh mana tujuan pendidikan tercapai. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil belajar siswa, tetapi juga mencakup proses pembelajaran, efektivitas guru, dan relevansi kurikulum itu sendiri.

Stufflebeam⁸⁰ melalui *CIPP Model* menekankan bahwa evaluasi mencakup empat aspek: Context, Input, Process, dan Product. Evaluasi kurikulum tidak boleh hanya bersifat

⁷⁹ Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* ..., hlm. 33.

⁸⁰ Daniel L. Stufflebeam, "The CIPP Model for Evaluation ...", hlm. 32.

sumatif (hasil akhir), tetapi juga formatif (proses) sehingga dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan Islam, evaluasi tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana Nilai-nilai Islami seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan akhlak mulia tercermin dalam perilaku peserta didik ⁸¹.

Dengan demikian, pengembangan kurikulum setidaknya melibatkan lima komponen utama, yaitu: (1) tujuan pendidikan, (2) isi atau materi pembelajaran, (3) strategi atau metode pembelajaran, (4) organisasi kurikulum, dan (5) evaluasi kurikulum. Kelima komponen ini saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks pendidikan Islam, kelima komponen tersebut harus senantiasa berlandaskan pada Nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah agar dapat membentuk generasi muslim yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Gambar 2.1 : Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum



⁸¹ Nur Hamim, "Pendidikan Akhlak ...", hlm. 394

Kurikulum menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian ini menegaskan bahwa kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai pedoman strategis yang mengarahkan seluruh proses pendidikan agar berjalan secara sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, yang dilakukan untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman, karakteristik dan kebutuhan peserta didik, serta tuntutan lingkungan sosial, budaya, dan global. Proses ini menuntut adanya kemampuan adaptasi dan inovasi agar kurikulum tetap relevan, kontekstual, dan mampu menjawab tantangan perubahan yang terus berlangsung dalam dunia pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, kurikulum memiliki beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai, isi atau materi pembelajaran, strategi atau proses penyampaian pembelajaran, serta evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan tersebut. Keempat komponen ini harus dirancang secara terpadu dan konsisten agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan bermakna bagi peserta didik.

Pengembangan kurikulum juga harus berpijak pada berbagai landasan yang kuat, meliputi landasan filosofis yang menentukan arah dan nilai dasar pendidikan, landasan psikologis yang memperhatikan perkembangan dan karakteristik peserta didik, landasan historis yang mempertimbangkan pengalaman dan perjalanan pendidikan di masa lalu, landasan sosiologis yang menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memastikan kurikulum relevan dengan perkembangan IPTEK. Landasan-landasan ini berfungsi sebagai pijakan konseptual agar kurikulum

tidak kehilangan arah dan tetap kontekstual dengan realitas pendidikan.

Prosedur pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan, perancangan atau desain kurikulum, implementasi di lapangan, monitoring pelaksanaan, evaluasi hasil, hingga tahap revisi dan pemeliharaan kurikulum. Tahapan ini menunjukkan bahwa kurikulum bukan produk final yang bersifat statis, melainkan terus dikaji dan disempurnakan sesuai dengan hasil evaluasi dan dinamika kebutuhan pendidikan.

Dalam konteks pembelajaran, strategi pembelajaran merupakan bagian penting dari implementasi kurikulum. Strategi ini mencakup berbagai pendekatan, seperti *exposition* yang menekankan penyampaian materi secara langsung, *discovery learning* yang mendorong peserta didik menemukan pengetahuan secara mandiri, *rote learning* yang berfokus pada penguatan ingatan, *experiential learning* yang menekankan pengalaman langsung, *group learning* yang mengembangkan kerja sama dan interaksi sosial, serta *individual learning* yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan potensi individu peserta didik. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum dan pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

Konsep dasar pengembangan kurikulum merupakan landasan penting dalam sistem pendidikan, karena kurikulum menjadi pedoman utama dalam mengarahkan proses belajar mengajar. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Tahun 2003, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana yang memuat tujuan, isi, bahan ajar, serta cara penyelenggaraan pembelajaran. Dengan kata lain, kurikulum bukan sekadar kumpulan materi, melainkan suatu rancangan komprehensif yang menjadi panduan guru, peserta didik, dan seluruh pihak sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan.

Pengembangan kurikulum dipahami sebagai suatu proses dinamis, yang selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, kondisi peserta didik, serta lingkungan sosial budaya tempat pendidikan berlangsung. Oleh karena itu, kurikulum bersifat adaptif dan fleksibel, agar dapat merespons perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tantangan kehidupan global yang terus berkembang.

Di dalam kurikulum terdapat beberapa komponen utama, yaitu tujuan pendidikan, isi atau materi pelajaran, strategi pembelajaran (proses penyampaian), serta evaluasi. Tujuan menjadi arah yang ingin dicapai, isi kurikulum menggambarkan bahan ajar yang harus dipelajari siswa, strategi merupakan cara untuk menyampaikan materi agar efektif dan bermakna, sedangkan evaluasi berfungsi menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai.

Dalam pengembangannya, kurikulum berlandaskan pada beberapa aspek penting. Landasan filosofis memberikan arah nilai, tujuan, serta pandangan hidup yang ingin diwujudkan. Landasan psikologis menekankan pada perkembangan peserta didik, sehingga kurikulum sesuai dengan tahap usia dan kebutuhan belajar. Landasan historis melihat pengalaman serta warisan pendidikan sebelumnya. Landasan sosiologis memastikan kurikulum relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kurikulum agar sejalan dengan perkembangan keilmuan dan kemajuan teknologi.

Proses atau prosedur pengembangan kurikulum biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap awal dimulai dengan analisis kebutuhan, kemudian perumusan tujuan yang jelas, penyusunan desain kurikulum, implementasi dalam pembelajaran, dilanjutkan dengan monitoring untuk melihat pelaksanaannya, evaluasi untuk mengukur efektivitasnya, serta revisi dan pemeliharaan agar kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan.

Selain itu, pengembangan kurikulum erat kaitannya dengan strategi pembelajaran yang diterapkan guru. Strategi tersebut mencakup berbagai pendekatan seperti exposition (penyampaian

langsung), discovery learning (pembelajaran penemuan), rote learning (pembelajaran hafalan), experiential learning (pembelajaran berbasis pengalaman), group learning (belajar kelompok), serta individual learning (belajar mandiri). Dengan kombinasi strategi ini, proses belajar menjadi lebih variatif dan mampu menyesuaikan gaya belajar siswa yang berbeda-beda.

2.2.3 Filosofi Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis yang melatarbelakanginya. Filosofi pendidikan memberikan arah tentang hakikat manusia, tujuan pendidikan, peran guru dan peserta didik, serta jenis pengetahuan yang dianggap bernilai untuk diajarkan. Dalam kajian teori kurikulum, terdapat beberapa aliran filsafat utama yang berpengaruh besar terhadap perumusan dan pengembangan kurikulum, di antaranya esensialisme, perenialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Masing-masing aliran tersebut menawarkan pandangan yang berbeda mengenai tujuan pendidikan dan strategi pengembangan kurikulum.

Aliran esensialisme berpandangan bahwa pendidikan harus berfokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan masyarakat. Pendidikan dipahami sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai, norma, dan pengetahuan pokok yang telah teruji oleh waktu, sehingga peserta didik memiliki fondasi intelektual yang kuat. Oleh karena itu, kurikulum dalam perspektif esensialisme menekankan mata pelajaran inti seperti membaca, menulis, matematika, ilmu pengetahuan, dan sejarah, yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan berjenjang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Dalam implementasinya, kurikulum esensialisme menekankan disiplin akademik, standar capaian yang jelas, serta penguasaan materi secara mendalam. Proses pembelajaran cenderung berorientasi pada guru (teacher-centered), di mana guru diposisikan sebagai pusat pembelajaran sekaligus otoritas utama

dalam mentransmisikan pengetahuan. Guru bertanggung jawab memastikan peserta didik menguasai materi pokok melalui metode pembelajaran yang terarah, latihan yang berulang, serta evaluasi yang ketat. Sementara itu, peserta didik dipandang sebagai individu yang perlu dibimbing secara sistematis untuk menguasai pengetahuan dasar sebelum mengembangkan kemampuan berpikir tingkat lanjut.

Tujuan utama kurikulum esensialisme adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan fundamental yang bersifat stabil, universal, dan tahan lama, sehingga mereka mampu beradaptasi dalam kehidupan sosial serta berperan sebagai warga masyarakat yang produktif. Dalam pandangan ini, pendidikan tidak semata-mata mengikuti perubahan zaman secara cepat, tetapi harus selektif dalam menyaring pengetahuan agar nilai-nilai inti pendidikan tetap terjaga. Dengan demikian, esensialisme menempatkan kurikulum sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan budaya dan intelektual, sekaligus membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan etos kerja peserta didik (Ornstein & Hunkins, 2018).¹

Berbeda dengan esensialisme yang menekankan penguasaan pengetahuan dasar yang bersifat fungsional, perenialisme berpandangan bahwa pendidikan harus berorientasi pada nilai-nilai abadi (*perennial values*) yang bersumber dari kebenaran universal dan rasionalitas manusia. Aliran ini meyakini bahwa hakikat manusia dan persoalan fundamental kehidupan tidak banyak berubah sepanjang sejarah, sehingga pendidikan seharusnya berfokus pada pengembangan intelektual dan moral yang bersifat mendasar dan universal.

Dalam perspektif perenialisme, kurikulum diarahkan pada kajian karya-karya klasik (*great books*) yang memuat pemikiran besar umat manusia dalam bidang filsafat, sastra, logika, etika, dan sejarah. Karya-karya tersebut dipandang sebagai sumber utama pembelajaran karena mengandung nilai kebenaran yang bersifat lintas zaman dan mampu melatih kemampuan berpikir rasional,

analitis, serta reflektif peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum perenialisme cenderung menekankan diskusi mendalam, dialog filosofis, dan pembacaan teks klasik sebagai metode utama pembelajaran.

Tujuan pendidikan dalam aliran perenialisme bukan sekadar menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tuntutan praktis dunia kerja, melainkan membentuk manusia yang memiliki karakter kuat, integritas moral, serta kemampuan berpikir kritis dan logis. Guru berperan sebagai intelektual dan fasilitator dialog yang membimbing peserta didik untuk memahami gagasan-gagasan besar, sementara peserta didik didorong untuk aktif berpikir, berargumentasi, dan merefleksikan nilai-nilai universal yang dipelajari.

Dalam pandangan perenialisme, kurikulum bersifat relatif tetap karena kebenaran dan nilai-nilai dasar yang diajarkan dianggap tidak berubah oleh perkembangan zaman. Pendidikan dipandang sebagai upaya menuntun peserta didik untuk memahami kebijaksanaan masa lalu sebagai dasar dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Dengan demikian, perenialisme menempatkan kurikulum sebagai sarana pembentukan intelektual dan moral manusia yang berkelanjutan, bukan sekadar instrumen penyesuaian terhadap perubahan sosial yang bersifat sementara⁸².

Sementara itu, progresivisme memandang pendidikan sebagai proses yang dinamis, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik (student-centered learning). Aliran ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Dewey yang menekankan bahwa belajar merupakan hasil dari interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya. Pendidikan tidak dipahami sebagai proses transfer pengetahuan secara pasif, melainkan sebagai pengalaman belajar yang bermakna melalui prinsip *learning by doing* dan *problem solving*.

Dalam perspektif progresivisme, kurikulum dirancang secara fleksibel dan adaptif, disesuaikan dengan kebutuhan, minat, potensi, serta pengalaman hidup peserta didik. Materi pembelajaran tidak

⁸² Daniel Tanner & Laurel Tanner, *Curriculum Development: Theory into Practice*, 4th ed. (New Jersey: Pearson, 2007), hlm. 89–91

ditentukan secara kaku, tetapi berkembang dari permasalahan nyata yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), dan kegiatan kolaboratif menjadi pendekatan yang dominan dalam kurikulum progresivisme.

Peran guru dalam aliran ini mengalami pergeseran signifikan, dari pusat otoritas pengetahuan menjadi fasilitator, pembimbing, dan mitra belajar bagi peserta didik. Guru bertugas menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menstimulasi rasa ingin tahu, serta mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, bereksplorasi, dan merefleksikan pengalaman belajarnya. Peserta didik diposisikan sebagai subjek aktif yang memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri.

Tujuan utama kurikulum progresivisme adalah mengembangkan individu yang kreatif, kritis, demokratis, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus berlangsung. Pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang memiliki kepekaan sosial, kemampuan bekerja sama, serta keterampilan berpikir reflektif dalam menghadapi persoalan kehidupan nyata. Dengan demikian, progresivisme menempatkan kurikulum sebagai sarana pembentukan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga aktif, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat⁸³.

Lebih lanjut, rekonstruksionisme memandang pendidikan sebagai sarana strategis dan transformatif untuk melakukan perubahan serta perbaikan sosial secara sadar dan terencana. Aliran ini berangkat dari pandangan bahwa pendidikan tidak boleh bersifat netral terhadap realitas sosial, melainkan harus berpihak pada upaya mengatasi berbagai persoalan kemanusiaan seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, konflik budaya, dan

⁸³ John Dewey, *Experience and Education* (New York: Macmillan, 1938), hlm. 25–30.

krisis moral. Oleh karena itu, kurikulum dalam perspektif rekonstruksionisme harus responsif terhadap dinamika dan problematika sosial yang dihadapi masyarakat, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

Kurikulum rekonstruksionisme dirancang untuk menumbuhkan kesadaran kritis (*critical consciousness*) peserta didik terhadap struktur sosial yang tidak adil, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan analitis dan etis untuk terlibat aktif dalam proses perubahan sosial. Materi pembelajaran tidak hanya berisi pengetahuan akademik, tetapi juga isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, demokrasi, hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab warga negara. Pembelajaran mendorong dialog, refleksi kritis, serta keterlibatan peserta didik dalam aksi sosial sebagai bagian dari pengalaman belajar.

Dalam aliran ini, guru diposisikan sebagai agen perubahan (*agent of social change*) yang berperan membimbing peserta didik untuk memahami realitas sosial secara kritis dan konstruktif. Peserta didik tidak sekadar dipersiapkan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat yang ada, tetapi didorong untuk berpartisipasi dalam merekonstruksi tatanan sosial menuju masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan manusiawi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi budaya, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada masa depan⁸⁴.

Adapun eksistensialisme menekankan kebebasan individu, tanggung jawab personal, serta pencarian makna hidup sebagai inti dari proses pendidikan. Aliran ini berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang secara sadar membentuk dirinya melalui pilihan-pilihan hidup yang diambilnya. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh mengekang kebebasan berpikir dan berekspresi peserta didik melalui kurikulum yang kaku, seragam, dan terlalu menekankan standar eksternal. Setiap individu dipandang unik,

⁸⁴ Allan C. Ornstein & Francis P. Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues* (Boston: Pearson, 2018), hlm. 52–55

memiliki potensi, latar belakang, serta tujuan hidup yang berbeda, sehingga proses pendidikan harus menghormati keunikan tersebut.

Dalam perspektif eksistensialisme, kurikulum bersifat fleksibel dan terbuka, memberi ruang yang luas bagi peserta didik untuk mengeksplorasi minat, bakat, kreativitas, dan nilai-nilai personal yang diyakininya. Materi pembelajaran tidak ditentukan secara mutlak, melainkan berkembang dari pengalaman, refleksi diri, serta interaksi peserta didik dengan lingkungan sosial dan budaya. Pembelajaran seni, sastra, filsafat, dan ekspresi kreatif dipandang penting karena mampu membantu peserta didik memahami diri, emosi, dan makna keberadaannya sebagai manusia.

Peran guru dalam kurikulum eksistensialisme bukan sebagai otoritas yang memaksakan nilai, melainkan sebagai pendamping dan fasilitator yang membantu peserta didik dalam proses pencarian jati diri. Guru diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang dialogis, reflektif, dan humanis, sehingga peserta didik terdorong untuk berpikir kritis terhadap pilihan hidupnya sendiri. Tujuan utama pendidikan dalam aliran ini adalah membentuk manusia yang autentik, sadar diri, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, serta mampu menjalani kehidupan secara bermakna sesuai dengan nilai yang diyakininya⁸⁵

Secara keseluruhan, kelima aliran filsafat tersebut memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam pengembangan kurikulum modern. Esensialisme dan perenialisme cenderung menekankan stabilitas, kedisiplinan intelektual, serta pewarisan nilai dan pengetahuan fundamental yang telah teruji oleh waktu. Kedua aliran ini berperan penting dalam menjaga kesinambungan tradisi intelektual dan moral agar pendidikan tidak kehilangan arah dan pijakan nilai. Sebaliknya, progresivisme dan rekonstruksionisme lebih berorientasi pada dinamika perubahan sosial dan tuntutan masa depan, dengan menekankan fleksibilitas kurikulum, pembelajaran berbasis pengalaman, serta peran

⁸⁵ George F. Kneller, *Introduction to the Philosophy of Education* (New York: Wiley, 1971), hlm. 102–105

pendidikan sebagai agen transformasi sosial yang responsif terhadap persoalan masyarakat.

Sementara itu, eksistensialisme melengkapi keempat aliran tersebut dengan penekanan pada dimensi kemanusiaan yang bersifat personal, yakni kebebasan memilih, tanggung jawab individual, dan pencarian makna hidup. Aliran ini mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh mengabaikan keunikan peserta didik sebagai subjek yang aktif dan reflektif dalam membangun jati dirinya. Dalam praktiknya, pengembangan kurikulum kontemporer, termasuk Kurikulum Merdeka di Indonesia, tidak mengadopsi satu aliran filsafat secara murni, melainkan memadukan berbagai pandangan filosofis tersebut secara eklektik dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan kurikulum dirancang secara seimbang, mengintegrasikan pengetahuan dasar, nilai-nilai luhur, pengalaman belajar bermakna, kesadaran sosial, serta pengembangan potensi individu, sehingga mampu menjawab kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, dan tantangan global secara komprehensif.

2.2.4 Landasan Filosofis Pendidikan Islam

Dalam perspektif pendidikan Islam, pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dari kerangka keilmuan Islam yang bersifat integratif dan tauhidik. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai satu kesatuan yang bersumber dari Allah SWT, baik yang diperoleh melalui wahyu (ayat qouliyah) maupun melalui pengamatan terhadap alam semesta (ayat kauniyah). Dalam konteks ini, Uloomul Tabi'iyah dan Uloomul Insaniyah menempati posisi strategis sebagai instrumen utama untuk membangun Islamic Worldview dalam diri peserta didik.⁸⁶

Uloomul Tabi'iyah merujuk pada cabang ilmu yang mempelajari fenomena alam, materi, dan hukum-hukum fisik yang mengatur alam semesta. Ilmu-ilmu ini meliputi fisika, kimia, biologi, astronomi, geologi, dan cabang sains lainnya. Dalam tradisi

⁸⁶ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), h. 17

keilmuan Islam, kajian terhadap alam tidak dipandang sebagai aktivitas sekuler, melainkan sebagai bentuk tadabbur terhadap ciptaan Allah yang mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan dan kebesaran-Nya.

Dalam konteks kurikulum pendidikan Islam, Ulumul Tabi'iyah berfungsi sebagai sarana untuk memahami ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam semesta. Pembelajaran sains diarahkan tidak hanya pada penguasaan konsep dan keterampilan ilmiah, tetapi juga pada pembentukan kesadaran spiritual bahwa keteraturan dan hukum alam merupakan manifestasi kehendak Ilahi.⁸⁷ Dengan demikian, sains tidak bersifat value-free, melainkan sarat nilai tauhid dan etika.

Pendekatan integratif ini sekaligus berupaya menghapus dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sains yang selama ini menjadi problem dalam sistem pendidikan modern. Kurikulum pendidikan Islam yang mengintegrasikan Ulumul Tabi'iyah dengan nilai-nilai keislaman bertujuan melahirkan peserta didik yang unggul dalam penguasaan IPTEK, namun tetap memiliki sikap rendah hati, rasa kagum kepada Sang Pencipta, serta tanggung jawab moral dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan.⁸⁸

Ulumul Insaniyah mencakup cabang ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk individu dan sosial, termasuk sosiologi, psikologi, sejarah, antropologi, ilmu politik, dan kajian budaya. Dalam perspektif Islam, ilmu-ilmu ini berfungsi untuk memahami peran manusia sebagai khalifah fi al-ardh, yaitu makhluk yang diberi amanah untuk mengelola bumi berdasarkan nilai-nilai Ilahi.

Dalam kurikulum pendidikan Islam, Ulumul Insaniyah memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, etika sosial, dan kesadaran moral peserta didik. Melalui kajian sejarah Islam, misalnya, peserta didik diajak memahami transformasi peradaban

⁸⁷ Osman Bakar, *Tauhid and Science: Essays on the History and Philosophy of Islamic Science*, (Kuala Lumpur: Secretariat for Islamic Philosophy and Science, 1991), h. 45

⁸⁸ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 112.

manusia dari masa jahiliyah menuju masyarakat beradab yang dibangun atas dasar tauhid, keadilan, dan akhlak mulia.⁸⁹ Demikian pula melalui sosiologi dan psikologi Islami, peserta didik dibekali pemahaman tentang dinamika sosial, tanggung jawab sosial, serta pentingnya nilai ihsan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ulumul Insaniyah juga berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian muslim yang tidak hanya saleh secara individual, tetapi juga saleh secara sosial.⁹⁰

Dalam desain kurikulum pendidikan Islam, Ulumul Tabi'iyah dan Ulumul Insaniyah tidak diposisikan secara terpisah, melainkan diintegrasikan dalam satu kerangka tauhid sebagai landasan epistemologis. Tauhid berfungsi sebagai pusat orientasi keilmuan yang menyatukan seluruh disiplin ilmu, baik yang berkaitan dengan struktur alam (*world structure*) maupun struktur kemanusiaan (*human structure*).⁹¹

Struktur integrasi keilmuan ini dapat dipahami sebagai berikut: tauhid menjadi fondasi akidah dan nilai, Ulumul Tabi'iyah berfungsi untuk memahami alam semesta sebagai ciptaan Allah, sementara Ulumul Insaniyah berfungsi untuk memahami manusia sebagai subjek moral dan sosial. Integrasi ini bertujuan melahirkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan spiritual, dan kepekaan sosial.⁹²

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, pendekatan integratif ini sangat relevan karena kurikulum menekankan penguatan karakter, pembelajaran kontekstual, dan pengembangan Profil Pelajar Pancasila. Nilai-nilai tauhid, akhlak, dan tanggung jawab

⁸⁹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 421

⁹⁰ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq*, terj. Helmi Hidayat, (Bandung: Mizan, 1994), h. 56.

⁹¹ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1980), h. 33

⁹² Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2003), h. 97.

sosial yang dikembangkan melalui Ulumul Tabi'iyah dan Ulumul Insaniyah sejalan dengan dimensi “beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia”, serta memperkaya makna pendidikan karakter dalam konteks Islam, khususnya di Aceh.⁹³

2.2.5 Landasan Kebijakan Pendidikan Nasional

Strategi pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003. Undang-undang ini menandai adanya pergeseran paradigma pendidikan dari pendekatan yang berpusat pada guru (*teacher-centered*) menuju pendekatan yang berpusat pada peserta didik (*learner-centered*). Perubahan paradigma tersebut menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, sementara guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah proses belajar. Dalam Pasal 1 angka 20 UUSPN dinyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, yang menegaskan bahwa pembelajaran bersifat dialogis, interaktif, dan kontekstual.⁹⁴

Lebih lanjut, UUSPN mengamanatkan agar proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan mengenai kewajiban pendidik untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, kreatif, dinamis, dan dialogis.⁹⁵ Dengan demikian, strategi pembelajaran tidak lagi dimaknai sebagai proses penyampaian materi secara satu arah, melainkan sebagai upaya sistematis untuk menciptakan pengalaman belajar yang

⁹³ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Profil Pelajar Pancasila*, (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022).

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 20

⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (2)

memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi intelektual, emosional, sosial, dan spiritual secara seimbang.

Dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan, strategi pembelajaran diatur lebih lanjut melalui Standar Proses yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran.⁹⁶ Perencanaan pembelajaran menuntut guru untuk menyusun perangkat pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, serta konteks sosial dan budaya lingkungan sekitar. Pelaksanaan pembelajaran diarahkan pada penggunaan metode dan model pembelajaran yang variatif, aktif, dan partisipatif, sehingga peserta didik terlibat secara langsung dalam proses membangun pengetahuan dan keterampilan.

UUSPN juga memberikan landasan kebijakan yang menegaskan hak peserta didik untuk memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.⁹⁷ Prinsip ini menuntut strategi pembelajaran yang fleksibel, adaptif, dan diferensiatif, sehingga mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik peserta didik. Dalam praktiknya, kebijakan ini mendorong penerapan berbagai strategi pembelajaran aktif, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran inkuiri, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran kontekstual, yang menempatkan pengalaman belajar peserta didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran.

Selain itu, UUSPN menegaskan bahwa sumber belajar dalam strategi pembelajaran tidak terbatas pada guru semata. Pembelajaran dituntut untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik berupa bahan cetak, media visual dan audio-visual, teknologi digital, maupun lingkungan alam dan sosial peserta didik.⁵ Pemanfaatan sumber belajar yang beragam ini sejalan dengan tuntutan pendidikan

⁹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; lihat juga Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan

⁹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 ayat (1)

abad ke-21 yang menekankan literasi informasi, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kemandirian belajar. Guru dalam konteks ini berperan sebagai pengelola pembelajaran yang membantu peserta didik mengakses, mengolah, dan memaknai informasi secara bertanggung jawab.

Dalam aspek evaluasi, UUSPN mengamanatkan penilaian pembelajaran yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Penilaian tidak hanya diarahkan pada pencapaian aspek kognitif, tetapi juga mencakup pengembangan sikap dan keterampilan peserta didik.⁹⁸ Strategi pembelajaran yang efektif harus mampu mengintegrasikan penilaian sebagai bagian dari proses belajar, sehingga hasil penilaian dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki strategi pembelajaran dan mengembangkan potensi peserta didik secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, strategi pembelajaran dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menegaskan pentingnya pembelajaran yang humanis, partisipatif, dan kontekstual dengan menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pendidikan. Landasan kebijakan ini sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran bermakna, penguatan karakter, serta pengembangan kompetensi abad ke-21. Dengan demikian, UUSPN menjadi pijakan yuridis yang kokoh bagi pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran yang adaptif dan relevan dalam sistem pendidikan nasional.

2.2.6 Kurikulum dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, kurikulum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, tetapi juga mencakup Nilai-nilai spiritual, akhlak, dan pengembangan kepribadian peserta didik secara menyeluruh. Kurikulum dalam Islam menekankan keterpaduan antara aspek kognitif (ilmu pengetahuan), afektif (akhlak dan spiritualitas), dan

⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58.

psikomotorik (keterampilan hidup). Dengan demikian, tujuan akhir dari kurikulum Islam adalah membentuk manusia *insan kāmil* (manusia paripurna) yang beriman, berilmu, dan beramal saleh.

Ahmad Tafsir menegaskan bahwa kurikulum dalam pendidikan Islam tidak dapat dipahami sekadar sebagai kumpulan mata pelajaran, melainkan sebagai seluruh pengalaman belajar peserta didik yang dirancang secara sadar untuk membentuk akhlak mulia dan kepribadian Islami. Kurikulum dipandang sebagai sarana strategis dalam proses tarbiyah yang mencakup pembinaan intelektual, spiritual, dan sosial secara terpadu. Oleh karena itu, orientasi utama kurikulum pendidikan Islam bukan hanya pada pencapaian kognitif, tetapi pada pembentukan manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Dalam pandangan Ahmad Tafsir, kurikulum pendidikan Islam mencakup tiga dimensi utama yang saling berkaitan. Dimensi ilahiyah menekankan hubungan manusia dengan Allah melalui penguatan tauhid, pelaksanaan ibadah, serta pembinaan akhlak kepada Sang Pencipta sebagai landasan seluruh aktivitas pendidikan. Dimensi insaniyah menitikberatkan pada hubungan manusia dengan sesama, yang diwujudkan melalui pembentukan akhlak sosial, sikap solidaritas, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kemaslahatan umat. Sementara itu, dimensi kauniyah mengarahkan hubungan manusia dengan alam semesta, yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bentuk pelaksanaan amanah kekhalifahan manusia di bumi.

Lebih lanjut, Ahmad Tafsir menekankan bahwa kurikulum Islami harus bersumber pada Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan utama, serta diperkuat oleh ijtihad para ulama dalam merespons dinamika dan tantangan zaman. Dengan landasan tersebut, kurikulum pendidikan Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual, mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Pandangan ini menegaskan bahwa kurikulum Islam memiliki fleksibilitas epistemologis dan

normatif yang memungkinkan integrasi antara nilai-nilai spiritual, moral, dan kompetensi modern dalam satu kerangka pendidikan yang utuh⁹⁹.

Muhaimin memandang kurikulum pendidikan Islam sebagai suatu sistem yang utuh dan fungsional, yang dirancang untuk mengarahkan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Kurikulum tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen strategis yang memiliki peran normatif, instrumental, dan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Dalam fungsi normatifnya, kurikulum berperan sebagai pedoman nilai yang mengarahkan seluruh proses pendidikan agar selaras dengan ajaran Islam, baik dalam aspek tujuan, materi, maupun proses pembelajaran.

Lebih lanjut, Muhaimin menegaskan bahwa kurikulum juga memiliki fungsi instrumental, yaitu sebagai alat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai akhlak kepada peserta didik secara terencana dan sistematis. Melalui kurikulum, pendidikan Islam diharapkan mampu membekali peserta didik dengan kompetensi intelektual sekaligus moral yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan pribadi dan sosial. Selain itu, kurikulum berfungsi secara operasional sebagai pedoman praktis bagi guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Muhaimin juga menekankan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus bersifat integratif, yaitu menghubungkan antara ilmu agama dan ilmu umum, antara teori dan praktik, serta antara nilai-nilai lokal dengan tuntutan dan tantangan global. Pendekatan integratif ini bertujuan agar pendidikan Islam tidak terjebak pada dikotomi keilmuan, melainkan mampu membentuk manusia yang utuh, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dengan kurikulum yang integratif, pendidikan Islam diharapkan mampu menjawab kebutuhan manusia secara menyeluruh, baik dalam dimensi duniawi

⁹⁹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam ...*, hlm. 33.

maupun ukhrawi, serta relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya.¹⁰⁰

Omar Mohammad Al Syaibany dalam karyanya *Falsafah Pendidikan Islam* menegaskan bahwa kurikulum dalam pendidikan Islam harus dibangun berdasarkan pandangan hidup Islam (worldview of Islam). Kurikulum tidak semata-mata dipahami sebagai perangkat akademik, melainkan sebagai sarana strategis untuk mewujudkan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu mencapai kesempurnaan diri manusia (takmil al insan). Kesempurnaan ini mencakup pengembangan aspek ruhaniyah, jasmaniyah, intelektual, dan akhlak secara seimbang dan harmonis, sehingga peserta didik tumbuh menjadi pribadi muslim yang utuh.

Menurut Al Syaibany, kurikulum Islami harus bersumber dari wahyu, dengan Al Quran dan Sunnah sebagai landasan utama dalam penentuan tujuan, isi, dan arah pendidikan. Kurikulum juga harus bersifat menyeluruh karena mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, sosial, budaya, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaannya, kurikulum Islami dituntut untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan potensi spiritual, intelektual, emosional, dan fisik peserta didik, agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembentukan kepribadian.

Lebih lanjut, Al Syaibany menekankan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat, tanpa kehilangan pijakan nilai-nilai dasarnya. Kurikulum tidak boleh kaku dan statis, tetapi harus mampu merespons tantangan sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, kurikulum Islami harus bersifat praktis, artinya tidak hanya berisi konsep dan teori, tetapi juga membimbing peserta didik melalui pengalaman nyata yang menumbuhkan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan

¹⁰⁰ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 33.

sehari-hari. Dengan demikian, kurikulum dalam perspektif Al Syaibany tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi terutama pada pembentukan kepribadian muslim yang kaffah, beriman, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan perannya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi.¹⁰¹

Berdasarkan pandangan Ahmad Tafsir, Muhaimin, dan Omar Mohammad Al Syaibany, dapat disimpulkan bahwa kurikulum dalam perspektif pendidikan Islam memiliki dimensi yang komprehensif, meliputi dimensi transendental, dimensi sosial, dan dimensi ekologis. Dimensi transendental menekankan hubungan manusia dengan Allah melalui penguatan tauhid, ibadah, dan pembentukan akhlak mulia. Dimensi sosial mengarahkan peserta didik untuk membangun relasi yang harmonis dengan sesama manusia melalui nilai keadilan, kepedulian, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama. Sementara itu, dimensi ekologis menuntut adanya kesadaran terhadap hubungan manusia dengan alam semesta, sehingga penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup diarahkan sebagai amanah kekhalifahan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Dalam kerangka tersebut, kurikulum pendidikan Islam tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata, tetapi harus secara simultan menanamkan nilai akhlak, spiritualitas, dan kecakapan hidup yang membentuk kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum berfungsi sebagai instrumen pembinaan karakter yang menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga proses pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual.

Dalam konteks Indonesia, khususnya Provinsi Aceh, integrasi nilai-nilai Islami dalam kurikulum memiliki landasan yuridis yang kuat melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Qanun ini menegaskan bahwa

¹⁰¹ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam ...*, hlm. 33.

pendidikan di Aceh wajib berlandaskan nilai-nilai Islam sebagai ruh dan orientasi utama dalam seluruh proses pendidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara pemikiran para tokoh pendidikan Islam dengan implementasi kebijakan kurikulum di tingkat daerah, sehingga nilai-nilai Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik pendidikan formal.

Lebih lanjut, Kurikulum Merdeka yang menekankan penguatan Profil Pelajar Pancasila memiliki titik temu yang kuat dengan nilai-nilai Islami. Kedua kerangka tersebut sama-sama bertujuan membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, integrasi nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, khususnya di Aceh, bukanlah bentuk pertentangan antara kebijakan nasional dan nilai agama, melainkan wujud sinergi yang saling menguatkan dalam membangun karakter peserta didik yang holistik dan berkepribadian luhur.

2.2.7 Akhlak: Landasan Pengembangan Kurikulum Islam

Dalam perspektif pengembangan kurikulum Islam, akhlak tidak boleh diposisikan sebagai muatan tambahan, pelengkap, atau sekadar salah satu materi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang berdiri sendiri dan terpisah dari mata pelajaran lainnya. Sebaliknya, akhlak harus menjadi landasan filosofis fundamental yang menjiwai seluruh komponen kurikulum, mulai dari tujuan pendidikan, pemilihan isi atau materi pembelajaran, penentuan strategi dan metode pembelajaran, organisasi kurikulum, hingga sistem evaluasi yang digunakan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Miskawaih yang menempatkan akhlak sebagai inti dari seluruh proses pendidikan, di mana setiap mata pelajaran, baik yang tergolong ilmu agama maupun ilmu umum, seharusnya menjadi wahana pembentukan moral, bukan sekadar transfer pengetahuan semata. Dalam pandangan ini, tidak ada dikotomi antara ilmu yang "sakral" dan "profan", karena seluruh ilmu pada

hakikatnya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membentuk kepribadian yang berakhlak mulia.

Pemikiran Hilda Taba dalam model pengembangan kurikulumnya yang terkenal dengan pendekatan *grassroots* atau akar rumput, menekankan bahwa pengembangan kurikulum harus berangkat dari diagnosis kebutuhan peserta didik (*diagnosis of needs*) sebagai langkah pertama yang fundamental. Diagnosis kebutuhan ini menjadi dasar bagi seluruh langkah selanjutnya, mulai dari perumusan tujuan, pemilihan dan pengorganisasian isi, pemilihan pengalaman belajar, hingga penentuan evaluasi. Dalam konteks pendidikan Islam, kebutuhan fundamental yang paling hakiki bagi setiap peserta didik adalah pembentukan akhlak mulia (*al-akhlaq al-karimah*) yang akan menjadi bekal hidup mereka, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Akhlak mulia inilah yang akan menentukan kualitas hubungan mereka dengan Allah (*hablun minallah*), dengan sesama manusia (*hablun minannas*), dan dengan alam semesta (*hablun minal 'alam*). Oleh karena itu, setiap perencanaan kurikulum, mulai dari perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan, hingga penyusunan materi, strategi, dan media pembelajaran, harus berorientasi secara eksplisit pada pencapaian akhlak mulia sebagai tujuan tertinggi. Visi sekolah tidak boleh hanya berorientasi pada prestasi akademik semata, tetapi harus mencerminkan komitmen untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia. Misi sekolah harus dijabarkan ke dalam program-program yang secara langsung menanamkan nilai-nilai akhlak dalam keseharian. Dan tujuan pembelajaran, bahkan untuk mata pelajaran umum seperti matematika, IPA, atau IPS, harus dirumuskan dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap pembentukan akhlak peserta didik.

Lawrence Stenhouse¹⁰² melalui konsep *process model* yang dikembangkanya, memandang kurikulum bukan sebagai dokumen statis yang harus diikuti secara mekanis, melainkan sebagai hipotesis

¹⁰² Lawrence Stenhouse, *An Introduction to Curriculum Research and Development* (London: Heinemann, 1975), hlm. 60.

pendidikan yang harus terus diuji, dikaji, dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui praktik refleksi di kelas. Dalam kerangka ini, akhlak tidak diajarkan sebagai doktrin yang kaku, dogmatis, dan tidak boleh dipertanyakan, tetapi dikembangkan melalui proses eksperimentasi pedagogis yang dinamis, refleksi mendalam, dan pembiasaan yang berkelanjutan. Guru tidak lagi berperan sebagai pelaksana kurikulum yang pasif yang hanya mengikuti instruksi dari atas, tetapi menjadi peneliti (*teacher as researcher*) yang secara aktif menguji sejauh mana nilai-nilai akhlak benar-benar terinternalisasi dalam diri peserta didik. Guru didorong untuk melakukan eksperimen dengan berbagai metode pembelajaran, merefleksikan hasilnya, dan terus melakukan perbaikan. Pendekatan ini sangat relevan dengan upaya internalisasi akhlak karena proses pembentukan akhlak tidak dapat dilakukan dengan pendekatan indoktrinasi yang memaksa, tetapi membutuhkan ruang bagi peserta didik untuk memahami, menghayati, dan pada akhirnya memilih sendiri untuk mengamalkan nilai-nilai akhlak tersebut sebagai bagian dari kesadaran pribadi mereka.

Muhaimin¹⁰³ dalam karyanya *Paradigma Pendidikan Islam* menegaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus bersifat integratif dan holistik, yaitu menghubungkan secara organik antara ilmu agama dan ilmu umum, antara teori dan praktik, serta antara nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat dengan tuntutan global yang terus berkembang. Dalam kerangka integratif ini, akhlak menjadi perekat yang menyatukan seluruh disiplin ilmu. Tanpa akhlak, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi justru dapat menjadi sumber kehancuran, bukan kemaslahatan. Akhlak menjadi filter yang memastikan bahwa ilmu pengetahuan dimanfaatkan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan; untuk membangun peradaban, bukan untuk menghancurkannya; untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menjauh dari-Nya. Dengan demikian, setiap bidang pengetahuan, baik fisika, biologi, ekonomi, sosiologi, maupun kedokteran, pada hakikatnya harus bermuara

¹⁰³ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam ...*, hlm. 155.

pada pembentukan manusia yang beradab, bermoral, dan bertanggung jawab. Integrasi ini tidak berarti mencampuradukkan secara paksa ilmu agama ke dalam setiap mata pelajaran, tetapi membangun kesadaran epistemologis bahwa setiap ilmu memiliki dimensi nilai yang tidak dapat dipisahkan dari realitas ketuhanan dan kemanusiaan.

Secara lebih operasional, pengembangan kurikulum yang berpusat pada akhlak dapat diwujudkan melalui beberapa langkah konkret. *Pertama*, dalam perumusan tujuan pembelajaran, setiap mata pelajaran harus secara eksplisit mencantumkan pencapaian aspek afektif dan spiritual sebagai bagian dari kompetensi inti yang ingin dicapai. *Kedua*, dalam pemilihan isi atau materi, guru tidak hanya mengajarkan konsep-konsep teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai akhlak yang relevan. Misalnya, dalam pembelajaran fisika, selain mengajarkan hukum gravitasi, guru juga menanamkan kesadaran akan kebesaran Allah sebagai Pencipta alam semesta. Dalam pembelajaran ekonomi, selain mengajarkan mekanisme pasar, guru juga menanamkan nilai kejujuran dan keadilan dalam berbisnis. *Ketiga*, dalam pemilihan strategi dan metode, guru tidak hanya mengandalkan ceramah, tetapi juga menggunakan metode keteladanan (*uswah*), pembiasaan (*ta'wīd*), kisah (*qishash*), dan latihan jiwa (*riyāḍah al-nafs*) yang telah digagas oleh para tokoh pendidikan Islam klasik. *Keempat*, dalam evaluasi, penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif melalui tes tertulis, tetapi juga mengukur aspek afektif dan spiritual melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, portofolio, dan jurnal refleksi.

Dengan demikian, pengembangan kurikulum yang berpusat pada akhlak akan melahirkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan terampil secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan moral yang tajam, kesadaran spiritual yang mendalam, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Mereka tidak hanya mampu menjawab soal-soal ujian dengan benar, tetapi juga mampu menjawab panggilan kemanusiaan dengan empati dan kepedulian.

Mereka tidak hanya unggul dalam persaingan global, tetapi juga mampu menjadi *rahmatan lil 'alamin*, membawa kebaikan dan kedamaian bagi seluruh alam. Hal ini sejalan dengan tujuan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembentukan Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi “beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia” yang menjadi fondasi dari seluruh dimensi lainnya. Pengembangan kurikulum yang berpusat pada akhlak ini juga menjadi fondasi yang kokoh bagi internalisasi nilai-nilai Islami yang menjadi fokus utama penelitian ini, karena ia menempatkan akhlak bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai ruh yang menjiwai seluruh proses pendidikan, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan antara cita-cita pendidikan nasional, nilai-nilai keislaman, dan kearifan lokal masyarakat Aceh.

2.3 Konsep Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka yang mulai diperkenalkan sejak tahun 2020 merupakan jawaban dari kebutuhan reformasi pendidikan nasional agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, tuntutan global, dan keragaman konteks lokal Indonesia. Secara filosofis, kurikulum ini mengusung prinsip kebebasan belajar (*freedom to learn*), yang memberi ruang bagi sekolah, guru, dan peserta didik untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, serta potensi unik masing-masing. Hakikat dari Kurikulum Merdeka adalah fleksibilitas, diferensiasi, dan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, sehingga pendidikan benar-benar berfungsi sebagai sarana memerdekakan manusia¹⁰⁴.

Kurikulum Merdeka tidak lagi menekankan pada penguasaan seluruh materi secara luas, tetapi lebih pada pendalaman kompetensi esensial yang dianggap penting bagi pengembangan daya pikir kritis, kreativitas, komunikasi, serta kolaborasi. Hal ini

¹⁰⁴ Kemendikbudristek, *Kurikulum Merdeka: Panduan Implementasi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022), hlm. 33.

sejalan dengan visi membentuk *Profil Pelajar Pancasila*, yakni pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, serta mampu bergotong royong dan berkebinekaan global ¹⁰⁵.

Salah satu karakteristik utama Kurikulum Merdeka adalah *Project Based Learning* (PjBL) yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui pengalaman nyata. Proyek yang dirancang tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga menekankan pada dimensi sosial, lingkungan, dan budaya. Dalam konteks Aceh, proyek-proyek pembelajaran dapat diarahkan pada penguatan nilai-nilai Islami dan kearifan lokal, seperti tradisi meunasah, praktik budaya Islami, atau proyek sosial berbasis kepedulian umat. Dengan demikian, hakikat kurikulum tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan akhlak yang baik.

Di Aceh, implementasi Kurikulum Merdeka tidak bisa dilepaskan dari Qanun Pendidikan Aceh yang menegaskan pentingnya pendidikan berbasis syariat Islam. Dengan adanya sinergi ini, kurikulum tidak sekadar menjadi perangkat teknis pengajaran, melainkan instrumen ideologis dan kultural yang membentuk identitas generasi muda Aceh sebagai muslim yang berilmu, berkarakter Islami, sekaligus menjadi warga negara yang produktif. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat kurikulum bersifat dinamis, dapat disesuaikan dengan nilai-nilai filosofis dan kebutuhan daerah ¹⁰⁶.

Secara konseptual, hakikat kurikulum tidak hanya sebatas dokumen atau seperangkat rencana pembelajaran, melainkan juga pengalaman belajar yang diperoleh siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Ornstein dan Hunkins ¹⁰⁷ menegaskan bahwa kurikulum harus dipahami sebagai seluruh pengalaman belajar yang direncanakan oleh sekolah untuk membentuk kompetensi dan

¹⁰⁵ Y. Yanu dkk., "Penguatan Pendidikan Karakter ...", hlm. 203

¹⁰⁶ Mujiburrahman, "Pendidikan Islami di Aceh ...," hlm. 51.

¹⁰⁷ Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues ...*, hlm. 33.

karakter siswa. Dalam perspektif Islam, pengalaman belajar ini sekaligus diarahkan untuk menanamkan nilai keimanan, akhlak mulia, serta tanggung jawab sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ¹⁰⁸.

Dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum memiliki dimensi transendental yang membedakannya dengan kurikulum sekuler. Kurikulum Islami bertujuan membentuk manusia yang *insan kāmīl* (manusia paripurna), yakni yang seimbang antara kecerdasan intelektual, kekuatan spiritual, dan kepekaan sosial ¹⁰⁹. Dengan demikian, hakikat Kurikulum Merdeka di Aceh tidak hanya mengarahkan siswa agar cakap dalam bidang akademik, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses pembelajaran menjadi wahana untuk menumbuhkan akhlak Islami.

Oleh karena itu, hakikat Kurikulum Merdeka dapat disimpulkan sebagai seperangkat rencana dan pengalaman belajar yang integratif, fleksibel, dan kontekstual, yang tidak hanya menekankan penguasaan kompetensi abad ke -21, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islami sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Dengan kata lain, kurikulum ini berfungsi sebagai jembatan antara modernitas dan spiritualitas, antara kebutuhan global dan identitas lokal, serta antara capaian akademik dan pembentukan karakter mulia.

Pendekatan Deep Learning sebagai Penguatan Pedagogis dalam Kurikulum Merdeka

Secara konseptual, *deep learning* dalam pendidikan didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan reflektif, serta kemampuan peserta didik untuk menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi sehari-hari. Pendekatan ini memiliki perbedaan fundamental dengan pembelajaran permukaan

¹⁰⁸ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam ...*, hlm. 33.

¹⁰⁹ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 33.

(*surface learning*) yang hanya menekankan hafalan dan penguasaan materi secara mekanis tanpa pemahaman yang mendalam tentang makna dan implikasi dari materi tersebut. Dalam *surface learning*, peserta didik cenderung belajar untuk memenuhi tuntutan tugas atau ujian, tanpa benar-benar menginternalisasi pengetahuan ke dalam struktur kognitif mereka. Sebaliknya, *deep learning* mendorong peserta didik untuk secara aktif membangun makna, mengajukan pertanyaan kritis, mengeksplorasi keterkaitan antar konsep, dan merefleksikan implikasi dari pengetahuan yang mereka peroleh terhadap kehidupan mereka¹¹⁰. Perbedaan paradigmatis ini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap desain pembelajaran, peran guru, strategi evaluasi, dan pada akhirnya terhadap kualitas hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mu'ti telah menggagas tiga komponen utama dalam implementasi pendekatan *deep learning*, yaitu *mindful learning* (pembelajaran sadar), *meaningful learning* (pembelajaran bermakna), dan *joyful learning* (pembelajaran menyenangkan)¹¹¹. Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan memperkuat dalam menciptakan pengalaman belajar yang transformatif bagi peserta didik. *Mindful learning* merujuk pada pembelajaran yang dilakukan dengan kesadaran penuh, di mana peserta didik hadir secara utuh dalam proses pembelajaran, menyadari tujuan belajar, dan merefleksikan proses berpikir mereka sendiri. *Meaningful learning* menekankan pentingnya keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik serta relevansinya dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran tidak menjadi sesuatu yang asing dan terpisah dari realitas keseharian

¹¹⁰ Michael Fullan, Joanne Quinn, dan Joanne McEachen, *Deep Learning: Engage the World Change the World* (Thousand Oaks, CA: Corwin, 2018), hlm. 45.

¹¹¹ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, *Pendekatan Deep Learning dalam Implementasi Kurikulum Merdeka* (Jakarta: Kemendikdasmen RI, 2025), hlm. 8.

mereka. *Joyful learning* menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, membangkitkan rasa ingin tahu, dan memotivasi peserta didik untuk terus belajar tanpa merasa tertekan atau terbebani¹¹². Ketiga prinsip ini selaras secara filosofis dengan semangat Kurikulum Merdeka yang mengedepankan pengalaman belajar yang mendalam, relevan dengan konteks peserta didik, dan membahagiakan bagi seluruh warga sekolah. Kurikulum Merdeka dengan karakteristik utamanya yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan menekankan penguatan Profil Pelajar Pancasila, memberikan ruang yang sangat luas bagi implementasi prinsip-prinsip *deep learning* dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Relevansi pendekatan *deep learning* dengan temuan penelitian ini sangat kuat dan signifikan, terutama dalam kaitannya dengan strategi-strategi internalisasi nilai-nilai Islami yang telah berhasil diidentifikasi melalui penelitian lapangan di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh. Pendekatan *deep learning* yang menekankan pemahaman mendalam dan pembelajaran kontekstual sejalan secara konseptual dengan strategi integrasi nilai Islami dalam materi pembelajaran lintas mata pelajaran, di mana para guru tidak sekadar mentransfer pengetahuan secara mekanis, tetapi juga menanamkan pemahaman spiritual dan moral secara mendalam melalui keterkaitan antara materi pelajaran dengan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Qur'an serta nilai-nilai keislaman yang relevan¹¹³. Dalam praktiknya, ketika guru mengaitkan fenomena alam dengan kebesaran Allah melalui ayat-ayat kauniyah, atau ketika guru menghubungkan konsep keadilan sosial dengan ajaran Islam tentang keseimbangan dan tanggung jawab, sesungguhnya mereka sedang menerapkan prinsip *meaningful learning* yang menjadi salah satu pilar *deep learning*. Peserta didik tidak hanya memahami konsep secara kognitif, tetapi juga merasakan makna

¹¹² Fullan, Quinn, dan McEachen, *Deep Learning ...*, hlm. 48.

¹¹³ Rohmat, "Integrasi Kurikulum dan Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Membentuk Sikap Religius Siswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 8, No. 1 (2020): hlm. 52.

spiritual dan moral dari konsep tersebut, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membekas dalam jiwa mereka.

Lebih jauh, prinsip *meaningful learning* dalam pendekatan *deep learning* juga menguatkan temuan penelitian tentang efektivitas pembelajaran berbasis proyek, khususnya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islami. Hasil wawancara dengan para guru menunjukkan bahwa ketika peserta didik terlibat dalam proyek-proyek yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, seperti proyek lingkungan hidup yang dikaitkan dengan konsep *khalifah* dan tanggung jawab menjaga alam, atau proyek kewirausahaan yang dilandasi nilai kejujuran dan amanah, mereka tidak hanya belajar secara kognitif tentang konsep-konsep tersebut, tetapi juga mengalami dan menghayati nilai-nilai tersebut secara langsung dalam konteks nyata¹¹⁴. Pengalaman langsung ini menciptakan pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna, karena peserta didik tidak hanya mendengar atau membaca tentang nilai-nilai tersebut, tetapi juga mempraktikkannya, merasakan dampaknya, dan merefleksikan maknanya dalam kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran pengalaman (*experiential learning*) yang dikemukakan oleh David Kolb, yang menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika peserta didik melalui siklus pengalaman konkret, refleksi observasi, konseptualisasi abstrak, dan eksperimentasi aktif¹¹⁵. Pendekatan *deep learning* melalui proyek-proyek integratif ini memungkinkan peserta didik untuk melalui seluruh siklus pembelajaran pengalaman tersebut secara utuh.

Hasil penelitian dari berbagai sekolah yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *deep learning* menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran

¹¹⁴ Ida Lutfi Ayuningtyas dan Didi Pramono, "Internalisasi Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di SMAN 11 Semarang," *Journal of Education Research and Evaluation* 7, No. 1 (2023): hlm. 20.

¹¹⁵ David A. Kolb, *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*, Edisi ke-2 (Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2015), hlm. 67.

secara signifikan, terutama dalam hal keterlibatan aktif peserta didik (*student engagement*), pengembangan kemandirian belajar, dan peningkatan kemampuan berpikir kritis. Peserta didik yang belajar dengan pendekatan *deep learning* cenderung lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, lebih proaktif dalam mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban, lebih mampu menganalisis informasi secara kritis, serta lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat dan memecahkan masalah¹¹⁶. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dalam disertasi ini, yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islami melalui strategi keteladanan guru, pembiasaan religius, dan integrasi nilai dalam pembelajaran telah berhasil membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia peserta didik di Sekolah Penggerak Aceh. Kedisiplinan yang terbentuk melalui pembiasaan shalat berjamaah dan tadarus Al-Qur'an, tanggung jawab yang tumbuh melalui penugasan proyek-proyek sosial, serta akhlak mulia yang berkembang melalui keteladanan guru, semuanya merupakan indikator dari pembelajaran mendalam yang tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan spiritual peserta didik. Dengan demikian, pendekatan *deep learning* dapat menjadi kerangka pedagogis yang memperkuat dan melegitimasi strategi-strategi internalisasi nilai yang telah diterapkan di Sekolah Penggerak Aceh, sekaligus memberikan landasan teoretis yang kokoh bagi pengembangan lebih lanjut.

Lebih lanjut, analisis epistemologis terhadap pendekatan *deep learning* menunjukkan bahwa pendekatan ini merupakan transformasi epistemologis dan pedagogis yang fundamental dalam cara pandang terhadap proses belajar dan mengajar. *Deep learning* tidak hanya mengubah metode pembelajaran, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap hakikat pengetahuan, peran guru dan peserta didik, serta tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Dalam perspektif *deep learning*, pengetahuan tidak lagi dipandang sebagai kumpulan fakta yang harus dihafal dan

¹¹⁶ Fullan, Quinn, dan McEachen, *Deep Learning ...*, hlm. 52

diingat, tetapi sebagai pemahaman mendalam yang harus dibangun, diinternalisasi, dan diaplikasikan dalam kehidupan. Guru tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang mentransfer informasi secara satu arah, tetapi sebagai fasilitator, pembimbing, dan mitra belajar yang membantu peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri. Peserta didik tidak lagi menjadi objek pasif yang menerima pengetahuan, tetapi menjadi subjek aktif yang secara sadar dan bertanggung jawab membangun pemahaman mereka¹¹⁷. Transformasi epistemologis ini sangat relevan dengan tujuan internalisasi nilai-nilai Islami dalam pendidikan, yang tidak hanya bertujuan membentuk peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, memiliki kesadaran spiritual yang mendalam, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi nilai, sebagaimana ditegaskan oleh para ahli, bukanlah proses menghafalkan nilai-nilai, melainkan proses menghayati, meresapi, dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai bagian integral dari kepribadian¹¹⁸. Proses ini hanya dapat terjadi melalui pembelajaran yang mendalam dan bermakna, bukan melalui pembelajaran permukaan yang hanya menyentuh aspek kognitif semata.

Integrasi antara pendekatan *deep learning* dan internalisasi nilai-nilai Islami berpotensi menciptakan sinergi yang sangat kuat dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi "beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia." Dimensi ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, penghayatan yang tulus terhadap nilai-nilai spiritual, dan pengamalan yang konsisten dalam perilaku sehari-hari. Ketiganya hanya dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan reflektif, sebagaimana menjadi inti dari pendekatan *deep learning*. Ketika peserta didik belajar tentang nilai-nilai keimanan tidak hanya melalui hafalan,

¹¹⁷ Fullan, Quinn, dan McEachen, *Deep Learning ...*, hlm. 55.

¹¹⁸ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 85.

tetapi melalui perenungan mendalam tentang kebesaran Allah melalui ciptaan-Nya; ketika mereka belajar tentang akhlak mulia tidak hanya melalui ceramah, tetapi melalui keteladanan nyata dan praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari; ketika mereka belajar tentang tanggung jawab sosial tidak hanya melalui teori, tetapi melalui proyek-proyek nyata yang melibatkan mereka dalam memecahkan masalah masyarakat, maka sesungguhnya mereka sedang mengalami pembelajaran mendalam yang akan membentuk karakter mereka secara utuh dan permanen¹¹⁹. Dengan demikian, pendekatan *deep learning* bukan hanya relevan, tetapi bahkan menjadi keharusan dalam upaya internalisasi nilai-nilai Islami yang efektif dan berkelanjutan.

Meskipun pendekatan *deep learning* merupakan wacana yang relatif baru dalam kebijakan pendidikan nasional Indonesia, pemerintah telah merencanakan implementasinya di sekolah-sekolah secara bertahap mulai tahun ajaran 2025/2026¹²⁰. Hal ini menegaskan bahwa pembahasan tentang *deep learning* dalam disertasi ini tidak hanya relevan secara akademis sebagai wacana teoretis, tetapi juga memiliki signifikansi praktis yang sangat tinggi dalam mengantisipasi arah kebijakan pendidikan ke depan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa praktik-praktik internalisasi nilai-nilai Islami yang telah berjalan di Sekolah Penggerak Aceh, seperti keteladanan guru, pembiasaan religius, integrasi nilai dalam pembelajaran, dan pembelajaran berbasis proyek, sesungguhnya telah menerapkan prinsip-prinsip *deep learning* secara implisit. Temuan ini dapat menjadi modal berharga bagi sekolah-sekolah di Aceh untuk mengembangkan lebih lanjut praktik-praktik tersebut dalam kerangka *deep learning* yang lebih sistematis dan terukur.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas guru secara berkelanjutan dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip *deep*

¹¹⁹ Kemendikdasmen, *Pendekatan Deep Learning...*, hlm. 12.

¹²⁰ Kemendikdasmen, *Pendekatan Deep Learning ...*, hlm. 15.

learning, terutama dalam kaitannya dengan internalisasi nilai-nilai Islami. Guru perlu dibekali tidak hanya dengan pemahaman konseptual tentang *deep learning*, tetapi juga dengan keterampilan praktis dalam merancang pembelajaran yang mendalam, mengembangkan proyek-proyek integratif yang bermakna, serta menciptakan suasana belajar yang sadar dan menyenangkan. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem asesmen yang mampu mengukur capaian pembelajaran mendalam, terutama dalam ranah afektif dan spiritual yang menjadi fokus utama internalisasi nilai-nilai Islami. Asesmen tidak lagi cukup hanya mengukur hafalan atau pemahaman permukaan, tetapi harus mampu mengukur sejauh mana peserta didik telah menghayati dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka¹²¹. Pengembangan instrumen asesmen yang valid, reliabel, dan praktis untuk mengukur capaian pembelajaran mendalam dalam ranah afektif dan spiritual menjadi tantangan sekaligus peluang bagi penelitian lanjutan di masa depan.

Dengan demikian, penambahan pembahasan tentang pendekatan *deep learning* dalam disertasi ini akan memperkuat posisi penelitian sebagai karya ilmiah yang tidak hanya membahas fenomena masa kini secara mendalam, tetapi juga responsif dan antisipatif terhadap perkembangan kebijakan dan tren pedagogis terkini. Hal ini sekaligus membuka peluang yang luas bagi penelitian lanjutan untuk mengkaji secara lebih mendalam implementasi *deep learning* berbasis nilai-nilai Islami di Sekolah Penggerak dan sekolah-sekolah lainnya, serta kontribusinya dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual dan kompetitif secara global, tetapi juga kokoh secara spiritual, mulia secara akhlak, dan mampu menjadi *rahmatan lil 'alamin* di tengah peradaban dunia yang semakin kompleks dan dinamis. Integrasi antara pendekatan *deep learning* dan internalisasi nilai-nilai Islami ini berpotensi melahirkan model pendidikan karakter yang autentik, kontekstual, dan transformatif, yang dapat menjadi inspirasi bagi

¹²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 58.

pengembangan pendidikan di Indonesia dan dunia Islam secara lebih luas.

2.3.1 Pengertian Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu kebijakan strategis dalam rangkaian program Merdeka Belajar yang mulai diperkenalkan sejak tahun 2019, dan secara resmi dikukuhkan sebagai bagian dari episode kelima belas kebijakan pendidikan nasional. Kurikulum ini dirancang sebagai kurikulum yang memberikan keleluasaan dan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan guru dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, serta konteks lingkungan sosial dan budaya. Kurikulum Merdeka menekankan keberagaman konten pembelajaran agar peserta didik memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memahami konsep secara mendalam dan mengembangkan kompetensi secara optimal, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun karakter.

Dalam Kurikulum Merdeka, guru memiliki otonomi yang lebih besar dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan strategi, metode, dan perangkat ajar dengan kebutuhan, minat, serta tingkat perkembangan peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak lagi bersifat seragam dan berorientasi pada target materi semata, melainkan lebih berfokus pada proses belajar yang bermakna. Pencapaian Profil Pelajar Pancasila menjadi tujuan utama kurikulum ini, yang diwujudkan melalui pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*). Proyek-proyek tersebut disusun berdasarkan tema-tema yang ditetapkan pemerintah untuk mencapai capaian pembelajaran tertentu, namun tidak terikat secara kaku pada batasan mata pelajaran, sehingga mendorong pembelajaran yang lintas disiplin dan kontekstual.

Konsep pembelajaran yang merdeka, fleksibel, dan menyenangkan dalam Kurikulum Merdeka sejatinya memiliki akar filosofis yang kuat dalam pemikiran tokoh-tokoh pendidikan klasik. Salah satunya adalah Friedrich Froebel, yang meyakini bahwa

bermain merupakan cara belajar yang paling efektif bagi anak-anak. Froebel berpandangan bahwa melalui bermain, anak dapat mengenal lingkungan sekitarnya, memperoleh berbagai pengalaman langsung, serta mengembangkan potensi fisik dan kemampuan berpikir secara alami. Sekolah, menurut Froebel, idealnya menjadi sebuah “republik merdeka” bagi anak-anak, yakni ruang yang memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengekspresikan diri, berkreasi, dan berkembang sesuai dengan keunikan yang dimiliki masing-masing. Pandangan ini menempatkan anak sebagai subjek aktif dalam proses belajar, bukan sekadar objek penerima pengetahuan.¹²²

Pemikiran Froebel kemudian memberikan pengaruh besar terhadap Maria Montessori, yang mengembangkan pendekatan pendidikan komprehensif yang dikenal luas hingga saat ini. Montessori memandang bahwa setiap individu adalah unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga pendidikan harus dirancang untuk menghargai keunikan tersebut. Dalam kurikulum Montessori, peserta didik diposisikan sebagai pembelajar aktif yang hidup dalam komunitas yang saling peduli dan mendukung. Kebebasan yang diberikan kepada peserta didik bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab. Melalui pendekatan ini, peserta didik diarahkan untuk berpikir kritis, bekerja sama, berani mencoba, serta mampu mengenali dan memperbaiki kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Kepercayaan diri, kemandirian, dan antusiasme belajar menjadi tujuan utama yang ingin dicapai dalam pendidikan Montessori.¹²³

Sejalan dengan pemikiran Froebel dan Montessori, tokoh pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara juga mengembangkan konsep pendidikan yang menekankan kemerdekaan belajar peserta didik. Melalui pendirian Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara merancang pendidikan sebagai sebuah “taman” yang selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Taman Siswa bukan sekadar institusi

¹²² Peter Weston, *Friedrich Froebel: His Life, Times & Significance* (London: University of Surrey Roehampton, 2000), hlm. 45–48

¹²³ The Montessori Group, *A Guide to the Montessori Educational System* (United States: The Montessori Group, 2019), hlm. 12–15

pendidikan formal, melainkan sebuah lingkungan belajar yang menyenangkan, menantang, dan memerdekakan. Ki Hadjar Dewantara memahami bahwa bermain merupakan kebutuhan fundamental anak-anak yang berperan penting dalam perkembangan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus memberikan ruang bagi anak untuk bermain, bereksplorasi, dan belajar melalui pengalaman langsung, sehingga potensi peserta didik dapat berkembang secara utuh dan seimbang.¹²⁴

Dalam konteks perkembangan global saat ini, khususnya pada era Revolusi Industri 4.0, Kurikulum Merdeka juga dirancang untuk menjawab tuntutan penguasaan literasi baru. Jika pada masa lalu literasi dipahami sebatas kemampuan membaca dan menulis, maka pada era modern literasi mencakup dimensi yang lebih luas. Literasi data menuntut kemampuan peserta didik untuk membaca, menganalisis, dan memanfaatkan data dalam jumlah besar (big data) secara kritis. Literasi teknologi mengharuskan penguasaan terhadap berbagai aplikasi teknologi, pemahaman cara kerja mesin, serta pengenalan terhadap kecerdasan buatan, coding, dan prinsip-prinsip rekayasa. Sementara itu, literasi manusia menekankan aspek kemanusiaan, seperti kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir empatik, serta memiliki karakter dan etika yang kuat.

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dapat dipahami sebagai kurikulum yang berupaya memadukan kebebasan belajar, penguatan karakter, dan penguasaan kompetensi abad ke-21. Kurikulum ini tidak hanya bertujuan mencetak peserta didik yang cakap secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang mandiri, kreatif, ber karakter, dan siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa.

2.3.2 Landasan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka dirancang sebagai kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas sumber

¹²⁴ Suhartono Wiryopranoto et al., *Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran dan Perjuangannya* (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hlm. 87–92.

daya manusia Indonesia agar mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lokal, nasional, dan global. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut tidak hanya diukur dari capaian akademik semata, tetapi juga dari penguatan karakter, kompetensi, kreativitas, kemandirian, serta kesiapan peserta didik dalam menghadapi tantangan kehidupan abad ke-21. Oleh karena itu, Kurikulum Merdeka memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat sebagai pijakan implementasinya dalam sistem pendidikan nasional.

Secara yuridis, Kurikulum Merdeka berakar pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menegaskan tujuan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusional ini menjadi dasar utama penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada pengembangan potensi manusia Indonesia secara menyeluruh. Selanjutnya, UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) memperkuat peran negara dengan menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan ini menegaskan bahwa kurikulum sebagai jantung pendidikan harus dirancang secara sistematis, adaptif, dan berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan zaman.

Landasan yuridis Kurikulum Merdeka juga tercermin secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konsideran menimbang, ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, serta efisiensi manajemen pendidikan guna menghadapi perubahan kehidupan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan global. Oleh sebab itu, pembaruan kurikulum merupakan keniscayaan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Lebih lanjut, Pasal 3 UU Sisdiknas menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan tersebut

diarahkan pada pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab. Rumusan tujuan ini selaras dengan orientasi Kurikulum Merdeka yang menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik¹²⁵.

Selain itu, Kurikulum Merdeka juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya Nawacita kelima yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Pendidikan diposisikan sebagai instrumen strategis dalam membangun manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Dalam konteks ini, Kurikulum Merdeka hadir sebagai upaya konkret untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran melalui pendekatan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik.

Secara konseptual, Kurikulum Merdeka memiliki keselarasan yang kuat dengan empat pilar pembelajaran UNESCO, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*. Pilar *learning to know* menekankan penguasaan kemampuan kognitif sebagai dasar untuk memahami dunia dan kompleksitasnya, sekaligus menjadi fondasi bagi pembelajaran sepanjang hayat. Pilar *learning to do* menekankan penguasaan keterampilan praktis yang memungkinkan individu berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi global. Pilar *learning to be* menekankan pengembangan kepribadian dan potensi diri secara utuh, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun fisik. Sementara itu, pilar *learning to live together* menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi,

¹²⁵ Suyanto Kusumaryono, “Merdeka Belajar,” Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020, hlm. 3–7.

toleransi, penghormatan terhadap keberagaman budaya, serta kemampuan hidup damai dan harmonis dalam masyarakat plural.¹²⁶

Keempat pilar tersebut menegaskan bahwa pembelajaran tidak boleh berhenti pada proses knowing atau transfer pengetahuan semata, melainkan harus diarahkan pada pembentukan pengalaman belajar yang bermakna. Oleh karena itu, Kurikulum Merdeka mengadopsi pendekatan pembelajaran yang menekankan doing, being, dan living together, yakni pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, mendorong refleksi diri, serta menumbuhkan kesadaran sosial. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma kurikulum social reconstruction yang memandang pendidikan sebagai sarana untuk membentuk individu yang mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan masyarakat.

Dalam desain kurikulum social reconstruction, peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif melalui pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah nyata. Pengalaman belajar yang diperoleh di sekolah diharapkan tidak berhenti pada konteks akademik, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Oleh sebab itu, pembelajaran dirancang dalam bentuk active learning, interaksi dengan lingkungan, serta pelibatan peserta didik dalam berbagai proyek tematik yang relevan dengan realitas sosial di sekitarnya. Proses ini memungkinkan peserta didik mengalami dinamika sosial yang memperkaya pengalaman belajar mereka sebagai bekal kehidupan bermasyarakat di masa depan.

Untuk mendukung paradigma social reconstruction tersebut, Kurikulum Merdeka juga berlandaskan pada teori pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered). Teori ini memandang peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, bukan sekadar objek penerima informasi. Schiro

¹²⁶ Jacques Delors et al., *Learning: The Treasure Within: Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century*, Paris: UNESCO Publishing, 2004, hlm. 85–98.

menegaskan bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara alamiah, serta menjadi agen utama dalam mengaktualisasikan kemampuan dirinya sendiri.⁴⁴ Oleh karena itu, peran guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang bertugas menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kontekstual, dan menstimulasi peserta didik untuk membangun makna belajarnya secara mandiri.

Dengan demikian, landasan Kurikulum Merdeka mencerminkan integrasi antara pijakan konstitusional, kebijakan nasional, paradigma global pendidikan, serta pendekatan pedagogis modern. Kurikulum ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan mutu akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan kompetensi sosial, dan pengembangan potensi peserta didik secara holistik, sehingga selaras dengan tujuan pendidikan nasional dan tantangan global abad ke-21.

2.3.3 Karakteristik Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka dirancang sebagai kurikulum yang bersifat adaptif dan fleksibel guna menjawab tantangan pembelajaran di tengah perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang cepat. Kurikulum ini menekankan penguatan kompetensi esensial dan pembentukan karakter peserta didik, bukan semata-mata penuntasan materi yang bersifat luas namun dangkal. Dalam perjalanannya, Kurikulum Merdeka pada tahap awal dikenal sebagai kurikulum prototipe, yang dikembangkan untuk memberikan ruang inovasi dan refleksi berkelanjutan dalam praktik pembelajaran di satuan pendidikan.¹²⁷

Salah satu karakteristik utama Kurikulum Merdeka adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang dirancang secara khusus untuk menguatkan Profil Pelajar Pancasila sekaligus mengembangkan kompetensi abad ke-21.

¹²⁷ Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum Merdeka*, Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022, hlm. 7–12

Melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan secara konseptual, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi, dan memecahkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Proyek-proyek tersebut mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual.

Karakteristik berikutnya adalah fokus kurikulum pada materi esensial. Kurikulum Merdeka secara sadar menyederhanakan cakupan materi pembelajaran agar guru dan peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pendalaman konsep dasar, khususnya pada kemampuan literasi dan numerasi. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik tidak sekadar menghafal informasi, tetapi benar-benar memahami konsep dan mampu menggunakannya dalam berbagai situasi. Dengan pengurangan beban konten, proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih efektif, reflektif, dan berorientasi pada penguasaan kompetensi inti.

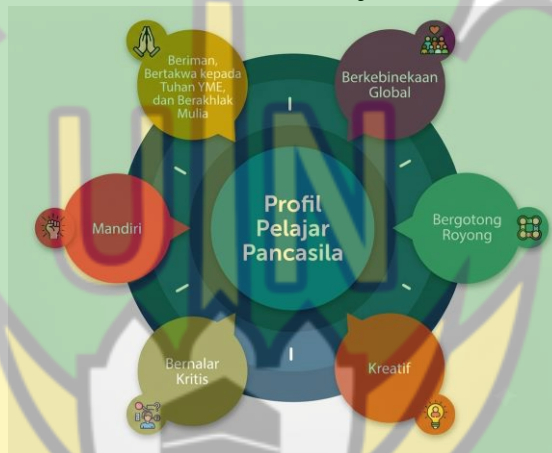
Selain itu, Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas yang luas kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan materi, metode, dan strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, konteks satuan pendidikan, serta kearifan lokal daerah masing-masing. Fleksibilitas ini sejalan dengan paradigma pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar kondusif untuk tumbuhnya kreativitas dan potensi individu peserta didik. Pendekatan ini juga memperkuat peran profesional guru sebagai perancang pembelajaran yang reflektif dan inovatif.¹²⁸

Implementasi pembelajaran berbasis proyek dalam Kurikulum Merdeka secara khusus diwujudkan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Melalui P5, peserta didik

¹²⁸ Michael Stephen Schiro, *Curriculum Theory: Conflicting Visions and Enduring Concerns*, terj. Endah Sulistiowati, *Teori Kurikulum: Visi-Visi yang Saling Bertentangan dan Kekhawatiran Tanpa Henti*, Jakarta: Penerbit Indeks, 2017, hlm. 146–152.

diberi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai isu aktual dan kontekstual, sekaligus menginternalisasi enam dimensi Profil Pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Keenam dimensi ini dirancang sebagai satu kesatuan yang saling terintegrasi dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik secara holistik.

Gambar 2.2 : Profil Pelajar Pancasila



Lebih jauh, pembelajaran berbasis proyek dalam Kurikulum Merdeka memungkinkan terjadinya pembelajaran kontekstual dan eksperimental secara simultan. Peserta didik diajak untuk mempelajari berbagai topik penting yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, seperti isu keberlanjutan lingkungan, toleransi dan keberagaman, kesehatan, budaya lokal, kewirausahaan, serta praktik kehidupan berdemokrasi. Dalam proses ini, peserta didik tidak hanya melakukan eksplorasi ide dan pengetahuan, tetapi juga didorong untuk melakukan aksi nyata sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat di sekitarnya.

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka tidak hanya memposisikan pembelajaran sebagai aktivitas akademik di dalam kelas, tetapi sebagai proses pembentukan pengalaman hidup yang bermakna. Proyek-proyek yang dijalankan peserta didik diharapkan

dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sosial dan budaya mereka, sekaligus membentuk kesadaran sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab. Karakteristik ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang tidak hanya berorientasi pada hasil belajar kognitif, tetapi juga pada penguatan karakter, nilai, dan keterampilan hidup yang relevan dengan tantangan masa depan.

2.3.4 Implementasi Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu transformasi kebijakan pendidikan paling signifikan di Indonesia yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak tahun 2020 melalui program Merdeka Belajar episode kelima belas. Kurikulum ini hadir sebagai respons strategis terhadap berbagai tuntutan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, serta kebutuhan peserta didik untuk menguasai keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis (*critical thinking*), kreativitas (*creativity*), komunikasi (*communication*), dan kolaborasi (*collaboration*). Kehadiran Kurikulum Merdeka tidak dapat dipisahkan dari evaluasi mendalam terhadap implementasi kurikulum sebelumnya, terutama Kurikulum 2013, yang dinilai masih terlalu padat materi dan kurang memberikan ruang bagi pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Lebih dari sekadar penyempurnaan teknis, Kurikulum Merdeka lahir dari kesadaran bahwa sistem pendidikan nasional perlu beradaptasi dengan perubahan paradigma pembelajaran global yang menekankan fleksibilitas, kebermaknaan, dan relevansi dengan kehidupan nyata.

Landasan filosofis Kurikulum Merdeka berakar pada pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang harus selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hadjar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam

konteks ini, Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan, guru, dan peserta didik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan sesuai dengan potensi lokal serta kebutuhan individual peserta didik. Fleksibilitas ini diwujudkan melalui beberapa ciri utama, yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila, fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam dan bermakna, struktur kurikulum yang sederhana dan mudah dipahami, serta penyediaan Platform Merdeka Mengajar sebagai media pendukung bagi guru dalam mengakses berbagai sumber belajar, perangkat ajar, dan pelatihan.

Lebih dari itu, Kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya pembentukan karakter melalui penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang mencakup enam dimensi utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, serta berkebinekaan global. Keenam dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan memperkuat dalam membentuk kepribadian peserta didik secara utuh. Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia menjadi fondasi spiritual dan moral yang melandasi seluruh dimensi lainnya, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila. Dimensi mandiri menekankan pentingnya kemandirian belajar dan tanggung jawab peserta didik terhadap proses perkembangan dirinya sendiri. Dimensi bergotong royong mencerminkan nilai luhur budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan, solidaritas, dan kerja sama. Dimensi bernalar kritis membekali peserta didik dengan kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan secara rasional. Dimensi kreatif mendorong peserta didik untuk menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal dan bermanfaat. Sementara dimensi berkebinekaan global menanamkan sikap saling menghargai terhadap keragaman budaya,

agama, suku, dan pandangan, serta kemampuan beradaptasi dalam pergaulan dunia yang semakin tanpa batas. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, tetapi juga pada pengembangan potensi peserta didik secara holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas secara intelektual, berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Dalam implementasinya, Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan yang luas kepada satuan pendidikan untuk memilih apakah tetap menggunakan Kurikulum 2013, melanjutkan Kurikulum Darurat yang merupakan penyederhanaan dari Kurikulum 2013, atau beralih sepenuhnya ke Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik, kesiapan, dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat diseragamkan secara nasional. Fleksibilitas ini memungkinkan sekolah yang belum siap untuk bertransformasi secara bertahap, sementara sekolah yang telah siap dapat segera mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara penuh. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memberikan dukungan penuh terhadap implementasi Kurikulum Merdeka melalui berbagai kebijakan strategis. Dukungan tersebut mencakup penyediaan perangkat ajar seperti buku teks, modul pembelajaran, dan bahan ajar lainnya yang dapat diakses secara gratis melalui Platform Merdeka Mengajar. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan, baik melalui pelatihan daring, lokakarya, maupun program kemitraan dengan berbagai lembaga pendidikan. Pemerintah juga memberikan jaminan terhadap hak-hak guru, termasuk beban jam mengajar dan tunjangan profesi, sebagai bentuk penghargaan atas peran strategis guru dalam keberhasilan transformasi pendidikan.

Platform Merdeka Mengajar (PMM) menjadi salah satu inovasi paling penting dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Platform ini dirancang sebagai ekosistem digital yang memfasilitasi guru dalam tiga fungsi utama. Pertama, fungsi mengajar, di mana PMM menyediakan berbagai referensi perangkat ajar yang dapat digunakan guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka. Kedua, fungsi belajar, yang memberikan kesempatan yang setara bagi guru di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogis mereka secara fleksibel, kapan pun dan di mana pun, melalui berbagai modul pelatihan, video inspiratif, dan sumber belajar lainnya. Ketiga, fungsi berkarya, yang mendorong guru untuk membangun portofolio hasil karya, berbagi praktik baik, berkolaborasi dengan guru lain, dan saling menginspirasi melalui komunitas belajar yang terbentuk dalam platform. Dengan demikian, PMM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia konten, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi dan pengembangan profesional berkelanjutan yang memberdayakan guru sebagai agen utama transformasi pendidikan.

Perencanaan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka disusun dengan mengacu pada Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang dikembangkan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan berdasarkan visi, misi, dan karakteristik masing-masing. KOSP memuat tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, serta sistem asesmen yang akan digunakan. Guru diberi kebebasan yang luas untuk merancang modul ajar, menentukan alur tujuan pembelajaran, serta mengembangkan asesmen yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, konteks lokal, dan kebutuhan masyarakat sekitar. Otonomi guru dalam merencanakan pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap proses pendidikan, tetapi juga mendorong kreativitas dan inovasi dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal, termasuk nilai-nilai Islami di Aceh, ke dalam pembelajaran. Di sekolah-sekolah yang berlatar

belakang keagamaan, guru dapat mengembangkan modul ajar yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga kaya akan muatan nilai-nilai keislaman, sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang utuh dan bermakna.

Pelaksanaan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka menekankan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan kunci dalam menciptakan pengalaman belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya masing-masing. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan diagnostik yang baik untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar setiap peserta didik, kemudian merancang strategi pembelajaran yang tepat, baik dalam konten, proses, produk, maupun lingkungan belajar. Selain pembelajaran berdiferensiasi, Kurikulum Merdeka juga mengintegrasikan Project Based Learning (PjBL) dan Problem Based Learning (PBL) untuk mendorong peserta didik belajar secara aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi melalui pengalaman langsung dalam memecahkan masalah nyata. Di sekolah penggerak Aceh, strategi ini sering dipadukan dengan praktik keagamaan, misalnya mengaitkan proyek pembelajaran dengan nilai-nilai Al-Qur'an, hadis, atau praktik sosial Islami seperti zakat, infak, sedekah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa Kurikulum Merdeka sangat kompatibel untuk diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal dan keagamaan, sehingga pembelajaran tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan spiritual yang tinggi.

Guru menjadi aktor utama dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Kesiapan guru dalam memahami filosofi, struktur, dan pendekatan pembelajaran Kurikulum Merdeka menjadi

faktor penentu utama. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus memiliki kompetensi pedagogis yang memadai untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan asesmen autentik, serta memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Selain itu, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pembelajaran (*instructional leader*) yang bertanggung jawab untuk menciptakan visi bersama, membangun budaya sekolah yang kondusif, mendukung pengembangan profesional guru, serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Dalam konteks Aceh, kepala sekolah juga bertugas memastikan bahwa muatan lokal Islami dan regulasi daerah, seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional. Hal ini menuntut kepala sekolah untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kedua kerangka kebijakan tersebut, serta kemampuan untuk mengintegrasikannya secara harmonis dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Asesmen dalam Kurikulum Merdeka menekankan pada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif yang berkelanjutan. Asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kemampuan awal, kekuatan, dan kelemahan peserta didik, sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang tepat. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau perkembangan belajar peserta didik, memberikan umpan balik, dan melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Asesmen sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik terhadap capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam Kurikulum Merdeka, asesmen autentik menjadi penekanan utama, yaitu penilaian yang menilai keterampilan nyata peserta didik melalui proyek, portofolio, kinerja, dan produk. Asesmen autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui peserta didik, tetapi juga apa yang dapat mereka lakukan dengan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan

bahwa masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun instrumen asesmen autentik, terutama yang berkaitan dengan pengukuran aspek sikap, nilai-nilai, dan keterampilan spiritual. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di sekolah-sekolah yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam pembelajaran, karena aspek afektif dan spiritual memerlukan instrumen asesmen yang valid, reliabel, dan praktis .

Gambar 2.3 : Kurikulum Merdeka dan PMM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
kemdikbud.go.id

MERDEKA BELAJAR

KURIKULUM MERDEKA DAN PLATFORM MERDEKA MENGAJAR

✓ KURIKULUM MERDEKA

Dalam pemulihan pembelajaran, sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih, yaitu apakah akan menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), atau Kurikulum Merdeka.

Keunggulan Kurikulum Merdeka

- Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar jadi lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan
- Memberi kemerdekaan lebih kepada peserta didik, guru, dan sekolah dalam memilih pembelajaran yang sesuai
- Lebih relevan dan interaktif

Dukungan penerapan Kurikulum Merdeka untuk guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan diberikan berupa penyediaan perangkat ajar yaitu buku teks dan bahan ajar pendukung, pelatihan dan penyediaan sumber belajar bagi guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah; dan jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru

✓ PLATFORM MERDEKA MENGAJAR

Ada tiga jenis kegiatan yang bisa dilakukan guru dengan platform Merdeka Mengajar, yaitu Mengajar, Belajar, dan Berkarya

- Mengajar**
Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktisi mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka.
- Belajar**
Platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapan pun dan di mana pun
- Berkarya**
Platform Merdeka Mengajar mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik

Pada fitur Bukti Karya Saya, guru dapat membangun portfolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi

Kemdikbud.RI
 Kemdikbud_RI
 kemdikbud.ri
 KEMENDIKBUD RI
 kemdikbud ri

Dalam implementasinya, Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan yang luas kepada satuan pendidikan untuk memilih opsi kurikulum yang paling sesuai dengan kondisi, kesiapan, dan kebutuhan masing-masing sekolah. Pemerintah memberikan tiga pilihan kebijakan, yaitu tetap menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, melanjutkan Kurikulum Darurat yang merupakan penyederhanaan dari Kurikulum 2013 sebagai respons terhadap situasi darurat pembelajaran, atau beralih sepenuhnya ke Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik, kesiapan, dan sumber daya yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat diseragamkan secara nasional dalam satu kebijakan yang kaku. Fleksibilitas ini memungkinkan sekolah yang belum siap untuk bertransformasi secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi objektif mereka, sementara sekolah yang telah siap dapat segera mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara penuh dan menjadi pelopor dalam transformasi pendidikan nasional.

Kurikulum Merdeka memiliki sejumlah keunggulan yang membedakannya secara signifikan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pertama, kurikulum ini menekankan fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya, bukan berdasarkan tingkatan kelas semata. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk memastikan bahwa peserta didik benar-benar menguasai kompetensi dasar yang diperlukan sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks, sehingga pembelajaran menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Pengurangan cakupan materi yang terlalu luas dan padat memberikan ruang bagi guru dan peserta didik untuk melakukan eksplorasi, diskusi, dan refleksi yang lebih mendalam terhadap setiap topik pembelajaran, sehingga pemahaman yang diperoleh lebih kokoh dan tahan lama. Kedua, Kurikulum Merdeka memberikan kemandirian yang lebih besar kepada siswa, guru, dan sekolah dalam memilih cara belajar yang paling sesuai. Siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya melalui

pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan kokurikuler. Guru diberi otonomi untuk merancang strategi, metode, dan media pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum operasional yang sesuai dengan konteks lokal, kearifan budaya, dan kebutuhan masyarakat sekitar. Ketiga, Kurikulum Merdeka dirancang agar pembelajaran lebih relevan dan interaktif, dengan mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, sehingga mereka dapat melihat secara langsung manfaat dan aplikasi dari apa yang mereka pelajari. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru sebagai satu-satunya sumber informasi, tetapi mendorong interaksi multiarah antara guru, siswa, dan sumber belajar lainnya, termasuk lingkungan alam dan sosial .

Pemerintah memberikan dukungan yang sangat kuat dan komprehensif terhadap implementasi Kurikulum Merdeka melalui berbagai kebijakan strategis. Dukungan tersebut mencakup penyediaan perangkat ajar yang lengkap dan mudah diakses, seperti buku teks, modul pembelajaran, bahan ajar digital, dan berbagai sumber belajar lainnya yang dapat digunakan oleh guru secara gratis. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan, baik melalui pelatihan daring yang fleksibel, lokakarya tatap muka, maupun program kemitraan dengan berbagai lembaga pendidikan dan organisasi profesi. Pemerintah juga memberikan jaminan terhadap hak-hak profesional guru, termasuk beban jam mengajar yang wajar dan tunjangan profesi, sebagai bentuk penghargaan atas peran strategis guru dalam keberhasilan transformasi pendidikan. Dukungan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa Kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi dokumen kebijakan yang ideal di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Platform Merdeka Mengajar (PMM) menjadi salah satu instrumen paling strategis dalam mendukung implementasi

Kurikulum Merdeka, dengan menyediakan tiga jenis kegiatan utama yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengembangkan kompetensi profesional mereka. Pertama, kegiatan mengajar, di mana platform ini menyediakan berbagai referensi perangkat ajar yang lengkap dan mudah diakses, mulai dari modul ajar, bahan presentasi, lembar kerja peserta didik, hingga instrumen asesmen, yang semuanya dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka. Guru dapat mengunduh, mengadaptasi, dan mengembangkan perangkat ajar tersebut sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik mereka, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Kedua, kegiatan belajar, yang memberikan kesempatan yang setara bagi guru di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali, untuk terus meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogis mereka secara fleksibel, kapan pun dan di mana pun, melalui berbagai modul pelatihan, video inspiratif, webinar, dan sumber belajar lainnya yang tersedia dalam platform. Guru dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar mereka masing-masing, tanpa harus meninggalkan tugas mengajar untuk waktu yang lama. Ketiga, kegiatan berkarya, yang mendorong guru untuk membangun portofolio hasil karya mereka, berbagi praktik baik yang telah berhasil mereka lakukan, berkolaborasi dengan guru lain dari berbagai daerah, dan saling menginspirasi melalui komunitas belajar yang terbentuk dalam platform]. Dengan demikian, Platform Merdeka Mengajar tidak hanya berfungsi sebagai penyedia konten dan sumber belajar, tetapi juga sebagai ekosistem digital yang memberdayakan guru sebagai pembelajar sepanjang hayat, inovator, dan agen utama transformasi pendidikan di Indonesia. Melalui ketiga fungsi ini, guru didorong untuk terus berkembang, berinovasi, dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus membangun jejaring profesional yang kuat dan saling mendukung.

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang memberikan ruang kebebasan lebih besar bagi sekolah untuk menyesuaikan kebutuhan pembelajaran. Sekolah

diberi keleluasaan untuk memilih apakah tetap menggunakan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat yang merupakan penyederhanaan dari Kurikulum 2013, atau beralih pada Kurikulum Merdeka. Fleksibilitas ini memungkinkan setiap satuan pendidikan dapat menyesuaikan pilihan kurikulum dengan kondisi, kebutuhan, serta kesiapan sekolah dan peserta didiknya.

Kurikulum Merdeka memiliki sejumlah keunggulan yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya. Pertama, kurikulum ini menekankan pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya, sehingga proses belajar tidak hanya menekankan pada keluasan materi, tetapi lebih mendalam, bermakna, dan berorientasi pada pemahaman. Kedua, kurikulum ini memberi ruang lebih luas bagi kemandirian, baik bagi siswa, guru, maupun sekolah dalam menentukan metode, strategi, serta model pembelajaran yang paling sesuai. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih personal, fleksibel, dan berpusat pada kebutuhan nyata peserta didik. Ketiga, Kurikulum Merdeka dirancang agar pembelajaran lebih relevan dan interaktif, dengan mengaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi.

Pemerintah turut mendukung implementasi Kurikulum Merdeka melalui berbagai kebijakan nyata. Dukungan tersebut mencakup penyediaan perangkat ajar seperti buku teks dan bahan pembelajaran, penyelenggaraan pelatihan bagi guru serta tenaga kependidikan, hingga penyediaan sumber belajar yang dapat diakses dengan mudah. Selain itu, pemerintah juga menjamin hak guru dalam hal beban jam mengajar dan tetap memberikan tunjangan profesi sebagai bentuk penghargaan atas peran penting guru dalam transformasi pendidikan.

Sejalan dengan kebijakan kurikulum, pemerintah juga menghadirkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai sarana digital untuk membantu guru dalam menjalankan pembelajaran. Platform ini menawarkan tiga fungsi utama. Pertama, fungsi

Mengajar, di mana PMM menyediakan berbagai referensi perangkat ajar yang dapat digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Kedua, fungsi Belajar, yang memberikan kesempatan setara bagi guru di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan kompetensi, baik secara akademik maupun pedagogis, dengan cara yang fleksibel kapan pun dan di mana pun. Ketiga, fungsi Berkarya, yang mendorong guru untuk membangun portofolio hasil karya, membagikan praktik baik, serta berkolaborasi dengan guru lain, sehingga terbentuk ekosistem pembelajaran yang inovatif dan saling menginspirasi.

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar merupakan dua instrumen yang saling melengkapi. Kurikulum Merdeka memberi arah dan fleksibilitas dalam pembelajaran, sementara PMM menyediakan wadah digital yang mendukung guru untuk terus belajar, mengajar dengan lebih efektif, dan berkarya secara kreatif demi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Menurut Kemendikbudristek¹²⁹, pelaksanaan Kurikulum Merdeka bertujuan memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan, guru, dan peserta didik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan sesuai dengan potensi lokal. Fleksibilitas ini diwujudkan melalui beberapa ciri utama: (1) pembelajaran berbasis proyek, (2) fokus pada materi esensial, (3) struktur kurikulum yang sederhana, dan (4) platform *Merdeka Mengajar* sebagai media dukungan guru.

Perencanaan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka disusun dengan mengacu pada Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Guru diberi kebebasan untuk merancang modul ajar, alur tujuan pembelajaran, serta asesmen yang sesuai dengan karakteristik siswa.

¹²⁹ Kemendikbudristek, *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022), hlm. 33.

Parker & Raihani¹³⁰ menegaskan bahwa otonomi guru dalam merencanakan pembelajaran akan meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) terhadap proses pendidikan, sehingga guru dapat lebih kreatif dalam mengintegrasikan Nilai-nilai lokal, termasuk nilai Islami di Aceh.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka menekankan pendekatan pembelajaran diferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa yang beragam. Tomlinson¹³¹ menyebutkan bahwa pembelajaran diferensiasi merupakan kunci dalam menciptakan pengalaman belajar yang inklusif, di mana setiap siswa dapat berkembang sesuai potensinya. Selain itu, terdapat integrasi Project Based Learning (PjBL) dan Problem Based Learning (PBL) untuk mendorong siswa belajar secara aktif dan kolaboratif¹³².

Di sekolah penggerak Aceh, strategi ini sering dipadukan dengan praktik keagamaan, misalnya mengaitkan proyek pembelajaran dengan Nilai-nilai Al-Qur'an, hadis, atau praktik sosial Islami. Hal ini memperlihatkan bahwa Kurikulum Merdeka sangat kompatibel untuk diintegrasikan dengan Nilai-nilai lokal.

Guru menjadi aktor utama dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Sari & Utami¹³³ menekankan bahwa kesiapan guru dalam merancang asesmen autentik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Selain itu, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pembelajaran (*instructional leader*) yang mendukung guru melalui supervisi, pelatihan, dan penciptaan budaya sekolah yang kondusif¹³⁴.

Dalam konteks Aceh, kepala sekolah juga bertugas memastikan bahwa muatan lokal Islami dan regulasi daerah, seperti

¹³⁰ L. Parker dan R. Raihani, "Democratizing Indonesia: Community Participation," *Educational Management Administration & Leadership* 39, No. 6 (2011): hlm. 712.

¹³¹ Carol A. Tomlinson, *The Differentiated Classroom* ..., hlm. 33.

¹³² I. Rahmawati dan A. Nurhayati, "Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka ...", hlm. 570.

¹³³ D. Sari dan R. Utami, "Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka ...", hlm. 49.

¹³⁴ H. A. R. Tilaar, *Kebijakan Pendidikan* ..., hlm. 33.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendidikan, dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka menekankan pada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Bloom et al.¹³⁵ menyatakan bahwa asesmen seharusnya bukan sekadar mengukur hasil belajar, tetapi juga berfungsi formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dalam Kurikulum Merdeka, asesmen autentik menjadi penekanan utama, yaitu penilaian yang menilai keterampilan nyata siswa melalui proyek, portofolio, dan kinerja.

Namun, hasil penelitian (Rahmawati & Nurhayati, 2022) menunjukkan bahwa masih banyak guru yang kesulitan dalam menyusun instrumen asesmen autentik. Hal ini sejalan dengan temuan di Aceh bahwa keterbatasan kompetensi guru dalam evaluasi berbasis kompetensi menjadi tantangan utama.

Salah satu inovasi penting dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka adalah hadirnya Platform Merdeka Mengajar (PMM). Aplikasi ini menyediakan berbagai sumber daya digital, mulai dari contoh modul ajar, video inspiratif, hingga pelatihan daring untuk guru¹³⁶.

PMM sangat membantu guru dalam menyesuaikan diri dengan kurikulum baru, meskipun beberapa kendala teknis masih ditemukan, seperti keterbatasan infrastruktur digital di daerah tertentu¹³⁷.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh, tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan-tantangan ini muncul sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma pendidikan yang cukup mendasar, dari pendekatan yang berpusat pada guru dan berorientasi pada penguasaan materi menuju pendekatan yang berpusat pada peserta

¹³⁵ Benjamin S. Bloom, J. Thomas Hastings, dan George F. Madaus, *Handbook on Formative and Summative Evaluation ...*, hlm. 33.

¹³⁶ Kemendikbudristek, *Merdeka Belajar Episode 15 ...*, hlm. 10.

¹³⁷ II. Rahmawati dan A. Nurhayati, "Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka ...", hlm. 572.

didik dan berorientasi pada pengembangan kompetensi dan karakter. Salah satu tantangan paling mendasar adalah kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang menjadi ciri utama Kurikulum Merdeka. Pembelajaran berbasis proyek menuntut guru untuk tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga memiliki keterampilan dalam merancang proyek yang relevan, membimbing peserta didik selama proses pengerjaan proyek, melakukan asesmen autentik terhadap proses dan hasil proyek, serta mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam satu tema proyek. Guru-guru yang selama ini terbiasa dengan metode ceramah dan pembelajaran konvensional mengalami kesulitan dalam melakukan transisi menuju peran baru sebagai fasilitator, mentor, dan mitra belajar bagi peserta didik. Diperlukan waktu, pelatihan, dan pendampingan yang intensif agar guru dapat menguasai keterampilan-keterampilan baru ini secara memadai.

Tantangan kedua yang tidak kalah pentingnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil dan wilayah dengan akses terbatas. Kurikulum Merdeka, dengan segala inovasinya, sangat bergantung pada ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran, akses terhadap sumber belajar digital, pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar, serta pelaksanaan asesmen berbasis komputer. Namun kenyataannya, masih banyak sekolah di berbagai daerah, termasuk di beberapa wilayah di Aceh, yang mengalami keterbatasan akses terhadap jaringan internet yang stabil, kekurangan perangkat keras seperti komputer, laptop, atau tablet, serta minimnya dukungan teknis untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur teknologi. Kesenjangan digital ini berpotensi memperlebar ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan, antara sekolah di Jawa dan di luar Jawa, serta antara sekolah yang memiliki akses memadai dengan sekolah yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur teknologi.

Tantangan ketiga adalah kesulitan yang dialami guru dalam mengembangkan asesmen autentik berbasis kompetensi, terutama

untuk mengukur aspek sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang menjadi fokus utama Kurikulum Merdeka. Guru-guru selama ini lebih terbiasa dengan asesmen tradisional yang mengandalkan tes tertulis untuk mengukur penguasaan materi secara kognitif. Ketika dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan asesmen autentik yang mencakup penilaian proyek, portofolio, kinerja, dan penilaian diri, banyak guru merasa kebingungan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai. Mereka kesulitan dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang spesifik dan terukur, merancang instrumen asesmen yang valid dan reliabel, melakukan observasi dan pencatatan yang sistematis terhadap perkembangan peserta didik, serta memberikan umpan balik yang konstruktif berdasarkan hasil asesmen. Akibatnya, asesmen yang dilakukan sering kali masih bersifat subjektif, tidak konsisten, dan tidak mampu memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian kompetensi peserta didik secara utuh.

Tantangan keempat yang sangat relevan dengan konteks Provinsi Aceh adalah integrasi muatan lokal, khususnya nilai-nilai Islami, ke dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Aceh sebagai daerah dengan keistimewaan otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang bernafaskan Islami sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Namun demikian, para guru masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam pembelajaran lintas mata pelajaran secara sistematis dan terukur. Belum tersedia pedoman praktis yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Islami seperti keteladanan, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian sosial, dan nilai-nilai akhlak mulia lainnya dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran umum seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ketiadaan pedoman ini menyebabkan upaya integrasi nilai-nilai Islami sering kali bersifat sporadis, tidak konsisten, dan sangat bergantung pada inisiatif dan

keaktivitas individu guru masing-masing. Akibatnya, potensi besar Kurikulum Merdeka untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman belum dapat dioptimalkan secara maksimal di sekolah-sekolah Aceh.

Kelima tantangan tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain, sehingga membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi dalam upaya mengatasinya. Kesiapan guru dalam pembelajaran berbasis proyek, misalnya, tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kemampuan guru dalam mengembangkan asesmen autentik. Demikian pula, integrasi nilai-nilai Islami ke dalam pembelajaran tidak akan efektif jika guru belum menguasai metodologi pembelajaran berbasis proyek dan asesmen autentik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif yang mencakup peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, penyediaan infrastruktur teknologi yang merata di seluruh wilayah, pengembangan pedoman praktis integrasi nilai-nilai Islami ke dalam pembelajaran, serta penguatan kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi ini, diharapkan berbagai tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap, sehingga Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara efektif dan optimal di seluruh sekolah di Provinsi Aceh, dan pada akhirnya melahirkan generasi muda Aceh yang tidak hanya unggul secara intelektual dan kompetitif secara global, tetapi juga kokoh secara spiritual dan mulia secara akhlak sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal Aceh.

Sevea¹³⁸ mengingatkan bahwa pendidikan Islami di era modern harus mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan jati diri, sehingga pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Aceh harus tetap memperkuat nilai Islami sebagai ciri khas pendidikan daerah.

¹³⁸ Teren Sevea, "Islamic Education and Modern Challenges ...", hlm. 350.

7. Peluang Integrasi dengan Pendidikan Islami

Kurikulum Merdeka memberi ruang besar untuk integrasi nilai Islami, khususnya dalam konteks sekolah berbasis agama atau di daerah dengan kekhasan Islami seperti Aceh. Hidayat¹³⁹ menegaskan bahwa internalisasi nilai Islami dalam kurikulum nasional dapat memperkuat aspek moral dan spiritual siswa, sehingga mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter Islami.

Integrasi ini diwujudkan dalam berbagai praktik, misalnya menyisipkan ayat Al-Qur'an dalam proyek pembelajaran, melaksanakan program pembiasaan religius, serta menjadikan kegiatan ekstrakurikuler Islami sebagai bagian dari kurikulum.

Integrasi nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka tidak hanya bersifat simbolik atau tambahan semata, melainkan dapat diposisikan sebagai kerangka filosofis yang menjiwai setiap aspek pembelajaran. Sebagai contoh, prinsip rahmatan lil-'alamin dapat dijadikan landasan dalam pengembangan proyek berbasis lingkungan hidup, di mana siswa tidak hanya belajar tentang konservasi alam, tetapi juga memahami bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30). Dengan cara ini, pembelajaran tidak hanya mengasah kompetensi akademik, tetapi juga membentuk kesadaran ekologis Islami yang lebih mendalam.

Selain itu, praktik pembelajaran berbasis proyek dapat diarahkan untuk memperkuat nilai gotong royong Islami (ta'awun) dan kepedulian sosial (ukhuwah). Misalnya, siswa dapat dilibatkan dalam proyek layanan masyarakat seperti bakti sosial, pengelolaan zakat sekolah, atau program literasi Al-Qur'an di meunasah dan dayah. Hal ini sejalan dengan gagasan Ayuningtyas & Pramono¹⁴⁰ yang menegaskan bahwa pendidikan karakter dalam konteks Profil

¹³⁹ R. Hidayat, "Internalisasi Nilai-nilai Islami ...", hlm. 125.

¹⁴⁰ Ika Lestari Ayuningtyas dan D. Pramono, "Internalisasi Pendidikan Karakter ...", hlm. 18

Pelajar Pancasila dapat berjalan efektif apabila dipadukan dengan nilai-nilai religius yang hidup di masyarakat.

Lebih jauh, integrasi nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka di Aceh juga memiliki dimensi yuridis dan kultural. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015¹⁴¹ secara jelas mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan harus memasukkan muatan Islami sebagai bagian integral dari kurikulum. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai instrumen nasional, tetapi juga harus selaras dengan kearifan lokal. Hal ini memperlihatkan adanya kesinambungan antara kebijakan pusat dan daerah, yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi model pendidikan berbasis kearifan lokal untuk daerah lain di Indonesia.

Dari perspektif praktis, peluang integrasi ini juga dapat memperkaya Profil Pelajar Pancasila dengan menambahkan dimensi keislaman yang lebih eksplisit. Misalnya, dimensi "beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME" dalam Profil Pelajar Pancasila dapat dioperasionalisasikan melalui program tahfizul Qur'an, kegiatan shalat berjamaah, atau diskusi tematik berbasis hadis. Dengan demikian, pelaksanaan Kurikulum Merdeka tidak sekadar menyiapkan siswa menjadi insan yang cerdas, tetapi juga insan kamil menurut perspektif pendidikan Islam¹⁴².

Lebih jauh lagi, integrasi ini dapat menjawab tantangan globalisasi yang sering kali membawa nilai-nilai asing yang tidak sejalan dengan budaya lokal. Melalui Kurikulum Merdeka yang bernafaskan Islami, peserta didik di Aceh tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi era disrupsi dengan keterampilan abad 21, tetapi juga dibentengi dengan identitas keislaman yang kuat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sevea¹⁴³ bahwa pendidikan Islam modern harus

¹⁴¹ *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ...*, hlm. 5.

¹⁴² Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 25.

¹⁴³ Teren Sevea, "Islamic Education and Modern Challenges ...", hlm. 352.

mampu menggabungkan relevansi global dengan kekhasan lokal agar tidak kehilangan arah dan jati diri.

Dengan demikian, pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Aceh dapat dipandang bukan hanya sebagai program teknokratis pendidikan nasional, melainkan juga sebagai sebuah upaya integratif untuk membangun generasi yang cerdas, berakarakter, dan berakhlak Islami. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka tidak bertentangan dengan pendidikan Islam, melainkan justru dapat menjadi sarana untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islami ke dalam kehidupan nyata peserta didik, sehingga melahirkan insan yang ‘alim, ‘abid, dan akhlaq karimah.

2.3.5 Filosofi Kurikulum Merdeka

Filosofi Kurikulum Merdeka berakar dari gagasan Ki Hadjar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yang menekankan pentingnya kebebasan belajar, keteladanan guru, serta pendidikan yang sesuai dengan kodrat anak. Menurut Dewantara¹⁴⁴, pendidikan seharusnya “menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi, tingginya.” Filosofi ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membangun kepribadian, akhlak, dan keterampilan sosial.

Konsep pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara didasarkan pada tiga semboyan utamanya, yaitu: *Ing ngarsa sung tuladha* (di depan memberi teladan), *Ing madya mangun karsa* (di tengah membangun semangat), dan *Tut wuri handayani* (di belakang memberi dorongan)¹⁴⁵. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, filosofi ini relevan untuk menekankan peran guru sebagai fasilitator dan motivator, bukan sekadar penyampai informasi. Guru dituntut menjadi teladan dalam nilai moral, membangun motivasi belajar

¹⁴⁴ E. Sutrisno, "Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara: Relevansi dengan Pendidikan Nasional," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 23, No. 2 (2018): hlm. 153.

¹⁴⁵ Ki Hajar Dewantara, *Pemikiran tentang Pendidikan ...*, hlm. 35.

siswa, serta memberikan ruang kebebasan bagi siswa untuk berkembang sesuai potensinya¹⁴⁶.

Kebijakan *Merdeka Belajar* yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 merupakan upaya revitalisasi filosofi Dewantara dalam konteks modern. Menurut Kemendikbud¹⁴⁷, *Merdeka Belajar* menekankan pada fleksibilitas kurikulum, penyederhanaan asesmen, penguatan literasi dan numerasi, serta kemandirian sekolah dalam mengelola pembelajaran. Dalam hal ini, peserta didik ditempatkan sebagai subjek utama pembelajaran yang aktif, kreatif, dan merdeka menentukan jalannya proses belajar.

Merdeka Belajar juga berupaya menghapus paradigma lama yang terlalu berorientasi pada ujian dan capaian kognitif semata, dengan menggantinya menjadi pendidikan holistik yang mengutamakan pembentukan karakter, sesuai dengan tuntutan abad ke 21¹⁴⁸.

Profil Pelajar Pancasila merupakan manifestasi konkret dan operasional dari filosofi Kurikulum Merdeka yang menjadi kompas utama dalam seluruh proses pembelajaran di satuan pendidikan. Profil ini dirancang untuk menjawab pertanyaan fundamental tentang kompetensi dan karakter seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan nasional Indonesia. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, profil ini menggambarkan pelajar Indonesia yang diharapkan memiliki enam dimensi utama yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk kepribadian yang utuh. Keenam dimensi tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang holistik, di mana pengembangan satu dimensi akan berdampak positif pada pengembangan dimensi lainnya, sehingga pelajar Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi

¹⁴⁶ H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional ...*, hlm. 112.

¹⁴⁷ Kemendikbud, *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ...*, hlm. 50.

¹⁴⁸ L. Parker dan R. Raihani, "Democratizing Indonesia ...", hlm. 718.

pribadi yang seimbang, baik dalam aspek spiritual, sosial, emosional, maupun intelektual.

Dimensi pertama dan paling fundamental adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi ini menjadi fondasi spiritual dan moral yang melandasi seluruh dimensi lainnya, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila. Pelajar Indonesia diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama yang dianutnya, mampu menginternalisasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari, serta mewujudkannya dalam perilaku akhlak mulia, baik dalam hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, maupun dengan alam semesta. Akhlak mulia ini mencakup berbagai nilai seperti kejujuran, keadilan, kesantunan, kedisiplinan, tanggung jawab, kasih sayang, empati, dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.

Dimensi kedua adalah berkebinekaan global, yang menekankan pentingnya pelajar Indonesia mampu mempertahankan identitas dan budaya luhur bangsa, sekaligus terbuka dan mampu berinteraksi dengan keragaman budaya global. Pelajar Indonesia diharapkan dapat mengenali, menghargai, dan merayakan perbedaan budaya, suku, agama, dan pandangan, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Mereka juga diharapkan memiliki kemampuan komunikasi lintas budaya yang efektif, sikap toleran terhadap perbedaan, serta komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal.

Dimensi ketiga adalah bergotong royong, yang mencerminkan nilai luhur budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan, solidaritas, dan kerja sama. Pelajar Indonesia diharapkan memiliki kemampuan untuk bekerja sama secara kolaboratif dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, menunjukkan sikap sukarela dan rela berkorban untuk kepentingan bersama, serta mampu membangun sinergi dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. Gotong royong tidak hanya terbatas pada kerja sama dalam

kelompok, tetapi juga mencakup kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kemauan untuk terlibat aktif dalam memecahkan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Dimensi keempat adalah mandiri, yang menekankan pentingnya kemandirian belajar dan tanggung jawab peserta didik terhadap proses perkembangan dirinya sendiri. Pelajar Indonesia diharapkan memiliki kesadaran akan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya, serta mampu mengembangkan potensi tersebut secara optimal melalui proses belajar yang proaktif dan berkelanjutan. Mereka juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri, mengambil inisiatif, membuat keputusan secara bertanggung jawab, serta memiliki ketahanan dan kegigihan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan.

Dimensi kelima adalah bernalar kritis, yang membekali peserta didik dengan kemampuan menganalisis informasi secara mendalam, mengevaluasi argumen dan bukti secara objektif, serta mengambil keputusan secara rasional berdasarkan data dan fakta yang valid. Pelajar Indonesia diharapkan mampu berpikir secara sistematis dan logis, tidak mudah menerima informasi tanpa verifikasi, mampu mengajukan pertanyaan kritis, serta memiliki keterbukaan terhadap perspektif dan pandangan yang berbeda. Kemampuan bernalar kritis ini sangat penting di era informasi yang dibanjiri oleh berbagai konten yang tidak semuanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi keenam adalah kreatif, yang mendorong peserta didik untuk menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal, inovatif, dan bermanfaat. Pelajar Indonesia diharapkan memiliki kemampuan berpikir divergen yang mampu menghasilkan berbagai alternatif solusi, berani mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru, serta mampu mengekspresikan ide-ide kreatif dalam berbagai bentuk karya, baik dalam bidang seni, sains, teknologi, maupun kewirausahaan. Kreativitas menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan abad ke-21 yang membutuhkan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan yang cepat dan kompleks.

Keenam dimensi Profil Pelajar Pancasila ini menjadi fondasi karakter siswa yang tidak hanya unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki identitas moral dan spiritual yang kuat. Penguatan profil pelajar Pancasila dapat dilakukan secara terintegrasi melalui berbagai jalur, baik pembelajaran intrakurikuler yang sistematis, kegiatan kokurikuler yang memperdalam dan memperkaya pengalaman belajar, maupun kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Di daerah-daerah dengan kekhasan budaya dan agama, seperti Provinsi Aceh, dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dapat diperkuat dengan integrasi nilai-nilai Islami yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sehingga profil pelajar Pancasila tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kebangsaan universal, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal masyarakat setempat. Dengan demikian, Profil Pelajar Pancasila menjadi jembatan yang menghubungkan cita-cita pendidikan nasional dengan realitas sosial-budaya masyarakat Indonesia yang majemuk, sekaligus menjadi kompas yang mengarahkan seluruh upaya pendidikan untuk melahirkan generasi emas Indonesia yang berkarakter, berdaya saing, dan berkontribusi positif bagi peradaban dunia¹⁴⁹

Dimensi ini menjadi fondasi karakter siswa yang tidak hanya unggul dalam sains dan teknologi, tetapi juga memiliki identitas moral dan spiritual yang kuat. Menurut Yanu et al.¹⁵⁰, penguatan profil pelajar Pancasila dapat dilakukan melalui pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta integrasi dengan muatan lokal, termasuk Nilai-nilai Islami di Aceh.

Filosofi Kurikulum Merdeka memiliki keselarasan dengan pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Seperti ditegaskan oleh Al-Attas¹⁵¹, tujuan pendidikan Islam adalah menghasilkan insan kamil yang berilmu,

¹⁴⁹ Kemendikbudristek, *Program Sekolah Penggerak ...*, hlm. 15.

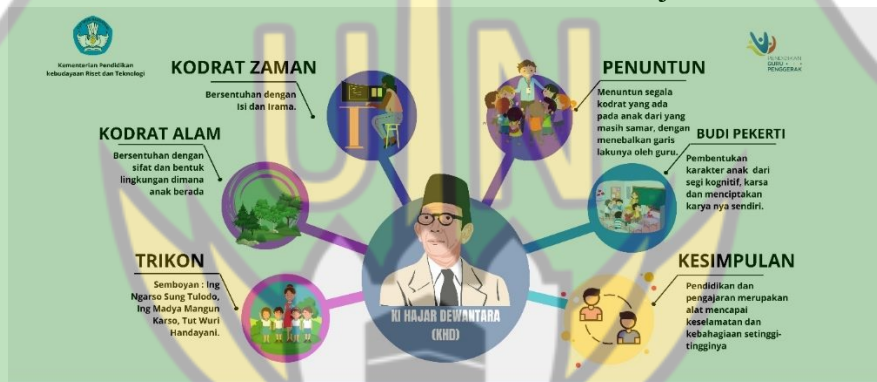
¹⁵⁰ Y. Yanu dkk., "Penguatan Pendidikan Karakter ...", hlm. 207

¹⁵¹ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 28.

beradab, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, integrasi nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka akan memperkuat dimensi profil pelajar Pancasila, khususnya iman, takwa, dan akhlak mulia.

Dalam konteks Aceh, filosofi Kurikulum Merdeka dapat diperkaya dengan muatan lokal berbasis syariat Islam yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga kontekstual dan sesuai dengan kearifan lokal Islami.

Gambar 2.4 : Falsafah Pendidikan Ki Hajar Dewantara



Pemikiran mendasar Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan telah menjadi fondasi filosofis bagi gerakan Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Inti dari falsafah ini adalah pendidikan sebagai proses tuntunan yang menghormati kodrat setiap anak, bukan pemaksaan.

Pendidikan yang baik harus selaras dengan Kodrat Alam, yaitu konteks lingkungan tempat anak hidup dan berkembang. Namun, pendidikan juga harus responsif terhadap Kodrat Zaman, dengan menyesuaikan diri pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika masyarakat.

Peran guru digambarkan secara luhur dalam prinsip Trikon, yang tercermin dalam semboyan: Ing Ngarso Sung Tulodo (di depan memberi teladan), Ing Madya Mangun Karso (di tengah membangun semangat dan prakarsa), dan Tut Wuri Handayani (di belakang

memberikan dukungan dan dorongan). Dengan demikian, guru berperan sebagai penuntun yang membimbing anak agar kodrat dan potensinya dapat berkembang secara optimal.

Tujuan pendidikan tidak berhenti pada kecerdasan intelektual semata, tetapi lebih menekankan pembentukan Budi Pekerti-karakter yang kuat yang terwujud dalam moralitas, rasa, dan karya nyata.

Pada akhirnya, seluruh proses pendidikan ini bermuara pada satu tujuan tertinggi: mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi anak. Inilah esensi dari *Merdeka Belajar*: menciptakan ruang di mana setiap peserta didik dapat tumbuh menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter, cakap, dan bahagia sesuai dengan kodrat dan zamannya.

Falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara (KHD) menjadi dasar filosofis bagi lahirnya konsep *Merdeka Belajar* dan Kurikulum Merdeka di Indonesia. Pemikiran KHD menekankan bahwa pendidikan harus berpijak pada kodrat anak, kodrat alam, serta kodrat zaman, sehingga anak dapat berkembang secara utuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Pertama, Kodrat Alam menekankan bahwa pendidikan harus selaras dengan lingkungan di mana anak hidup. Lingkungan sosial, budaya, maupun geografis menjadi faktor yang tidak bisa dipisahkan dari proses pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tidak boleh terlepas dari realitas kehidupan anak, melainkan harus mengakar pada kondisi dan kearifan lokal yang membentuk identitas mereka.

Kedua, Kodrat Zaman menunjukkan bahwa pendidikan juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak didik tidak cukup hanya memahami tradisi atau nilai lokal, tetapi juga harus dibekali keterampilan dan pengetahuan agar mampu beradaptasi dengan tuntutan era modern dan global. Dengan begitu, pendidikan selalu relevan dan tidak tertinggal oleh perubahan zaman.

Ketiga, Trikon, yaitu semboyan terkenal *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*. Semboyan ini menggambarkan tiga peran penting seorang pendidik: sebagai teladan ketika berada di depan, sebagai penggerak dan pemberi semangat ketika berada di tengah, dan sebagai pembimbing yang memberi dorongan ketika berada di belakang. Filosofi ini mengandung makna bahwa pendidikan tidak bersifat otoriter, tetapi mendampingi anak dalam setiap tahap perkembangan mereka.

Keempat, Penuntun. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa peran guru bukanlah membentuk anak sesuai kehendak orang dewasa, melainkan menuntun kodrat anak agar berkembang optimal sesuai potensi masing-masing. Anak diibaratkan sebagai benih yang sudah memiliki bakat alami, sementara guru berfungsi sebagai penuntun agar potensi tersebut tumbuh dengan baik sesuai jalurnya.

Kelima, Budi Pekerti. Falsafah KHD menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada ranah kognitif atau penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moralitas. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, serta mampu mewujudkan nilai-nilai itu dalam karya nyata. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi juga dari sikap, perilaku, dan kontribusi nyata anak bagi masyarakat.

Akhirnya, falsafah pendidikan KHD mengarahkan bahwa tujuan utama pendidikan adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi anak. Pendidikan harus membentuk manusia yang merdeka lahir dan batin, mampu mengembangkan potensinya, serta hidup bahagia dalam kebersamaan dengan masyarakatnya.

Dengan dasar falsafah ini, Kurikulum Merdeka berusaha mewujudkan pendidikan yang lebih kontekstual, relevan dengan perkembangan zaman, serta menekankan pembentukan karakter dan kemandirian anak didik sesuai semangat Ki Hajar Dewantara.

2.3.6 Harmonisasi Akhlak Islami dengan Profil Pelajar Pancasila

Filosofi Kurikulum Merdeka yang berakar pada pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang menuntun kodrat anak memiliki titik temu yang kuat dan mendasar dengan konsep akhlak dalam pendidikan Islam. Keduanya sama-sama berpijak pada keyakinan bahwa tujuan pendidikan bukan sekadar mentransfer pengetahuan atau mengembangkan keterampilan teknis semata, tetapi yang lebih hakiki adalah membentuk manusia yang berakhlak, bermoral, dan mampu hidup harmonis dengan sesama manusia, alam lingkungan, serta dengan Tuhannya. Ki Hadjar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus "menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya". Konsep "keselamatan dan kebahagiaan" dalam pandangan Ki Hadjar ini sejatinya selaras dengan konsep *sa'ādah* (kebahagiaan hakiki) dalam pemikiran Ibnu Miskawaih dan Al-Ghazali, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya bersifat jasmani dan material, tetapi juga rohani dan spiritual, yang hanya dapat dicapai melalui keseimbangan jiwa dan akhlak mulia.

Profil Pelajar Pancasila yang menjadi tujuan utama Kurikulum Merdeka mencakup enam dimensi yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain, yaitu: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; (2) berkebinekaan global; (3) bergotong royong; (4) mandiri; (5) bernalar kritis; dan (6) kreatif. Di antara keenam dimensi ini, dimensi pertama dan paling fundamental adalah "beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia". Dimensi ini menjadi fondasi spiritual dan moral yang melandasi seluruh dimensi lainnya, karena tanpa keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, dimensi-dimensi lain seperti kemandirian, gotong royong, nalar kritis, dan kreativitas dapat kehilangan arah moral dan justru berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang tidak baik. Dimensi pertama ini

memiliki keselarasan substantif yang sangat kuat dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan pembentukan akhlak mulia (*al-akhlaq al-karimah*) sebagai inti sekaligus tujuan tertinggi dari seluruh proses pendidikan, sebagaimana ditegaskan oleh para tokoh pendidikan Islam klasik seperti Ibnu Miskawaih, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun. Dalam konteks Aceh, dimensi ini tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi justru diperkaya dengan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tanpa mengurangi esensi kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pengayaan ini justru memperkuat makna "beriman dan bertakwa" yang dalam konteks Aceh memiliki kedalaman spiritual yang khas, sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kebangsaan tidak berada dalam posisi dikotomis atau konfliktual, melainkan dapat berjalan secara sinergis dan saling menguatkan.

Ibnu Miskawaih melalui teori *The Golden Mean* yang terkenal mengajarkan bahwa akhlak mulia dicapai melalui keseimbangan (*al-wasathiyyah*) antara dua ekstrem yang tercela, yaitu kekurangan (*tafrīt*) dan kelebihan (*ifrāt*). Dalam perspektif ini, nilai-nilai dalam Profil Pelajar Pancasila seperti mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif dapat dipandang sebagai manifestasi dari keseimbangan akhlak dalam konteks kehidupan modern yang kompleks dan dinamis. Kemandirian, misalnya, bukan berarti individualisme yang memisahkan diri dari masyarakat, melainkan adalah manifestasi dari *'iffah* (menahan diri) yang seimbang antara ketergantungan berlebihan yang melahirkan sikap manja dan lemah, di satu sisi, dan sikap individualistis yang menolak bantuan dan kerja sama dengan orang lain, di sisi lain. Kemandirian yang Islami adalah kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri sekaligus tetap terbuka untuk bekerja sama dan saling membantu. Gotong royong adalah wujud konkret dari nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 2 yang memerintahkan umat Islam untuk tolong-menolong dalam kebaikan

dan ketakwaan. Nilai gotong royong dalam Profil Pelajar Pancasila menjadi semakin bermakna ketika dihayati sebagai bagian dari ajaran agama yang mulia, bukan sekadar kearifan lokal turun-temurun. Bernalar kritis adalah bagian dari penggunaan akal ('*aql*') yang merupakan karunia terbesar Allah kepada manusia, namun harus digunakan secara seimbang antara fanatisme buta yang menutup pikiran dari kebenaran, di satu sisi, dan skeptisisme berlebihan yang menolak segala bentuk otoritas dan kebenaran, di sisi lain. Bernalar kritis yang Islami adalah kemampuan berpikir yang mendalam, analitis, dan reflektif, namun tetap dalam bingkai iman dan keyakinan kepada Allah sebagai sumber segala kebenaran. Kreativitas adalah wujud aktualisasi potensi manusia sebagai *khalīfah* di muka bumi yang diberi amanah untuk memakmurkan alam semesta, namun harus diarahkan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi umat manusia, bukan untuk merusak atau mengeksploitasi.

Al-Ghazali dalam karya-karyanya, terutama *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* dan *Mizān al-'Amal*, menekankan pentingnya tazkiyat al-nafs (penyucian jiwa) sebagai inti dari pendidikan yang sejati. Baginya, pendidikan tidak cukup hanya mengisi pikiran dengan pengetahuan, tetapi juga harus membersihkan hati dari sifat-sifat tercela (*al-akhlāq al-madzmūmah*) seperti sombong, iri, dengki, dan tamak, serta menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji (*al-akhlāq al-mahmūdah*) seperti ikhlas, tawaduk, sabar, dan syukur. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, penyucian jiwa ini dapat diwujudkan melalui proses refleksi kritis yang menjadi bagian integral dari pembelajaran berbasis proyek (P5). Dalam P5, peserta didik tidak hanya diajak untuk menghasilkan karya atau produk yang inovatif, tetapi yang lebih penting adalah merenungkan makna yang mendalam dari apa yang mereka lakukan, mengoreksi diri terhadap kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi, dan terus memperbaiki kualitas moral dan spiritual mereka. Proyek tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses pembelajaran yang dialami, termasuk bagaimana peserta didik

belajar bekerja sama, mengatasi konflik, bertanggung jawab, dan berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Refleksi menjadi momen penting di mana peserta didik diajak untuk melihat ke dalam diri, mengevaluasi niat, sikap, dan perilaku mereka, serta merencanakan perbaikan ke depan. Proses refleksi ini sejalan dengan konsep *muḥāsabah* (introspeksi diri) dalam ajaran Islam yang menjadi bagian dari *tazkiyat al-nafs*. Dengan demikian, P5 tidak hanya menjadi wahana pengembangan kompetensi, tetapi juga sarana penyucian jiwa yang membentuk peserta didik menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berhati bersih dan berakhlak mulia.

Dengan demikian, harmoni antara akhlak Islami dan Profil Pelajar Pancasila tidak hanya memungkinkan, tetapi bahkan menjadi keharusan dalam konteks pendidikan di Aceh. Kekhasan Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam dan memiliki Qanun Pendidikan yang menegaskan penyelenggaraan pendidikan secara Islami dan terpadu, justru menjadi modal sosial dan kultural yang sangat berharga untuk mengembangkan model integrasi yang lebih mendalam dan substantif. Kurikulum Merdeka di Aceh dapat dikembangkan sebagai model pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kebijakan nasional, menjadikan akhlak sebagai ruh yang menjiwai seluruh proses pembelajaran, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Model ini tidak hanya akan menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual dan kompetitif secara global, tetapi yang lebih penting, mulia secara akhlak, kokoh secara spiritual, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Mereka akan menjadi generasi yang tidak hanya mampu menjawab tantangan zaman, tetapi juga menjadi *rahmatan lil ‘alamin* di tengah peradaban dunia yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan demikian, integrasi akhlak Islami dalam Kurikulum Merdeka bukanlah bentuk perlawanan terhadap kebijakan nasional, melainkan wujud aktualisasi nyata dari semangat Merdeka Belajar yang memberikan ruang bagi keragaman

dan kekhasan lokal untuk berkembang, sekaligus memperkuat fondasi moral dan spiritual bangsa Indonesia yang religius.

2.3.7 Strategi Implementasi di Sekolah Penggerak

Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak merupakan bagian integral dari kebijakan *Merdeka Belajar* yang dirancang untuk mendorong transformasi pendidikan nasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Menurut Kemendikbudristek¹⁵², Sekolah Penggerak berperan sebagai model penggerak perubahan, yang diharapkan menjadi pusat inovasi dan praktik baik dalam pembelajaran. Agar tujuan tersebut tercapai, dibutuhkan strategi implementasi yang terarah, partisipatif, dan sesuai dengan konteks lokal, termasuk di daerah berciri khas Islami seperti Aceh.

Guru dan kepala sekolah menjadi aktor utama dalam strategi implementasi Kurikulum Merdeka. Menurut Fullan¹⁵³, transformasi pendidikan hanya dapat berhasil apabila para pelaku pendidikan memiliki kapasitas dan motivasi untuk berubah. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan, *coaching*, dan pendampingan menjadi strategi utama dalam meningkatkan pemahaman guru tentang filosofi, struktur, dan pendekatan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka.

Kemendikbudristek¹⁵⁴ melalui *Platform Merdeka Mengajar* menyediakan modul pelatihan, perangkat ajar, dan forum berbagi praktik baik sebagai bentuk dukungan konkret terhadap guru. Dengan adanya pelatihan dan fasilitasi ini, guru diharapkan mampu mengintegrasikan Nilai-nilai Islami dan kearifan lokal ke dalam desain pembelajaran yang lebih kontekstual.

Strategi implementasi juga mencakup penyusunan KOSP yang disesuaikan dengan visi, misi sekolah, kebutuhan peserta didik,

¹⁵² Kemendikbudristek, *Program Sekolah Penggerak ...*, hlm. 27.

¹⁵³ Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change*, Edisi ke-4 (New York: Teachers College Press, 2007), hlm. 65.

¹⁵⁴ Kemendikbudristek, *Program Sekolah Penggerak ...*, hlm. 33.

dan karakteristik lingkungan sosial budaya. Menurut Ornstein & Hunkins ¹⁵⁵, perencanaan kurikulum harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks Aceh, KOSP harus selaras dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menekankan integrasi nilai Islami ke dalam proses pembelajaran dan budaya sekolah.

Strategi penting lainnya adalah penerapan pembelajaran diferensiasi yang memperhatikan kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Tomlinson ¹⁵⁶ menekankan bahwa diferensiasi pembelajaran mendorong keterlibatan siswa secara aktif dan optimal sesuai potensinya. Dalam Kurikulum Merdeka, diferensiasi dikombinasikan dengan *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)* yang memberi ruang luas bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, kolaborasi, dan kepedulian sosial melalui proyek lintas disiplin ilmu.

Di Aceh, proyek P5 dapat diintegrasikan dengan tema, tema Islami, seperti *projek eco, masjid, projek ekonomi syariah sekolah*, atau *projek literasi Al-Qur'an*. Integrasi ini sejalan dengan pandangan Hidayat ¹⁵⁷ bahwa internalisasi nilai Islami dalam kurikulum nasional dapat memperkuat karakter religius peserta didik.

Budaya sekolah Islami menjadi strategi implementasi yang krusial. Menurut Muhaimin ¹⁵⁸, pendidikan Islam tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga harus tercermin dalam iklim, aturan, dan kebiasaan sehari-hari di sekolah. Di Sekolah Penggerak, budaya Islami dapat diwujudkan melalui kegiatan rutin seperti doa bersama, kajian agama, shalat berjamaah, dan pembiasaan salam, sapa.

Selain itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi Kurikulum

¹⁵⁵ Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues ...*, hlm. 89.

¹⁵⁶ Carol A. Tomlinson, *The Differentiated Classroom ...*, hlm. 52.

¹⁵⁷ R. Hidayat, "Internalisasi Nilai-nilai Islami ...", hlm. 128.

¹⁵⁸ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam ...*, hlm. 144.

Merdeka. Epstein ¹⁵⁹ menyebutkan bahwa kolaborasi sekolah dengan keluarga dan komunitas dapat meningkatkan motivasi belajar, disiplin, serta internalisasi nilai pada peserta didik. Di Aceh, peran komite sekolah, tokoh agama, dan lembaga dayah dapat memperkuat kolaborasi ini.

Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak perlu dilengkapi dengan sistem evaluasi berkelanjutan. Stufflebeam ¹⁶⁰ melalui *CIPP Model* menekankan pentingnya evaluasi konteks, input, proses, dan produk untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Evaluasi bukan hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga perkembangan karakter, spiritualitas, dan keterampilan abad ke-21.

Guru dan kepala sekolah diharapkan melakukan refleksi rutin terhadap praktik pembelajaran dan hasil proyek P5, serta memperbaiki kelemahan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, dan perbaikan. Hal ini sejalan dengan gagasan Bloom et al. ¹⁶¹ tentang evaluasi formatif dan sumatif yang saling melengkapi.

Lebih jauh, strategi evaluasi dan refleksi berkelanjutan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas administratif, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran institusional. Evaluasi yang dilakukan secara partisipatif-melibatkan guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, bahkan komunitas lokal-dapat membentuk budaya reflektif yang mendorong sekolah untuk senantiasa beradaptasi dengan perubahan. Fullan ¹⁶² menegaskan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan bergantung pada kemampuan organisasi sekolah untuk belajar dari pengalamannya sendiri (*learning organization*). Dengan demikian, refleksi menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa inovasi

¹⁵⁹ Joyce L. Epstein, *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*, Edisi ke-2 (Boulder, CO: Westview Press, 2011), hlm. 120.

¹⁶⁰ Daniel L. Stufflebeam, "The CIPP Model for Evaluation ...", hlm. 40.

¹⁶¹ Benjamin S. Bloom, J. Thomas Hastings, dan George F. Madaus, *Handbook on Formative and Summative Evaluation ...*, hlm. 215.

¹⁶² Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change ...*, hlm. 72.

tidak berhenti pada tahap perencanaan, melainkan terus berkembang sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Dalam konteks Aceh, refleksi berkelanjutan juga dapat diarahkan untuk menilai sejauh mana nilai Islami benar-benar terinternalisasi dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya, tidak hanya mengukur keberhasilan proyek P5 dari aspek keterampilan akademik, tetapi juga menilai apakah siswa menunjukkan peningkatan dalam hal disiplin shalat, adab kepada guru, kepedulian sosial, dan semangat ukhuwah. Dengan model evaluasi semacam ini, implementasi Kurikulum Merdeka akan selaras dengan tujuan Qanun Pendidikan Aceh yang menekankan pentingnya membentuk generasi Islami yang berilmu dan berakhlak mulia¹⁶³.

Selain itu, strategi implementasi harus memperhatikan penguatan kapasitas evaluasi berbasis data. Ghozali¹⁶⁴ menyebutkan bahwa analisis data yang sistematis sangat membantu sekolah dalam mengambil keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making). Sekolah Penggerak di Aceh dapat memanfaatkan instrumen asesmen berbasis teknologi, seperti e-portofolio dan aplikasi asesmen daring, untuk memantau perkembangan siswa tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga keterampilan sosial-emosional dan spiritual. Dengan begitu, evaluasi tidak berhenti sebagai laporan tertulis, melainkan menjadi sumber informasi strategis bagi perbaikan berkelanjutan.

Strategi lainnya adalah membangun jejaring antar-Sekolah Penggerak untuk saling bertukar pengalaman, tantangan, dan solusi. Wenger¹⁶⁵ dalam konsep *Communities of Practice* menjelaskan bahwa pembelajaran akan lebih efektif apabila berlangsung dalam komunitas yang saling berbagi praktik nyata. Sekolah Penggerak di Aceh dapat membangun forum rutin dengan sekolah lain, baik di

¹⁶³ *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan* ..., hlm. 8.

¹⁶⁴ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 155.

¹⁶⁵ Etienne Wenger, *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 85.

tingkat provinsi maupun nasional, untuk memperkaya strategi implementasi Kurikulum Merdeka. Dengan adanya jejaring ini, setiap sekolah tidak berjalan sendiri, melainkan saling memperkuat dalam menghadapi tantangan implementasi.

Akhirnya, strategi implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak harus dipandang sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan inovasi. Dengan memperkuat kapasitas guru, menyusun KOSP yang kontekstual, menerapkan pembelajaran diferensiasi dan proyek P5, membangun budaya sekolah Islami, melibatkan komunitas, serta melakukan evaluasi reflektif dan berbasis data, Kurikulum Merdeka dapat benar-benar menjadi instrumen transformasi pendidikan di Aceh. Pada akhirnya, strategi-strategi tersebut tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas dan kompetitif secara global, tetapi juga berakhlak mulia, sesuai dengan visi Profil Pelajar Pancasila yang sejalan dengan nilai-nilai Islami.

Selain evaluasi formal, penting juga untuk menekankan evaluasi partisipatif, yaitu keterlibatan siswa, orang tua, dan masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Evaluasi partisipatif memungkinkan munculnya perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas pembelajaran, karena tidak hanya menilai aspek akademik, tetapi juga sejauh mana pembelajaran telah berhasil membentuk karakter Islami, menumbuhkan keterampilan sosial, dan memperkuat ikatan antara sekolah dengan komunitas. Dengan cara ini, sekolah penggerak di Aceh dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pusat inovasi sekaligus pusat pembudayaan nilai.

Lebih jauh lagi, strategi implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability). Implementasi kurikulum tidak boleh berhenti pada inovasi awal atau semangat sementara, tetapi perlu ditopang dengan kebijakan sekolah jangka panjang, pembiayaan yang berkesinambungan, serta mekanisme monitoring yang

konsisten dari dinas pendidikan daerah. Tilaar ¹⁶⁶ menekankan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan sangat ditentukan oleh adanya kesinambungan antara kebijakan nasional, dukungan lokal, dan kapasitas kelembagaan sekolah itu sendiri.

Dalam konteks Aceh, strategi implementasi juga menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam bentuk integrasi nilai Islami dengan kebijakan nasional. Misalnya, penyusunan KOSP di Sekolah Penggerak Aceh tidak hanya mengacu pada standar nasional yang ditetapkan Kemendikbudristek, tetapi juga harus sesuai dengan Qanun Pendidikan Aceh. Integrasi regulasi ini memerlukan strategi kolaboratif antara kepala sekolah, guru, pengawas, dan tokoh agama agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, integrasi ini dapat menjadi nilai tambah bagi Sekolah Penggerak di Aceh, karena menghadirkan kurikulum yang lebih kontekstual dan religius.

Aspek lain yang perlu ditekankan adalah penguatan kapasitas digital. Platform Merdeka Mengajar (PMM) telah menjadi salah satu tonggak penting dalam mendukung guru, namun pemanfaatannya masih menghadapi kendala di beberapa sekolah di Aceh akibat keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, strategi implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Aceh harus mencakup pelatihan literasi digital bagi guru, dukungan perangkat teknologi, serta penyediaan akses internet yang merata. Hal ini sesuai dengan gagasan Tomlinson ¹⁶⁷ bahwa pembelajaran diferensiasi di abad ke-21 hanya dapat berjalan efektif apabila didukung dengan sarana teknologi yang memadai.

Terakhir, strategi implementasi juga harus memperhatikan aspek monitoring berbasis penelitian (research-based monitoring). Artinya, setiap proses implementasi sebaiknya tidak hanya dievaluasi secara administratif, tetapi juga dikaji secara ilmiah melalui penelitian tindakan kelas (PTK), evaluasi program berbasis CIPP, atau studi longitudinal. Dengan cara ini, Sekolah Penggerak

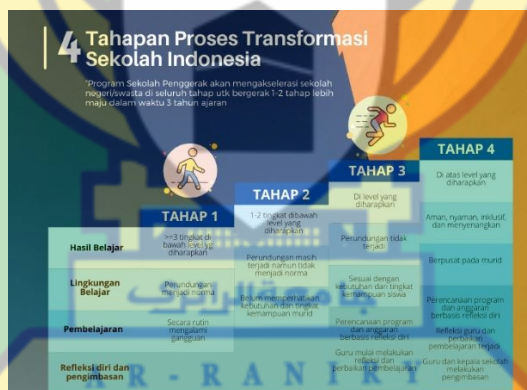
¹⁶⁶ H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* ..., hlm. 118.

¹⁶⁷ Carol A. Tomlinson, *The Differentiated Classroom* ..., hlm. 61.

dapat terus memperbaiki praktiknya secara ilmiah dan evidence-based. Sejalan dengan pendapat Fullan¹⁶⁸, inovasi pendidikan hanya akan bertahan apabila terus diuji, dipelajari, dan disesuaikan dengan dinamika yang ada di lapangan.

Dengan demikian, strategi implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Aceh harus bersifat holistik, kolaboratif, dan berkelanjutan, mencakup penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah, perencanaan berbasis KOSP, penerapan pembelajaran diferensiasi dan P5, pembentukan budaya sekolah Islami, keterlibatan komunitas, evaluasi partisipatif, hingga monitoring berbasis penelitian. Strategi yang komprehensif inilah yang pada akhirnya dapat memastikan bahwa Sekolah Penggerak di Aceh bukan hanya menjadi pelaksana Kurikulum Merdeka, tetapi juga menjadi model pendidikan Islami-modern yang mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Gambar 2.5 : Tahapan Proses Transformasi Sekolah Indonesia



Dalam kerangka Program Sekolah Penggerak, proses transformasi sekolah di Indonesia dirancang melalui empat tahapan berjenjang yang menggambarkan peningkatan kualitas sekolah secara sistematis dan terukur. Program ini bertujuan agar sekolah negeri maupun swasta dapat naik satu hingga dua tahap lebih maju

¹⁶⁸ Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change ...*, hlm. 80.

dalam kurun waktu tiga tahun ajaran, melalui intervensi kebijakan yang terstruktur, pendampingan intensif, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Keempat tahapan ini mencakup empat aspek utama yang menjadi indikator kemajuan sekolah, yaitu hasil belajar peserta didik, kualitas lingkungan belajar, efektivitas proses pembelajaran, serta praktik refleksi diri dan pengimbasan yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah.

Tahap pertama merupakan kondisi awal yang paling memprihatinkan dan menjadi titik tolak intervensi Program Sekolah Penggerak. Pada tahap ini, hasil belajar peserta didik berada pada posisi tiga tingkat atau lebih di bawah level yang diharapkan, menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara capaian aktual dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Lingkungan belajar di sekolah pada tahap ini sangat tidak kondusif, di mana perundungan atau bullying telah menjadi norma yang diterima dan dipraktikkan secara luas dalam keseharian interaksi warga sekolah, tanpa adanya upaya pencegahan dan penanganan yang efektif. Proses pembelajaran secara rutin mengalami gangguan, baik yang bersumber dari faktor internal seperti ketidaksiapan guru dan siswa, maupun faktor eksternal seperti intervensi kegiatan lain yang tidak terencana dengan baik. Lebih memprihatinkan lagi, praktik refleksi diri dan pengimbasan sama sekali belum terlihat, menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah belum memiliki kesadaran dan kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap praktik pembelajaran mereka, apalagi untuk berbagi praktik baik dengan sekolah lain.

Tahap kedua menunjukkan adanya perbaikan meskipun belum signifikan. Hasil belajar peserta didik meningkat menjadi satu hingga dua tingkat di bawah level yang diharapkan, menandakan adanya kemajuan meskipun target nasional masih belum tercapai. Lingkungan belajar mulai menunjukkan perbaikan, di mana perundungan masih terjadi namun belum menjadi norma yang diterima secara luas, dan mulai ada kesadaran untuk mengatasi perilaku bullying. Proses pembelajaran mulai berjalan lebih baik,

namun guru belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid secara individual, sehingga pembelajaran masih bersifat seragam untuk semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan potensi, minat, dan gaya belajar mereka. Refleksi diri mulai dilakukan, namun hasil refleksi tersebut belum digunakan secara optimal dalam perencanaan program dan anggaran sekolah, sehingga masih ada kesenjangan antara hasil evaluasi dengan tindakan perbaikan yang dilakukan.

Tahap ketiga menandai pencapaian level yang diharapkan dalam berbagai aspek. Hasil belajar peserta didik telah mencapai level yang ditargetkan, menunjukkan bahwa intervensi Program Sekolah Penggerak mulai membuahkan hasil yang signifikan. Lingkungan belajar menjadi lebih aman dan kondusif karena perundungan tidak lagi terjadi, berkat adanya sistem pencegahan dan penanganan yang efektif serta budaya sekolah yang positif. Proses pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa, mencerminkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi keragaman peserta didik. Refleksi diri guru dan kepala sekolah telah menjadi praktik yang membudaya, dan yang lebih penting, hasil refleksi tersebut digunakan sebagai dasar dalam perencanaan program dan anggaran sekolah. Guru juga telah mampu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan hasil refleksi, menunjukkan adanya siklus perbaikan berkelanjutan dalam praktik pembelajaran.

Tahap keempat merupakan kondisi ideal yang menjadi tujuan akhir Program Sekolah Penggerak. Pada tahap ini, hasil belajar peserta didik melampaui level yang diharapkan, menunjukkan keunggulan dan keistimewaan sekolah dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Lingkungan belajar sepenuhnya aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah, menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung optimalisasi potensi setiap individu. Proses pembelajaran sepenuhnya berpusat pada murid, di mana siswa menjadi subjek aktif dalam pembelajaran, guru berperan sebagai

fasilitator yang membimbing, dan pembelajaran dirancang berdasarkan minat, bakat, serta kebutuhan individual peserta didik. Refleksi diri dan pembelajaran berjalan secara berkesinambungan, membentuk siklus perbaikan yang terus-menerus. Perencanaan program dan anggaran sekolah sepenuhnya berbasis pada hasil refleksi yang mendalam dan komprehensif. Lebih dari itu, guru dan kepala sekolah tidak hanya mampu memperbaiki praktik di sekolah mereka sendiri, tetapi juga aktif melakukan pengimbasan ke sekolah lain, berbagi praktik baik, dan menjadi agen transformasi pendidikan yang memberikan dampak positif bagi ekosistem pendidikan yang lebih luas.

Keempat tahapan transformasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sekolah merupakan proses bertahap yang membutuhkan waktu, konsistensi, dan dukungan sistemik. Tidak ada lompatan instan dari kondisi terpuruk menuju keunggulan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang melewati berbagai fase perkembangan. Program Sekolah Penggerak dirancang untuk mempercepat perjalanan ini melalui intervensi yang tepat sasaran, pendampingan intensif, serta penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru sebagai aktor utama perubahan. Dengan memahami karakteristik setiap tahapan, sekolah dapat melakukan diagnosis diri secara akurat, merumuskan strategi perbaikan yang tepat, dan mengukur kemajuan yang telah dicapai secara objektif. Pada akhirnya, transformasi sekolah ini bertujuan untuk mewujudkan visi pendidikan nasional, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan, yang mampu menghasilkan peserta didik dengan hasil belajar unggul, karakter kuat, dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan.

Transformasi sekolah di Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak dibagi dalam empat tahapan utama yang menunjukkan perkembangan kualitas sekolah dalam aspek hasil belajar, lingkungan belajar, proses pembelajaran, serta refleksi diri dan pengimbasan.

Pada Tahap 1, kondisi sekolah berada pada tingkat yang sangat rendah. Hasil belajar siswa setidaknya tiga tingkat di bawah level yang diharapkan. Lingkungan sekolah kurang kondusif karena perundungan (bullying) telah menjadi norma yang diterima sehari-hari. Proses pembelajaran sering terganggu sehingga tujuan pembelajaran sulit tercapai. Pada tahap ini juga refleksi diri maupun kegiatan pengimbasan belum dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah.

Memasuki Tahap 2, terdapat perbaikan walaupun belum signifikan. Hasil belajar siswa meningkat, meskipun masih 1–2 tingkat di bawah level yang seharusnya. Perundungan masih terjadi, namun tidak lagi menjadi norma utama di sekolah. Proses pembelajaran mulai berjalan lebih baik, tetapi guru belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan dan kemampuan murid secara individual. Refleksi diri mulai dilakukan, meski perencanaan program maupun anggaran sekolah belum sepenuhnya berbasis pada hasil refleksi tersebut.

Pada Tahap 3, sekolah sudah mencapai level hasil belajar yang diharapkan. Lingkungan belajar menjadi lebih aman karena perundungan tidak lagi terjadi. Proses pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan siswa, sehingga lebih inklusif dan mendukung perkembangan murid secara holistik. Guru mulai melakukan refleksi diri yang nyata, kemudian hasil refleksi tersebut digunakan dalam penyusunan program, anggaran, serta pelaksanaan pembelajaran. Guru juga mampu menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi diri.

Sedangkan Tahap 4 merupakan kondisi ideal yang menjadi tujuan Program Sekolah Penggerak. Pada tahap ini, hasil belajar siswa melampaui level yang diharapkan. Lingkungan belajar sepenuhnya aman, nyaman, inklusif, serta menyenangkan. Proses pembelajaran benar-benar berpusat pada murid, mendorong partisipasi aktif dan pengembangan potensi siswa secara optimal. Perencanaan program dan anggaran sekolah sudah sepenuhnya berbasis refleksi diri dan bersifat berkesinambungan. Refleksi guru

serta praktik pembelajaran juga dilakukan secara terus-menerus untuk perbaikan kualitas. Selain itu, guru dan kepala sekolah mampu melakukan pengimbasan ke sekolah lain, yaitu menyebarkan praktik-praktik baik agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata.

Dengan demikian, keempat tahapan ini menunjukkan bahwa transformasi sekolah merupakan proses bertahap dari kondisi yang penuh permasalahan menuju kondisi ideal yang tidak hanya meningkatkan kualitas internal sekolah, tetapi juga memberi dampak positif bagi sekolah lain melalui pengimbasan.

2.3.8 Kelebihan dan Kelemahan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu inovasi kebijakan pendidikan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai respons terhadap dinamika global, tuntutan kompetensi abad ke - 21, serta tantangan implementasi kurikulum sebelumnya¹⁶⁹. Kurikulum ini menawarkan fleksibilitas dan kebebasan bagi sekolah serta guru dalam mengelola pembelajaran, sekaligus menekankan pembentukan *Profil Pelajar Pancasila* yang berkarakter. Namun, seperti halnya kebijakan pendidikan lainnya, Kurikulum Merdeka memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahan yang perlu dipahami secara mendalam.

Tabel 2.1 : Kelebihan dan Kelemahan Kurikulum Merdeka

No	Kelebihan Kurikulum Merdeka	Kelemahan / Tantangan Kurikulum Merdeka
1	Fleksibilitas dan Diferensiasi Pembelajaran: Memberikan kebebasan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan	Kesiapan Guru yang Masih Terbatas: Banyak guru mengalami kesulitan dalam memahami konsep

¹⁶⁹ Kemendikbudristek, *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka ...*, hlm. 45.

No	Kelebihan Kurikulum Merdeka	Kelemahan / Tantangan Kurikulum Merdeka
	potensi peserta didik. Pembelajaran dapat lebih personal dan tidak terpaku pada struktur yang seragam secara nasional. ¹⁷⁰	Kurikulum Merdeka, terutama dalam penerapan diferensiasi pembelajaran dan penyusunan proyek P5. Diperlukan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif. ¹⁷¹
2	Penguatan Pendidikan Karakter melalui P5: Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dirancang untuk mengembangkan dimensi karakter seperti iman dan takwa, gotong royong, kemandirian, bernalar kritis, kreatif, dan kebinekaan global secara kontekstual. ¹⁷²	Kesenjangan Fasilitas Antar Sekolah: Implementasi memerlukan sarana dan prasarana yang memadai (akses internet, ruang belajar fleksibel, bahan ajar kontekstual). Kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan dapat menghambat pemerataan kualitas. ¹⁷³

¹⁷⁰ Carol A. Tomlinson, *The Differentiated Classroom* ..., hlm. 68.

¹⁷¹ I. Rahmawati dan A. Nurhayati, "Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka ...", hlm. 575.

¹⁷² R. Hidayat, "Internalisasi Nilai-nilai Islami ...", hlm. 132.

¹⁷³ D. Sari dan R. Utami, "Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka ...", hlm. 51.

No	Kelebihan Kurikulum Merdeka	Kelemahan / Tantangan Kurikulum Merdeka
3	Kebebasan dalam Penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP): Sekolah memiliki otonomi untuk menyusun KOSP sesuai dengan visi, misi, dan konteks sosial, budaya, serta kearifan lokal, termasuk integrasi nilai-nilai Islami di daerah seperti Aceh. ¹⁷⁴	Kendala dalam Asesmen Berbasis Kompetensi: Guru sering kesulitan menerapkan penilaian autentik karena terbiasa dengan tes tertulis. Diperlukan bimbingan teknis dan instrumen yang jelas agar penilaian dapat mengukur kompetensi secara holistik. ¹⁷⁵
4	Penilaian yang Lebih Autentik: Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mengukur keterampilan, sikap, dan karakter peserta didik melalui asesmen yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. ¹⁷⁶	Perbedaan Pemahaman Antar Pemangku Kepentingan: Orang tua dan masyarakat sering belum memahami konsep Kurikulum Merdeka, sehingga timbul keraguan dan kurangnya dukungan terhadap perubahan kurikulum.

¹⁷⁴ Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues ...*, hlm. 95.

¹⁷⁵ Daniel L. Stufflebeam, "The CIPP Model for Evaluation ...", hlm. 45.

¹⁷⁶ Benjamin S. Bloom, J. Thomas Hastings, dan George F. Madaus, *Handbook on Formative and Summative Evaluation ...*, hlm. 222.

No	Kelebihan Kurikulum Merdeka	Kelemahan / Tantangan Kurikulum Merdeka
5	Dukungan Digital melalui Platform Merdeka Mengajar: Platform ini menyediakan berbagai fasilitas seperti perangkat ajar, video inspirasi, pelatihan, dan forum berbagi praktik baik, yang mempermudah guru dalam mengakses sumber belajar dan berinovasi.	Potensi Beban Tambahan bagi Guru: Kebebasan dalam merancang perangkat ajar dan proyek P5 sering dipersepsikan sebagai tambahan beban administratif, terutama jika tidak didukung dengan pendampingan dan pengurangan beban administratif lainnya.
6	Pembelajaran Berbasis Proyek dan Kontekstual: Kurikulum mendorong pembelajaran yang lebih bermakna melalui proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan peserta didik, sehingga meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar.	Evaluasi dan Monitoring yang Masih Terbatas: Sistem monitoring implementasi kurikulum di tingkat sekolah masih perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dan kualitas pelaksanaan di berbagai daerah.
7	Penguatan Literasi dan Numerasi: Kurikulum Merdeka menekankan penguatan kemampuan dasar literasi dan numerasi sejak dini, yang menjadi fondasi penting bagi pengembangan kompetensi peserta didik di tingkat selanjutnya.	Kurangnya Sosialisasi yang Merata: Sosialisasi Kurikulum Merdeka masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat pendidikan, termasuk komite sekolah dan pihak-pihak terkait di daerah terpencil.

No	Kelebihan Kurikulum Merdeka	Kelemahan / Tantangan Kurikulum Merdeka
8	Fokus pada Pengembangan Soft Skills: Kurikulum ini dirancang untuk tidak hanya mengembangkan hard skills, tetapi juga soft skills seperti kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di abad ke-21.	Tantangan Implementasi di Daerah dengan Keterbatasan Infrastruktur: Sekolah di daerah terpencil atau dengan akses teknologi yang terbatas mengalami kesulitan dalam mengakses Platform Merdeka Mengajar dan sumber belajar digital lainnya.

Dari paparan kelebihan dan kelemahan Kurikulum Merdeka di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum ini secara konseptual menawarkan terobosan yang progresif dalam sistem pendidikan Indonesia. Keunggulan utamanya terletak pada fleksibilitas pedagogis yang memungkinkan guru berinovasi sesuai konteks lokal, serta penekanan pada pembentukan karakter holistik melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Kurikulum ini juga sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 yang mengedepankan kompetensi berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi.

Namun, antara harapan dan realitas implementasi masih terdapat jarak yang signifikan. Kesiapan guru menjadi faktor penentu utama, sebab tanpa pemahaman yang mendalam, diferensiasi pembelajaran dan penilaian autentik hanya akan menjadi beban administratif belaka. Selain itu, kesenjangan infrastruktur antara sekolah di perkotaan dan pedesaan berpotensi memperlebar ketimpangan kualitas pendidikan, di mana Kurikulum Merdeka

justru berisiko hanya berjalan optimal di sekolah-sekolah yang telah memiliki fasilitas memadai.

Dalam konteks kekhususan Aceh, Kurikulum Merdeka justru membuka peluang strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islami secara sistematis ke dalam pembelajaran, sejalan dengan Qanun Pendidikan Aceh. Projek P5 dapat dirancang dengan nuansa keislaman yang kental, seperti projek zakat, penghafalan Al-Qur'an, atau kajian sejarah Islam Nusantara, sehingga kurikulum tidak hanya nasionalistik tetapi juga membumi dalam realitas sosial-keagamaan masyarakat Aceh.

Meski demikian, tantangan implementasi tidak boleh diabaikan. Pelatihan guru yang masih sporadis, minimnya pendampingan berkelanjutan, serta keterbatasan akses teknologi di sejumlah wilayah menjadi penghambat serius. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi yang terpadu, meliputi: (1) Pendampingan guru secara intensif dan berjenjang, baik melalui komunitas praktisi maupun pelatihan yang kontekstual. (2) Penyediaan infrastruktur pendukung yang merata, terutama akses internet dan perangkat digital di daerah terpencil. (3) Sosialisasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan masyarakat, agar muncul dukungan kolektif. (4) Pengembangan contoh praktik baik (best practices) yang dapat diadaptasi sekolah sesuai kondisi lokal tanpa kehilangan esensi kurikulum.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi kebijakan yang ideal di atas kertas, tetapi dapat diimplementasikan secara efektif, merata, dan berkelanjutan-terutama di daerah seperti Aceh yang memiliki karakter sosial, budaya, dan religius yang unik.

2.3.9 Tantangan Implementasi di Aceh

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Provinsi Aceh menghadapi konteks khusus yang kaya peluang sekaligus tantangan. Selain tuntutan nasional untuk mengembangkan Profil Pelajar Pancasila dan pembelajaran berbasis proyek, Aceh harus menyeimbangkan kebijakan tersebut dengan kekhasan lokal berupa

muatan Islami (Qanun), struktur sosial, religius, kondisi geografis, dan kondisi sumber daya sekolah. Pada bagian ini dibahas secara terperinci kendala utama yang ditemukan, dilengkapi rujukan, serta implikasinya bagi implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Aceh.

1. Kultur Islami dan Harmonisasi Kebijakan (Qanun Aceh)

Aceh memiliki regulasi dan praktek pendidikan yang menempatkan muatan Islami sebagai bagian penting dari kurikulum operasional sekolah. Hal ini memberi peluang kuat untuk mengintegrasikan nilai Islami ke dalam proyek P5 dan mata pelajaran, namun juga menimbulkan tantangan dalam penyesuaian kurikulum nasional agar selaras dengan Qanun Aceh (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015). Harmonisasi ini memerlukan pedoman operasional yang jelas agar guru tidak mengalami kebingungan antara tuntutan nasional (mis. kompetensi abad, 21) dan tuntutan lokal (muatan syariah). Jika tidak diatur dengan baik, terjadi tumpang, tindih isi, beban administrasi, dan potensi resistensi dari pemangku kepentingan lokal¹⁷⁷.

2. Sarana dan Prasarana, Kesenjangan Infrastruktur

Implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan proyek, pembelajaran kolaboratif, dan pemanfaatan platform digital mensyaratkan fasilitas memadai: ruang kerja proyek, akses internet yang stabil, perpustakaan/modul digital, serta peralatan praktikum. Kenyataannya, distribusi sarana di Aceh belum merata; sekolah di daerah terpencil, termasuk pulau, pulau kecil dan pegunungan, sering kekurangan akses internet dan fasilitas penunjang, sehingga kemampuan guru untuk memanfaatkan *Platform Merdeka Mengajar* dan bahan ajar digital menjadi terbatas¹⁷⁸. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan

¹⁷⁷ Kemendikbudristek, *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022), hlm. 75.

¹⁷⁸ I. Rahmawati dan A. Nurhayati, "Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka ...", hlm. 578.

ketidaksetaraan pelaksanaan kurikulum antara sekolah kota dan desa.

3. Kompetensi Guru dan Kepala Sekolah

Kesiapan pedagogis dan kemampuan teknis guru merupakan faktor penentu. Banyak guru masih berorientasi pada metode tradisional dan penilaian tertulis, belum terbiasa merancang asesmen autentik, modul proyek, atau diferensiasi pembelajaran¹⁷⁹. Di Aceh, tantangan ini diperparah oleh kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai Islami secara kongruen dengan tujuan kompetensi nasional; guru perlu keterampilan ganda, pedagogi Kurikulum Merdeka sekaligus pedagogi agama yang kontekstual¹⁸⁰. Ketersediaan pelatihan yang intensif, coaching, dan pendampingan jarang merata, sehingga hasil pelatihan sering belum berdampak signifikan pada praktik kelas.

4. Asesmen Berbasis Kompetensi dan Penilaian Sikap/Spiritual

Asesmen Kurikulum Merdeka dimaksudkan lebih otentik, portofolio, kinerja, proyek, tetapi menjalankan asesmen sikap dan spiritual (internalisasi Islami) membutuhkan rubrik jelas, prosedur observasi, dan konsistensi antar, penilai. Ketiadaan template penilaian yang baku untuk indikator religius (mis. keteladanan, pembiasaan ibadah) menyebabkan variabilitas penilaian antar guru dan sekolah. Selain itu, guru sering kekurangan keterampilan asesmen untuk menilai aspek afektif dan psikomotorik dengan valid dan reliabel¹⁸¹.

5. Peran Komunitas, Dayah, dan Orang Tua

Di Aceh, lembaga keagamaan tradisional (dayah/pesantren), tokoh agama, dan orang tua memiliki pengaruh kuat terhadap pendidikan anak. Keterlibatan komunitas merupakan modal sosial yang besar untuk internalisasi nilai Islami; namun koordinasi formal antara sekolah, dayah, dan otoritas pendidikan kadang lemah. Tanpa mekanisme kolaborasi yang

¹⁷⁹ Carol A. Tomlinson, *The Differentiated Classroom ...*, hlm. 74.

¹⁸⁰ R. Hidayat, "Internalisasi Nilai-nilai Islami ...", hlm. 135.

¹⁸¹ D. Sari dan R. Utami, "Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka ...", hlm. 55.

nyata (mis. forum sekolah–dayah, komite sekolah aktif), dukungan eksternal terhadap proyek, proyek Kurikulum Merdeka yang bernuansa Islami menjadi tidak optimal¹⁸².

6. Bahasa, Keragaman Sosial, dan Kontekstualisasi Materi
Aceh memiliki variasi dialek, adat, dan latar sosio, kultural. Materi atau proyek Kurikulum Merdeka yang tidak dikontekstualisasikan dapat kurang relevan dengan pengalaman siswa lokal. Selain itu, perbedaan latar keluarga (dayah vs keluarga sekuler) menuntut pendekatan pembelajaran dan pengelolaan kelas yang sensitif budaya (Banks, 2016). Kurikulum perlu memberi ruang untuk muatan lokal dan penggunaan bahasa pengantar yang sesuai agar pesan nilai Islami dan kompetensi akademik dapat diterima luas.
7. Pendanaan dan Keberlanjutan Program
Pelaksanaan proyek, pengembangan modul lokal, dan perbaikan sarana memerlukan dana. Keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten/kota dapat membatasi skalabilitas inisiatif Sekolah Penggerak. Selain itu, program, program sementara tanpa rencana keberlanjutan akan sia, sia ketika pendanaan turun atau pergantian kepemimpinan sekolah terjadi¹⁸³.

Implikasi dan Strategi Mitigasi.

Berdasarkan tantangan di atas, beberapa strategi praktis yang dapat ditempuh adalah:

1. Harmonisasi Kebijakan: Penyusunan pedoman praktis yang memadukan KOSP Kurikulum Merdeka dengan ketentuan Qanun Aceh sehingga muatan Islami diintegrasikan tanpa tumpang tindih¹⁸⁴.
2. Penguatan Kapasitas Berkelanjutan: Program pelatihan berjenjang (pelatihan, coaching, classroom observation, PLC)

¹⁸² Joyce L. Epstein, *School, Family, and Community Partnerships ...*, hlm. 130.

¹⁸³ Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change ...*, hlm. 95.

¹⁸⁴ Kemendikbudristek, *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka ...*, hlm. 82.

- untuk guru dan kepala sekolah, fokus pada desain proyek, asesmen autentik, dan integrasi nilai Islami ¹⁸⁵.
3. Perbaikan Infrastruktur Prioritas: Investasi teknologi (internet sekolah, perangkat multimedia) difokuskan pada sekolah penggerak dan kluster wilayah untuk meminimalkan kesenjangan akses ¹⁸⁶.
 4. Rubrik Penilaian Afektif dan Spiritual: Kembangkan rubrik penilaian standar untuk aspek religius dan karakter yang diujicobakan lalu disosialisasikan antar guru agar konsistensi meningkat ¹⁸⁷.
 5. Kolaborasi dengan Dayah dan Komunitas: Bentuk forum kerja sama formal antara sekolah, dayah, dan tokoh masyarakat untuk sinkronisasi isi pembelajaran dan dukungan program ekstrakurikuler Islami ¹⁸⁸.
 6. Pendanaan dan Model Keberlanjutan: Rancang rencana pembiayaan berkelanjutan (anggaran daerah, CSR, dana komunitas) serta mekanisme monitoring yang memastikan program tidak berhenti saat pergantian kepemimpinan (Fullan, 2007) ¹⁸⁹.

2.4 Perkembangan Kebijakan Program Sekolah Penggerak

Seiring dengan dinamika kebijakan pendidikan nasional dan upaya peningkatan layanan pendidikan yang bermutu, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri

¹⁸⁵ D. Sari dan R. Utami, "Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka ...", hlm. 58.

¹⁸⁶ I. Rahmawati dan A. Nurhayati, "Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka ...", hlm. 580.

¹⁸⁷ Daniel L. Stufflebeam, "The CIPP Model for Evaluation ...", hlm. 55.

¹⁸⁸ Joyce L. Epstein, *School, Family, and Community Partnerships ...*, hlm. 140.

¹⁸⁹ Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change ...*, hlm. 102.

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak. Keputusan yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2025 ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Program Sekolah Penggerak sebagai kebijakan tersendiri.

Dalam pertimbangan hukumnya, keputusan ini didasarkan pada evaluasi bahwa ketentuan mengenai Program Sekolah Penggerak sebagaimana diatur dalam keputusan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan upaya peningkatan layanan pendidikan bermutu pada satuan pendidikan. Dengan demikian, program yang sebelumnya menjadi salah satu pilar utama percepatan implementasi Kurikulum Merdeka ini secara resmi dihentikan sebagai program yang berdiri sendiri.

2.4.1 Transformasi Menuju Penerapan Deep Learning

Pencabutan Program Sekolah Penggerak sebagai kebijakan tersendiri tidak berarti menghentikan momentum transformasi pendidikan yang telah terbangun. Sebaliknya, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengkonsolidasikan dan memperluas dampak positif dari program-program sebelumnya ke dalam kerangka kebijakan yang lebih terintegrasi. Dalam konteks ini, sekolah-sekolah yang pernah menjadi Sekolah Penggerak—termasuk yang menjadi sampel dalam penelitian ini—kini menjadi sasaran prioritas penerapan pendekatan Deep Learning (Pembelajaran Mendalam) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mu'ti.

2.4.1.1 Konsep Deep Learning dalam Pendidikan

Deep Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan reflektif, serta kemampuan peserta didik untuk menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari dengan konteks kehidupan nyata. Berbeda dengan pembelajaran permukaan (*surface learning*) yang hanya menekankan hafalan dan penguasaan materi secara mekanis, Deep Learning mendorong peserta didik

untuk secara aktif membangun makna, mengajukan pertanyaan kritis, mengeksplorasi keterkaitan antar konsep, dan merefleksikan implikasi dari pengetahuan yang mereka peroleh terhadap kehidupan mereka.

Menurut Fullan, Quinn, dan McEachen (2018), Deep Learning memiliki enam kompetensi inti yang dikenal dengan sebutan *The 6 C's*,

yaitu *Character* (karakter), *Citizenship* (kewarganegaraan), *Collaboration* (kolaborasi), *Communication* (komunikasi), *Creativity* (kreativitas), dan *Critical Thinking* (berpikir kritis). Keenam kompetensi ini tidak hanya relevan dengan tuntutan abad ke-21, tetapi juga memiliki keselarasan yang kuat dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan pembentukan akhlak mulia dan kepribadian yang utuh.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mu'ti telah menggariskan tiga komponen utama dalam implementasi pendekatan Deep Learning, yaitu:

1. *Mindful Learning* (Pembelajaran Sadar)

Pembelajaran yang dilakukan dengan kesadaran penuh, di mana peserta didik hadir secara utuh dalam proses pembelajaran, menyadari tujuan belajar, dan merefleksikan proses berpikir mereka sendiri. Dalam konteks ini, peserta didik tidak sekadar menerima informasi secara pasif, tetapi secara aktif terlibat dalam proses berpikir yang mendalam tentang apa yang mereka pelajari, mengapa mereka mempelajarinya, dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan.

2. *Meaningful Learning* (Pembelajaran Bermakna)

Pembelajaran yang menekankan pentingnya keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik serta relevansinya dengan kehidupan nyata. Pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat melihat hubungan antara konsep-konsep baru dengan struktur kognitif yang telah mereka miliki, sehingga pengetahuan tidak

menjadi sesuatu yang asing dan terpisah dari realitas keseharian mereka.

3. *Joyful Learning* (Pembelajaran Menyenangkan)

Pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, membangkitkan rasa ingin tahu, dan memotivasi peserta didik untuk terus belajar tanpa merasa tertekan atau terbebani. Joyful learning tidak berarti pembelajaran tanpa tantangan, tetapi menciptakan lingkungan yang mendukung di mana peserta didik merasa aman untuk bereksplorasi, mencoba hal-hal baru, dan belajar dari kesalahan.

Ketiga komponen ini selaras dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan pengalaman belajar yang mendalam, relevan dengan konteks peserta didik, dan membahagiakan bagi seluruh warga sekolah. Kurikulum Merdeka dengan karakteristik utamanya yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan menekankan penguatan Profil Pelajar Pancasila, memberikan ruang yang sangat luas bagi implementasi prinsip-prinsip Deep Learning dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

2.4.1.2 Sekolah Penggerak sebagai Garda Terdepan Deep Learning

Sekolah-sekolah yang pernah menjadi Sekolah Penggerak diposisikan sebagai garda terdepan dalam implementasi Deep Learning karena beberapa pertimbangan strategis.

Pertama, sekolah-sekolah ini telah memiliki pengalaman dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*) dan pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi ciri utama Kurikulum Merdeka. Pengalaman ini memberikan fondasi pedagogis yang kuat bagi guru dan kepala sekolah untuk bertransformasi menuju pembelajaran yang lebih mendalam. Pembelajaran berbasis proyek yang selama ini menjadi inti dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) memiliki keselarasan konseptual dengan Deep Learning, karena keduanya sama-sama menekankan pembelajaran kontekstual, kolaboratif, dan reflektif.

Kedua, kapasitas guru dan kepala sekolah di sekolah-sekolah penggerak telah terasah melalui program pendampingan intensif selama pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Mereka telah dibekali dengan berbagai kompetensi pedagogis seperti pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, dan pengembangan komunitas belajar profesional. Kapasitas yang telah terbangun ini menjadi modal penting dalam mengadopsi pendekatan Deep Learning yang menuntut pemahaman pedagogis yang lebih kompleks dan keterampilan reflektif yang lebih mendalam.

Ketiga, ekosistem kolaboratif yang telah terbangun antara sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi modal sosial yang penting dalam mengimplementasikan Deep Learning yang membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Deep Learning tidak dapat berlangsung dalam isolasi; ia membutuhkan dukungan dari lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk menghubungkan pembelajaran mereka dengan dunia nyata, baik melalui keterlibatan orang tua, kolaborasi dengan komunitas, maupun pemanfaatan sumber belajar di lingkungan sekitar.

2.4.1.3 Relevansi Deep Learning dengan Internalisasi Nilai Islami

Pendekatan Deep Learning memiliki relevansi yang sangat kuat dengan proses internalisasi nilai-nilai Islami yang menjadi fokus utama penelitian ini. Internalisasi nilai, sebagaimana ditegaskan oleh para ahli, bukanlah proses menghafalkan nilai-nilai, melainkan proses menghayati, meresapi, dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai bagian integral dari kepribadian. Proses ini hanya dapat terjadi melalui pembelajaran yang mendalam dan bermakna, bukan melalui pembelajaran permukaan yang hanya menyentuh aspek kognitif semata.

Pertama, prinsip *mindful learning* dalam Deep Learning sejalan dengan konsep *tadabbur* dan *tafakkur* dalam ajaran Islam. Al-Qur'an berulang kali mengajak umat manusia untuk merenungkan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam Al-Qur'an (*qauliyah*) maupun yang terbentang di alam semesta (*kauniyah*). Ketika peserta

didik belajar dengan kesadaran penuh, menyadari tujuan belajar, dan merefleksikan proses berpikir mereka, mereka sedang menginternalisasi nilai bahwa belajar adalah bentuk ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kedua, prinsip *meaningful learning* dalam Deep Learning sejalan dengan konsep *ta'aqqul* (pemahaman mendalam) dalam pendidikan Islam. Ibnu Miskawaih dalam *Tahdzīb al-Akhlāq* menekankan bahwa akhlak mulia tidak dapat dicapai hanya melalui hafalan teori, tetapi harus dipahami maknanya, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan. Pembelajaran yang bermakna memungkinkan peserta didik untuk tidak hanya mengetahui nilai-nilai Islami secara kognitif, tetapi juga memahami relevansinya dengan kehidupan mereka, merasakan dampaknya, dan pada akhirnya mengamalkannya secara konsisten.

Ketiga, prinsip *joyful learning* dalam Deep Learning sejalan dengan konsep *rahmah* dan *bahjah* (kasih sayang dan kegembiraan) dalam pendidikan Islam. Al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* menekankan pentingnya pendekatan yang penuh kasih sayang dalam mendidik anak, karena pendidikan yang keras dan memaksa hanya akan mematikan potensi dan kreativitas peserta didik. Joyful learning menciptakan suasana yang membangkitkan rasa ingin tahu, memotivasi peserta didik untuk terus belajar, dan menjadikan proses internalisasi nilai sebagai pengalaman yang menyenangkan dan membahagiakan.

Keempat, Deep Learning menekankan pengembangan karakter (*character*) sebagai salah satu kompetensi intinya, yang memiliki keselarasan dengan tujuan utama pendidikan Islam yaitu pembentukan akhlak mulia. Dalam kerangka *The 6 C's*, karakter mencakup kejujuran, tanggung jawab, empati, ketekunan, dan kesadaran diri—nilai-nilai yang juga menjadi inti ajaran Islam tentang akhlak. Dengan demikian, pendekatan Deep Learning tidak hanya relevan secara pedagogis, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang kuat dalam tradisi pendidikan Islam.

2.4.1.4 Implikasi bagi Penelitian

Bagi penelitian ini, transformasi kebijakan yang menempatkan sekolah-sekolah penggerak sebagai sasaran prioritas penerapan Deep Learning memperkuat relevansi dan signifikansi kajian. Sekolah-sekolah yang menjadi sampel dalam penelitian ini tidak hanya relevan untuk dikaji dari perspektif implementasi Kurikulum Merdeka dan internalisasi nilai-nilai Islami, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi model bagi pengembangan pendekatan Deep Learning berbasis nilai-nilai keislaman di masa depan.

Temuan penelitian tentang strategi internalisasi nilai Islami yang diterapkan di sekolah-sekolah penggerak Aceh—seperti keteladanan guru, pembiasaan religius, integrasi nilai dalam pembelajaran, dan pembelajaran berbasis proyek yang bernuansa Islami—menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut sesungguhnya telah menerapkan prinsip-prinsip Deep Learning secara implisit. Ketika guru menjadi teladan dalam akhlak mulia, mereka sedang menerapkan *mindful learning* dengan menunjukkan kesadaran akan peran mereka sebagai uswah hasanah. Ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai Islami dan konteks kehidupan nyata, mereka sedang menerapkan *meaningful learning*. Ketika sekolah menciptakan suasana religius yang menyenangkan dan membangkitkan semangat belajar, mereka sedang menerapkan *joyful learning*.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang internalisasi nilai-nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka, tetapi juga menjadi dokumentasi berharga tentang praktik-praktik baik yang dapat menjadi fondasi bagi pengembangan implementasi Deep Learning berbasis nilai-nilai keislaman di masa depan. Pengalaman sekolah-sekolah penggerak Aceh dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam pembelajaran yang mendalam dan bermakna menjadi sumber belajar yang berharga bagi sekolah-sekolah lain di Aceh maupun di Indonesia secara lebih luas.

2.5 Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Pendidikan Islam

Pembahasan mengenai internalisasi Nilai-nilai Islami dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kontribusi tokoh etika Islam klasik, salah satunya adalah Ibnu Miskawaih (932–1030 M), seorang filsuf, sejarawan, dan ahli etika Muslim yang dikenal dengan karyanya *Tahdzīb al- Akhlāq wa Tathhīr al- A'rāq*. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam tradisi pendidikan Islam, khususnya dalam pengembangan akhlak dan karakter. Bagi Ibnu Miskawaih, internalisasi nilai Islami dalam pendidikan bukan hanya sebatas transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan jiwa dan akhlak yang mulia¹⁹⁰.

Ibnu Miskawaih berangkat dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki akal ('aql), jiwa (nafs), dan akhlak (khuluq). Akal membimbing manusia untuk membedakan yang baik dan buruk, jiwa menggerakkan tindakan, dan akhlak menjadi hasil internalisasi nilai yang berulang hingga melekat menjadi karakter. Internalisasi nilai Islami, menurutnya, adalah usaha membentuk kebiasaan baik melalui latihan (*riyadhah al- nafs*) hingga tertanam secara permanen¹⁹¹.

Dalam perspektifnya, manusia tidak dilahirkan dalam keadaan sempurna, melainkan memerlukan pendidikan untuk mencapai kesempurnaan akhlak. Di sinilah peran pendidik menjadi penting, yaitu menanamkan nilai Islami melalui keteladanan, pembiasaan, dan pembimbingan spiritual¹⁹².

Ibnu Miskawaih membagi jiwa manusia menjadi tiga bagian:

1. Jiwa syahwaniyyah (*al- nafs al -bahīmiyyah*): cenderung kepada syahwat dan kebutuhan jasmani.
2. Jiwa ghadhabiyyah (*al- nafs al- sabu'iyyah*): cenderung kepada amarah, keberanian, dan kekuasaan.

¹⁹⁰ Nur Hamim, "Pendidikan Akhlak ...", hlm. 400

¹⁹¹ Mahmud, *Filsafat Pendidikan Islam* ..., hlm. 88.

¹⁹² N. Rahmaniyyah, *Etika Pendidikan Islam Perspektif Ibnu Miskawaih* ..., hlm. 60.

3. Jiwa nathiqah (al- nafs al, nāṭiqah): cenderung kepada rasionalitas, ilmu, dan hikmah.

Pendidikan yang Islami harus menyeimbangkan ketiga aspek ini agar tidak melahirkan ekstremitas. Jika jiwa syahwat berlebihan, lahir sifat rakus; jika jiwa amarah berlebihan, lahir sifat zalim; sementara jika rasio tidak terlatih, lahir kebodohan. Internalisasi nilai Islami berfungsi menjaga keseimbangan tersebut, sehingga lahir pribadi yang harmonis antara jasmani, akal, dan ruhani ¹⁹³.

Ibnu Miskawaih mengemukakan bahwa akhlak yang baik lahir dari posisi tengah (*wasathiyyah*) antara dua ekstrem, yaitu kekurangan (*tafrīt*) dan kelebihan (*ifrāt*). Teori ini dikenal sebagai “The Golden Mean”. Misalnya, sifat berani (*syajā’ah*) adalah pertengahan antara pengecut dan nekat; sifat dermawan (*sakha’*) adalah pertengahan antara kikir dan boros; sifat iffah (menahan diri) adalah pertengahan antara hedonisme dan asketisme berlebihan.

Pendidikan Islam menurut Ibnu Miskawaih harus diarahkan pada pencapaian keseimbangan akhlak ini. Dengan demikian, internalisasi nilai Islami bukan sekadar pengajaran dogma, tetapi pembentukan karakter moderat yang sesuai dengan fitrah manusia ¹⁹⁴.

Ibnu Miskawaih menekankan beberapa strategi dalam proses internalisasi nilai Islami, yaitu:

1. Keteladanan (*uswah hasanah*): Guru atau pendidik harus menjadi teladan akhlak mulia.
2. Pembiasaan (*ta’wīd*): Membiasakan peserta didik melakukan perbuatan baik, seperti berkata jujur, disiplin, dan menghormati orang lain.
3. Latihan jiwa (*riyadhah al- nafs*): Melatih jiwa melalui pengendalian hawa nafsu dan perenungan spiritual.
4. Pendidikan rasional dan moral: Memberikan pemahaman logis tentang manfaat akhlak baik dan bahaya akhlak buruk.

¹⁹³ M. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam ...*, hlm. 110.

¹⁹⁴ Nur Hamim, "Pendidikan Akhlak ...", hlm. 402

5. Lingkungan Islami: Menurutnya, pendidikan harus didukung lingkungan sekolah dan masyarakat yang Islami agar proses internalisasi berjalan optimal¹⁹⁵.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka di Aceh, konsep internalisasi nilai Islami menurut Ibnu Miskawaih sangat relevan. Prinsip pembentukan karakter melalui keteladanan guru, pembiasaan religius, dan penyeimbangan aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik sejalan dengan profil Pelajar Pancasila. Bahkan, penerapan *Project, Based Learning* (PBL) dan pembelajaran berbasis nilai Islami dapat dipandang sebagai wujud aktualisasi gagasan Ibnu Miskawaih mengenai pendidikan akhlak.

Pemikiran Ibnu Miskawaih (w. 1030 M) tentang etika dan akhlak menempati posisi penting dalam khazanah filsafat Islam klasik. Karyanya *Tahdzīb al- Akhlāq wa Taṭhīr al- A'rāq* merupakan salah satu rujukan utama yang menguraikan teori akhlak secara sistematis. Berbeda dengan pandangan moral normatif yang hanya menekankan aturan halal-haram, Ibnu Miskawaih menekankan bahwa akhlak adalah hasil dari kebiasaan dan latihan (*riyāḍah al-naḥs*) yang konsisten, sehingga menjadi karakter permanen dalam diri manusia¹⁹⁶.

Menurut Ibnu Miskawaih, akhlak (khuluq) adalah keadaan jiwa yang mendorong perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan rasional yang panjang. Akhlak terbentuk dari pengulangan tindakan yang berkesinambungan sehingga menjadi kebiasaan. Dengan demikian, akhlak bukan hanya sekadar pengetahuan tentang baik dan buruk, tetapi lebih pada penghayatan dan pembiasaan hingga menyatu dengan kepribadian¹⁹⁷.

Sementara itu, etika (*akhlaqiyyāt*) dalam pandangan Ibnu Miskawaih bersifat filosofis, yakni kajian rasional tentang prinsip, prinsip yang membimbing manusia menuju kebahagiaan (*sa'ādah*).

¹⁹⁵ R. Riama, D. H. Muhammad, dan A. Susandi, "Penanaman Pendidikan Akhlak ...", hlm. 195

¹⁹⁶ Ibnu Miskawaih, *Tahdzīb al-Akhlāq wa Taṭhīr al-A'rāq* ..., hlm. 85.

¹⁹⁷ N. Rahmaniayah, *Etika Pendidikan Islam Perspektif Ibnu Miskawaih* ..., hlm. 65.

Etika baginya adalah ilmu praktis yang menuntun manusia untuk mencapai kesempurnaan moral dan spiritual¹⁹⁸.

Tujuan utama etika menurut Ibnu Miskawaih adalah mencapai kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya bersifat jasmani tetapi juga rohani. Kebahagiaan sejati dicapai dengan menyeimbangkan dimensi jasmani, akal, dan ruhani. Dengan akhlak yang lurus, manusia tidak hanya memperoleh keharmonisan hidup di dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat¹⁹⁹.

Ibnu Miskawaih mengadopsi konsep Aristotelian tentang *eudaimonia* (kebahagiaan), tetapi ia menafsirkannya dalam bingkai Islam. Baginya, kebahagiaan hakiki bukan hanya kesempurnaan akal, tetapi juga kedekatan dengan Allah SWT.

Konsep paling terkenal dari Ibnu Miskawaih adalah teori jalan tengah (*al, wasathiyyah / the golden mean*). Ia berpendapat bahwa setiap kebajikan moral adalah titik tengah antara dua ekstrem.

1. Syajā‘ah (keberanian): pertengahan antara pengecut (*jubn*) dan nekat (*tahawwur*).
2. ‘Adālah (keadilan): pertengahan antara zalim dan tunduk berlebihan.
3. ‘Iffah (menahan diri): pertengahan antara rakus dan mati rasa.
4. Hikmah (kebijaksanaan): pertengahan antara kebodohan dan kelicikan.

Dengan demikian, akhlak mulia hanya dapat dicapai melalui pengendalian diri dan keseimbangan, bukan dengan meninggalkan dunia ataupun melampiaskan hawa nafsu secara berlebihan (Fakhry, 1996²⁰⁰; Miskawaih, 1994²⁰¹).

Menurut Ibnu Miskawaih, akhlak dapat dibentuk melalui:

1. Keteladanan (*uswah hasanah*): peran pendidik yang menjadi contoh.

¹⁹⁸ Mahmud, *Filsafat Pendidikan Islam* ..., hlm. 92.

¹⁹⁹ M. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* ..., hlm. 115.

²⁰⁰ Majid Fakhry, *Etika dalam Islam* ..., hlm. 100.

²⁰¹ Ibnu Miskawaih, *Tahdzīb al-Akhlāq wa Tathīr al-A‘rāq* ..., hlm. 90.

2. Pembiasaan (ta'wīd): latihan terus, menerus dalam perbuatan baik.
3. Pengendalian nafsu: melatih jiwa agar tidak dikuasai hawa nafsu.
4. Lingkungan yang Islami: keluarga, sekolah, dan masyarakat harus mendukung pembentukan akhlak²⁰².

Proses internalisasi nilai Islami ini menekankan sinergi antara teori, praktik, dan pengalaman spiritual.

Konsep etika dan akhlak Ibnu Miskawaih sangat relevan dalam pendidikan kontemporer, termasuk Kurikulum Merdeka di Indonesia. Ketika kurikulum nasional menekankan Profil Pelajar Pancasila, yang mencakup beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, maka gagasan Ibnu Miskawaih dapat menjadi landasan filosofis bahwa akhlak dibentuk bukan hanya lewat teori, tetapi melalui pembiasaan, keteladanan, dan keseimbangan hidup.

Pemikiran Ibnu Miskawaih mengenai akhlak tidak berhenti pada ranah filsafat moral klasik, tetapi memiliki relevansi kuat untuk diaplikasikan dalam konteks pendidikan modern, khususnya implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. Gagasan tentang keseimbangan akhlak, pembiasaan moral, serta keteladanan memiliki titik temu dengan orientasi pendidikan karakter yang menjadi inti dari kebijakan kurikulum terbaru di tanah air.

Kurikulum Merdeka dirancang untuk melahirkan Profil Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta memiliki Nilai-nilai gotong royong, kemandirian, kreativitas, dan bernalar kritis²⁰³. Pandangan Ibnu Miskawaih tentang empat pokok keutamaan akhlak, 'iffah (menahan diri), syajā'ah (keberanian), hikmah (kebijaksanaan), dan 'adālah (keadilan), sangat selaras dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila tersebut. Misalnya, keberanian dalam bersikap dan berpikir kritis

²⁰² R. Riama, D. H. Muhammad, dan A. Susandi, "Penanaman Pendidikan Akhlak ...", hlm. 198

²⁰³ Kemendikbudristek, *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022), hlm. 100.

dapat dipandang sebagai bentuk syajā‘ah, sementara gotong royong dan saling menghargai dapat dimaknai sebagai praktik ‘adālah dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, ajaran Ibnu Miskawaih dapat menjadi fondasi filosofis untuk memperkuat dimensi akhlak mulia yang ada dalam Profil Pelajar Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan tanpa menimbulkan kontradiksi dengan visi kurikulum nasional.

Salah satu penekanan penting Ibnu Miskawaih adalah peran keteladanan (uswah ḥasanah) dalam membentuk akhlak. Menurutny, jiwa anak mudah meniru, sehingga figur guru memiliki posisi strategis dalam membentuk akhlak siswa²⁰⁴. Hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan dalam konteks sekolah penggerak di Aceh menunjukkan bahwa indikator keteladanan guru memperoleh nilai tertinggi (mean = 4,35). Fakta ini sejalan dengan teori Ibnu Miskawaih bahwa akhlak lebih efektif diajarkan melalui teladan dibandingkan hanya melalui instruksi verbal.

Keteladanan guru menjadi instrumen vital dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, yang menuntut guru tidak sekadar menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menjadi panutan moral dan spiritual bagi siswa.

Ibnu Miskawaih menekankan pentingnya pembiasaan (ta‘wīd) dan latihan jiwa untuk membentuk akhlak. Hal ini sesuai dengan praktik di sekolah penggerak Aceh, di mana siswa dibiasakan melakukan doa bersama, shalat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, serta menjaga disiplin Islami. Data kualitatif dari dokumen sekolah memperlihatkan bahwa program keagamaan rutin diintegrasikan dalam jadwal pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Sejalan dengan konsep Miskawaih, pembiasaan tersebut berfungsi sebagai *riyāḍah al-nafs* (latihan jiwa), yang lambat laun membentuk karakter Islami siswa. Inilah bukti konkret bahwa teori klasik dapat diinternalisasikan dalam praktik pendidikan modern.

²⁰⁴ Ibnu Miskawaih, *Tahdzīb al-Akhlāq wa Taḥīr al-A‘rāq* ..., hlm. 95.

Salah satu kelemahan pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang ditemukan dalam penelitian adalah aspek evaluasi berbasis kompetensi yang masih rendah (mean = 3,92). Ibnu Miskawaih memberikan perspektif bahwa evaluasi akhlak tidak boleh hanya berorientasi pada kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik. Artinya, evaluasi dalam Kurikulum Merdeka perlu mencerminkan keberhasilan pembiasaan Nilai-nilai Islami, bukan sekadar pencapaian akademik.

Jika evaluasi berbasis kompetensi diperkaya dengan prinsip akhlak Ibnu Miskawaih, maka asesmen akan lebih komprehensif karena mencakup integritas moral, kedisiplinan, dan kebiasaan baik siswa.

Konteks Aceh sebagai daerah yang menerapkan Qanun Pendidikan Islami²⁰⁵ membuat pemikiran Ibnu Miskawaih semakin relevan. Pendidikan di Aceh memang diarahkan tidak hanya pada pencapaian intelektual, tetapi juga pembentukan akhlak Islami yang berakar pada syariat. Dengan demikian, gagasan Miskawaih tentang integrasi ilmu, akhlak, dan kebiasaan Islami dapat menjadi dasar konseptual bagi sekolah penggerak Aceh dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka berbasis Islami.

Penerapan pemikiran Ibnu Miskawaih dalam Kurikulum Merdeka memberikan beberapa implikasi penting:

1. Penguatan Pendidikan Karakter Islami: Nilai-nilai klasik akhlak dapat diadaptasi untuk memperkuat dimensi religius Profil Pelajar Pancasila.
2. Integrasi Etika dan Kognisi: Pembelajaran tidak berhenti pada ranah kognitif, tetapi mengintegrasikan aspek moral dan spiritual.
3. Kebijakan Berbasis Konteks: Implementasi di Aceh menunjukkan bahwa kurikulum nasional dapat disinergikan dengan nilai Islami lokal.

²⁰⁵ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Aceh, 2015), hlm. 18.

4. Evaluasi Holistik: Asesmen sebaiknya mengukur keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan akhlak Islami.

Pemikiran Ibnu Miskawaih (w. 1030 M) tentang akhlak, jiwa, dan pendidikan memiliki signifikansi yang mendalam untuk pengembangan kurikulum modern, khususnya dalam konteks pendidikan karakter. Konsep dasar yang ia gagas dalam *Tahdzīb al-Akhlāq wa Taṭhīr al-A'rāq* menekankan bahwa akhlak bukanlah sesuatu yang bersifat bawaan, melainkan dapat dibentuk melalui pendidikan, pembiasaan, dan latihan jiwa (*riyāḍah al-nafs*). Prinsip ini selaras dengan arah kurikulum modern yang menempatkan pendidikan karakter sebagai prioritas utama.

Dalam kerangka pendidikan modern, Nilai-nilai moral menjadi landasan bagi pembentukan kepribadian peserta didik. Pemikiran Ibnu Miskawaih tentang empat keutamaan utama, 'iffah (pengendalian diri), syajā'ah (keberanian), hikmah (kebijaksanaan), dan 'adālah (keadilan), dapat dijadikan fondasi filosofis kurikulum. Nilai-nilai tersebut selaras dengan orientasi Kurikulum Merdeka di Indonesia yang berfokus pada pengembangan Profil Pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, serta berkebinekaan global²⁰⁶.

Implementasi pemikiran Ibnu Miskawaih dalam kurikulum modern berarti menjadikan akhlak sebagai kerangka utama, bukan sekadar muatan tambahan. Hal ini menegaskan bahwa setiap mata pelajaran seharusnya menjadi wahana pembentukan moral, bukan hanya transfer pengetahuan.

Ibnu Miskawaih menekankan pentingnya pembiasaan untuk membentuk akhlak yang stabil. Pendidikan, menurutnya, adalah usaha menanamkan kebiasaan baik sejak dini agar menjadi sifat yang melekat pada diri manusia²⁰⁷. Prinsip ini dapat diimplementasikan dalam kurikulum modern melalui kegiatan rutin

²⁰⁶ Kemendikbudristek, *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka ...*, hlm. 110.

²⁰⁷ Nur Hamim, "Pendidikan Akhlak ...", hlm. 40

sekolah, seperti doa bersama, shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, atau kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian.

Dalam konteks sekolah penggerak di Aceh, pembiasaan religius ini telah menjadi bagian integral dari implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini menunjukkan relevansi nyata pemikiran klasik Ibnu Miskawaih terhadap praktik pendidikan kontemporer.

Salah satu implikasi penting dari pemikiran Ibnu Miskawaih adalah pentingnya keteladanan guru. Ia meyakini bahwa anak, anak memiliki daya imitasi yang kuat, sehingga guru harus menjadi contoh akhlak mulia²⁰⁸. Dalam kurikulum modern, hal ini diterjemahkan sebagai kompetensi sosial dan kepribadian guru yang menjadi bagian dari standar nasional pendidikan.

Keteladanan guru juga relevan dengan hasil penelitian kuantitatif di Aceh yang menunjukkan indikator keteladanan memperoleh skor tertinggi dalam internalisasi nilai Islami. Dengan kata lain, implementasi Kurikulum Merdeka akan lebih efektif bila guru mampu mempraktikkan ajaran Ibnu Miskawaih dalam keseharian.

Ibnu Miskawaih menolak pandangan yang hanya menilai manusia berdasarkan intelektualitas semata. Ia menekankan perlunya keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan moral. Prinsip ini sejalan dengan konsep asesmen autentik dalam Kurikulum Merdeka, yang tidak hanya mengukur capaian akademik, tetapi juga menilai sikap, keterampilan, dan akhlak siswa²⁰⁹.

Dengan mengacu pada pemikiran Ibnu Miskawaih, evaluasi pendidikan modern dapat diarahkan untuk menilai keberhasilan internalisasi Nilai-nilai moral dalam diri siswa, sehingga pendidikan benar, benar membentuk insan kamil, bukan sekadar lulusan yang cerdas secara intelektual.

²⁰⁸ N. Rahmaniyah, *Etika Pendidikan Islam Perspektif Ibnu Miskawaih* ..., hlm. 70.

²⁰⁹ Kemendikbudristek, *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka* ..., hlm. 115.

Pendidikan modern menghadapi tantangan globalisasi berupa krisis moral, individualisme, dan degradasi spiritualitas. Pemikiran Ibnu Miskawaih yang menekankan keseimbangan jiwa serta integrasi ilmu dengan moralitas dapat menjadi solusi. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada materi, melainkan pada kesempurnaan jiwa yang berakhlak mulia²¹⁰. Dengan demikian, kurikulum modern yang mengintegrasikan pemikirannya dapat menjawab kebutuhan zaman sekaligus menjaga identitas spiritual bangsa.

Teori Taksonomi Bloom yang diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom bersama timnya pada tahun 1956 merupakan salah satu teori pendidikan paling berpengaruh di dunia modern. Taksonomi ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan ke dalam tiga ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik²¹¹. Pada perkembangannya, taksonomi ini tidak hanya menjadi acuan dalam pendidikan sekuler, tetapi juga dapat diintegrasikan dengan Nilai-nilai Islami dalam rangka menciptakan pendidikan holistik yang seimbang antara ilmu, iman, dan akhlak.

Ranah kognitif dalam taksonomi Bloom meliputi enam tingkatan berpikir: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam revisi Anderson & Krathwohl²¹², level ini berkembang menjadi: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.

Dalam perspektif Islam, pencapaian kognitif tidak sekadar untuk menambah wawasan duniawi, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah. Firman Allah dalam QS. Al, 'Alaq [96]: 1–5 menegaskan pentingnya membaca dan mencari ilmu sebagai ibadah. Oleh karena itu, internalisasi nilai Islami dalam ranah kognitif dapat dilakukan dengan mengarahkan

²¹⁰ Mahmud, *Filsafat Pendidikan Islam* ..., hlm. 96.

²¹¹ David R. Krathwohl, "A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview," *Theory into Practice* 41, No. 4 (2002): hlm. 215, https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2

²¹² David R. Krathwohl, "A Revision of Bloom's Taxonomy ...", hlm.

siswa untuk memahami ilmu pengetahuan secara integratif, baik ilmu agama maupun sains, sehingga melahirkan pemahaman tauhid yang utuh²¹³.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (gumpalan darah). Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (Maha Mulia). Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan pena (kalam). Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. QS. Al, 'Alaq [96]: 1–5

Ranah afektif mencakup sikap, perasaan, nilai, dan penghargaan. Bloom menekankan pentingnya pembentukan sikap positif sebagai bagian dari hasil pendidikan. Dalam Islam, ranah afektif memiliki posisi yang sangat penting, karena inti dari pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak mulia (*tahdzīb al, akhlāq*). Rasulullah SAW sendiri menegaskan:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

*“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad).*²¹⁴

Internalisasi nilai Islami dalam ranah afektif dapat diwujudkan melalui pembiasaan sikap religius, kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kasih sayang, yang tidak hanya diajarkan tetapi juga diteladankan guru dalam kehidupan sehari, hari.

Ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan fisik, koordinasi gerak, dan tindakan nyata. Dalam konteks Islam, ranah ini dapat diintegrasikan dengan keterampilan ibadah seperti shalat, membaca Al-Qur'an dengan tartil, atau keterampilan hidup yang Islami, seperti kerja sama, kewirausahaan yang jujur, dan

²¹³ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 35.

²¹⁴ HR. Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, no. 8729.

kepedulian sosial. Al- Syaibany²¹⁵ menyatakan bahwa pendidikan Islam harus melatih peserta didik untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan peran khalifah di bumi secara seimbang.

Ketiga ranah Bloom dapat diintegrasikan dengan kerangka pendidikan Islam. Ranah kognitif diarahkan untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat (*'ilm nāfi'*), ranah afektif berorientasi pada pembentukan akhlak mulia, dan ranah psikomotorik difokuskan pada keterampilan yang membawa maslahat bagi masyarakat. Muhaimin²¹⁶ menegaskan bahwa integrasi ini akan melahirkan peserta didik yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan (head), sikap (heart), dan keterampilan (hand) yang Islami.

5. Implikasi bagi Kurikulum Merdeka

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, integrasi taksonomi Bloom dengan nilai Islami sangat relevan. Ranah kognitif diimplementasikan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mengajarkan siswa berpikir kritis dengan perspektif iman. Ranah afektif diwujudkan melalui pembiasaan religius di sekolah, sedangkan ranah psikomotorik dikembangkan melalui kegiatan praktik dan ekstrakurikuler berbasis kearifan lokal Islami, seperti seni budaya Aceh, kegiatan sosial, dan program keagamaan. Dengan demikian, penerapan teori Bloom yang diinternalisasikan dengan Nilai-nilai Islami dapat menghasilkan insan kamil, yaitu manusia yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia.

2.5.1 Ranah Kognitif dan Nilai-nilai Islami

Ranah kognitif merupakan aspek utama dalam Taksonomi Bloom yang berhubungan dengan kemampuan berpikir, mulai dari mengingat (*knowledge*) hingga mencipta (*create*). Bloom (1956)²¹⁷ mengelompokkan ranah kognitif ke dalam enam tingkatan, yakni pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan

²¹⁵ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam ...*, hlm. 105.

²¹⁶ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam ...*, hlm. 155.

²¹⁷ Benjamin S. Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives ...*, hlm. 68.

evaluasi. Revisi terbaru oleh Anderson dan Krathwohl menyempurnakan klasifikasi ini menjadi: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ranah ini menjadi fondasi dalam pendidikan modern karena berkaitan dengan proses belajar intelektual yang membentuk daya nalar peserta didik.

Dalam perspektif Islam, ranah kognitif tidak hanya sekadar meningkatkan kecerdasan intelektual, melainkan juga menjadi sarana mengenal Allah SWT dan memperkuat iman. Al-Qur'an berulang kali menekankan pentingnya berpikir (*tafakkur*), merenung (*tadabbur*), dan menggunakan akal untuk memahami tanda, tanda kebesaran Allah. Firman Allah dalam QS. Al, 'Alaq [96]: 1–5 memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar, sedangkan dalam QS. Ali Imran [3]: 190–191 Allah memuji orang, orang yang senantiasa memikirkan ciptaan, Nya sebagai bukti keimanan. Dengan demikian, pencapaian ranah kognitif dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari orientasi tauhid ²¹⁸.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٠١﴾

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. QS. Ali Imran [3]: 190–191

Menurut Tafsir, tujuan utama pendidikan Islam adalah melahirkan manusia yang memiliki kesatuan antara akal ('aql), qalb (hati), dan ruh (spiritualitas). Artinya, aktivitas berpikir dalam ranah

²¹⁸ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 40.

kognitif harus diarahkan untuk melahirkan ilmu yang bermanfaat ('*ilm nāfi*'), bukan hanya pengetahuan sekuler yang terlepas dari Nilai-nilai ilahiah. Sejalan dengan itu, Muhaimin²¹⁹ menegaskan bahwa ranah kognitif dalam pendidikan Islam harus diorientasikan pada proses pencarian kebenaran hakiki yang berujung pada penghambaan kepada Allah, bukan hanya kecerdasan akademik semata.

Lebih jauh, integrasi Nilai-nilai Islami dalam ranah kognitif dapat dilihat dari beberapa dimensi:

1. Mengaitkan ilmu dengan wahyu

Setiap pengetahuan yang dipelajari peserta didik diarahkan agar semakin mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, pembelajaran sains dikaitkan dengan ayat, ayat kauniyah dalam Al-Qur'an, sehingga siswa tidak hanya memahami hukum alam, tetapi juga menyadari kebesaran Sang Pencipta²²⁰.

2. Menanamkan etika mencari ilmu

Islam menekankan adab sebelum ilmu. Ibnu Sina menegaskan bahwa seorang pelajar harus memiliki niat yang benar, adab yang baik, dan kerendahan hati agar pengetahuannya membawa keberkahan²²¹. Dengan demikian, pembelajaran kognitif tidak semata rasional, tetapi juga bermoral.

3. Mendorong berpikir kritis Islami

Al- Ghazali²²² menekankan pentingnya akal dalam membedakan yang benar dan salah. Namun, akal harus disinergikan dengan wahyu agar tidak terjebak pada kesesatan rasionalisme. Dalam konteks ini, ranah kognitif

²¹⁹ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam ...*, hlm. 160.

²²⁰ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 145.

²²¹ F. Roji dkk., "Concept of Islamic Education ...", hlm. 328.

²²² Abu Hamid Al-Ghazali, *Mi 'yār al- 'ilm* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1960), hlm. 120.

Islami menumbuhkan daya kritis sekaligus kesadaran spiritual.

4. Mengembangkan kreativitas bernilai ibadah

Pada level tertinggi taksonomi Bloom (mencipta), peserta didik diarahkan untuk melahirkan karya inovatif yang bermanfaat bagi umat. Kreativitas tidak semata untuk kemajuan teknologi, tetapi juga untuk memakmurkan bumi sebagaimana peran khalifah yang diamanahkan Allah dalam QS. Al, Baqarah [2]: 30²²³.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۖ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ
فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۖ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ ﴿۝۳۰﴾

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'" QS. Al, Baqarah [2]: 30

Dengan demikian, ranah kognitif dalam kerangka Islami menegaskan bahwa ilmu bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan menuju kebenaran dan ketakwaan. Implementasi konsep ini dalam Kurikulum Merdeka dapat diwujudkan melalui pembelajaran berbasis proyek (PjBL) yang mengintegrasikan aspek sains, sosial, dan agama, sehingga siswa tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki visi moral dan spiritual yang Islami.

2.5.2 Ranah Afektif dalam Perspektif Pendidikan Islam

Ranah afektif dalam Taksonomi Bloom mengacu pada dimensi sikap, nilai, perasaan, dan emosi peserta didik. Bloom,

²²³ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam ...*, hlm. 110.

Krathwohl, dan Masia²²⁴ mengklasifikasikan ranah afektif ke dalam lima tingkatan, yakni:

1. *Receiving* (menerima) – kesediaan untuk memperhatikan suatu fenomena atau nilai.
2. *Responding* (merespon) – keterlibatan aktif dalam menerima atau menolak suatu nilai.
3. *Valuing* (menilai) – komitmen terhadap suatu nilai dan menunjukkan preferensi terhadapnya.
4. *Organizing* (mengorganisasi nilai) – mengintegrasikan nilai ke dalam sistem yang lebih luas.
5. *Characterizing by value* (menginternalisasi nilai) – menjadikan nilai sebagai karakter yang konsisten dalam kehidupan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, ranah afektif memiliki kedudukan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pembentukan akhlak dan tazkiyatun nafs (penyucian jiwa). Islam menekankan bahwa ilmu yang tidak dibarengi dengan pembentukan sikap dan akhlak hanya akan melahirkan intelektual kering, tanpa membawa kebaikan bagi kehidupan. Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa tujuan utama diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia (HR. Ahmad).

Menurut Ibnu Miskawaih²²⁵, pendidikan bukan hanya soal penguasaan pengetahuan, tetapi juga pengendalian jiwa untuk mencapai kebahagiaan sejati (*sa'ādah*). Demikian pula Al-Ghazali²²⁶ dalam *Mīzān al-ʿAmal* menegaskan bahwa inti pendidikan adalah menanamkan nilai keimanan, keikhlasan, dan akhlak, sehingga hati peserta didik bersih dari sifat tercela dan siap menerima cahaya ilahi. Dengan kata lain, ranah afektif dalam

²²⁴ Benjamin S. Bloom, David R. Krathwohl, dan Bertram B. Masia, *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook II, Affective Domain* (New York: David McKay, 1964), hlm. 55.

²²⁵ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq* (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1994), hlm. 100.

²²⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Mīzān al-ʿAmal* ..., hlm. 85.

pendidikan Islam adalah jantung dari proses internalisasi Nilai-nilai Islami.

Beberapa aspek penting dari integrasi ranah afektif dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Pembiasaan religius

Salah satu strategi afektif yang banyak dipraktikkan di sekolah Islam adalah pembiasaan seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, serta salam, senyum, sapa. Menurut Mujiburrahman²²⁷, pembiasaan religius ini secara perlahan membentuk kepribadian Islami yang melekat pada siswa.

2. Keteladanan (uswah hasanah)

Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga model sikap dan perilaku Islami. Tafsir²²⁸ menekankan bahwa pendidikan Islam hanya akan berhasil apabila guru menjadi teladan nyata dalam akhlak, ibadah, dan interaksi sosial. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al, Ahzab [33]: 21, bahwa Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi umat manusia.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا



"Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah," QS. Al- Ahzab [33]: 21

3. Penginternalisasian nilai melalui pengalaman belajar

Menurut Krathwohl²²⁹, afeksi tidak dapat diajarkan secara teoritis semata, tetapi harus dialami melalui keterlibatan langsung. Dalam Islam, hal ini tercermin dalam kegiatan

²²⁷ Mujiburrahman, "Pendidikan Islami di Aceh ...," hlm. 58.

²²⁸ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* ..., hlm. 75.

²²⁹ David R. Krathwohl, "A Revision of Bloom's Taxonomy ...", hlm.

amal shalih, gotong royong, bakti sosial, dan kegiatan ekstrakurikuler bernuansa Islami yang membangun rasa empati, ukhuwah, dan tanggung jawab sosial.

4. Pembentukan karakter Islami

Muhaimin²³⁰ menyatakan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan Nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlak dalam seluruh mata pelajaran, sehingga peserta didik tumbuh sebagai pribadi berkarakter Islami yang konsisten. Hal ini selaras dengan tujuan Kurikulum Merdeka yang mengedepankan Profil Pelajar Pancasila, yang dalam konteks Aceh dapat dipadukan dengan visi *insan kamil*.

Dengan demikian, ranah afektif dalam perspektif pendidikan Islam tidak hanya sekadar mengajarkan sikap, tetapi lebih jauh mengarah pada internalisasi nilai Islami yang tercermin dalam karakter sehari, hari. Kurikulum Merdeka dapat mengakomodasi hal ini melalui pendekatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) yang dipadukan dengan Nilai-nilai Islami, sehingga peserta didik mampu menghayati sekaligus mempraktikkan ajaran Islam dalam konteks kehidupan modern.

2.5.3 Akhlak sebagai Puncak Ranah Afektif

Dalam Taksonomi Bloom yang menjadi salah satu teori pendidikan paling berpengaruh di dunia modern, ranah afektif (sikap, nilai, dan emosi) mencapai puncaknya pada tingkat *characterizing by value* atau menginternalisasi nilai, yaitu ketika nilai-nilai yang telah dipelajari dan dihayati benar-benar telah terinternalisasi menjadi karakter yang konsisten dalam kehidupan peserta didik. Pada tingkat ini, nilai tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang berasal dari luar diri, tetapi telah menjadi keyakinan pribadi yang menggerakkan perilaku secara spontan dan konsisten, tanpa memerlukan pertimbangan rasional yang panjang atau tekanan dari luar. Dalam perspektif pendidikan Islam, puncak dari ranah

²³⁰ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam ...*, hlm. 165.

afektif ini tidak lain adalah akhlak mulia (al-akhlaq al-karimah), yaitu keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga kebaikan menjadi kebiasaan yang melekat dan dilakukan dengan penuh kesadaran serta keikhlasan. Dengan demikian, akhlak merupakan implementasi tertinggi sekaligus indikator keberhasilan pendidikan dalam ranah afektif. Seorang peserta didik tidak dapat dikatakan berhasil dalam pembentukan sikap dan nilai jika nilai-nilai yang diajarkan belum mencapai tingkat akhlak, yaitu menjadi karakter yang menetap dan terwujud dalam perilaku sehari-hari.

Ibnu Miskawaih, dalam karyanya *Tahdzīb al-Akhlāq wa Taṭhīr al-A'rāq*, menjelaskan secara sistematis bahwa akhlak (khuluq) adalah keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan akal yang panjang, karena telah menjadi kebiasaan yang melekat dan mengakar dalam dirinya. Proses pembentukan akhlak ini, menurut Ibnu Miskawaih, melalui tiga tahap yang berkesinambungan. Tahap pertama adalah ta'wīd (pembiasaan), yaitu mengulang-ulang perbuatan baik sehingga menjadi terbiasa dilakukan. Tahap kedua adalah riyāḍah al-naḥs (latihan jiwa), yaitu melatih jiwa untuk secara sadar mengendalikan hawa nafsu dan mendisiplinkan diri dalam kebaikan. Tahap ketiga adalah al-malakah (menjadi karakter permanen), yaitu ketika kebaikan telah menjadi sifat yang melekat dan dilakukan secara spontan tanpa beban. Ketiga tahap ini memiliki keselarasan yang sangat kuat dengan tingkatan dalam ranah afektif Bloom, yang terdiri atas lima tingkatan: *receiving* (menerima), yaitu kesediaan untuk memperhatikan suatu nilai; *responding* (merespon), yaitu keterlibatan aktif dalam menerima nilai; *valuing* (menilai), yaitu komitmen terhadap suatu nilai dan menunjukkan preferensi terhadapnya; *organizing* (mengorganisasi), yaitu mengintegrasikan nilai ke dalam sistem nilai yang lebih luas; dan *characterizing* (menginternalisasi), yaitu menjadikan nilai sebagai karakter yang konsisten dalam kehidupan. Dengan demikian, teori akhlak Ibnu Miskawaih tidak hanya sejalan dengan

Taksonomi Bloom, tetapi justru memperkayanya dengan dimensi spiritual dan moral yang menjadi ciri khas pendidikan Islam.

Al-Ghazali, yang dikenal dengan gelar Hujjat al-Islām, dalam karya-karyanya seperti *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* dan *Mīzān al-'Amal*, menambahkan bahwa pencapaian akhlak mulia tidak mungkin terjadi tanpa adanya tazkiyat al-nafs (penyucian jiwa). Menurut Al-Ghazali, jiwa manusia memiliki potensi untuk kebaikan sekaligus kejahatan. Tanpa proses penyucian yang sungguh-sungguh, jiwa akan cenderung kepada kejahatan dan sifat-sifat tercela. Proses penyucian jiwa ini melibatkan dua upaya yang harus dilakukan secara simultan: pertama, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela (*al-akhlāq al-madzmūmah*) seperti sombong (*takabbur*), iri hati (*ḥasad*), dengki, tamak (*ṭama'*), dan cinta dunia (*ḥubb al-dunyā*); kedua, menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji (*al-akhlāq al-maḥmūdah*) seperti jujur (*ṣidq*), sabar (*ṣabr*), syukur (*syukr*), tawakal (*tawakkal*), dan ikhlas (*ikhlas*). Dalam konteks pembelajaran di sekolah, proses tazkiyat al-nafs ini dapat difasilitasi melalui berbagai strategi: refleksi diri yang mendorong peserta didik untuk melihat ke dalam, mengevaluasi niat, sikap, dan perilaku mereka; pembiasaan positif yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan; serta keteladanan guru yang menjadi model konkret bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai akhlak mulia.

Dalam Kurikulum Merdeka, pencapaian akhlak mulia sebagai puncak ranah afektif dapat diwujudkan melalui berbagai jalur yang terintegrasi. Pertama, melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang dapat dirancang dengan tema-tema Islami yang kontekstual dan bermakna. Misalnya, tema "Kearifan Lokal" dapat dikembangkan menjadi proyek tentang tradisi Islami Aceh seperti khanduri dan peusijek yang sarat nilai-nilai keislaman; tema "Gaya Hidup Berkelanjutan" dapat dikembangkan menjadi proyek tentang konservasi lingkungan dengan perspektif khalifah dan tanggung jawab menjaga alam; tema "Kewirausahaan" dapat dikembangkan menjadi proyek usaha mikro

yang dilandasi nilai amanah, kejujuran, dan keadilan dalam bermuamalah. Kedua, melalui pembiasaan religius yang tidak hanya bersifat ritual semata, seperti shalat berjamaah, doa bersama, dan tadarus Al-Qur'an, tetapi juga dilengkapi dengan refleksi nilai yang mendalam dan pembinaan karakter secara berkelanjutan. Setiap kegiatan ritual diikuti dengan diskusi tentang makna dan hikmahnya, serta bagaimana nilai-nilai yang terkandung dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, melalui asesmen afektif yang mampu mengukur sejauh mana nilai-nilai akhlak telah terinternalisasi dalam diri peserta didik, bukan sekadar penilaian sikap yang bersifat administratif dan formalitas. Asesmen afektif yang ideal tidak hanya menilai perilaku yang tampak, tetapi juga motivasi, niat, dan konsistensi peserta didik dalam mengamalkan nilai-nilai akhlak, melalui observasi berkelanjutan, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal refleksi, dan portofolio perkembangan karakter.

Dengan demikian, penelitian ini menjadikan akhlak sebagai fokus utama dalam mengkaji internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Pilihan fokus ini didasarkan pada beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, akhlak merupakan tujuan tertinggi sekaligus indikator keberhasilan pendidikan Islam, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama klasik dan pemikir modern. Kedua, akhlak memiliki keselarasan substantif yang kuat dengan dimensi utama Profil Pelajar Pancasila, yaitu “beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia”, sehingga menjadikannya titik temu yang paling strategis antara pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan nasional. Ketiga, akhlak dapat diukur dan diamati sebagai indikator keberhasilan internalisasi nilai, tidak hanya pada ranah kognitif (pengetahuan tentang nilai), tetapi juga pada ranah afektif (penghayatan nilai) dan psikomotorik (pengamalan nilai). Keempat, fokus pada akhlak memungkinkan penelitian ini untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan, baik bagi pengembangan teori pendidikan Islam maupun bagi pengembangan kebijakan Kurikulum Merdeka yang

kontekstual dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal Aceh. Dengan menjadikan akhlak sebagai fokus utama, penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana nilai-nilai Islami diinternalisasikan, tetapi juga menawarkan model integrasi akhlak dalam Kurikulum Merdeka yang dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai agama di daerah-daerah lain di Indonesia.

2.5.4 Ranah Psikomotorik dalam Pembentukan Karakter Islami

Ranah psikomotorik dalam Taksonomi Bloom berkaitan dengan keterampilan fisik dan kemampuan praktis yang ditunjukkan peserta didik dalam bentuk perilaku nyata. Simpson²³¹ mengembangkan klasifikasi ranah psikomotorik menjadi tujuh tingkatan, yaitu: *perception* (*persepsi*), *set* (*kesiapan*), *guided response* (*respon terbimbing*), *mechanism* (*mekanisme*), *complex overt response* (*respons terbuka kompleks*), *adaptation* (*adaptasi*), dan *origination* (*kreasi baru*). Ranah ini menekankan pada pembentukan keterampilan melalui latihan, kebiasaan, dan penghayatan yang terus, menerus.

Dalam perspektif pendidikan Islam, ranah psikomotorik memiliki kedudukan yang sangat penting karena terkait langsung dengan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang diperoleh dari ranah kognitif dan sikap yang terbentuk dari ranah afektif tidak akan bermakna apabila tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al, Saff [61]: 2 - 3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا

لَا تَفْعَلُونَ

²³¹ Elizabeth J. Simpson, *The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain* (Washington, DC: Gryphon House, 1972), hlm. 42.

"Wahai orang, orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa, apa yang tidak kamu kerjakan." QS. As-Saff [61]: 2 - 3

Ayat ini menekankan pentingnya konsistensi antara pengetahuan, keyakinan, dan perbuatan nyata.

Dalam pembentukan karakter Islami, ranah psikomotorik tercermin dalam berbagai aspek kehidupan peserta didik, antara lain:

1. Pelaksanaan ibadah ritual

Keterampilan psikomotorik Islami mencakup kemampuan teknis dalam melaksanakan ibadah seperti shalat, wudhu, membaca Al-Qur'an dengan tartil, dan ibadah lainnya. Menurut Al-Abrasyi²³², pendidikan Islam yang ideal harus memadukan teori ibadah dengan praktik langsung, agar siswa terbiasa mengaplikasikan ilmunya secara benar.

2. Pembiasaan amal shalih

Selain ibadah ritual, ranah psikomotorik juga mencakup kebiasaan amal shalih seperti bersedekah, membantu orang lain, menjaga kebersihan, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Mujiburrahman²³³ menekankan bahwa praktik keagamaan yang konsisten akan memperkuat identitas religius siswa dalam konteks masyarakat Aceh yang Islami.

3. Kegiatan ekstrakurikuler Islami

Program sekolah seperti pramuka Islami, seni hadrah, kaligrafi, olahraga sunnah (panahan, renang, berkuda), dan bakti sosial adalah contoh penerapan ranah psikomotorik yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Aktivitas ini tidak hanya membentuk keterampilan, tetapi juga memperkuat Nilai-nilai ukhuwah dan tanggung jawab sosial.

4. Keterampilan hidup berbasis nilai Islami

²³² M. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam ...*, hlm. 120.

²³³ Mujiburrahman, "Pendidikan Islami di Aceh ...," hlm. 60.

Pendidikan Islam tidak hanya menekankan ibadah, tetapi juga mengembangkan keterampilan hidup (*life skills*) yang Islami, seperti kemampuan berwirausaha dengan prinsip halal, keterampilan teknologi dengan etika, serta keterampilan komunikasi yang jujur dan santun. Menurut Al-Attas²³⁴, pendidikan Islam harus melahirkan *insan adabi*, yaitu manusia yang beradab, mampu mengintegrasikan ilmu, sikap, dan amal dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian, ranah psikomotorik dalam pembentukan karakter Islami bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi lebih luas lagi merupakan manifestasi nyata dari ilmu dan iman dalam bentuk amal saleh. Ketiga ranah dalam Taksonomi Bloom, kognitif, afektif, dan psikomotorik, bila diintegrasikan dengan Nilai-nilai Islami akan melahirkan peserta didik yang berilmu, berakhlak, dan beramal.

2.5.5 Integrasi Taksonomi Bloom dengan Profil Pelajar Pancasila

Profil Pelajar Pancasila merupakan visi pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi²³⁵ merumuskan enam dimensi utama Profil Pelajar Pancasila, yaitu: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; (2) berkebinekaan global; (3) bergotong royong; (4) mandiri; (5) bernalar kritis; dan (6) kreatif. Dimensi, dimensi tersebut mencerminkan kualitas peserta didik Indonesia yang diharapkan mampu menghadapi tantangan abad ke - 21 dengan tetap berpijak pada Nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa.

Di sisi lain, Taksonomi Bloom memberikan kerangka sistematis untuk mengembangkan tujuan pembelajaran dalam tiga ranah: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Integrasi antara

²³⁴ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 45.

²³⁵ Kemendikbudristek, *Kurikulum Merdeka: Panduan Implementasi ...*, hlm. 125.

Taksonomi Bloom dan Profil Pelajar Pancasila sangat relevan karena keduanya sama, sama menekankan pembentukan manusia yang utuh: cerdas secara intelektual, berkarakter, dan mampu mengaktualisasikan pengetahuan dalam tindakan nyata.

Adapun hubungan integrasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ranah Kognitif dan Dimensi Bernalar Kritis serta Kreatif

Ranah kognitif dalam Taksonomi Bloom, mulai dari *remembering* hingga *creating*, sejalan dengan upaya membentuk peserta didik yang mampu berpikir kritis dan kreatif. Misalnya, kemampuan *analyzing* dan *evaluating* sangat relevan dengan dimensi “bernalar kritis”, di mana siswa diharapkan mampu menilai informasi, mengambil keputusan, serta menyelesaikan masalah kompleks. Sedangkan kemampuan *creating* sejalan dengan dimensi “kreatif”, yang menekankan inovasi dan penciptaan solusi baru²³⁶.

2. Ranah Afektif dan Dimensi Iman, Takwa, serta Berkebinekaan Global

Ranah afektif menekankan sikap, nilai, dan pembentukan karakter, yang berhubungan erat dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila, khususnya “beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia”. Pada level *valuing* hingga *characterization*, peserta didik diharapkan bukan hanya memahami nilai moral, tetapi juga menginternalisasikan dan menampilkan perilaku berakhlak mulia dalam kehidupan nyata. Selain itu, ranah afektif mendukung dimensi “berkebinekaan global”, karena sikap empati, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman dapat ditanamkan melalui proses pembelajaran yang berpusat pada Nilai-nilai kemanusiaan²³⁷.

3. Ranah Psikomotorik dan Dimensi Gotong Royong serta Mandiri

220 ²³⁶ David R. Krathwohl, "A Revision of Bloom's Taxonomy ...", hlm.

²³⁷ James A. Banks, *Cultural Diversity and Education* ..., hlm. 88.

Ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan praktis yang ditunjukkan melalui aktivitas nyata. Hal ini sangat sesuai dengan dimensi “bergotong royong” dan “mandiri”. Peserta didik yang terbiasa mempraktikkan kerja sama dalam kegiatan kelompok, proyek sosial, atau ibadah berjamaah akan mengembangkan keterampilan sosial dan semangat kebersamaan. Sementara dimensi “mandiri” terwujud ketika peserta didik mampu mengatur diri, melaksanakan ibadah, mengelola waktu, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya tanpa ketergantungan pada orang lain²³⁸.

Integrasi ini juga sejalan dengan perspektif Islam. Dalam pendidikan Islam, tujuan utama adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal. Dengan demikian, Nilai-nilai Islami dapat diinternalisasikan ke dalam setiap ranah Taksonomi Bloom yang dikaitkan dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila. Misalnya, pada ranah kognitif siswa diajak memahami dalil Al-Qur'an tentang pentingnya ilmu; pada ranah afektif siswa dibiasakan menghargai perbedaan sebagai bentuk rahmat Allah, 'alamin; dan pada ranah psikomotorik siswa dipraktikkan keterampilan hidup Islami seperti beribadah dengan benar, bekerja sama dalam kebaikan, dan berinovasi dengan etika Islami²³⁹.

Dengan demikian, integrasi antara Taksonomi Bloom dan Profil Pelajar Pancasila dalam bingkai nilai Islami akan melahirkan peserta didik yang memiliki keseimbangan antara ilmu, sikap, dan keterampilan, serta siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri keislaman dan keindonesiaannya.

2.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pijakan konseptual yang memandu jalannya penelitian sehingga arah dan fokus penelitian

²³⁸ Ika Lestari Ayuningtyas dan D. Pramono, "Internalisasi Pendidikan Karakter ...", hlm. 20

²³⁹ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam* ..., hlm. 50.

menjadi jelas, sistematis, serta memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kerangka teori menjelaskan hubungan antara konsep, variabel, dan temuan penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan (Creswell, 2014²⁴⁰; Sugiyono, 2019)²⁴¹. Dalam penelitian ini, kerangka teori dibangun dari integrasi tiga dimensi utama, yaitu: (1) teori pendidikan Islam dan internalisasi nilai Islami, (2) teori kurikulum dan pengembangan kurikulum modern, serta (3) teori pendidikan karakter, khususnya dalam kerangka Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila.

2.6.1 Pendidikan Islam sebagai Landasan Nilai

Pendidikan Islam memiliki tujuan utama untuk membentuk insan kamil (manusia paripurna) yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan bermoral²⁴². Tokoh, tokoh klasik seperti Ibnu Khaldun, Al- Ghazali, dan Ibnu Miskawaih menekankan bahwa pendidikan harus menginternalisasikan akhlak mulia melalui teladan, pembiasaan, dan penguatan Nilai-nilai Qur'ani. Konsep ini selaras dengan prinsip integrasi ilmu dan agama²⁴³ yang menuntut agar setiap proses pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik.

Dalam konteks Aceh, internalisasi nilai Islami diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menegaskan bahwa pendidikan di Aceh harus berlandaskan Nilai-nilai Islami dan budaya lokal. Hal ini menegaskan bahwa kerangka teori penelitian ini harus meletakkan pendidikan Islam sebagai fondasi normatif dan ideologis.

²⁴⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Edisi ke-4 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), hlm. 105.

²⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 155.

²⁴² Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam ...*, hlm. 170.

²⁴³ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam ...*, hlm. 115.

Pendidikan Islam sejak awal telah dipahami sebagai proses membentuk manusia secara menyeluruh (kaffah) yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Dalam perspektif Islam, pendidikan bertujuan melahirkan manusia yang beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak mulia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al, Mujadalah: 11) bahwa Allah akan meninggikan derajat orang, orang yang beriman dan berilmu. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki landasan normatif yang bersumber dari wahyu, serta landasan filosofis yang bersumber dari pemikiran para ulama dan filosof Muslim.

Menurut Al- Attas ²⁴⁴, pendidikan Islam adalah proses penanaman adab, yaitu pengenalan dan pengakuan terhadap tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan wujud. Proses pendidikan ini pada akhirnya melahirkan insan beradab yang mampu memahami posisi dirinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa teori pendidikan Islam menekankan keterpaduan antara dimensi spiritual, intelektual, emosional, dan moral.

Muhaimin ²⁴⁵ menegaskan bahwa pendidikan Islam bertumpu pada tiga dimensi utama: (1) dimensi teologis, yaitu menanamkan iman dan ketakwaan kepada Allah; (2) dimensi epistemologis, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat; dan (3) dimensi aksiologis, yaitu mengarahkan peserta didik untuk beramal saleh dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Sementara itu, Al- Syaibany ²⁴⁶ menekankan bahwa pendidikan Islam harus berlandaskan tauhid sebagai asas tertinggi yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun alam semesta.

²⁴⁴ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 60.

²⁴⁵ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam ...*, hlm. 175.

²⁴⁶ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam ...*, hlm. 120.

Dari perspektif sejarah, Ibnu Khaldun (1332–1406 M) menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membangun peradaban (umran). Menurutnya, kemajuan atau kemunduran suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang berbasis pada nilai agama dan moral²⁴⁷. Hal ini selaras dengan pandangan Al- Ghazali²⁴⁸ yang memandang pendidikan sebagai sarana penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) dan pembentukan akhlak mulia.

Dalam konteks kontemporer, pendidikan Islam juga dipandang sebagai sarana membentuk sumber daya manusia yang unggul dan mampu menghadapi tantangan global. Azra²⁴⁹ menekankan bahwa modernisasi pendidikan Islam harus tetap berakar pada Nilai-nilai Qur'an dan Sunnah, sambil membuka ruang untuk adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, teori pendidikan Islam dapat dirumuskan dalam beberapa poin penting:

1. Pendidikan Islam berlandaskan pada tauhid sebagai asas utama.
2. Pendidikan Islam menekankan keterpaduan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
3. Pendidikan Islam bertujuan membentuk insan kamil, yaitu manusia beriman, berilmu, berakhlak, dan beramal.
4. Pendidikan Islam relevan sepanjang masa karena mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Kerangka teori ini penting karena penelitian mengenai internalisasi nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka di Aceh berpijak pada pandangan bahwa pendidikan Islam bukan hanya instrumen religius, tetapi juga fondasi filosofis dan ideologis dalam

²⁴⁷ A. Hadi dan S. Hanani, "Analisis Pemikiran Ibn Khaldun ...", hlm. 160.

²⁴⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Mīzān al- 'Amal* ..., hlm. 90.

²⁴⁹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi* ..., hlm. 155.

membentuk profil pelajar yang berkarakter Islami sekaligus Pancasila.

2.6.2 Teori Kurikulum dan Pengembangannya

Teori kurikulum modern memberikan kerangka untuk memahami bagaimana pendidikan dapat diorganisasikan secara sistematis. Tyler²⁵⁰ menekankan bahwa kurikulum harus dibangun dari empat komponen utama: tujuan, pengalaman belajar, organisasi pembelajaran, dan evaluasi. Taba²⁵¹ menambahkan bahwa guru harus berperan aktif dalam mengembangkan kurikulum yang kontekstual, sementara Stenhouse²⁵² menekankan kurikulum sebagai “a process” yang dinamis dan partisipatif.

Dalam konteks Indonesia, evolusi kurikulum dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), KTSP 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari penguasaan materi ke arah penguatan kompetensi dan karakter²⁵³. Dengan demikian, kerangka teori penelitian ini memandang Kurikulum Merdeka sebagai inovasi pendidikan yang tetap dapat dipadukan dengan Nilai-nilai Islami, khususnya di Aceh.

2.6.3 Teori Pendidikan Karakter dan Internalisasi Nilai Islami

Pendidikan karakter menurut Lickona²⁵⁴ berlandaskan pada tiga dimensi: moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral action (tindakan moral). Dalam konteks Islam, konsep ini sejalan dengan pandangan Ibnu Miskawaih²⁵⁵ yang

²⁵⁰ Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (Chicago: University of Chicago Press, 1949), hlm. 35.

²⁵¹ Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice ...*, hlm. 72.

²⁵² Lawrence Stenhouse, *An Introduction to Curriculum Research and Development* (London: Heinemann, 1975), hlm. 60.

²⁵³ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 133.

²⁵⁴ Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991), hlm. 47.

²⁵⁵ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq ...*, hlm. 105.

menekankan pentingnya keseimbangan antara akal, jiwa, dan perilaku (the golden mean).

Dalam Kurikulum Merdeka, pembentukan karakter difokuskan pada Profil Pelajar Pancasila, yang meliputi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif²⁵⁶. Nilai-nilai ini secara substansial dapat disejajarkan dengan tujuan pendidikan Islam, seperti membentuk insan beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak mulia²⁵⁷. Oleh karena itu, teori pendidikan karakter modern dapat disinergikan dengan konsep internalisasi Islami sebagai kerangka konseptual penelitian.

Internalisasi nilai merupakan salah satu konsep penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan Nilai-nilai tertentu ke dalam diri peserta didik sehingga nilai tersebut tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dihayati secara afektif dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Proses internalisasi berbeda dengan sekadar transfer pengetahuan, karena menekankan pada pembentukan kesadaran, sikap, dan kebiasaan yang sesuai dengan nilai yang ditanamkan.

Menurut Koesoema²⁵⁸, internalisasi nilai dalam pendidikan adalah upaya sadar untuk menjadikan nilai sebagai bagian integral dari kepribadian peserta didik. Proses ini terjadi melalui tiga tahapan: (1) transformasi nilai, yaitu pengenalan nilai dari guru kepada siswa; (2) transaksi nilai, yaitu proses interaksi dua arah antara guru dan siswa untuk mendialogkan nilai; (3) transinternalisasi nilai, yaitu kondisi ketika nilai sudah dihayati dan menjadi bagian dari kepribadian siswa.

Thomas Lickona²⁵⁹ melalui konsep *character education* menekankan bahwa internalisasi nilai tidak dapat dilepaskan dari

²⁵⁶ Kemendikbudristek, *Merdeka Belajar Episode 15* ..., hlm. 30.

²⁵⁷ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi* ..., hlm. 150.

²⁵⁸ Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global* (Jakarta: Grasindo, 2012), hlm. 85.

²⁵⁹ Thomas Lickona, *Educating for Character* ..., hlm. 52.

dimensi moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral action (tindakan moral). Ketiga dimensi ini membentuk integrasi yang memungkinkan peserta didik tidak hanya mengetahui nilai, tetapi juga menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata.

Dalam perspektif Islam, Al- Ghazali ²⁶⁰ menekankan pentingnya proses *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) dalam pendidikan, yang menjadi inti dari internalisasi nilai Islami. Menurutnya, pendidikan sejati adalah membimbing manusia untuk menginternalisasikan akhlak mulia sehingga menjadi karakter yang permanen. Hal ini sejalan dengan konsep Ibnu Miskawaih²⁶¹ dalam *Tahdzib Al- Akhlaq*, yang menegaskan bahwa pembiasaan (habituation) dan keteladanan (uswah) adalah sarana utama dalam menanamkan nilai moral pada peserta didik.

Selain itu, teori internalisasi nilai juga dapat dijelaskan melalui Bandura²⁶² dengan *social learning theory*, yang menyatakan bahwa perilaku individu dipelajari melalui observasi, imitasi, dan modeling. Dalam konteks pendidikan, guru berperan sebagai model utama yang memberikan teladan perilaku, sehingga nilai yang ditampilkan guru dapat secara efektif diinternalisasikan oleh siswa.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, internalisasi nilai Islami sejalan dengan tujuan Undang, Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, internalisasi nilai menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, khususnya di daerah berciri khas Islami seperti Aceh.

Dengan demikian, teori internalisasi nilai dapat dipahami sebagai landasan filosofis sekaligus praktis dalam pendidikan, yang

²⁶⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Mīzān al- 'Amal* ..., hlm. 95.

²⁶¹ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A 'raq* ..., hlm. 110.

²⁶² Albert Bandura, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986), hlm. 140.

mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penelitian ini, teori internalisasi nilai digunakan untuk menganalisis bagaimana Nilai-nilai Islami ditanamkan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak, melalui mekanisme pembelajaran, keteladanan guru, serta budaya sekolah Islami.

Pendidikan karakter merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan modern maupun pendidikan Islam, karena berhubungan langsung dengan pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Secara konseptual, pendidikan karakter dipahami sebagai proses penanaman Nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang diwujudkan dalam sikap serta perilaku sehari-hari.

Menurut Thomas Lickona²⁶³, pendidikan karakter melibatkan tiga dimensi utama: *moral knowing* (pengetahuan moral), *moral feeling* (perasaan moral), dan *moral action* (tindakan moral). Artinya, pendidikan karakter tidak berhenti pada aspek kognitif semata, tetapi harus mencakup internalisasi nilai yang menggerakkan perasaan, sehingga mendorong peserta didik untuk bertindak sesuai norma.

David Elkind dan Freddy Sweet²⁶⁴ menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah upaya sadar untuk membantu peserta didik memahami, memperhatikan, dan melaksanakan Nilai-nilai etika inti. Nilai inti tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, keadilan, serta kepedulian terhadap sesama.

Dalam perspektif Indonesia, pendidikan karakter mendapat perhatian serius melalui kebijakan nasional. Kementerian Pendidikan Nasional²⁶⁵ menegaskan bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kecerdasan emosional, spiritual, sosial, dan moral, di samping kecerdasan intelektual. Implementasinya dikaitkan dengan pembentukan Profil Pelajar Pancasila, yang diharapkan beriman,

²⁶³ Thomas Lickona, *Educating for Character ...*, hlm. 58.

²⁶⁴ David Elkind dan Fred Sweet, *How to Do Character Education* (California: Character Education Partnership, 2004), hlm. 33.

²⁶⁵ Kementerian Pendidikan Nasional, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa* (Jakarta: Kemendiknas, 2010), hlm. 22.

bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif²⁶⁶.

Dari perspektif Islam, pendidikan karakter erat kaitannya dengan konsep *akhlak al, karimah*. Al- Ghazali²⁶⁷ menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk akhlak mulia, di mana setiap pengetahuan yang dipelajari seharusnya bermuara pada perilaku yang sesuai dengan syariat. Sementara itu, Ibnu Miskawaih²⁶⁸ dalam *Tahdzib Al- Akhlaq* menegaskan pentingnya pembiasaan (habituation) dalam membentuk karakter. Baginya, akhlak yang baik bukan sekadar pengetahuan, tetapi hasil dari latihan dan pembiasaan yang konsisten.

Teori pendidikan karakter juga dapat dikaitkan dengan Kohlberg²⁶⁹ melalui *theory of moral development*. Ia mengemukakan enam tahap perkembangan moral, yang terbagi dalam tiga tingkat: (1) *pre, conventional*, di mana perilaku ditentukan oleh kepentingan pribadi; (2) *conventional*, di mana individu patuh pada aturan dan norma sosial; dan (3) *post, conventional*, di mana moralitas ditentukan oleh prinsip universal dan kesadaran etis. Pendidikan karakter di sekolah berperan untuk membantu siswa bergerak dari tahap rendah menuju tahap moral yang lebih tinggi.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak, teori pendidikan karakter berfungsi sebagai pijakan dalam mengintegrasikan Nilai-nilai Islami ke dalam pembelajaran. Proses ini dilakukan melalui keteladanan guru, pembiasaan religius, serta penerapan asesmen autentik yang menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Hal ini sesuai dengan pandangan Koesoema²⁷⁰ bahwa pendidikan karakter bukan hanya program

²⁶⁶ Kemendikbudristek, *Program Sekolah Penggerak ...*, hlm. 40.

²⁶⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Mīzān al-‘Amal ...*, hlm. 100.

²⁶⁸ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A‘raq ...*, hlm. 115.

²⁶⁹ Lawrence Kohlberg, *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice* (San Francisco: Harper & Row, 1981), hlm. 75.

²⁷⁰ Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter ...*, hlm. 90.

tambahan, melainkan ruh dari seluruh aktivitas pendidikan di sekolah.

Dengan demikian, teori pendidikan karakter memberikan landasan konseptual sekaligus praktis dalam penelitian ini, karena mendukung analisis bagaimana Nilai-nilai Islami dapat diinternalisasikan ke dalam Kurikulum Merdeka untuk membentuk pelajar yang berkarakter Islami sekaligus mencerminkan Profil Pelajar Pancasila.

2.6.4 Teori Belajar Bloom dan Integrasinya dengan Nilai Islami

Bloom ²⁷¹ melalui *Taxonomy of Educational Objectives* membagi ranah belajar menjadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam konteks internalisasi nilai Islami:

1. Ranah kognitif selaras dengan proses memahami ajaran agama (misalnya mengingat dan memahami ayat Qur'an).
2. Ranah afektif relevan dengan pembentukan sikap religius (misalnya taat beribadah, berakhlak baik).
3. Ranah psikomotorik terkait dengan keterampilan nyata yang Islami (misalnya shalat, tilawah Qur'an, keterampilan sosial berbasis nilai Islami).

Integrasi Bloom dengan nilai Islami menjadikan kerangka teori penelitian ini kuat dalam menjelaskan bagaimana pendidikan dapat menginternalisasikan nilai dalam tiga ranah perkembangan siswa.

2.6.5 Hubungan Internalisasi Nilai Islami dengan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Berdasarkan teori pendidikan Islam, teori kurikulum, pendidikan karakter, dan teori belajar Bloom, dapat dirumuskan hubungan teoritis sebagai berikut:

1. Internalisasi nilai Islami berperan sebagai variabel independen (X), yang diukur melalui indikator keteladanan

²⁷¹ Benjamin S. Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives ...*, hlm. 75.

guru, pembiasaan religius, integrasi materi Islami, dan disiplin Islami.

2. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka menjadi variabel dependen (Y), dengan indikator kesiapan guru, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan berbasis proyek, dan evaluasi berbasis kompetensi.
3. Hubungan keduanya diasumsikan positif: semakin kuat internalisasi nilai Islami, semakin efektif pula pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Dengan demikian, kerangka teori penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai Islami bukan sekadar muatan lokal, tetapi kerangka normatif dan praktis yang memperkuat keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya dalam pembentukan Profil Pelajar Pancasila yang Islami di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh.

Perkembangan kurikulum modern merupakan refleksi dari dinamika pemikiran pendidikan yang terus beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jika kurikulum klasik lebih menekankan pada transfer pengetahuan (*knowledge, centered*), maka kurikulum modern cenderung mengintegrasikan berbagai dimensi pendidikan, termasuk keterampilan, nilai, dan sikap, agar peserta didik mampu menghadapi tantangan era globalisasi.

Menurut Tyler ²⁷², kurikulum modern dibangun atas dasar empat pertanyaan mendasar: (1) tujuan pendidikan apa yang harus dicapai sekolah? (2) pengalaman belajar apa yang dapat memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan tersebut? (3) bagaimana pengalaman belajar tersebut dapat diorganisasikan secara efektif? (4) bagaimana kita mengetahui apakah tujuan tersebut telah tercapai? Model ini dikenal dengan *The Tyler Rationale*, yang menjadi salah satu teori kurikulum paling berpengaruh hingga saat ini.

²⁷² Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* ..., hlm. 40.

Selanjutnya, Hilda Taba²⁷³ mengembangkan teori kurikulum berbasis pada pendekatan *grassroots*, yang menekankan bahwa pengembangan kurikulum sebaiknya berangkat dari guru sebagai ujung tombak pembelajaran. Taba mengusulkan model tujuh langkah yang dimulai dari diagnosa kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan isi, organisasi isi, pemilihan pengalaman belajar, organisasi pengalaman belajar, hingga evaluasi. Teori Taba relevan bagi kurikulum modern karena memberikan ruang partisipatif bagi guru dan komunitas pendidikan dalam menentukan arah pembelajaran.

Stenhouse²⁷⁴ menawarkan model kurikulum proses (*process model*), yang menekankan bahwa kurikulum bukanlah sekadar dokumen tertulis atau daftar isi mata pelajaran, tetapi sebuah proses dinamis yang hidup dalam interaksi guru, siswa, dan materi pembelajaran. Dalam pandangannya, kurikulum modern harus fleksibel, terbuka terhadap perubahan, dan memungkinkan guru untuk bereksperimen dalam praktik kelas.

Selain itu, Ornstein dan Hunkins²⁷⁵ menjelaskan bahwa teori kurikulum modern mencakup tiga pendekatan utama: (1) pendekatan akademik, yang menekankan penguasaan ilmu pengetahuan; (2) pendekatan humanistik, yang menekankan pengembangan kepribadian dan aktualisasi diri; dan (3) pendekatan rekonstruksionis, yang menekankan pada perubahan sosial melalui pendidikan. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam kerangka pendidikan abad ke - 21.

Dalam konteks Indonesia, teori kurikulum modern diadopsi dalam pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K13), hingga Kurikulum Merdeka. Seluruhnya mengusung

²⁷³ Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice ...*, hlm. 78.

²⁷⁴ Lawrence Stenhouse, *An Introduction to Curriculum Research and Development ...*, hlm. 65.

²⁷⁵ Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues ...*, hlm. 108.

paradigma kompetensi, pembelajaran aktif, penguatan karakter, dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat global, namun tetap mengakar pada Nilai-nilai lokal.

Dengan demikian, teori kurikulum modern menegaskan bahwa kurikulum bukan hanya seperangkat dokumen formal, tetapi sebuah proses berkelanjutan yang harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman. Teori ini menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana Kurikulum Merdeka di Indonesia dapat selaras dengan Nilai-nilai Islami yang diinternalisasikan di Aceh.

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun atas dasar kebutuhan untuk menghubungkan antara konsep internalisasi Nilai-nilai Islami dengan implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak. Kerangka ini tidak hanya memaparkan hubungan variabel secara teoretis, tetapi juga menjelaskan model integratif yang dapat diaplikasikan dalam konteks pendidikan di Aceh, sebuah wilayah yang memiliki kekhususan regulatif dalam bidang pendidikan berbasis syariat Islam.

Secara konseptual, Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas, kebermaknaan pembelajaran, serta penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Di sisi lain, pendidikan Islam memiliki tujuan utama membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia²⁷⁶. Kedua kerangka ini dapat dipadukan melalui pendekatan integrasi nilai Islami dalam praktik kurikulum, yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

Komponen Kerangka Konseptual

1. Perencanaan Kurikulum

Integrasi nilai Islami pada tahap perencanaan dilakukan melalui penyusunan Kurikulum Operasional Satuan

²⁷⁶ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 65.

Pendidikan (KOSP), modul ajar, dan RPP yang memuat ayat, ayat Al-Qur'an, hadis, serta nilai akhlak Islami sebagai dasar pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pandangan Tafsir²⁷⁷ bahwa pendidikan Islam harus bersumber pada wahyu dan akal.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pada tahap implementasi, nilai Islami diinternalisasikan melalui:

- 1) Keteladanan guru (*uswah hasanah*), yang menurut Ibnu Miskawaih²⁷⁸ adalah kunci pembentukan karakter.
- 2) Pembiasaan religius, seperti doa bersama, salat berjamaah, atau tadarus Al-Qur'an di sekolah.
- 3) Pembelajaran berbasis proyek (Project, Based Learning) yang mengintegrasikan masalah sosial dan nilai Islami, sehingga siswa belajar sambil mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan nyata.

3. Evaluasi Berbasis Kompetensi Islami

Asesmen dalam Kurikulum Merdeka tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Model integrasi Islami menekankan penilaian akhlak mulia dan religiusitas peserta didik sebagai bagian dari kompetensi inti. Hal ini selaras dengan Bloom & Krathwohl²⁷⁹ yang membagi ranah pendidikan menjadi kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang dapat diisi dengan nilai Islami.

4. Kontekstualisasi dengan Budaya Aceh

Integrasi nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka di Aceh harus memperhatikan muatan lokal Islami yang diatur dalam Qanun Pendidikan. Menurut Mujiburrahman²⁸⁰, masyarakat

²⁷⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* ..., hlm. 85.

²⁷⁸ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq* ..., hlm. 120.

²⁷⁹ Benjamin S. Bloom dan David R. Krathwohl, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain* (New York: David McKay, 1956), hlm. 80.

²⁸⁰ Mujiburrahman, "Pendidikan Islami di Aceh ...," hlm. 62.

Aceh memiliki pandangan bahwa pendidikan Islami adalah bagian dari identitas sosial dan budaya. Oleh karena itu, muatan lokal seperti baca tulis Al-Qur'an, sejarah kebudayaan Islam, dan praktik ibadah menjadi penguat implementasi kurikulum.

Kerangka konseptual penelitian ini memposisikan:

- 1) Internalisasi nilai Islami (X) sebagai variabel independen, yang mencakup dimensi keteladanan, pembiasaan, integrasi materi, dan penilaian berbasis akhlak.
- 2) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka (Y) sebagai variabel dependen, yang mencakup dimensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan ketercapaian profil pelajar Pancasila.

Hubungan keduanya dijelaskan melalui model bahwa semakin kuat internalisasi nilai Islami, maka semakin efektif implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya dalam membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter Islami.

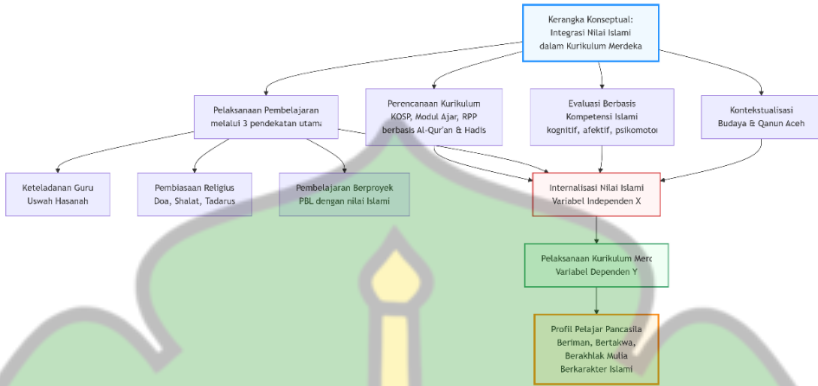
Model Konseptual

Secara sederhana, model ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Internalisasi Nilai Islami (X) : [Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Islami] : Pelaksanaan Kurikulum Merdeka (Y) : Terwujudnya Profil Pelajar Pancasila Berkarakter Islami.

Model ini menegaskan bahwa nilai Islami bukanlah tambahan, melainkan ruh yang menguatkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, sehingga relevan dengan konteks pendidikan Aceh yang berciri khas syariat Islam.

Gambar 2.8 : Kerangka Konseptual Penelitian



2.8 Pengkajian Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih perlu diuji secara empiris²⁸¹. Dalam penelitian ini, hipotesis dirumuskan berdasarkan kajian teori, kerangka konseptual, serta penelitian terdahulu yang relevan mengenai internalisasi nilai Islami dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Secara teoretis, pendidikan Islam menempatkan internalisasi nilai Islami sebagai inti dari pembentukan pribadi peserta didik. Menurut Al- Attas²⁸², tujuan pendidikan Islam adalah *ta'dib*, pembentukan adab dan akhlak mulia, sehingga peserta didik mampu mengenali peran dirinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Konsep ini menegaskan bahwa keteladanan guru, pembiasaan religius, dan integrasi Nilai-nilai akhlak ke dalam pembelajaran adalah faktor penting dalam membangun karakter Islami²⁸³.

Di sisi lain, Kurikulum Merdeka hadir sebagai kebijakan pendidikan nasional yang menekankan fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, dan penguatan karakter melalui *Profil Pelajar*

²⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ...*, hlm. 160.

²⁸² Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam ...*, hlm. 70.

²⁸³ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq ...*, hlm. 125.

*Pancasila*²⁸⁴. Profil ini menekankan enam dimensi utama, yaitu: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; (2) berkebinekaan global; (3) gotong royong; (4) mandiri; (5) bernalar kritis; dan (6) kreatif. Dengan demikian, integrasi nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka menjadi relevan, terutama di Aceh yang memiliki kekhususan pendidikan berbasis syariat Islam²⁸⁵.

Dasar Empiris Hipotesis

Hasil penelitian terdahulu memperkuat dugaan adanya pengaruh signifikan internalisasi nilai Islami terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum:

1. Hidayat²⁸⁶ menemukan bahwa internalisasi nilai Islami dalam kurikulum nasional mampu meningkatkan religiusitas siswa serta mendorong ketercapaian tujuan pendidikan karakter.
2. Rohmat²⁸⁷ membuktikan bahwa integrasi kurikulum dengan pendidikan Islam berkontribusi pada pembentukan sikap religius siswa secara signifikan.
3. Ayuningtyas & Pramono²⁸⁸ menunjukkan bahwa internalisasi pendidikan karakter, termasuk nilai Islami, mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila.
4. Yanu dkk.²⁸⁹ menegaskan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai religius mampu memperkuat implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah.
5. Riami dkk.²⁹⁰ menguraikan bahwa konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawaih relevan untuk diterapkan dalam kurikulum modern.

²⁸⁴ Kemendikbudristek, *Program Sekolah Penggerak ...*, hlm. 45.

²⁸⁵ *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ...*, hlm. 20.

²⁸⁶ R. Hidayat, "Internalisasi Nilai-nilai Islami ...", hlm. 142.

²⁸⁷ Rohmat, "Integrasi Kurikulum dan Internalisasi ...", hlm. 52

²⁸⁸ Ika Lestari Ayuningtyas dan D. Pramono, "Internalisasi Pendidikan Karakter ...", hlm. 22

²⁸⁹ Y. Yanu dkk., "Penguatan Pendidikan Karakter ...", hlm. 212

²⁹⁰ R. Riami, D. H. Muhammad, dan A. Susandi, "Penanaman Pendidikan Akhlak ...", hlm. 200

Dari penelitian, penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa internalisasi nilai Islami bukan hanya memiliki relevansi teoretis, tetapi juga telah terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan kurikulum modern di Indonesia.

Rumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hipotesis Utama (H_1):
Internalisasi nilai Islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh.
2. Hipotesis Parsial:
 - 1) H_{1a} : Keteladanan guru berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
 - 2) H_{1b} : Pembiasaan religius berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
 - 3) H_{1c} : Integrasi nilai Islami dalam perencanaan dan pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
 - 4) H_{1d} : Evaluasi berbasis kompetensi Islami berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
3. Hipotesis Simultan (H_2):
Seluruh dimensi internalisasi nilai Islami secara bersama, sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Aceh.

2.9 Kajian Penelitian Terdahulu

Bagian Kajian Penelitian Terdahulu (2.6) berfungsi untuk meninjau berbagai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian. Tujuannya adalah melihat sejauh mana topik penelitian sudah dibahas, menemukan persamaan dan perbedaan, serta

mengidentifikasi gap (celah) penelitian yang belum banyak dikaji. Dengan begitu, penelitian baru memiliki dasar argumentasi akademik yang kuat dan jelas kontribusinya.

Sedangkan Penelitian tentang Kurikulum Merdeka (2.6.1) merupakan salah satu subbagian dari kajian penelitian terdahulu. Bagian ini lebih fokus meninjau karya-karya ilmiah yang secara khusus membahas Kurikulum Merdeka, baik dari segi filosofi, implementasi, strategi, kelebihan, kelemahan, maupun dampaknya terhadap pembelajaran. Analisis terhadap penelitian-penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana Kurikulum Merdeka telah dikaji dalam berbagai konteks, serta posisi penelitian sekarang dalam memperkaya literatur yang sudah ada.

2.9.1 Penelitian tentang Kurikulum Merdeka

1. Nama Penulis: Heryahya, A., Herawati, E. S. B., Susandi, A. D., & Zulaiha, F. Tahun: 2022. Judul Penelitian: Analisis kesiapan guru sekolah dasar dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Nama Jurnal: *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*²⁹¹

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan pemahaman guru SD di Kota Cirebon tentang kebijakan kurikulum merdeka, (2) mendeskripsikan kesiapan guru SD di Kota Cirebon dalam merumuskan tujuan pembelajaran profil Pancasila, (3) mendeskripsikan kesiapan guru SD di Kota Cirebon dalam implementasi pembelajaran abad 21, dan (4) mendeskripsikan kesiapan guru SD di Kota Cirebon dalam mengidentifikasi potensi diri peserta didik. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survey dan need assessment. Populasi penelitian ini adalah guru SD negeri di Kota Cirebon. Jumlah SD negeri di Kota Cirebon sebanyak 128 sekolah, sehingga populasi penelitian ini adalah 768 guru.

²⁹¹ A. Heryahya, E. S. B. Herawati, A. D. Susandi, dan F. Zulaiha, "Analisis Kesiapan Guru Sekolah Dasar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka," *Journal of Education and Instruction (JOEAI)* 5, No. 2 (2022): hlm. 548–562.

Sampel ditetapkan menggunakan teknik simple random sampling. Berdasarkan tabel Issac Michael dengan sampling error 5%, diperoleh jumlah sampel sebanyak 238 orang guru. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument angket yang diberikan kepada guru dan wawancara kepada beberapa key informan. Adapun key informan dalam penelitian ini adalah Kabid Dikdas Kota Cirebon dan beberapa Kepala sekolah. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) para guru SD Negeri di Kota Cirebon memahami esensi dari kebijakan Kurikulum Merdeka, (2) para guru SD Negeri di Kota Cirebon memahami alasan utama untuk mempelajari profil pelajar Pancasila, (3) para guru SD Negeri di Kota Cirebon memahami alasan utama untuk mempelajari profil profil pelajar Pancasila, (4) para guru SD Negeri di Kota Cirebon memahami alasan utama untuk mempelajari profil pelajar Pancasila.

2. Nama Penulis: Widiensyah, S., Hidayat, S. P., Kamil, S. I., Purba, I. D. L. B., Rahmawati, U., & Khairo, F. M. A. Tahun: 2025. Judul Penelitian: Kesiapan guru dalam menghadapi tantangan implementasi Kurikulum Merdeka (Studi kasus di Sekolah Menengah Atas). Nama Jurnal: Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan²⁹²

Abstrak : Kurikulum merupakan komponen fundamental dalam sistem pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai respons strategis terhadap tantangan global dan dampak pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini

²⁹² S. Widiensyah, S. P. Hidayat, S. I. Kamil, I. D. L. B. Purba, U. Rahmawati, dan F. M. A. Khairo, "Kesiapan Guru dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka (Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas)," *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, No. 1 (2025): hlm. 344–362.

menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh Teori Fungsional Struktural untuk menginterpretasi dinamika pelaksanaan kurikulum.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam kesiapan guru untuk memahami dan menerapkan kurikulum, yang dipengaruhi oleh faktor pelatihan, ketersediaan sumber daya, serta dukungan kelembagaan. Tantangan utama meliputi infrastruktur yang belum memadai, kesenjangan pemahaman, serta resistensi terhadap inovasi pedagogis. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kolaborasi antara guru, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, disertai pelatihan intensif dan pengembangan infrastruktur, dapat mengoptimalkan potensi kurikulum dalam mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing global. Disarankan agar seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif dalam kolaborasi lintas sektor guna memastikan keberlanjutan implementasi Kurikulum Merdeka.

3. Nama Penulis: Purnawanto, A. T. Tahun: 2023. Judul Penelitian: Pendidikan karakter melalui internalisasi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka. Nama Jurnal: Jurnal Pedagogi²⁹³

Abstrak: Abstract Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana internalisasi Profil Pelajar Pancasila dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pendidikan karakter Kurikulum Merdeka. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah proyek pengembangan karakter pelajar Indonesia agar para pelajar menjadi pelajar yang menghidupi nilai-nilai Pancasila. Program ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mempelajari isu-isu penting di sekitar. Permasalahan yang terjadi adalah ketika aktivitas proyek lebih mengedepankan hasil dibandingkan

²⁹³ A. T. Purnawanto, "Pendidikan Karakter melalui Internalisasi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka," *Jurnal Pedagogi* 16, No. 2 (2023): hlm. 103–115.

proses sehingga P5 lebih pada pameran hasil tanpa proses. Metode penelitian literature review dengan cara membaca dan mengkaji berbagai referensi, baik buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) harus dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. P5 diterapkan dalam kurikulum merdeka untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada pelajar Indonesia. Menjadi Pelajar Pancasila, itulah tujuan pelaksanaan P5 di dalam Kurikulum Merdeka. Implikasi dari penelitian ini yakni mengetahui bagaimana melaksanakan Pendidikan karakter dalam kurikulum Merdeka.

4. Nama Penulis: Habibullah, N. Tahun: 2023 Judul Penelitian: Manajemen Pendidikan Karakter pada Kurikulum Merdeka Belajar Nama Jurnal: *At-Ta'lim: Kajian Pendidikan Agama Islam*.²⁹⁴

Abstrak: Latar belakang: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pendidikan karakter dalam kurikulum merdeka belajar. Metode penelitian: Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian: Manajemen pendidikan karakter dilakukan dengan menggagas program sekolah penggerak dengan tujuan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yaitu pelajar yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebhinnekaan global. Pelaksanaan pembinaan karakter peserta didik di antaranya adalah dengan

²⁹⁴ N. Habibullah, "Manajemen Pendidikan Karakter pada Kurikulum Merdeka Belajar," *At-Ta'lim: Kajian Pendidikan Agama Islam* 5, No. 1 (2023): hlm. 67.

memaksimalkan fungsi mata pelajaran yang syarat dengan materi pendidikan karakter (akhlak atau nilai) seperti Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Di samping itu, pendidik mendesain setiap proses pembelajaran di kelas dengan mengintegrasikan pendidikan karakter di dalamnya. Evaluasi dilakukan dengan memperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan pendidikan karakter.

5. Nama Penulis: Putri, N. S. E., Setiani, F., & Al Fath, M. S. Tahun: 2023. Judul Penelitian: Membangun Pendidikan Karakter Berbasis Kurikulum Merdeka Menuju Era Society 5.0: Building Character Education Based On The Merdeka Curriculum Towards Society Era 5.0. Nama Jurnal: *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*.²⁹⁵

Abstrak: Penguatan karakter siswa merupakan hasil dari proses pendidikan yang dijalani dan berperan dalam majunya peradaban suatu negara. Era disrupsi mengubah berbagai sistem dan tatanan kurikulum yang merupakan fondasi Pendidikan. Kurikulum Merdeka mengharapkan siswa tidak hanya dibentuk menjadi cerdas, tetapi juga berkarakter sebagai wujud profil pelajar Pancasila yang mampu bersaing secara global, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta relevansi dalam penerapan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah menelaah implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum merdeka dalam rangka menghadapi era society 5.0. Metode penelitian ini adalah library research dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Data diperoleh dari berbagai artikel, buku dan hasil observasi terbaru sebagai rujukan peneliti. Hasil penelitian ini 1) Pendidikan karakter harus dibentuk dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan pendidikan dan

²⁹⁵ Putri, N. S. E., Setiani, F., & Al Fath, M. S. (2023). Membangun Pendidikan Karakter Berbasis Kurikulum Merdeka Menuju Era Society 5.0: Building Character Education Based On The Merdeka Curriculum Towards Society Era 5.0. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 18(2), 194-201.

menekankan pembelajaran yang berkualitas serta berkarakter profil siswa Pancasila. Kurikulum merdeka memfasilitasi pengembangan karakter berupa aktivitas intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler yang terintegrasi dalam pembelajaran sebagai Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). 2) Implementasi P5 ialah penguatan karakter dan softskill yang berfokus pada pembiasaan dan penanaman karakter dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar. Strategi penerapan enam dimensi profil pelajar Pancasila dapat dilakukan dengan pembelajaran dengan proyek, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembiasaan. 3) Kurikulum merdeka sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Era Society 5.0 dimana Pendidikan nilai dan karakter sangatlah penting di era kemajuan teknologi globalisasi. Kurikulum merdeka memberi ruang pada pemanfaatan teknologi salah satunya dengan platform merdeka mengajar yang memberikan berbagai fasilitas bagi guru seperti pelatihan, praktik, dan perangkat ajar yang tersedia.

2.9.2 Gap Analysis

Kajian terhadap kelima penelitian yang dilakukan oleh Heryahya dan rekan-rekan (2022), Widiensyah dan rekannya (2025), Purnawanto (2023), Habibullah (2023), serta Putri, Setiani, dan Al Fath (2023) menunjukkan adanya sejumlah persamaan mendasar yang mencerminkan arah dan kecenderungan umum dalam studi-studi tentang Kurikulum Merdeka dan pendidikan karakter di Indonesia. Persamaan-persamaan ini penting untuk dipahami karena memberikan gambaran tentang peta kajian yang telah ada sekaligus menjadi titik tolak untuk mengidentifikasi hal-hal yang belum terjangkau oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Persamaan pertama yang paling menonjol di antara kelima penelitian tersebut adalah kesamaan fokus pada isu implementasi Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan pendidikan nasional yang

relatif baru. Seluruh penelitian ini menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai objek kajian utama, baik dalam aspek kesiapan guru, tantangan implementasi, manajemen pendidikan karakter, maupun internalisasi nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memang menjadi perhatian serius para akademisi dan peneliti pendidikan di Indonesia, mengingat kebijakan ini membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem pendidikan nasional, terutama dengan penekanannya pada fleksibilitas pembelajaran, penguatan karakter, dan otonomi satuan pendidikan. Kelima penelitian ini secara kolektif mengakui bahwa Kurikulum Merdeka merupakan terobosan penting yang perlu dikaji dari berbagai sudut pandang untuk memastikan implementasinya dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Persamaan kedua terletak pada perhatian yang sama terhadap pendidikan karakter sebagai elemen fundamental dalam Kurikulum Merdeka. Seluruh penelitian ini menempatkan Profil Pelajar Pancasila sebagai kerangka acuan utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Heryahya dan rekan-rekan menyoroti pemahaman guru tentang profil pelajar Pancasila, Purnawanto secara khusus mengkaji internalisasi profil pelajar Pancasila melalui P5, Habibullah membahas manajemen pendidikan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, sementara Putri dan rekan-rekan mengaitkan profil pelajar Pancasila dengan tantangan era Society 5.0. Bahkan Widiansyah dan rekannya, meskipun lebih fokus pada aspek struktural, tetap mengakui bahwa tujuan akhir dari Kurikulum Merdeka adalah membentuk sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing global. Persamaan ini menunjukkan adanya konsensus di kalangan peneliti bahwa pendidikan karakter bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari transformasi pendidikan yang diusung oleh Kurikulum Merdeka.

Persamaan ketiga adalah pengakuan terhadap peran sentral guru dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dan pendidikan karakter. Heryahya dan rekan-rekan secara eksplisit menjadikan kesiapan guru sebagai fokus utama penelitiannya,

dengan mengukur pemahaman guru tentang kebijakan kurikulum, kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran, kesiapan mengimplementasikan pembelajaran abad 21, hingga kemampuan mengidentifikasi potensi peserta didik. Widiansyah dan rekannya juga menyoroti kesiapan guru sebagai faktor kunci, meskipun dalam kerangka yang lebih luas dengan mempertimbangkan faktor pelatihan, sumber daya, dan dukungan kelembagaan. Purnawanto dan Habibullah, dalam kajiannya tentang pendidikan karakter, sama-sama menekankan bahwa guru memiliki peran tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, teladan moral, dan agen utama dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Putri dan rekan-rekan juga mengakui bahwa guru memegang peranan penting dalam mendesain pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter, baik melalui pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi, maupun pembiasaan. Persamaan ini menegaskan bahwa dalam berbagai perspektif kajian, guru selalu ditempatkan sebagai aktor sentral yang menentukan berhasil tidaknya sebuah kebijakan kurikulum.

Persamaan keempat terletak pada metodologi yang digunakan, di mana sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur. Purnawanto, Habibullah, serta Putri, Setiani, dan Al Fath sama-sama menggunakan metode library research atau studi kepustakaan dalam penelitiannya. Widiansyah²⁹⁶ dan rekannya juga menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh Teori Fungsional Struktural. Bahkan Heryahya dan rekan-rekan, meskipun menggunakan pendekatan survei kuantitatif, tetap mengombinasikannya dengan wawancara kualitatif kepada informan kunci. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa kajian tentang Kurikulum Merdeka, terutama pada tahap awal implementasinya, masih banyak dilakukan pada tataran konseptual

²⁹⁶ S. Widiansyah, S. P. Hidayat, S. I. Kamil, I. D. L. B. Purba, U. Rahmawati, dan F. M. A. Khairo, "Kesiapan Guru dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka (Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas)," *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, No. 1 (2025): hlm. 344–362.

dan analisis kebijakan, untuk membangun pemahaman teoretis sebelum dilakukan pengujian empiris yang lebih luas. Hal ini juga mencerminkan bahwa Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan baru masih memerlukan eksplorasi konseptual yang mendalam sebelum dapat dikaji secara empiris dalam skala besar.

Persamaan kelima adalah kesamaan dalam mengidentifikasi tantangan implementasi Kurikulum Merdeka. Hampir seluruh penelitian ini, baik secara eksplisit maupun implisit, mengakui bahwa implementasi Kurikulum Merdeka menghadapi berbagai tantangan. Widiensyah dan rekannya secara khusus mengidentifikasi tantangan utama seperti infrastruktur yang belum memadai, kesenjangan pemahaman, serta resistensi terhadap inovasi pedagogis. Purnawanto menyoroti tantangan dalam implementasi P5, di mana aktivitas proyek sering kali lebih mengedepankan hasil dibandingkan proses. Habibullah²⁹⁷, meskipun lebih fokus pada manajemen, tetap mengakui perlunya evaluasi yang akurat untuk mengukur keberhasilan pendidikan karakter. Putri dan rekan-rekan menyadari bahwa era disrupsi dan Society 5.0 membawa tantangan tersendiri bagi pendidikan karakter. Bahkan Heryahya dan rekan-rekan, yang temuannya menunjukkan pemahaman guru yang baik, tetap mengindikasikan bahwa kesiapan guru tidak serta-merta menjamin implementasi yang mulus tanpa dukungan sistem yang memadai. Pengakuan terhadap adanya tantangan ini menunjukkan bahwa para peneliti memiliki kesadaran bahwa transformasi kurikulum bukanlah proses yang mudah dan membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak.

Persamaan keenam adalah fokus pada nilai-nilai universal kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, tanpa melakukan eksplorasi mendalam terhadap nilai-nilai keagamaan spesifik, terutama nilai-nilai Islami. Kelima penelitian ini sama-sama menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai utama dalam pendidikan

²⁹⁷ N. Habibullah, "Manajemen Pendidikan Karakter pada Kurikulum Merdeka Belajar," *At-Ta'lim: Kajian Pendidikan Agama Islam* 5, No. 1 (2023): hlm. 67.

karakter, sebagaimana tercermin dalam pembahasan tentang Profil Pelajar Pancasila dan P5. Nilai-nilai seperti gotong royong, kemandirian, bernalar kritis, kreativitas, kebinekaan global, serta keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semuanya dirumuskan dalam bingkai Pancasila sebagai ideologi nasional. Namun, tidak satu pun dari kelima penelitian ini yang secara spesifik mengkaji bagaimana nilai-nilai keagamaan, khususnya nilai-nilai Islami seperti keteladanan, pembiasaan religius, disiplin ibadah, akhlak mulia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dapat diintegrasikan dan diperkuat dalam kerangka Kurikulum Merdeka. Padahal, nilai-nilai keagamaan memiliki potensi besar untuk memperkaya dan memperkuat dimensi "beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia" yang menjadi fondasi utama Profil Pelajar Pancasila.

Persamaan-persamaan ini secara kolektif menunjukkan bahwa kajian tentang Kurikulum Merdeka dan pendidikan karakter di Indonesia, meskipun telah berkembang cukup pesat, masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat umum, konseptual, dan berfokus pada nilai-nilai kebangsaan universal. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji integrasi nilai-nilai keagamaan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, terutama di daerah-daerah dengan karakteristik religius yang kuat seperti Aceh. Di sinilah letak celah akademik yang signifikan, di mana penelitian tentang internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi juga akan memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan model pendidikan karakter yang harmonis antara nilai-nilai keislaman, kebijakan kurikulum nasional, dan kearifan lokal Aceh.

Di samping berbagai persamaan yang telah diuraikan, kelima penelitian tersebut juga menunjukkan sejumlah perbedaan signifikan yang mencerminkan keragaman sudut pandang, fokus kajian,

pendekatan metodologis, serta konteks penelitian yang digunakan. Perbedaan-perbedaan ini penting untuk dipahami karena menunjukkan bahwa kajian tentang Kurikulum Merdeka dan pendidikan karakter tidak bersifat monolitik, melainkan memiliki spektrum yang luas dan beragam, sehingga masing-masing penelitian memberikan kontribusi yang khas dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang ini.

Perbedaan pertama dan paling mendasar terletak pada fokus kajian utama dari masing-masing penelitian. Heryahya dan rekan-rekan pada tahun 2022 memfokuskan penelitiannya pada aspek kesiapan guru sekolah dasar di Kota Cirebon dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Fokus kajiannya sangat spesifik, yaitu mengukur pemahaman guru tentang kebijakan Kurikulum Merdeka, kesiapan dalam merumuskan tujuan pembelajaran profil Pancasila, kesiapan dalam implementasi pembelajaran abad 21, serta kesiapan dalam mengidentifikasi potensi diri peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada aspek kognitif dan kesiapan teknis guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum. Sementara itu, Widiensyah dan rekannya pada tahun 2025 memiliki fokus yang lebih luas, yaitu menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka secara umum dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dengan menggunakan Teori Fungsional Struktural untuk menginterpretasi dinamika pelaksanaan kurikulum. Fokus kajiannya tidak hanya pada guru, tetapi juga pada faktor-faktor struktural seperti pelatihan, ketersediaan sumber daya, dan dukungan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan implementasi.

Adapun Purnawanto pada tahun 2023 memiliki fokus yang berbeda lagi, yaitu menelaah pendidikan karakter melalui internalisasi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka, dengan perhatian khusus pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Penelitian ini lebih menekankan pada aspek bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan melalui pembelajaran berbasis proyek, serta menyoroti permasalahan bahwa

implementasi P5 sering kali lebih mengedepankan hasil dibandingkan proses. Habibullah pada tahun 2023 juga memiliki fokus pada pendidikan karakter, tetapi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu manajemen pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka Belajar. Penelitian ini menyoroti bagaimana pendidikan karakter dikelola di tingkat sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan menekankan pada optimalisasi fungsi mata pelajaran yang sarat nilai seperti Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sementara itu, Putri, Setiani, dan Al Fath pada tahun 2023 memiliki fokus yang paling berbeda, yaitu mengaitkan implementasi pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka dengan tantangan era Society 5.0. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana pendidikan karakter berbasis Kurikulum Merdeka dapat mempersiapkan peserta didik menghadapi era digital dan globalisasi, dengan memanfaatkan teknologi seperti Platform Merdeka Mengajar.

Perbedaan kedua terletak pada metodologi penelitian yang digunakan. Heryahya dan rekan-rekan menggunakan rancangan penelitian survei dan need assessment dengan pendekatan kuantitatif, melibatkan 238 guru sebagai sampel yang dipilih secara acak sederhana (simple random sampling), serta dilengkapi dengan wawancara kepada informan kunci seperti Kepala Bidang Dikdas dan beberapa kepala sekolah. Pendekatan ini memungkinkan generalisasi temuan ke populasi yang lebih luas, namun kurang mendalam dalam menggali makna dan pengalaman subjektif para guru. Widiensyah dan rekannya menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh Teori Fungsional Struktural sebagai kerangka analisis. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika implementasi kurikulum dari berbagai sumber pustaka, namun tidak melibatkan data empiris langsung dari lapangan. Purnawanto, Habibullah, serta Putri, Setiani, dan Al Fath sama-sama menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Ketiga

penelitian ini mengandalkan analisis terhadap berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga bersifat konseptual dan teoretis, tanpa melakukan pengujian empiris di lapangan. Perbedaan metodologis ini menunjukkan bahwa penelitian-penelitian tersebut berada pada spektrum yang berbeda, mulai dari penelitian empiris kuantitatif hingga kajian konseptual kualitatif.

Perbedaan ketiga terletak pada konteks wilayah dan jenjang pendidikan yang menjadi objek penelitian. Heryahya dan rekan-rekan melakukan penelitian di Kota Cirebon dengan fokus pada jenjang pendidikan dasar (sekolah dasar). Widiansyah dan rekannya melakukan studi kasus di Sekolah Menengah Atas, namun tidak menyebutkan lokasi spesifik karena penelitiannya bersifat tinjauan literatur. Purnawanto, Habibullah, serta Putri, Setiani, dan Al Fath tidak menyebutkan konteks wilayah tertentu karena penelitian mereka bersifat umum dan konseptual, tidak terikat pada lokasi geografis tertentu. Keragaman konteks ini menunjukkan bahwa kajian tentang Kurikulum Merdeka telah dilakukan di berbagai jenjang pendidikan dan wilayah, namun belum ada yang secara spesifik mengkaji implementasinya di Provinsi Aceh, apalagi dengan mempertimbangkan kekhasan pendidikan Islam di daerah tersebut.

Perbedaan keempat terletak pada aspek nilai yang dikaji. Heryahya dan rekan-rekan, meskipun menyinggung Profil Pelajar Pancasila, tidak secara spesifik mengkaji nilai-nilai apa saja yang diinternalisasikan, karena fokus utamanya adalah pada pemahaman dan kesiapan guru. Widiansyah dan rekannya juga tidak secara khusus mengkaji nilai-nilai, karena fokusnya pada tantangan struktural implementasi kurikulum. Purnawanto mengkaji internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui P5, namun nilai-nilai tersebut masih dalam kerangka umum kebangsaan, tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai keagamaan spesifik. Habibullah juga mengkaji nilai-nilai karakter seperti akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global,

yang semuanya bersumber dari Pancasila. Putri, Setiani, dan Al Fath juga mengkaji nilai-nilai yang sama dalam konteks era Society 5.0. Dengan demikian, kelima penelitian ini sama-sama belum menyentuh aspek nilai-nilai Islami yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti keteladanan guru (uswah hasanah), pembiasaan religius (ta'wid), disiplin ibadah, dan akhlak Islami yang lebih spesifik.

Perbedaan kelima terletak pada hasil atau temuan utama masing-masing penelitian. Heryahya dan rekan-rekan menemukan bahwa guru SD Negeri di Kota Cirebon memahami esensi kebijakan Kurikulum Merdeka dan memahami alasan mempelajari profil pelajar Pancasila. Temuan ini cenderung positif dan optimis tentang kesiapan guru. Widiensyah dan rekannya justru menemukan adanya kesenjangan signifikan dalam kesiapan guru, yang dipengaruhi oleh faktor pelatihan, ketersediaan sumber daya, dan dukungan kelembagaan. Temuan ini lebih kritis dan menyoroti tantangan struktural. Purnawanto menemukan bahwa implementasi P5 harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan, dan menyoroti masalah bahwa aktivitas proyek sering kali lebih mengedepankan hasil dibandingkan proses. Habibullah menemukan bahwa manajemen pendidikan karakter dilakukan dengan memaksimalkan fungsi mata pelajaran yang sarat nilai dan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran. Putri, Setiani, dan Al Fath²⁹⁸ menemukan bahwa pendidikan karakter harus dibentuk melalui kolaborasi keluarga, masyarakat, dan sekolah, serta Kurikulum Merdeka memfasilitasi pengembangan karakter melalui aktivitas intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler yang terintegrasi dalam P5. Keragaman temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka memiliki banyak dimensi dan aspek yang dapat dikaji dari berbagai sudut pandang.

²⁹⁸ Putri, N. S. E., Setiani, F., & Al Fath, M. S. (2023). Membangun Pendidikan Karakter Berbasis Kurikulum Merdeka Menuju Era Society 5.0: Building Character Education Based On The Merdeka Curriculum Towards Society Era 5.0. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 18(2), 194-201.

Perbedaan keenam terletak pada implikasi dan rekomendasi yang diajukan. Heryahya dan rekan-rekan merekomendasikan perlunya peningkatan pemahaman guru secara berkelanjutan. Widiensyah dan rekannya merekomendasikan penguatan kolaborasi antara guru, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, disertai pelatihan intensif dan pengembangan infrastruktur. Purnawanto memberikan implikasi tentang pentingnya memahami bagaimana melaksanakan pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka. Habibullah menekankan pentingnya evaluasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan pendidikan karakter. Putri, Setiani, dan Al Fath merekomendasikan strategi penerapan enam dimensi profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran dengan proyek, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembiasaan. Keragaman rekomendasi ini menunjukkan bahwa perbaikan implementasi Kurikulum Merdeka membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan berbagai aspek dan pemangku kepentingan.

Perbedaan-perbedaan ini secara kolektif menunjukkan bahwa kajian tentang Kurikulum Merdeka dan pendidikan karakter telah dilakukan dengan berbagai sudut pandang, fokus, metodologi, dan konteks yang beragam. Namun, dari semua perbedaan tersebut, tidak satu pun penelitian yang secara khusus mengkaji internalisasi nilai-nilai Islami dalam implementasi Kurikulum Merdeka, terutama di daerah dengan karakteristik keislaman yang kuat seperti Aceh. Hal ini menegaskan bahwa penelitian disertasi tentang "Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh" memiliki posisi yang unik dan signifikan, karena tidak hanya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kebijakan kurikulum nasional dalam konteks kearifan lokal Aceh.

Berdasarkan telaah mendalam terhadap kelima penelitian yang dilakukan oleh Heryahya dan rekan-rekan (2022), Widiensyah

dan rekannya (2025), Purnawanto (2023), Habibullah (2023), serta Putri, Setiani, dan Al Fath (2023), dapat diidentifikasi sejumlah celah penelitian (research gap) yang signifikan dan belum terjawab oleh studi-studi sebelumnya. Celah-celah ini menjadi landasan akademik yang kuat bagi penelitian disertasi ini untuk hadir dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia.

Celah penelitian pertama dan paling mendasar adalah masih sangat terbatasnya kajian yang secara spesifik mengkaji integrasi nilai-nilai Islami dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Kelima penelitian yang telah dikaji, meskipun komprehensif dalam membahas berbagai aspek Kurikulum Merdeka dan pendidikan karakter, sama sekali tidak menyentuh dimensi nilai-nilai keislaman secara mendalam. Heryahya dan rekan-rekan hanya berfokus pada kesiapan guru dan pemahaman tentang profil pelajar Pancasila tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai agama. Widiensyah dan rekannya lebih menyoroiti tantangan struktural implementasi kurikulum tanpa membahas aspek nilai keagamaan. Purnawanto mengkaji internalisasi profil pelajar Pancasila melalui P5, namun nilai-nilai yang dikaji masih dalam kerangka umum kebangsaan. Habibullah membahas manajemen pendidikan karakter dengan menekankan pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi tidak melakukan eksplorasi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islami diinternalisasikan dalam praktik pembelajaran. Putri, Setiani, dan Al Fath mengaitkan pendidikan karakter dengan era Society 5.0, namun tetap dalam bingkai nilai-nilai Pancasila tanpa menyentuh nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Padahal, nilai-nilai Islami seperti keteladanan guru (uswah hasanah), pembiasaan religius (ta'wid), disiplin ibadah, kejujuran, amanah, tanggung jawab, ukhuwah, dan akhlak mulia lainnya memiliki potensi besar untuk memperkuat dan memperkaya implementasi Profil Pelajar Pancasila, terutama pada dimensi "beriman, bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia". Ketiadaan kajian yang secara spesifik mengintegrasikan nilai-nilai Islami ini menjadi celah signifikan yang perlu diisi.

Celah penelitian kedua adalah belum adanya penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka di Provinsi Aceh, sebuah daerah dengan karakteristik unik yang menerapkan syariat Islam dan memiliki Qanun Pendidikan berbasis nilai-nilai Islami. Kelima penelitian yang telah dikaji dilakukan di berbagai konteks, seperti Kota Cirebon (Heryahya dan rekan-rekan), Sekolah Menengah Atas secara umum (Widiansyah dan rekannya), serta kajian konseptual tanpa konteks wilayah spesifik (Purnawanto, Habibullah, serta Putri, Setiani, dan Al Fath). Tidak satu pun dari penelitian tersebut yang menjadikan Aceh sebagai lokasi penelitian, padahal Aceh memiliki kekhasan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan secara tegas menegaskan bahwa sistem pendidikan di Aceh harus diselenggarakan secara Islami dan terpadu, serta memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kurikulum yang bernuansa Islami. Kekhasan regulasi dan sosial-budaya ini tentu membawa implikasi tersendiri bagi implementasi Kurikulum Merdeka di Aceh, yang belum terjangkau oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji secara spesifik implementasi Kurikulum Merdeka di Aceh, terutama dalam kaitannya dengan internalisasi nilai-nilai Islami, menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan.

Celah penelitian ketiga terletak pada aspek metodologi, di mana sebagian besar penelitian terdahulu masih didominasi oleh pendekatan konseptual dan studi literatur, serta belum banyak yang melakukan pengujian empiris dengan pendekatan mixed methods yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif secara berimbang. Purnawanto, Habibullah, serta Putri, Setiani, dan Al Fath menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang menghasilkan temuan-temuan bersifat konseptual dan teoretis. Widiansyah dan rekannya juga menggunakan metode tinjauan

literatur dengan pendekatan kualitatif. Hanya Heryahya dan rekan-rekan yang menggunakan pendekatan survei kuantitatif, namun tetap dilengkapi dengan wawancara kualitatif. Dari kelima penelitian tersebut, tidak ada satu pun yang menggunakan pendekatan mixed methods secara utuh, di mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan, dianalisis, dan diintegrasikan untuk saling memperkuat dan melengkapi. Padahal, pendekatan mixed methods sangat relevan untuk mengkaji fenomena kompleks seperti internalisasi nilai-nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka, karena di satu sisi diperlukan pengukuran kuantitatif untuk melihat sejauh mana pengaruh dan kontribusi internalisasi nilai terhadap pelaksanaan kurikulum, dan di sisi lain diperlukan pendalaman kualitatif untuk memahami proses, strategi, makna, dan pengalaman subjektif para pelaku pendidikan dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut. Ketiadaan penelitian dengan pendekatan mixed methods yang komprehensif menjadi celah metodologis yang signifikan.

Celah penelitian keempat adalah belum adanya penelitian yang secara sistematis mengkaji pengaruh internalisasi nilai-nilai Islami terhadap keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kelima penelitian terdahulu cenderung bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan kesiapan guru, mengidentifikasi tantangan, atau memaparkan manajemen pendidikan karakter, tanpa melakukan pengujian statistik untuk melihat sejauh mana suatu variabel memengaruhi variabel lainnya. Heryahya dan rekan-rekan mendeskripsikan pemahaman dan kesiapan guru, namun tidak menguji apakah pemahaman tersebut berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kurikulum. Widiensyah dan rekannya mengidentifikasi tantangan, namun tidak menguji secara statistik faktor-faktor apa yang paling dominan memengaruhi keberhasilan implementasi. Purnawanto, Habibullah, serta Putri, Setiani, dan Al Fath juga bersifat deskriptif-konseptual tanpa pengujian hipotesis. Padahal, untuk memahami secara komprehensif hubungan antara internalisasi nilai-nilai Islami dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka,

diperlukan analisis statistik inferensial seperti uji regresi untuk melihat seberapa besar pengaruh dan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian disertasi ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis regresi untuk menguji pengaruh internalisasi nilai-nilai Islami terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka, serta mengukur besaran kontribusinya melalui koefisien determinasi (R^2).

Celah penelitian kelima adalah belum adanya penelitian yang secara spesifik mengidentifikasi nilai-nilai Islami apa saja yang diinternalisasikan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, serta bagaimana proses internalisasi tersebut berlangsung. Kelima penelitian terdahulu cenderung membahas nilai-nilai dalam kerangka umum, seperti nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai karakter secara generik, tanpa melakukan identifikasi dan klasifikasi yang sistematis terhadap nilai-nilai Islami yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Padahal, nilai-nilai Islami memiliki kekhasan tersendiri, seperti nilai aqidah yang menanamkan keyakinan kepada Allah, nilai syariah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama, nilai ibadah yang mewujudkan pengabdian kepada Allah dalam bentuk ritual dan sosial, serta nilai akhlak yang membentuk perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian yang mampu mengidentifikasi secara sistematis nilai-nilai Islami apa saja yang diinternalisasikan, bagaimana proses internalisasinya, dan sejauh mana nilai-nilai tersebut terwujud dalam perilaku peserta didik, akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan teori dan praktik pendidikan Islam di Indonesia.

Celah penelitian keenam adalah belum adanya penelitian yang secara komprehensif memetakan tantangan dan hambatan dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islami ke dalam Kurikulum Merdeka. Widiansyah dan rekannya telah mengidentifikasi tantangan implementasi Kurikulum Merdeka secara umum, seperti infrastruktur yang belum memadai, kesenjangan pemahaman, dan resistensi terhadap inovasi pedagogis. Namun, tantangan-tantangan tersebut bersifat umum dan belum dikaitkan secara spesifik dengan

upaya internalisasi nilai-nilai Islami. Padahal, internalisasi nilai-nilai Islami dalam konteks Kurikulum Merdeka di Aceh tentu menghadapi tantangan yang khas, seperti bagaimana menyelaraskan tuntutan kurikulum nasional dengan ketentuan Qanun Pendidikan Aceh, bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam mata pelajaran umum, bagaimana melakukan asesmen yang mampu mengukur aspek afektif dan spiritual peserta didik secara valid dan reliabel, serta bagaimana membangun kolaborasi yang efektif antara sekolah, dayah, orang tua, dan masyarakat dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai Islami. Penelitian yang mampu memetakan tantangan-tantangan spesifik ini secara komprehensif akan memberikan kontribusi praktis yang sangat berharga bagi para pemangku kebijakan dalam merancang program intervensi yang tepat sasaran.

Celah penelitian ketujuh adalah belum adanya penelitian yang mengkaji peran Sekolah Penggerak sebagai model implementasi Kurikulum Merdeka dalam kaitannya dengan internalisasi nilai-nilai Islami. Kelima penelitian terdahulu memang ada yang menyinggung program sekolah penggerak, seperti penelitian Habibullah yang menyebutkan bahwa manajemen pendidikan karakter dilakukan dengan menggagas program sekolah penggerak. Namun, tidak ada penelitian yang secara khusus menjadikan Sekolah Penggerak sebagai objek kajian utama dalam konteks internalisasi nilai-nilai Islami. Padahal, Sekolah Penggerak memiliki posisi strategis sebagai pelopor dan model dalam implementasi Kurikulum Merdeka, sehingga kajian tentang bagaimana sekolah-sekolah ini menginternalisasikan nilai-nilai Islami akan memberikan gambaran tentang praktik terbaik (best practices) yang dapat direplikasi oleh sekolah-sekolah lain. Selain itu, Sekolah Penggerak juga mendapatkan pendampingan intensif dari pemerintah, sehingga memiliki potensi lebih besar untuk berhasil dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam kurikulum dan pembelajaran.

Celah penelitian kedelapan adalah belum adanya penelitian yang secara eksplisit mengaitkan internalisasi nilai-nilai Islami dengan upaya penguatan Profil Pelajar Pancasila, khususnya di daerah dengan karakteristik keislaman yang kuat. Kelima penelitian terdahulu membahas Profil Pelajar Pancasila sebagai kerangka acuan utama, namun tidak ada yang mengkaji bagaimana nilai-nilai Islami dapat bersinergi dan memperkuat pencapaian profil tersebut. Padahal, dimensi pertama Profil Pelajar Pancasila, yaitu "beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia", memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan nilai-nilai Islami. Penelitian yang mampu menunjukkan secara empiris bagaimana internalisasi nilai-nilai Islami berkontribusi terhadap penguatan dimensi ini, serta bagaimana sinergi antara nilai-nilai Islami dan nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam praktik pendidikan, akan memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan.

Dari keseluruhan celah penelitian yang telah diidentifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang "Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh" memiliki posisi yang sangat strategis dan urgen untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan mengisi kekosongan akademik yang ditinggalkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi juga akan memberikan kontribusi baru yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam dengan menunjukkan relevansi dan aktualisasi nilai-nilai Islam klasik dalam konteks kebijakan pendidikan modern. Secara praktis, penelitian ini akan menghasilkan model internalisasi nilai-nilai Islami yang aplikatif dan kontekstual, serta memberikan rekomendasi strategis bagi guru, kepala sekolah, Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi Kurikulum Merdeka berbasis nilai-nilai Islami di Aceh.

Berdasarkan telaah mendalam terhadap kelima penelitian terdahulu serta identifikasi celah penelitian (research gap) yang telah diuraikan, penelitian disertasi ini memiliki posisi yang jelas,

strategis, dan signifikan dalam peta keilmuan pendidikan Islam dan implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. Posisi penelitian ini tidak hanya sebagai pelengkap atau kelanjutan dari studi-studi sebelumnya, tetapi juga sebagai terobosan baru yang menawarkan perspektif, pendekatan, dan kontribusi yang belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Kebaruan atau novelty penelitian ini dapat dijelaskan secara komprehensif dari berbagai dimensi, meliputi aspek substansi kajian, konteks lokasi, pendekatan metodologis, kerangka teoretis yang digunakan, serta kontribusi yang dihasilkan.

Pertama, novelty dari segi substansi kajian. Penelitian ini secara spesifik mengkaji internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, sebuah tema yang sama sekali belum disentuh oleh kelima penelitian terdahulu. Heryahya dan rekan-rekan (2022) hanya berfokus pada kesiapan guru dan pemahaman tentang profil pelajar Pancasila tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai keislaman. Widiensyah dan rekannya (2025) lebih menyoroti tantangan struktural implementasi kurikulum tanpa membahas aspek nilai keagamaan. Purnawanto (2023) mengkaji internalisasi profil pelajar Pancasila melalui P5, namun nilai-nilai yang dikaji masih dalam kerangka umum kebangsaan. Habibullah (2023) membahas manajemen pendidikan karakter dengan menekankan pada mata pelajaran Pendidikan Agama, tetapi tidak melakukan eksplorasi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islami diinternalisasikan. Putri, Setiani, dan Al Fath (2023) mengaitkan pendidikan karakter dengan era Society 5.0, namun tetap dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini menjadi yang pertama dan terdepan dalam mengkaji secara sistematis dan komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Islami yang meliputi nilai aqidah, syariah, ibadah, dan akhlak diinternalisasikan dalam kerangka Kurikulum Merdeka. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi nilai-nilai apa saja yang diinternalisasikan, tetapi juga menganalisis proses internalisasinya, mengukur pengaruhnya terhadap pelaksanaan kurikulum, serta

memetakan tantangan dan hambatan yang dihadapi. Kebaruan substansial ini menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi yang unik dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Kedua, novelty dari segi konteks lokasi penelitian. Penelitian ini secara khusus mengambil lokasi di Provinsi Aceh, sebuah daerah dengan karakteristik unik yang menerapkan syariat Islam dan memiliki Qanun Pendidikan berbasis nilai-nilai Islami. Kelima penelitian terdahulu dilakukan di berbagai konteks yang berbeda, seperti Kota Cirebon (Heryahya dan rekan-rekan), Sekolah Menengah Atas secara umum (Widiansyah dan rekannya), serta kajian konseptual tanpa konteks wilayah spesifik (Purnawanto, Habibullah, serta Putri, Setiani, dan Al Fath). Tidak satu pun dari penelitian tersebut yang menjadikan Aceh sebagai lokasi penelitian, padahal Aceh memiliki kekhasan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan secara tegas menegaskan bahwa sistem pendidikan di Aceh harus diselenggarakan secara Islami dan terpadu, serta memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kurikulum yang bernuansa Islami. Kekhasan regulasi dan sosial-budaya ini tentu membawa implikasi tersendiri bagi implementasi Kurikulum Merdeka di Aceh. Penelitian ini menjadi yang pertama kali mengkaji secara empiris bagaimana Kurikulum Merdeka diimplementasikan di Aceh dengan mempertimbangkan kekhasan nilai-nilai Islami dan kearifan lokal Aceh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan temuan yang relevan untuk pengembangan pendidikan di Aceh, tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik keagamaan yang kuat.

Ketiga, novelty dari segi pendekatan metodologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods (metode campuran) yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif secara berurutan dan terintegrasi. Pendekatan ini berbeda dengan kelima penelitian terdahulu yang mayoritas menggunakan studi literatur atau pendekatan kualitatif deskriptif. Purnawanto, Habibullah, serta

Putri, Setiani, dan Al Fath menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang menghasilkan temuan-temuan bersifat konseptual dan teoretis. Widiansyah dan rekannya juga menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan kualitatif. Hanya Heryahya dan rekan-rekan yang menggunakan pendekatan survei kuantitatif. Dari kelima penelitian tersebut, tidak ada satu pun yang menggunakan pendekatan mixed methods secara utuh, di mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan, dianalisis, dan diintegrasikan untuk saling memperkuat dan melengkapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan explanatory sequential design, di mana tahap pertama dilakukan pengumpulan dan analisis data kuantitatif melalui kuesioner kepada 48 responden, dilanjutkan dengan uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Tahap kedua dilakukan pengumpulan dan analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen untuk memperkuat dan memperdalam temuan kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mengukur seberapa besar pengaruh internalisasi nilai Islami terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka, tetapi juga memahami secara mendalam bagaimana proses internalisasi tersebut berlangsung, apa maknanya bagi para pelaku pendidikan, serta tantangan apa yang mereka hadapi. Kebaruan metodologis ini menjadikan temuan penelitian lebih komprehensif, valid, dan reliabel.

Keempat, novelty dari segi kerangka teoretis yang digunakan. Penelitian ini mengintegrasikan tiga kerangka teoretis utama secara harmonis, yaitu teori pendidikan Islam klasik (khususnya pemikiran Ibnu Miskawaih, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun), teori kurikulum modern (Tyler, Taba, Stenhouse), serta teori pendidikan karakter dan Taksonomi Bloom. Integrasi ketiga kerangka teoretis ini belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Heryahya dan rekan-rekan tidak menggunakan kerangka teoretis yang eksplisit. Widiansyah dan rekannya menggunakan Teori Fungsional Struktural, namun tidak

mengaitkannya dengan nilai-nilai Islami. Purnawanto, Habibullah, serta Putri, Setiani, dan Al Fath menggunakan kerangka pendidikan karakter dan Profil Pelajar Pancasila, tetapi tidak mengintegrasikannya dengan teori pendidikan Islam klasik. Penelitian ini secara sadar dan sistematis memadukan pemikiran Ibnu Miskawaih tentang pembentukan akhlak melalui pembiasaan dan keseimbangan (*the golden mean*), pemikiran Al-Ghazali tentang penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*), pemikiran Ibn Khaldun tentang pembelajaran bertahap (*tadarruj*) dan peran guru sebagai teladan, dengan teori kurikulum modern dan Taksonomi Bloom. Integrasi ini menghasilkan kerangka analisis yang kaya dan mendalam untuk memahami fenomena internalisasi nilai-nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka. Kebaruan teoretis ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga menunjukkan relevansi dan aktualisasi pemikiran Islam klasik dalam menjawab tantangan pendidikan kontemporer.

Kelima, novelty dari segi konsep yang dihasilkan. Penelitian ini menghasilkan konsep baru yang orisinal, yaitu "Integrasi Nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka Berbasis Sekolah Penggerak". Konsep ini menegaskan bahwa nilai-nilai Islami tidak boleh diposisikan sekadar sebagai muatan lokal atau tambahan dalam Kurikulum Merdeka, melainkan dapat menjadi kerangka utama dan fondasi filosofis dalam menguatkan Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi "beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia". Konsep ini dibangun berdasarkan temuan empiris bahwa internalisasi nilai-nilai Islami melalui keteladanan guru, pembiasaan religius, integrasi dalam pembelajaran, dan penciptaan budaya sekolah Islami, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Lebih jauh, konsep ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Islami dan nilai-nilai Pancasila dapat berjalan secara sinergis dan saling menguatkan, bukan dalam posisi dikotomis apalagi konfliktual. Sinergi ini diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti pengintegrasian ayat-ayat Al-Qur'an dan

hadis dalam pembelajaran, pembiasaan ibadah dan akhlak mulia dalam keseharian sekolah, serta penanaman nilai-nilai keislaman yang selaras dengan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila. Konsep ini merupakan sumbangan orisinal penelitian bagi pengembangan teori dan praktik pendidikan Islam di Indonesia, sekaligus menjadi model implementasi Kurikulum Merdeka yang kontekstual dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal Aceh.

Keenam, novelty dari segi pengujian empiris. Penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga melakukan pengujian empiris yang ketat melalui analisis statistik inferensial. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas bersifat deskriptif atau konseptual, penelitian ini melakukan uji regresi linier berganda untuk menguji pengaruh internalisasi nilai-nilai Islami terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Hasil pengujian menunjukkan bahwa internalisasi nilai Islami berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,62. Artinya, 62% variasi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat dijelaskan oleh internalisasi nilai-nilai Islami. Temuan empiris ini memberikan bukti kuat dan terukur tentang pentingnya internalisasi nilai-nilai Islami dalam mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya di Sekolah Penggerak Aceh. Kebaruan empiris ini sekaligus menjawab kritik bahwa penelitian-penelitian sebelumnya masih banyak yang bersifat spekulatif atau normatif tanpa dukungan data empiris yang memadai.

Ketujuh, novelty dari segi identifikasi nilai dan tantangan secara komprehensif. Penelitian ini secara sistematis mengidentifikasi nilai-nilai Islami apa saja yang diinternalisasikan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, serta memetakan secara komprehensif tantangan dan hambatan yang dihadapi. Nilai-nilai Islami yang teridentifikasi meliputi nilai keteladanan guru (uswah hasanah) yang memperoleh skor tertinggi, nilai pembiasaan religius (ta'wid), nilai disiplin Islami, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai kepedulian sosial, dan nilai-nilai akhlak mulia lainnya.

Sementara itu, tantangan yang teridentifikasi meliputi aspek kompetensi guru dalam asesmen berbasis kompetensi, keterbatasan fasilitas pendukung, kurangnya pelatihan spesifik tentang integrasi nilai Islami, serta tantangan dalam membangun konsistensi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Identifikasi yang komprehensif ini belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, dan menjadi landasan penting bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Kedelapan, novelty dari segi kontribusi bagi pengembangan kebijakan. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan temuan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Aceh dan Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan bersifat aplikatif dan kontekstual, ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari guru, kepala sekolah, Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, hingga peneliti selanjutnya. Bagi guru, penelitian ini memberikan gambaran strategi efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam pembelajaran. Bagi kepala sekolah, penelitian ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan sekolah dan menciptakan budaya sekolah Islami. Bagi Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah, penelitian ini menyediakan data dan informasi penting untuk merancang program pelatihan, penyediaan fasilitas, dan harmonisasi kebijakan nasional dengan Qanun Aceh. Kontribusi praktis ini menjadikan penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga bermanfaat secara nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Aceh.

Dengan demikian, penelitian disertasi tentang "Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh" memiliki kebaruan (novelty) yang jelas, kuat, dan terukur dari berbagai dimensi. Penelitian ini tidak hanya mengisi celah akademik yang ditinggalkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi juga menawarkan perspektif, pendekatan, dan kontribusi baru yang orisinal dan signifikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research (penelitian penjelasan). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran data yang berbentuk angka serta analisis statistik untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antarvariabel. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh dapat diolah secara objektif, sistematis, dan dapat digeneralisasikan pada konteks yang lebih luas ²⁹⁹.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research (penelitian penjelasan). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran data yang berbentuk angka serta analisis statistik untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antarvariabel. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh dapat diolah secara objektif, sistematis, dan dapat digeneralisasikan pada konteks yang lebih luas.

Metode explanatory research atau penelitian penjelasan merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis yang dirumuskan berdasarkan landasan teori yang kuat. Metode ini memiliki karakteristik utama yang membedakannya dari jenis penelitian lainnya, yaitu fokusnya pada upaya menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi dan bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, bukan sekadar mendeskripsikan fenomena sebagaimana adanya. Menurut Singarimbun dan Effendi, explanatory research adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, di mana peneliti tidak hanya terbatas pada

²⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ...*, hlm. 165.

deskripsi fenomena, tetapi juga berupaya menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi dan apa pengaruhnya terhadap fenomena lain³⁰⁰. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melampaui pertanyaan "apa" yang menjadi ciri penelitian deskriptif, menuju pertanyaan "mengapa" dan "seberapa besar" yang menjadi inti dari penelitian penjelasan. Sementara itu, Sugiyono menegaskan bahwa explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya³⁰¹. Dengan demikian, explanatory research tidak hanya memberikan gambaran tentang suatu fenomena, tetapi juga menjelaskan hubungan dan pengaruh antar fenomena tersebut secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Kumar menjelaskan bahwa explanatory research memiliki karakteristik utama yaitu berfokus pada penyebab dan alasan di balik terjadinya suatu fenomena, menggunakan pendekatan yang terstruktur dan ketat dalam pengumpulan dan analisis data, serta membutuhkan hipotesis yang dirumuskan secara jelas sebelum pengumpulan data dilakukan³⁰². Karakteristik ini menjadikan explanatory research sangat cocok digunakan dalam penelitian-penelitian yang bertujuan untuk menguji teori, membuktikan hubungan kausal, dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Creswell menambahkan bahwa dalam explanatory research, peneliti menggunakan teori sebagai landasan untuk merumuskan hipotesis, kemudian menguji hipotesis tersebut melalui pengumpulan dan analisis data kuantitatif, dan pada akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengujian statistik

³⁰⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 45.

³⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 55.

³⁰² Ranjit Kumar, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*, Edisi ke-3 (London: Sage Publications, 2011), hlm. 78.

yang dilakukan³⁰³. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak didasarkan pada spekulasi atau asumsi semata, tetapi pada bukti empiris yang valid dan reliabel.

Dalam konteks penelitian ini, explanatory research digunakan untuk menjelaskan pengaruh internalisasi nilai-nilai Islami sebagai variabel independen terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka sebagai variabel dependen pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan yang matang bahwa penelitian ini tidak hanya ingin mendeskripsikan bagaimana proses internalisasi nilai Islami dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka berlangsung di lapangan, tetapi juga ingin membuktikan secara empiris sejauh mana pengaruh internalisasi nilai Islami terhadap keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan apakah sekolah-sekolah yang berhasil menginternalisasikan nilai-nilai Islami dengan baik juga menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka, serta seberapa besar kontribusi internalisasi nilai Islami tersebut terhadap variasi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini hanya dapat dijawab secara memadai melalui explanatory research dengan analisis statistik inferensial, bukan melalui penelitian deskriptif semata.

Melalui explanatory research, peneliti dapat menguji hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan landasan teori yang kuat, serta menjelaskan hubungan kausalitas antara kedua variabel tersebut dengan menggunakan analisis statistik inferensial. Dalam penelitian ini, hipotesis utama yang diajukan adalah bahwa internalisasi nilai-nilai Islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan kajian teoretis

³⁰³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Edisi ke-4 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), hlm. 112.

yang mendalam, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Islami seperti keteladanan guru, pembiasaan religius, integrasi nilai dalam pembelajaran, dan penciptaan budaya sekolah Islami memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier berganda, yang memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara variabel independen dan dependen, tetapi juga seberapa besar pengaruh tersebut serta arah hubungannya. Hasil pengujian ini kemudian diinterpretasikan dan dibahas secara mendalam dengan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan dan temuan-temuan penelitian sebelumnya, sehingga menghasilkan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia³⁰⁴.

Lebih lanjut, menurut Kumar, explanatory research memiliki karakteristik utama yaitu berfokus pada penyebab dan alasan di balik terjadinya suatu fenomena, menggunakan pendekatan yang terstruktur dan ketat dalam seluruh tahapan penelitian, serta membutuhkan hipotesis yang dirumuskan secara jelas dan spesifik sebelum pengumpulan data dilakukan³⁰⁵. Karakteristik ini menjadikan explanatory research sebagai metode yang sangat tepat digunakan ketika peneliti telah memiliki landasan teori yang kuat dan ingin menguji kebenaran teori tersebut dalam konteks empiris tertentu. Penelitian explanatory tidak hanya berhenti pada permukaan fenomena, tetapi berusaha menggali lebih dalam untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu fenomena serta menjelaskan mekanisme hubungan antar berbagai faktor tersebut. Creswell menambahkan bahwa dalam explanatory

³⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hlm. 58.

³⁰⁵ Ranjit Kumar, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*, Edisi ke-3 (London: Sage Publications, 2011), hlm. 78.

research, peneliti menggunakan teori sebagai landasan utama untuk merumuskan hipotesis, kemudian menguji hipotesis tersebut secara empiris melalui pengumpulan dan analisis data kuantitatif yang sistematis, dan pada akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan³⁰⁶. Proses ini memastikan bahwa setiap langkah penelitian didasarkan pada penalaran logis dan bukti empiris, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan demikian, explanatory research memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen dan dependen, tetapi juga seberapa besar pengaruh tersebut serta arah hubungannya, apakah positif atau negatif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang dinamika hubungan antar variabel yang diteliti.

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode utama yang menjadi fondasi dalam pengujian hipotesis dan pengukuran pengaruh antar variabel, namun untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, mendalam, dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan kualitatif dalam kerangka metode campuran atau mixed methods. Pendekatan mixed methods dipilih karena kesadaran bahwa fenomena internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka merupakan realitas yang kompleks dan multidimensional, yang tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui angka-angka statistik semata. Diperlukan pemahaman kontekstual tentang bagaimana proses internalisasi itu berlangsung, apa maknanya bagi para pelaku pendidikan, serta tantangan apa yang mereka hadapi dalam implementasinya. Menurut Creswell dan Plano Clark, mixed methods merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kuantitatif dan kualitatif, baik dalam

³⁰⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Edisi ke-4 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), hlm. 112.

paradigma, metode, maupun teknik analisis data, dalam satu penelitian atau serangkaian penelitian yang saling terkait³⁰⁷. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi fundamental bahwa penggabungan kedua metode tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih lengkap, kaya, dan bermakna tentang masalah penelitian dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu metode saja, karena masing-masing metode memiliki kekuatan dan kelemahan yang saling melengkapi.

Sementara itu, Johnson dan Onwuegbuzie mendefinisikan mixed methods sebagai kelas desain penelitian di mana peneliti mencampur atau mengombinasikan teknik penelitian kuantitatif dan kualitatif ke dalam satu studi tunggal yang terintegrasi³⁰⁸. Definisi ini menekankan bahwa penggabungan kedua metode tidak dilakukan secara terpisah atau parsial, tetapi benar-benar diintegrasikan dalam satu kesatuan desain penelitian yang utuh, sehingga data kuantitatif dan kualitatif saling berdialog dan memperkuat. Tujuan utama dari pendekatan mixed methods adalah untuk memanfaatkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dari masing-masing pendekatan, sehingga menghasilkan temuan yang lebih valid, reliabel, dan komprehensif. Pendekatan kuantitatif unggul dalam hal generalisasi, pengukuran yang presisi, dan pengujian hipotesis, namun lemah dalam hal kedalaman pemahaman dan konteks. Sebaliknya, pendekatan kualitatif unggul dalam hal kedalaman, kekayaan data, dan pemahaman kontekstual, namun lemah dalam hal generalisasi. Dengan menggabungkan keduanya, peneliti dapat memperoleh manfaat dari kedua pendekatan sekaligus, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang fenomena yang diteliti³⁰⁹. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan mixed methods

³⁰⁷ John W. Creswell dan Vicki L. Plano Clark, *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, Edisi ke-2 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2011), hlm. 45.

³⁰⁸ R. Burke Johnson dan Anthony J. Onwuegbuzie, "Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come," *Educational Researcher* 33, No. 7 (2004): hlm. 17.

³⁰⁹ Johnson dan Onwuegbuzie, "Mixed Methods Research ...", hlm. 20

memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menguji secara statistik seberapa besar pengaruh internalisasi nilai Islami terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka, tetapi juga memahami secara mendalam bagaimana proses internalisasi itu berlangsung, strategi apa yang digunakan guru, tantangan apa yang dihadapi, serta bagaimana para pelaku pendidikan memaknai pengalaman mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam Kurikulum Merdeka. Hal ini sejalan dengan pandangan Tashakkori dan Teddlie yang menegaskan bahwa integrasi data kuantitatif dan kualitatif dalam mixed methods dapat menghasilkan temuan yang lebih kaya, lebih mendalam, dan lebih bermakna dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu pendekatan saja³¹⁰.

Terdapat beberapa teori dan model desain mixed methods yang dikemukakan oleh para ahli di bidang metodologi penelitian, masing-masing dengan karakteristik, keunggulan, dan tantangan tersendiri dalam implementasinya. Creswell mengidentifikasi enam desain utama mixed methods yang paling sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian, terutama dalam penelitian pendidikan dan sosial. Keenam desain tersebut meliputi pertama, desain sequential explanatory, di mana pengumpulan dan analisis data kuantitatif dilakukan pada tahap pertama, kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua yang bertujuan untuk memperkuat, memperdalam, dan menjelaskan temuan-temuan kuantitatif yang telah diperoleh. Kedua, desain sequential exploratory, di mana tahap pertama dilakukan pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk mengeksplorasi suatu fenomena, diikuti oleh tahap kedua pengumpulan dan analisis data kuantitatif untuk menggeneralisasi temuan kualitatif ke populasi yang lebih luas. Ketiga, desain sequential transformative, yang menggunakan perspektif teoretis tertentu, seperti teori feminis, teori kritis, atau teori emansipatoris, untuk memandu keseluruhan

³¹⁰ Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, *Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1998), hlm. 43.

penelitian dengan dua fase berurutan, baik kuantitatif diikuti kualitatif maupun sebaliknya. Keempat, desain concurrent triangulation, di mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan dalam satu waktu, kemudian hasil analisis dari kedua data tersebut dibandingkan untuk menemukan konvergensi, perbedaan, atau kombinasi temuan. Kelima, desain concurrent nested, di mana satu metode utama digunakan sebagai kerangka penelitian, sementara metode lainnya dinesting atau ditempatkan di dalam metode utama tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berbeda atau pada level analisis yang berbeda. Keenam, desain concurrent transformative, yang menggunakan perspektif teoretis tertentu untuk memandu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, dengan tujuan untuk memahami fenomena dari berbagai sudut pandang³¹¹. Keenam desain ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk memilih desain yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, karakteristik masalah yang diteliti, serta sumber daya dan waktu yang tersedia.

Penelitian ini menggunakan desain sequential explanatory, yang merupakan salah satu desain mixed methods yang paling populer dan sering digunakan dalam penelitian pendidikan dan sosial karena kesederhanaan dan kejelasan langkah-langkahnya. Desain ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh internalisasi nilai-nilai Islami terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka, sehingga data kuantitatif menjadi fondasi utama untuk menguji hipotesis dan mengukur besarnya pengaruh antar variabel. Namun demikian, peneliti juga menyadari bahwa data kuantitatif saja tidak cukup untuk memahami secara mendalam bagaimana proses internalisasi itu berlangsung, apa maknanya bagi para pelaku pendidikan, serta tantangan apa yang mereka hadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu, data kualitatif diperlukan untuk memberikan konteks, makna, dan

³¹¹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Edisi ke-4 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), hlm. 220–225.

pemahaman yang lebih mendalam tentang temuan-temuan statistik yang diperoleh. Menurut Creswell dan Plano Clark, desain sequential explanatory dicirikan oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada fase pertama, kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif pada fase kedua yang bertujuan untuk menjelaskan atau memperdalam temuan-temuan kuantitatif yang telah diperoleh³¹². Fase kualitatif dalam desain ini biasanya diberi bobot yang lebih kecil atau bersifat sekunder dibandingkan fase kuantitatif yang menjadi prioritas utama, namun memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan konteks, makna, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hasil statistik yang diperoleh. Dengan kata lain, data kualitatif berfungsi untuk "menghidupkan" angka-angka statistik, menjelaskan mengapa suatu pola muncul, dan memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana fenomena yang diukur secara kuantitatif itu berlangsung dalam realitas sehari-hari.

Dalam implementasinya di penelitian ini, fase kuantitatif dilakukan terlebih dahulu dengan menyebarkan kuesioner kepada 48 responden yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh. Kuesioner yang digunakan dirancang untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai Islami sebagai variabel independen dan tingkat pelaksanaan Kurikulum Merdeka sebagai variabel dependen. Data kuantitatif yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan serangkaian teknik statistik, dimulai dari statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi data, dilanjutkan dengan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan memiliki konsistensi internal yang memadai. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa data memenuhi

³¹² John W. Creswell dan Vicki L. Plano Clark, *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, Edisi ke-2 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2011), hlm. 71.

syarat untuk dilakukan analisis regresi. Tahap akhir dari analisis kuantitatif adalah uji regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh internalisasi nilai-nilai Islami terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka, baik secara parsial maupun simultan³¹³. Hasil dari analisis kuantitatif ini kemudian menjadi dasar dan panduan untuk pelaksanaan fase kualitatif selanjutnya.

Selanjutnya, pada fase kualitatif, peneliti melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data untuk memperkuat, memperdalam, dan memberikan penjelasan kontekstual terhadap temuan-temuan kuantitatif yang telah diperoleh. Kegiatan tersebut meliputi wawancara semi-terstruktur yang dilakukan secara mendalam dengan para guru dan kepala sekolah untuk menggali informasi tentang strategi yang mereka gunakan dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islami, tantangan yang mereka hadapi, serta persepsi mereka tentang efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah untuk melihat secara langsung bagaimana nilai-nilai Islami diinternalisasikan dalam praktik sehari-hari. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap kegiatan pembiasaan religius seperti doa bersama, tadarus Al-Qur'an, shalat berjamaah, serta interaksi sosial antara guru, siswa, dan seluruh warga sekolah. Peneliti juga melakukan telaah mendalam terhadap berbagai dokumen kurikulum dan pembelajaran, seperti Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), modul ajar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta catatan kegiatan religius dan akademik sekolah. Telaah dokumen ini bertujuan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Islami terintegrasi dalam perencanaan dan dokumentasi pembelajaran, serta untuk memvalidasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Data kualitatif dari berbagai sumber ini kemudian dianalisis secara sistematis untuk

³¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 58.

menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang praktik internalisasi nilai-nilai Islami di Sekolah Penggerak Aceh³¹⁴.

Miles, Huberman, dan Saldana menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dalam mixed methods melibatkan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara interaktif dan berkelanjutan sepanjang proses penelitian, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi³¹⁵. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema-tema dan pola-pola yang muncul dari data. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara mentranskrip hasil wawancara, memilih pernyataan-pernyataan penting yang relevan dengan fokus penelitian, mengelompokkan data berdasarkan kategori-kategori tertentu, dan membuang data yang tidak relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, matriks, hubungan antar kategori, atau teks naratif yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan mengorganisir temuan-temuan ke dalam tema-tema utama seperti strategi internalisasi nilai, nilai-nilai yang diinternalisasikan, tantangan yang dihadapi, dan efektivitas implementasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan sejak awal pengumpulan data dengan mencari makna, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab-akibat, kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk memastikan keabsahan temuan. Dalam penelitian ini, ketiga alur analisis tersebut diterapkan secara konsisten untuk mengolah data wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam, kaya, dan komprehensif tentang praktik internalisasi nilai-nilai Islami di Sekolah Penggerak Aceh. Data kualitatif yang telah dianalisis ini kemudian digunakan untuk

³¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6

³¹⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), hlm. 82.

memperkuat, memperdalam, dan memberikan penjelasan kontekstual terhadap temuan-temuan kuantitatif, terutama terkait dengan proses internalisasi nilai, nilai-nilai apa saja yang diinternalisasikan, serta berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya

Penggunaan *mixed methods* dengan desain *sequential explanatory* dalam penelitian ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran umum yang luas tentang fenomena yang diteliti melalui data kuantitatif, sekaligus memahami secara mendalam makna dan konteks di balik fenomena tersebut melalui data kualitatif. Kedua, data kualitatif dapat digunakan untuk memverifikasi, memperkuat, dan memberikan ilustrasi terhadap temuan kuantitatif, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Ketiga, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat "apa" dan "seberapa besar" melalui data kuantitatif, sekaligus menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" melalui data kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mampu membuktikan secara statistik bahwa internalisasi nilai-nilai Islami berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka, tetapi juga mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana proses internalisasi tersebut berlangsung, nilai-nilai apa saja yang diinternalisasikan, serta tantangan apa yang dihadapi dalam proses tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan utama *explanatory research* yang tidak hanya menjelaskan hubungan antar variabel, tetapi juga memberikan pemahaman kontekstual tentang dinamika hubungan tersebut dalam setting alami.

Metode *explanatory research* memiliki tujuan utama untuk menjelaskan hubungan kausal (sebab-akibat) antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena sebagaimana adanya, tetapi juga menguji sejauh mana variabel

independen memengaruhi variabel dependen ³¹⁶. Dalam konteks penelitian ini:

1. Variabel independen (X) adalah internalisasi nilai-nilai Islami, yang meliputi keteladanan guru, integrasi nilai Islami dalam pembelajaran, disiplin Islami, serta pembiasaan religius.
2. Variabel dependen (Y) adalah pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh, yang diukur melalui kesiapan guru, kreativitas guru, partisipasi siswa, serta evaluasi berbasis kompetensi.

Pendekatan explanatory research dipandang tepat karena alasan berikut:

1. Menghasilkan pemahaman empiris tentang bagaimana nilai-nilai Islami diinternalisasikan ke dalam praktik pendidikan, khususnya di Sekolah Penggerak.
2. Menguji pengaruh variabel secara statistik, sehingga dapat diketahui kontribusi internalisasi nilai Islami terhadap efektivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
3. Memberikan rekomendasi praktis kepada sekolah dan pemangku kebijakan pendidikan berdasarkan bukti empiris, bukan sekadar asumsi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitik, karena menekankan pada hubungan sebab-akibat. Explanatory research juga relevan dengan tujuan penelitian yang ingin menjelaskan bagaimana integrasi nilai Islami berperan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan nasional, khususnya Kurikulum Merdeka di Aceh.

3.1.1 Variabel Penelitian dan Indikator Penelitian

1. Variabel Independen (X): Internalisasi Nilai-Nilai Islami
Variabel ini menggambarkan sejauh mana nilai-nilai Islami diimplementasikan dalam aktivitas pendidikan, baik melalui

³¹⁶ William L. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Edisi ke-7 (London: Pearson, 2014), hlm. 95.

keteladanan guru maupun integrasi dalam proses pembelajaran. Internalisasi nilai Islami penting untuk membentuk karakter siswa yang sejalan dengan ajaran Islam, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional yang berlandaskan nilai moral dan spiritual.

Indikator dan sub-indikator:

a. Keteladanan guru dalam mengamalkan nilai Islami

- 1) Guru menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan rendah hati.
- 2) Guru melaksanakan ibadah dengan baik dan menjadi teladan bagi siswa.
- 3) Perilaku guru sehari-hari mencerminkan akhlak mulia, baik di dalam maupun di luar kelas.

b. Integrasi nilai Islami dalam pembelajaran

- 1) Guru mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai Islami.
- 2) Guru menyisipkan ayat Al-Qur'an, hadis, atau kisah Islami relevan dalam pembelajaran.
- 3) Nilai Islami digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual di kelas.

c. Penerapan disiplin Islami di sekolah

- 1) Penegakan aturan sekolah berlandaskan prinsip Islami (misalnya kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan waktu).
- 2) Tata tertib sekolah mendukung perilaku religius siswa.
- 3) Guru menegakkan disiplin dengan pendekatan yang mendidik dan Islami.

d. Pembiasaan sikap religius

- 1) Kegiatan rutin religius seperti shalat berjamaah, doa bersama, membaca Al-Qur'an sebelum belajar.
- 2) Sikap saling menghargai dan tolong-menolong ditanamkan dalam keseharian.

- 3) Lingkungan sekolah mendukung atmosfer Islami, baik dalam interaksi maupun kegiatan ekstrakurikuler.

2. Variabel Dependen (Y): Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Variabel ini menjelaskan sejauh mana Kurikulum Merdeka diterapkan secara efektif di Sekolah Penggerak. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi, fleksibilitas, serta pengembangan karakter siswa sesuai Profil Pelajar Pancasila.

Indikator dan sub-indikator:

- a. Kesiapan guru dalam merencanakan pembelajaran
 - 1) Guru menyusun RPP/Modul Ajar sesuai dengan struktur Kurikulum Merdeka.
 - 2) Guru menyiapkan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan siswa.
 - 3) Guru memahami capaian pembelajaran (CP) dan tujuan pembelajaran (TP).
- b. Kreativitas guru dalam mengajar
 - 1) Guru menggunakan metode pembelajaran yang variatif (diskusi, proyek, problem solving, dll).
 - 2) Guru memanfaatkan media dan teknologi dalam pembelajaran.
 - 3) Guru mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, dan menyenangkan.
- c. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran
 - 1) Siswa terlibat aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok.
 - 2) Siswa berani mengemukakan pendapat, ide, atau hasil karya.
 - 3) Siswa menunjukkan motivasi dan antusiasme belajar tinggi.
- d. Evaluasi dan asesmen berbasis kompetensi
 - 1) Guru menggunakan asesmen formatif dan sumatif sesuai capaian pembelajaran.

- 2) Penilaian dilakukan secara holistik, tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan.
- 3) Guru memberi umpan balik konstruktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Tabel 3.1 Variabel, Indikator dan Sub-Indikator Utama

Variabel	Indikator	Sub-Indikator Utama
X (Internalisasi Nilai Islami)	a. Keteladanan guru	1) Kejujuran, disiplin, tanggung jawab 2) Menjadi teladan ibadah 3) Akhlak mulia sehari-hari
	b. Integrasi nilai Islami dalam pembelajaran	1) Mengaitkan materi dengan nilai Islami 2) Menyisipkan ayat/hadis 3) Nilai Islami sebagai dasar penyelesaian masalah
	c. Penerapan disiplin Islami	1) Aturan berbasis nilai Islami 2) Tata tertib religius 3) Pendekatan Islami dalam menegakkan disiplin
	d. Pembiasaan sikap religius	1) Kegiatan rutin ibadah 2) Saling menghargai & tolong-menolong 3) Lingkungan Islami
Y (Pelaksanaan Kurikulum Merdeka)	a. Kesiapan guru	1) Penyusunan RPP/Modul Ajar 2) Menyiapkan bahan ajar 3) Pemahaman CP & TP
	b. Kreativitas guru	1) Metode pembelajaran variatif 2) Pemanfaatan media/teknologi

Variabel	Indikator	Sub-Indikator Utama
		3) Suasana belajar inovatif
	c. Partisipasi siswa	1) Keaktifan diskusi/kelompok 2) Keberanian menyampaikan ide 3) Motivasi belajar
	d. Evaluasi berbasis kompetensi	1) Asesmen formatif & sumatif 2) Penilaian holistik (kognitif, afektif, psikomotorik) 3) Pemberian umpan balik

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru dan kepala sekolah pada Sekolah Penggerak yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka di Provinsi Aceh. Populasi ini dipilih karena guru dan kepala sekolah merupakan aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka, sekaligus berperan penting dalam proses internalisasi nilai-nilai Islami di sekolah. Dengan demikian, populasi penelitian ini merepresentasikan pihak-pihak yang paling relevan dan strategis untuk memberikan data sesuai dengan fokus penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh yang telah melaksanakan Program Sekolah Penggerak (PSP) sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka. Berdasarkan data dari Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan Aceh, jumlah keseluruhan sekolah penggerak di Aceh terdiri atas:

- 1) PSP Angkatan I (telah menyelesaikan program percepatan Kurikulum Merdeka) sebanyak 59 sekolah,
- 2) PSP Angkatan II sebanyak 141 sekolah, dan
- 3) PSP Angkatan III sebanyak 203 sekolah.

Dengan demikian, total keseluruhan populasi Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh adalah 403 sekolah.

Namun, penelitian ini secara khusus memfokuskan diri pada sekolah yang telah menyelesaikan program percepatan Kurikulum Merdeka (PSP Angkatan I), yaitu sebanyak 59 sekolah, karena sekolah-sekolah inilah yang telah menjalankan Kurikulum Merdeka secara penuh dan memiliki pengalaman implementasi paling komprehensif. Sekolah-sekolah pada angkatan II dan III masih dalam tahap pelaksanaan dan adaptasi, sehingga belum dapat dijadikan acuan dalam menilai efektivitas internalisasi nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Sampel penelitian ditetapkan sebanyak 48 orang guru dan kepala sekolah yang berasal dari empat kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yaitu:

1. Kota Banda Aceh
2. Kabupaten Nagan Raya
3. Kota Langsa
4. Kabupaten Bireuen

Tabel 3.2
Daftar Sekolah Sampel Penelitian Sekolah Penggerak Aceh
(Angkatan I)

No	Nama Sekolah	NPSN	Kabupaten/ Kota	Jumlah Responden
1	KB Bina Phon	69820194	Nagan Raya	9
2	SD Negeri Lhok Banie	10105715	Kota Langsa	10
3	SD Negeri 26	10105322	Banda Aceh	10
4	UPTD SMP Negeri 4	10107064	Bireuen	9
5	SMP Negeri 5 Seunagan	10104675	Nagan Raya	10
Total				48 Org

Pemilihan sampel tersebut dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian ³¹⁷. Pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden merupakan guru atau kepala sekolah yang aktif terlibat dalam implementasi Kurikulum Merdeka.
2. Responden berasal dari sekolah yang telah ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Sekolah Penggerak.
3. Responden memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, sehingga diharapkan mampu memberikan data yang valid, objektif, dan sesuai dengan realitas lapangan.

Penggunaan purposive sampling dipandang tepat karena penelitian ini membutuhkan data dari responden dengan karakteristik khusus, bukan dari populasi umum. Selain itu, jumlah sampel 48 orang dianggap representatif untuk menggambarkan fenomena penelitian di empat kabupaten/kota terpilih, mengingat penelitian ini bersifat explanatory yang lebih menekankan kualitas data daripada kuantitas responden ³¹⁸.

Dari total 23 kabupaten/kota di Aceh, penelitian ini mengambil sampel dari 4 kabupaten/kota yaitu Nagan Raya, Kota Langsa, Banda Aceh, Bireuen. Pemilihan empat wilayah ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni pemilihan daerah secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria pemilihan 4 kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Memiliki sekolah penggerak Angkatan I yang telah menyelesaikan program percepatan Kurikulum Merdeka.

³¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ...*, hlm. 170.

³¹⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches ...*, hlm. 110.

2. Mewakili keragaman geografis dan sosio-kultural Aceh, baik wilayah perkotaan maupun semi-perdesaan, untuk memperoleh gambaran yang representatif.
3. Adanya dukungan pemerintah daerah dan ketersediaan data yang memadai untuk keperluan penelitian.
4. Konteks penerapan nilai Islami yang kuat baik dalam kurikulum maupun budaya sekolah, sesuai dengan karakter pendidikan Aceh yang berbasis syariat Islam.

Dengan pertimbangan tersebut, empat kabupaten/kota terpilih dianggap dapat merepresentasikan variasi implementasi Kurikulum Merdeka di Aceh dari sisi karakteristik sosial, geografis, dan budaya pendidikan.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 48 responden, yang terdiri atas guru dan kepala sekolah dari sekolah penggerak terpilih. Penentuan jumlah sampel ini didasarkan pada teori penentuan ukuran sampel menurut Arikunto yang menyatakan: “Apabila subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil seluruhnya; namun apabila lebih dari 100, dapat diambil antara 10–25% dari jumlah populasi.”

Dari populasi 59 sekolah penggerak Angkatan I, diambil sekitar 20–25% sebagai sampel (yaitu 48 responden mewakili ±24 sekolah), sehingga ukuran sampel ini sudah memenuhi proporsi minimal representasi populasi. Selain itu, menurut Cochran's Sample Size Formula dan Slovin's formula ($n = N / (1 + N e^2)$), dengan tingkat kesalahan (margin of error) 10% dan populasi 59 sekolah, maka jumlah sampel minimal adalah ≈ 38 –40 responden, sehingga penggunaan 48 responden dalam penelitian ini telah memenuhi bahkan melampaui batas minimum statistik inferensial yang disarankan untuk penelitian sosial dengan tingkat kepercayaan 90–95%.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan bagian dari non-probability sampling, di mana pemilihan sampel didasarkan pada kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua sekolah

penggerak berada pada tahap implementasi Kurikulum Merdeka yang sama.

Kriteria pemilihan sampel sekolah dan responden (guru/kepala sekolah) adalah:

- 1) Sekolah merupakan Sekolah Penggerak Angkatan I yang telah menyelesaikan program percepatan Kurikulum Merdeka minimal satu tahun.
- 2) Guru atau kepala sekolah yang menjadi responden aktif terlibat langsung dalam proses implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
- 3) Sekolah memiliki program atau kegiatan integratif berbasis nilai Islami dalam kurikulum, pembelajaran, dan budaya sekolah.
- 4) Responden bersedia memberikan data melalui angket dan wawancara mendalam secara sukarela.

Dengan kriteria tersebut, 48 responden yang terdiri dari guru dinilai telah mewakili keragaman pengalaman dan konteks implementasi Kurikulum Merdeka di Aceh.

Gambaran Umum Sekolah Sasaran Penelitian

3.2.1 SD Negeri 26 Banda Aceh

Sejarah dan Lokasi

SD Negeri 26 Banda Aceh merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang telah berdiri sejak tahun 1972, menjadikannya salah satu lembaga pendidikan dasar yang telah melayani masyarakat Kota Banda Aceh selama lebih dari lima dekade. Sekolah ini berlokasi di Jalan Pemancar No. 12, Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Lokasi sekolah berada di wilayah perkotaan Banda Aceh yang cukup strategis, dengan akses yang relatif mudah dijangkau dari berbagai penjuru kota. Secara geografis, sekolah ini berada di kawasan yang berkembang pesat pasca rehabilitasi dan rekonstruksi setelah peristiwa tsunami 2004 yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayah pesisir Aceh. Meskipun bangunan sekolah mengalami

kerusakan parah pada masa itu, semangat untuk terus menyelenggarakan pendidikan berkualitas tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh warga sekolah. Sejarah panjang perjalanan sekolah ini menjadi saksi bagaimana institusi pendidikan mampu bertahan dan terus beradaptasi dengan berbagai dinamika perubahan kebijakan pendidikan nasional, mulai dari kurikulum masa lalu hingga Kurikulum Merdeka yang saat ini diimplementasikan.

Secara administratif, SD Negeri 26 Banda Aceh berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dan merupakan salah satu sekolah dasar yang aktif dalam berbagai program pengembangan mutu pendidikan di tingkat kota maupun provinsi. Letaknya yang berada di Kecamatan Jaya Baru, sebuah kecamatan yang berkembang sebagai kawasan permukiman padat penduduk, menjadikan sekolah ini memiliki posisi strategis dalam melayani kebutuhan pendidikan dasar masyarakat sekitar. Wilayah ini memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen, namun secara dominan memiliki latar belakang religius yang kuat, yang kemudian turut mempengaruhi orientasi pendidikan di sekolah ini, terutama dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam proses pembelajaran.

Jumlah Siswa dan Tenaga Pendidik

SD Negeri 26 Banda Aceh memiliki total peserta didik sebanyak 236 siswa yang terdistribusi dalam 6 rombongan belajar (rombel). Jumlah ini menunjukkan bahwa sekolah ini termasuk dalam kategori sekolah dengan skala menengah, di mana setiap rombongan belajar diisi oleh rata-rata 30-40 siswa, yang masih tergolong ideal untuk proses pembelajaran yang efektif. Distribusi siswa dalam 6 rombel ini mencakup jenjang kelas I hingga kelas VI, dengan komposisi yang cukup berimbang antara siswa laki-laki dan perempuan.

Dari segi sumber daya manusia, sekolah ini memiliki 9 orang guru dengan kualifikasi akademik Strata Satu (S1). Jumlah tenaga pendidik ini cukup representatif untuk mendukung proses pembelajaran di 6 rombel yang ada, dengan rasio guru terhadap

siswa yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran yang optimal. Sebagian besar guru telah memiliki sertifikasi profesi, yang menunjukkan komitmen sekolah dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi profesional. Sertifikasi guru ini juga menjadi indikator bahwa tenaga pendidik di sekolah ini telah memenuhi standar nasional dan memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang memadai.

Selain tenaga pendidik, sekolah ini juga didukung oleh 6 orang tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi, perpustakaan, dan pengelolaan sarana prasarana. Keberadaan tenaga kependidikan ini sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional sekolah, sehingga guru dapat lebih fokus pada proses pembelajaran dan pembinaan karakter siswa.

Facilities and Infrastructure

Condition of facilities and infrastructure of SD Negeri 26 Banda Aceh becomes one of the important aspects that need to be observed in the context of this research. The main building of the school experiences damage that is quite significant, covering the classroom, teacher's room, library, and multi-purpose room. The level of damage reaches 33% on various components of the building, including the roof, ceiling, structure columns, walls, stairs, foundation, utilities, and finishing. This condition certainly becomes a challenge on its own in supporting the optimization of the learning process, especially remembering the Merdeka Curriculum emphasizes active, collaborative, and project-based learning that requires space and facilities that are adequate.

Damage to the roof and ceiling causes several rooms to be less comfortable to use, especially during the rainy season. Damage to the structure columns and walls causes concern related to the aspect of safety and student safety. Meanwhile, the condition of the stairs, foundation, utilities, and finishing that are less optimal affects the overall comfort. Despite this, the local government through the Education Department

Kota Banda Aceh terus berupaya melakukan perbaikan secara bertahap, mengingat pentingnya infrastruktur pendidikan yang layak bagi keberhasilan proses pembelajaran.

Kondisi fisik bangunan yang kurang layak ini menjadi tantangan nyata dalam mendukung optimalisasi implementasi Kurikulum Merdeka. Pembelajaran berbasis proyek, yang menjadi salah satu ciri utama Kurikulum Merdeka, membutuhkan ruang yang fleksibel dan kondusif untuk kegiatan kolaboratif, diskusi kelompok, dan presentasi. Demikian pula dengan pembelajaran aktif yang menuntut mobilitas siswa dalam ruang belajar. Keterbatasan fasilitas yang representatif tentu menjadi kendala yang harus diatasi dengan kreativitas dan inovasi dari para guru.

Meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas fisik, sekolah ini telah menunjukkan resiliensi yang tinggi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Ruang kelas yang tersedia tetap digunakan secara optimal dengan penataan yang kreatif. Perpustakaan meskipun terbatas, tetap difungsikan sebagai sumber belajar. Ruang serbaguna yang ada digunakan secara bergiliran untuk berbagai kegiatan, termasuk pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan kegiatan keagamaan. Kondisi ini mencerminkan semangat pantang menyerah dalam menyelenggarakan pendidikan berkualitas meskipun dengan keterbatasan infrastruktur.

Program Unggulan

SD Negeri 26 Banda Aceh memiliki sejumlah program unggulan yang menjadi ciri khas sekolah ini dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar. Program-program ini dikembangkan berdasarkan potensi sekolah dan kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan visi sekolah untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, berprestasi, dan berwawasan lingkungan.

Dalam bidang akademik, sekolah ini aktif mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Keikutsertaan dalam OSN ini menjadi salah satu fokus pengembangan prestasi akademik siswa,

sekaligus menjadi ajang pembinaan bakat dan minat di bidang sains. Para guru secara rutin melakukan pembinaan khusus bagi siswa-siswa yang memiliki potensi di bidang ini, yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran reguler.

Dalam bidang seni dan budaya, sekolah ini mengembangkan program seni tari kreasi dan pantomim. Kedua program ini menjadi wadah bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas dan mengembangkan bakat seni. Seni tari kreasi yang dikembangkan biasanya mengangkat tema-tema budaya Aceh yang dikemas secara modern, sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman namun tidak kehilangan akar budaya lokal. Sementara itu, pantomim menjadi media bagi siswa untuk melatih ekspresi, komunikasi non-verbal, dan kreativitas dalam menyampaikan pesan-pesan moral.

Yang menjadi kekhasan dan keunggulan utama sekolah ini adalah program diniyah dan tahfizh yang mengintegrasikan nilai-nilai Islami secara sistematis dalam pembelajaran sehari-hari. Program diniyah dilaksanakan sebagai penguatan pendidikan agama Islam di luar jam pelajaran formal, mencakup pembelajaran baca tulis Al-Qur'an, fiqh dasar, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. Program tahfizh Al-Qur'an menjadi program unggulan yang bertujuan untuk mencetak generasi penghafal Al-Qur'an sejak usia dini. Kedua program ini menjadi sarana utama dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islami kepada peserta didik, yang menjadi fokus penelitian ini.

Integrasi program diniyah dan tahfizh ke dalam kurikulum sekolah menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak sekolah untuk tidak hanya mengutamakan pencapaian akademik semata, tetapi juga pembentukan karakter Islami yang menjadi fondasi kepribadian siswa. Program-program ini dilaksanakan secara rutin dan terstruktur, dengan melibatkan guru-guru yang kompeten di bidangnya, serta didukung oleh komite sekolah dan orang tua siswa.

Implementasi Kurikulum Merdeka

SD Negeri 26 Banda Aceh telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sebagai landasan utama dalam

penyelenggaraan pendidikan. Pemilihan kurikulum ini didasarkan pada kesadaran akan kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada peserta didik, sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah ini tidak sekadar mengikuti kebijakan nasional, tetapi diinternalisasikan dan diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran yang kontekstual dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan peserta didik.

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning)

Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif melalui proyek kolaboratif. Di SD Negeri 26 Banda Aceh, pendekatan ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan proyek integratif yang mengaitkan materi pembelajaran dengan isu-isu lokal, lingkungan, maupun nilai-nilai karakter. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi wadah utama bagi pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Tema-tema yang diangkat dalam P5 disesuaikan dengan konteks lokal Aceh, seperti kearifan lokal, kewirausahaan, dan gaya hidup berkelanjutan, yang kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman.

Fleksibilitas dan Otonomi Guru

Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengembangkan materi, metode, dan asesmen sesuai dengan karakteristik peserta didik serta potensi lokal. Di SD Negeri 26 Banda Aceh, fleksibilitas ini diterjemahkan ke dalam berbagai inovasi pembelajaran. Guru-guru secara kreatif mengembangkan modul ajar yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam mata pelajaran umum. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga mulai dikembangkan, meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Pendekatan pembelajaran kolaboratif dan inkuiri menjadi pilihan utama untuk mendorong keaktifan siswa dalam proses belajar.

Penguatan Karakter dan Profil Pelajar Pancasila

Kurikulum Merdeka di sekolah ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga secara sistematis mengintegrasikan

dimensi Profil Pelajar Pancasila, khususnya dimensi "beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia". Nilai-nilai keislaman diinternalisasikan melalui berbagai strategi. Pembiasaan religius seperti doa bersama sebelum memulai pelajaran, tadarus Al-Qur'an setiap pagi, dan shalat dhuha serta shalat dzuhur berjamaah menjadi rutinitas harian. Keteladanan guru (*uswah hasanah*) menjadi faktor utama dalam menanamkan nilai-nilai akhlak mulia, di mana guru-guru secara konsisten menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan perilaku religius dalam keseharian. Integrasi konten keagamaan juga dilakukan dalam materi ajar lintas mata pelajaran, misalnya dalam pembelajaran IPA dikaitkan dengan ayat-ayat kauniyah, dalam pembelajaran IPS dikaitkan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Diferensiasi Pembelajaran

Sekolah ini menerapkan pembelajaran yang memperhatikan keberagaman kemampuan, minat, dan kebutuhan peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang mengakomodasi perbedaan individu dalam proses belajar. Guru-guru berusaha untuk mengenali karakteristik setiap siswa, kemudian menyesuaikan strategi, metode, dan media pembelajaran agar dapat menjangkau seluruh siswa dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga diterapkan dalam konteks internalisasi nilai Islami, di mana pendekatan disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kesiapan spiritual masing-masing siswa.

Asesmen Autentik dan Berkelanjutan

Sistem penilaian di SD Negeri 26 Banda Aceh tidak hanya menekankan hasil akhir, tetapi juga proses perkembangan peserta didik secara berkelanjutan. Penilaian afektif (sikap dan karakter) dan psikomotorik menjadi bagian integral dari asesmen, selaras dengan kompetensi Islami yang ingin dikembangkan. Guru melakukan observasi terhadap perilaku sehari-hari siswa, mencatat perkembangan karakter, dan memberikan umpan balik yang

konstruktif. Penilaian diri dan penilaian antar teman juga mulai dikembangkan untuk melatih kesadaran siswa akan pentingnya introspeksi dan tanggung jawab moral.

Dengan visi mewujudkan siswa berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, berprestasi, dan berwawasan lingkungan, SD Negeri 26 Banda Aceh berupaya menciptakan ekosistem pembelajaran yang memerdekakan, memberdayakan potensi peserta didik, serta membentuk generasi yang kompeten secara akademis dan kuat dalam karakter. Sekolah ini menjadi studi kasus yang sangat relevan untuk meneliti hubungan antara kualitas infrastruktur pendidikan dengan efektivitas implementasi kurikulum, serta bagaimana internalisasi nilai-nilai Islami dapat dilakukan secara optimal meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Keberhasilan sekolah ini dalam mempertahankan kualitas pembelajaran dan internalisasi nilai Islami di tengah keterbatasan infrastruktur menjadi bukti bahwa komitmen, kreativitas, dan keteladanan guru memiliki peran yang lebih menentukan dibandingkan faktor fisik semata.

3.2.2 UPTD SMP Negeri 4 Bireuen

Sejarah dan Lokasi

UPTD SMP Negeri 4 Bireuen merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang berada di Kabupaten Bireuen, sebuah kabupaten yang terletak di pesisir timur Provinsi Aceh. Kabupaten Bireuen dikenal sebagai wilayah dengan tradisi pendidikan yang kuat, memiliki banyak lembaga pendidikan formal maupun non-formal, termasuk dayah-dayah tradisional yang telah lama menjadi pusat pendidikan Islam di Aceh. Berdiri sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat, UPTD SMP Negeri 4 Bireuen telah melayani masyarakat Kabupaten Bireuen selama bertahun-tahun. Sekolah ini berlokasi di wilayah yang strategis, mudah diakses dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bireuen, sehingga menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka di jenjang pendidikan menengah pertama.

Secara administratif, sekolah ini berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menaungi beberapa satuan pendidikan di wilayah tersebut. Statusnya sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah menunjukkan bahwa sekolah ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat kabupaten, sekaligus menjadi salah satu sekolah rujukan dalam berbagai program pengembangan mutu pendidikan. Letak geografisnya yang berada di wilayah dengan akses transportasi yang relatif baik menjadikan sekolah ini mudah dijangkau oleh peserta didik dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bireuen. Kondisi ini turut mempengaruhi keberagaman latar belakang sosial-ekonomi dan religius peserta didik, yang kemudian menjadi konteks penting dalam upaya internalisasi nilai-nilai Islami di sekolah.

Jumlah Siswa dan Tenaga Pendidik

UPTD SMP Negeri 4 Bireuen memiliki total peserta didik sebanyak 566 siswa, yang terdiri dari 293 siswa laki-laki dan 273 siswa perempuan. Jumlah ini menunjukkan bahwa sekolah ini termasuk dalam kategori sekolah menengah pertama dengan skala besar di Kabupaten Bireuen. Komposisi siswa yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan mencerminkan adanya kesetaraan akses pendidikan bagi kedua gender di wilayah ini. Jumlah peserta didik yang signifikan ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan pembelajaran, terutama dalam upaya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu ciri utama Kurikulum Merdeka, di mana guru dituntut untuk mampu mengakomodasi keberagaman kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar siswa.

Dari segi sumber daya manusia, sekolah ini didukung oleh 36 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 31 guru non-PNS, sehingga total tenaga pendidik mencapai 67 orang. Jumlah guru yang cukup besar ini memungkinkan rasio guru terhadap siswa yang ideal, di mana setiap guru dapat memberikan perhatian yang memadai kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Keberadaan guru non-PNS

yang cukup banyak juga menunjukkan bahwa sekolah ini membuka peluang bagi tenaga pendidik dari berbagai latar belakang untuk berkontribusi dalam pengembangan mutu pendidikan. Sebagian besar guru telah memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan pengalaman mengajar yang cukup, sehingga mampu melaksanakan tugas profesional mereka dengan baik.

Selain tenaga pendidik, sekolah ini juga didukung oleh 1 orang tenaga administrasi PNS dan 7 orang tenaga administrasi non-PNS. Keberadaan tenaga administrasi ini sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional sekolah, mulai dari pengelolaan administrasi kesiswaan, kepegawaian, keuangan, hingga pelayanan kepada masyarakat. Dengan dukungan tenaga administrasi yang memadai, guru dapat lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu melaksanakan pembelajaran dan pembinaan karakter peserta didik. Kepala sekolah, Eliza Zuhra, S.Pd., yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Matematika, memimpin sekolah ini dengan dukungan dari komite sekolah dan tata usaha yang aktif. Kepemimpinan yang kolaboratif antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif bagi pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan internalisasi nilai-nilai Islami.

Fasilitas dan Sarana Prasarana

Dari sisi sarana fisik, UPTD SMP Negeri 4 Bireuen memiliki 24 ruang kelas dengan 19 rombongan belajar (rombel) yang aktif digunakan. Ketersediaan ruang kelas yang melebihi jumlah rombel yang ada memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pembelajaran, termasuk kemungkinan untuk melaksanakan pembelajaran di luar kelas reguler atau kegiatan pembelajaran yang membutuhkan ruang khusus. Ruang kelas yang tersedia juga memungkinkan diterapkannya pembelajaran dengan pendekatan yang lebih variatif, seperti diskusi kelompok, presentasi, dan kegiatan kolaboratif lainnya yang menjadi ciri pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka.

Sekolah ini telah dilengkapi dengan akses Wi-Fi dan website sekolah. Ketersediaan akses internet menjadi modal penting dalam

mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, terutama dalam pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang menjadi sumber belajar dan pengembangan profesional bagi guru. Melalui akses internet, guru dapat mengakses berbagai referensi perangkat ajar, modul pelatihan, dan berbagi praktik baik dengan guru lain di seluruh Indonesia. Website sekolah juga menjadi sarana informasi bagi masyarakat dan warga sekolah, sekaligus media untuk mempublikasikan berbagai program dan prestasi sekolah.

Selain ruang kelas dan akses teknologi, sekolah ini juga memiliki fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan fasilitas olahraga. Meskipun tidak disebutkan secara rinci dalam profil, keberadaan fasilitas-fasilitas ini menjadi penunjang penting bagi pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas. Laboratorium sains, misalnya, menjadi tempat yang sangat penting untuk pembelajaran IPA yang memerlukan praktikum dan eksperimen. Perpustakaan menjadi sumber belajar yang kaya bagi peserta didik untuk memperluas wawasan dan mengembangkan literasi. Fasilitas olahraga mendukung pengembangan kesehatan jasmani dan pembentukan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Program Unggulan

UPTD SMP Negeri 4 Bireuen memiliki sejumlah program unggulan yang menjadi ciri khas sekolah ini. Dalam bidang akademik, sekolah ini fokus pada penguatan literasi dan numerasi sebagai kompetensi dasar yang diperlukan peserta didik untuk menguasai berbagai bidang ilmu. Program ini sejalan dengan penekanan Kurikulum Merdeka pada penguatan literasi dan numerasi sejak dini. Guru-guru secara sistematis mengintegrasikan kegiatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran sehari-hari, baik melalui pembelajaran di kelas maupun kegiatan kokurikuler.

Dalam bidang karakter, sekolah ini mengembangkan program pembinaan akhlak dan budi pekerti yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Kegiatan pembiasaan religius seperti doa bersama sebelum memulai pelajaran, tadarus Al-Qur'an, dan

shalat berjamaah menjadi rutinitas harian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sekolah. Program ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga dilengkapi dengan pembinaan pemahaman keagamaan dan refleksi nilai, sehingga peserta didik dapat menghayati makna ibadah dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sekolah juga mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter, seperti pramuka, olahraga, seni, dan kegiatan sosial.

Dalam bidang keagamaan, sekolah ini memiliki program unggulan yang memperkuat internalisasi nilai-nilai Islami. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam profil, sebagai sekolah yang berlokasi di Aceh yang menerapkan syariat Islam, dapat dipahami bahwa sekolah ini mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam berbagai aspek pembelajaran dan budaya sekolah. Guru-guru, baik yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam maupun mata pelajaran umum, berupaya mengaitkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai keislaman. Keteladanan guru dalam sikap dan perilaku Islami menjadi faktor penting dalam menanamkan akhlak mulia kepada peserta didik. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, termasuk dengan dayah-dayah di sekitar, juga dilakukan untuk memperkuat pembinaan karakter Islami siswa.

Implementasi Kurikulum Merdeka

Sebagai sekolah negeri di Indonesia yang mengikuti kebijakan nasional, UPTD SMP Negeri 4 Bireuen telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun dalam profil tidak secara eksplisit disebutkan kurikulum yang digunakan, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang terus bertransformasi, sekolah ini telah berada dalam tahap implementasi Kurikulum Merdeka atau setidaknya dalam proses transisi menuju kurikulum tersebut. Implementasi kurikulum di sekolah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan prinsip fleksibilitas, pembelajaran berdiferensiasi, dan penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning)

Dalam kerangka Kurikulum Merdeka, UPTD SMP Negeri 4 Bireuen menerapkan pembelajaran berbasis proyek sebagai salah satu pendekatan utama. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui kegiatan proyek yang kontekstual dan aplikatif. Tema-tema proyek yang diangkat disesuaikan dengan konteks lokal Kabupaten Bireuen, seperti kearifan lokal, kewirausahaan, dan gaya hidup berkelanjutan, yang kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Melalui proyek-proyek ini, peserta didik tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga mengalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam proses pembelajaran.

Fleksibilitas dan Otonomi Guru

Kurikulum Merdeka memberikan otonomi yang lebih luas kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Di UPTD SMP Negeri 4 Bireuen, guru-guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan materi, metode, dan asesmen sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks lokal. Hal ini mendorong kreativitas dan inovasi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam pembelajaran. Guru-guru secara aktif mengembangkan modul ajar yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga kaya akan muatan nilai-nilai keislaman. Pendekatan pembelajaran yang variatif, seperti diskusi, inkuiri, dan pembelajaran kolaboratif, menjadi pilihan untuk meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik.

Penguatan Karakter dan Profil Pelajar Pancasila

Kurikulum Merdeka di UPTD SMP Negeri 4 Bireuen tidak hanya berfokus pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Dimensi "beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia" menjadi fondasi yang diperkuat melalui integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran. Pembiasaan religius seperti doa bersama, tadarus Al-Qur'an, dan

shalat berjamaah menjadi rutinitas harian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sekolah. Keteladanan guru dalam sikap dan perilaku Islami menjadi faktor utama dalam menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Integrasi konten keagamaan juga dilakukan dalam materi ajar lintas mata pelajaran, misalnya dalam pembelajaran IPA dikaitkan dengan ayat-ayat kauniah, dalam pembelajaran IPS dikaitkan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam, dan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan teks bacaan bernilai moral Islami.

Pembelajaran Berdiferensiasi

Dengan jumlah peserta didik yang signifikan (566 siswa) dan latar belakang yang beragam, UPTD SMP Negeri 4 Bireuen menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai pendekatan untuk mengakomodasi keberagaman kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar siswa. Guru-guru berusaha untuk mengenali karakteristik setiap siswa, kemudian menyesuaikan strategi, metode, dan media pembelajaran agar dapat menjangkau seluruh siswa dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga diterapkan dalam konteks internalisasi nilai Islami, di mana pendekatan disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kesiapan spiritual masing-masing siswa.

Asesmen Autentik dan Berkelanjutan

Sistem penilaian di UPTD SMP Negeri 4 Bireuen tidak hanya menekankan hasil akhir, tetapi juga proses perkembangan peserta didik secara berkelanjutan. Asesmen formatif menjadi bagian integral dari pembelajaran, di mana guru melakukan pemantauan terhadap perkembangan siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Penilaian autentik yang mencakup penilaian proyek, portofolio, kinerja, dan observasi menjadi pilihan utama. Penilaian afektif (sikap dan karakter) dan psikomotorik juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari asesmen, selaras dengan kompetensi Islami yang ingin dikembangkan. Guru melakukan observasi terhadap perilaku sehari-hari siswa, mencatat

perkembangan karakter, dan memberikan pembinaan yang berkelanjutan.

Dengan jumlah siswa dan guru yang signifikan, serta dukungan sarana seperti ruang kelas dan teknologi yang memadai, UPTD SMP Negeri 4 Bireuen memiliki potensi yang besar sebagai lokasi penelitian yang relevan untuk mengkaji implementasi kurikulum, manajemen sekolah, dan efektivitas pembelajaran dalam konteks pendidikan menengah pertama di Kabupaten Bireuen. Sekolah ini menjadi contoh bagaimana Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan di sekolah dengan skala besar, dengan tantangan dan peluang yang khas. Keberhasilan sekolah ini dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam pembelajaran di tengah dinamika peserta didik yang beragam menjadi bukti bahwa internalisasi nilai dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan dukungan komitmen yang kuat dari seluruh warga sekolah.

3.2.3 SMP Negeri 5 Seunagan

Sejarah dan Lokasi

SMP Negeri 5 Seunagan merupakan satuan pendidikan menengah pertama berstatus negeri yang berlokasi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Kabupaten Nagan Raya terletak di pesisir barat Aceh, sebuah wilayah yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi keislaman yang kuat. Sebagai salah satu kabupaten yang relatif muda hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya terus berupaya mengembangkan infrastruktur pendidikan untuk melayani masyarakatnya. SMP Negeri 5 Seunagan hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan menengah pertama yang berkualitas bagi masyarakat di wilayah ini.

Secara geografis, sekolah ini berlokasi di Kecamatan Seunagan, salah satu kecamatan di Kabupaten Nagan Raya yang memiliki karakteristik masyarakat agraris dengan tingkat religiusitas yang tinggi. Kecamatan Seunagan dikenal sebagai daerah yang memiliki tradisi pendidikan Islam yang kuat, dengan keberadaan

dayah-dayah tradisional yang telah lama menjadi pusat pendidikan agama bagi masyarakat setempat. Lokasi sekolah yang berada di tengah-tengah masyarakat dengan latar belakang religius yang kuat ini menjadi konteks yang sangat relevan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Islami diintegrasikan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Lingkungan sekitar yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam upaya internalisasi nilai Islami di sekolah.

Sebagai sekolah yang termasuk dalam program Sekolah Penggerak, SMP Negeri 5 Seunagan memiliki posisi strategis dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Nagan Raya. Program Sekolah Penggerak yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bertujuan untuk mempercepat transformasi pendidikan melalui pendampingan intensif, penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru, serta peningkatan ekosistem kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Keikutsertaan SMP Negeri 5 Seunagan dalam program ini menunjukkan komitmen sekolah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Jumlah Siswa dan Tenaga Pendidik

Sebagai sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Nagan Raya, SMP Negeri 5 Seunagan memiliki jumlah peserta didik yang representatif, dengan komposisi yang cukup seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan. Jumlah siswa yang signifikan ini menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap sekolah ini, yang tidak terlepas dari reputasi sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pembelajaran modern. Keberagaman latar belakang siswa, baik dari sisi sosial-ekonomi maupun tingkat religiusitas, menjadi tantangan sekaligus peluang dalam upaya internalisasi nilai Islami di sekolah.

Dari segi sumber daya manusia, sekolah ini didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dan berkomitmen tinggi. Sebagai Sekolah Penggerak, guru-guru di SMP Negeri 5 Seunagan

mendapatkan pendampingan intensif dari pemerintah pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian mereka. Pendampingan ini mencakup pelatihan tentang implementasi Kurikulum Merdeka, pengembangan perangkat ajar, penerapan asesmen autentik, serta strategi penguatan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan. Para guru juga didorong untuk aktif dalam komunitas belajar (learning community) untuk saling berbagi praktik baik dan mengembangkan inovasi pembelajaran.

Kepala sekolah SMP Negeri 5 Seunagan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan transformasi pendidikan di sekolah ini. Sebagai pemimpin pembelajaran (instructional leader), kepala sekolah bertanggung jawab untuk menciptakan visi bersama, membangun budaya sekolah yang kondusif, mendukung pengembangan profesional guru, serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Dalam konteks Aceh, kepala sekolah juga bertugas memastikan bahwa muatan lokal Islami dan regulasi daerah, seperti Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional.

Fasilitas dan Sarana Prasarana

SMP Negeri 5 Seunagan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dan penguatan nilai-nilai Islami. Dari sisi sarana fisik, sekolah memiliki ruang kelas yang memadai untuk menampung seluruh peserta didik. Ruang kelas ditata sedemikian rupa untuk mendukung pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Beberapa ruang kelas juga dilengkapi dengan media pembelajaran interaktif yang memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar.

Sekolah ini juga memiliki fasilitas ibadah yang representatif, berupa musholla yang digunakan untuk kegiatan shalat berjamaah, doa bersama, dan kegiatan keagamaan lainnya. Keberadaan musholla yang nyaman dan bersih menjadi faktor penting dalam membangun pembiasaan religius di lingkungan sekolah. Selain itu,

sekolah juga menyediakan fasilitas olahraga, laboratorium, perpustakaan, dan ruang serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

Dalam aspek teknologi, SMP Negeri 5 Seunagan telah mengintegrasikan digitalisasi dalam proses pembelajaran. Sekolah memiliki akses internet yang memadai, yang digunakan untuk mengakses sumber belajar digital, Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan berbagai platform pembelajaran daring lainnya. Pemanfaatan teknologi ini sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang mendorong pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih dinamis, inklusif, dan terpersonalisasi. Beberapa ruang kelas juga dilengkapi dengan proyektor dan perangkat multimedia yang mendukung pembelajaran interaktif.

Program Unggulan

SMP Negeri 5 Seunagan memiliki sejumlah program unggulan yang menjadi ciri khas sekolah ini dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar. Program-program ini dikembangkan berdasarkan potensi sekolah dan kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan visi sekolah untuk menciptakan generasi yang unggul secara intelektual, kokoh secara spiritual, dan mulia secara akhlak.

Dalam bidang pembelajaran, sekolah ini menekankan pendekatan Deep Learning (pembelajaran mendalam) sebagai strategi utama. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian materi kognitif, tetapi juga mengembangkan kemampuan analisis, kreasi, dan refleksi kritis siswa. Siswa diajak untuk mengaitkan pembelajaran dengan masalah nyata, baik dalam konteks lokal maupun global. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *project-based learning* dan *inquiry-based learning* yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar secara teoretis, tetapi juga mengalami dan menghayati makna dari apa yang mereka pelajari.

Dalam aspek teknologi, sekolah ini mengembangkan program digitalisasi pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar-mengajar. Penggunaan platform digital, sumber belajar elektronik, dan media interaktif menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital siswa, mempersiapkan mereka menghadapi era digital, serta memperkaya pengalaman belajar dengan berbagai sumber dan media yang variatif. Digitalisasi pembelajaran juga memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan individual siswa.

Dalam aspek karakter, sekolah ini memiliki program unggulan Ekstrakurikuler Siswa Penggerak Disiplin (SPD) yang mencerminkan fokus sekolah pada penanaman nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Program ini melibatkan siswa secara aktif dalam upaya menciptakan budaya disiplin di lingkungan sekolah, baik dalam hal kedisiplinan waktu, berpakaian, maupun perilaku. Siswa yang tergabung dalam program ini menjadi agen perubahan yang membantu menegakkan aturan sekolah dan membudayakan perilaku disiplin di kalangan teman-temannya. Program ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai bagian dari akhlak mulia.

Dalam aspek keagamaan, sekolah ini memiliki program pembinaan karakter berbasis agama yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman secara sistematis dalam seluruh aspek pembelajaran dan budaya sekolah. Program ini mencakup pembiasaan religius seperti doa bersama, tadarus Al-Qur'an, shalat dhuha dan shalat dzuhur berjamaah, serta peringatan hari besar Islam. Selain itu, program ini juga mencakup integrasi nilai-nilai keislaman dalam materi ajar lintas mata pelajaran, serta keteladanan guru dalam sikap dan perilaku Islami. Program ini menjadi sarana utama dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islami kepada peserta didik.

Implementasi Kurikulum Merdeka

Sebagai bagian dari program Sekolah Penggerak, SMP Negeri 5 Seunagan telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual. Implementasi kurikulum ini tidak sekadar mengikuti kebijakan nasional, tetapi diinternalisasikan dan diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran yang kontekstual dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan peserta didik di Kabupaten Nagan Raya.

Pendekatan Pembelajaran Deep Learning

Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 5 Seunagan tidak hanya berfokus pada pencapaian materi kognitif, tetapi menekankan pembelajaran bermakna (deep learning) yang mengembangkan kemampuan analisis, kreasi, dan refleksi kritis siswa. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun pemahaman yang mendalam, menghubungkan konsep dengan konteks kehidupan nyata, dan mendorong siswa untuk merefleksikan proses berpikir mereka sendiri. Siswa diajak untuk mengaitkan pembelajaran dengan masalah nyata, baik dalam konteks lokal maupun global, sesuai dengan prinsip project-based learning dan inquiry-based learning yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka.

Dalam praktiknya, pendekatan deep learning diwujudkan melalui berbagai strategi. Guru merancang pembelajaran yang menantang siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan menciptakan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Siswa didorong untuk bertanya, mencari jawaban, dan tidak puas dengan informasi yang instan. Pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan konsep, tetapi dilanjutkan dengan aplikasi dalam kehidupan nyata dan refleksi atas apa yang telah dipelajari. Pendekatan ini sangat relevan dengan upaya internalisasi nilai-nilai Islami, karena nilai tidak cukup diajarkan secara teoretis, tetapi harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Digitalisasi Pembelajaran

Sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, SMP Negeri 5 Seunagan mengintegrasikan digitalisasi dalam proses belajar-mengajar. Hal ini mencakup penggunaan platform digital, sumber belajar elektronik, dan media interaktif untuk mendukung pembelajaran yang lebih dinamis, inklusif, dan terpersonalisasi. Guru-guru di sekolah ini memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk mengakses berbagai referensi perangkat ajar, modul pelatihan, dan sumber belajar lainnya. Platform ini juga menjadi wadah bagi guru untuk berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan guru lain di seluruh Indonesia.

Digitalisasi pembelajaran juga memungkinkan sekolah untuk mengatasi keterbatasan sumber belajar konvensional. Dengan akses internet yang memadai, siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar dari seluruh dunia, memperkaya wawasan, dan mengembangkan literasi digital. Penggunaan media interaktif seperti video pembelajaran, simulasi, dan aplikasi edukatif membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Digitalisasi juga memungkinkan pembelajaran yang lebih personal, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing.

Pembinaan Karakter Berbasis Agama

Kurikulum Merdeka menempatkan Profil Pelajar Pancasila sebagai tujuan utama, dengan dimensi "Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia" sebagai fondasi dari seluruh dimensi lainnya. Di SMP Negeri 5 Seunagan, nilai-nilai keislaman diintegrasikan secara sistematis melalui pembiasaan religius, keteladanan pendidik, dan materi pembelajaran yang mengakar pada kearifan lokal Aceh. Pembiasaan religius seperti doa bersama sebelum memulai pelajaran, tadarus Al-Qur'an setiap pagi, serta shalat dhuha dan shalat dzuhur berjamaah menjadi rutinitas harian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sekolah.

Keteladanan pendidik menjadi faktor utama dalam menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Guru-guru di SMP Negeri 5 Seunagan secara konsisten menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sabar, dan rendah hati dalam keseharian mereka. Mereka juga menjadi teladan dalam pelaksanaan ibadah, seperti shalat tepat waktu, berpakaian sopan sesuai syariat, dan berinteraksi dengan sesama secara santun dan penuh hormat. Keteladanan ini menjadi contoh nyata yang lebih efektif daripada ribuan kata-kata nasihat.

Integrasi nilai-nilai keislaman juga dilakukan dalam materi pembelajaran lintas mata pelajaran. Dalam pembelajaran IPA, guru mengaitkan fenomena alam dengan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Qur'an, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep ilmiah, tetapi juga menyadari kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta. Dalam pembelajaran IPS, guru mengaitkan materi tentang keadilan sosial, sistem ekonomi, dan interaksi sosial dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, guru menggunakan teks-teks bacaan yang mengandung nilai-nilai moral Islami atau mengangkat kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh Muslim.

Program Ekstrakurikuler Siswa Penggerak Disiplin (SPD) menjadi sarana penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Program ini melibatkan siswa secara aktif dalam upaya menciptakan budaya disiplin di lingkungan sekolah. Siswa yang tergabung dalam program ini dilatih untuk menjadi teladan dalam hal kedisiplinan, membantu menegakkan aturan sekolah, dan membudayakan perilaku disiplin di kalangan teman-temannya. Program ini mengajarkan bahwa disiplin bukanlah bentuk pengekangan, tetapi cara untuk melatih diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab, teratur, dan berakhlak mulia.

Fleksibilitas dan Otonomi Guru

Sebagai Sekolah Penggerak, guru di SMP Negeri 5 Seunagan memiliki keleluasaan yang luas untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Guru didorong untuk

melakukan *teaching at the right level*, yaitu mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, bukan sekadar mengajar sesuai dengan target kurikulum yang kaku. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk memberikan perhatian yang lebih intensif kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, sekaligus memberikan tantangan yang sesuai bagi siswa yang sudah mencapai tingkat kemampuan lebih tinggi.

Guru juga didorong untuk menerapkan asesmen formatif secara berkelanjutan, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa, memberikan umpan balik, dan melakukan perbaikan pembelajaran. Asesmen formatif ini berbeda dengan asesmen sumatif yang hanya dilakukan di akhir pembelajaran. Melalui asesmen formatif, guru dapat segera mengetahui kelemahan siswa dan memberikan bantuan yang tepat sebelum siswa tertinggal terlalu jauh.

Pengembangan materi ajar juga menjadi bagian dari otonomi guru. Guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar, bahan ajar, dan media pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial-budaya Aceh. Mereka dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal ke dalam materi ajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna bagi siswa. Guru juga didorong untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik cetak maupun digital, untuk memperkaya pengalaman belajar siswa.

Program Sekolah Penggerak sebagai Penguat Implementasi

Keikutsertaan dalam program Sekolah Penggerak memperkuat kapasitas SMP Negeri 5 Seunagan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka melalui berbagai bentuk dukungan. Pendampingan intensif dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi salah satu bentuk dukungan utama. Para pendamping memberikan bimbingan kepada kepala sekolah dan guru dalam memahami filosofi, struktur, dan pendekatan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. Mereka juga membantu sekolah dalam

menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), mengembangkan perangkat ajar, dan menerapkan asesmen autentik.

Pengembangan kepemimpinan instruksional menjadi fokus lain dari program Sekolah Penggerak. Kepala sekolah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif, yang mampu menciptakan visi bersama, membangun budaya sekolah yang kondusif, mendukung pengembangan profesional guru, serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transformasi pendidikan.

Peningkatan ekosistem kolaboratif juga menjadi bagian penting dari program Sekolah Penggerak. Sekolah didorong untuk membangun kemitraan yang erat dengan orang tua dan masyarakat. Keterlibatan orang tua tidak hanya terbatas pada pertemuan rutin, tetapi juga dalam mendukung program-program sekolah, termasuk program keagamaan dan pembinaan karakter. Kolaborasi dengan masyarakat, termasuk dengan dayah dan tokoh agama, juga diperkuat untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dan memperkuat internalisasi nilai-nilai Islami.

Dengan demikian, SMP Negeri 5 Seunagan tidak hanya sekadar mengadopsi Kurikulum Merdeka secara administratif, tetapi juga menginternalisasikan prinsip-prinsipnya dalam budaya sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang memerdekakan, memberdayakan, dan berkarakter kuat sesuai dengan identitas keacehan dan keislaman. Sekolah ini menjadi studi kasus yang menarik untuk meneliti bagaimana Kurikulum Merdeka diimplementasikan di daerah dengan kekhasan budaya-religius yang kuat, serta bagaimana integrasi antara modernitas (digitalisasi, deep learning) dan tradisi (nilai agama, kedisiplinan) dapat berjalan secara sinergis. Keberhasilan sekolah ini dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami dengan pendekatan pembelajaran modern menjadi bukti bahwa pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak harus berjalan pada jalur yang terpisah, tetapi dapat bersinergi dan saling

menguatkan dalam membentuk generasi muda yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, dan berdaya saing global.

3.2.4 KB Bina Phon

Sejarah dan Lokasi

KB Bina Phon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) berjenjang Kelompok Bermain (KB) yang berlokasi di Gampong Purworejo, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Lembaga ini berdiri sebagai wujud kepedulian masyarakat setempat terhadap pentingnya pendidikan sejak usia dini, yang menjadi fondasi bagi pembentukan karakter dan potensi anak di masa depan. Sebagai lembaga swasta yang dikelola oleh masyarakat, KB Bina Phon mencerminkan semangat partisipasi aktif warga dalam memajukan pendidikan di lingkungannya. Keberadaan lembaga ini menjadi sangat penting mengingat Kabupaten Nagan Raya yang terletak di pesisir barat Aceh ini masih terus berkembang dalam berbagai aspek, termasuk infrastruktur pendidikan.

Secara geografis, Kecamatan Kuala, tempat berlokasinya KB Bina Phon, merupakan wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat agraris dengan tradisi keislaman yang kuat. Masyarakat di kecamatan ini umumnya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan pedagang, dengan tingkat religiusitas yang tinggi. Kondisi ini turut mempengaruhi orientasi pendidikan yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan setempat, termasuk KB Bina Phon, yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Lokasi yang berada di pedesaan dengan kehidupan masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong menjadi konteks yang sangat relevan untuk mengkaji bagaimana pendidikan anak usia dini dikelola dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada.

Sebagai lembaga PAUD yang telah berdiri cukup lama dan memiliki akreditasi B, KB Bina Phon telah menunjukkan eksistensinya dalam melayani kebutuhan pendidikan anak usia dini di wilayah Kecamatan Kuala. Akreditasi B yang diperoleh lembaga ini merupakan pengakuan resmi dari Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PNF) bahwa lembaga ini telah memenuhi standar layanan pendidikan yang ditetapkan, meskipun dengan fasilitas yang sederhana. Capaian ini menunjukkan komitmen lembaga dalam terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

Jumlah Siswa dan Tenaga Pendidik

KB Bina Phon mengelola 4 rombongan belajar (rombel) yang terdiri dari kelompok-kelompok bermain sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Jumlah rombel ini menunjukkan bahwa lembaga ini melayani cukup banyak anak usia dini di wilayah Kecamatan Kuala. Dengan 4 rombel, lembaga ini dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan anak usia dini masyarakat sekitar yang menyadari pentingnya pendidikan sejak usia dini bagi perkembangan optimal anak-anak mereka.

Dari segi sumber daya manusia, lembaga ini didukung oleh 4 orang pendidik yang memiliki latar belakang kualifikasi akademik yang bervariasi, meliputi jenjang Strata Satu (S1), Diploma Dua (D2), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keragaman latar belakang pendidikan ini menunjukkan bahwa lembaga ini berupaya menyediakan tenaga pengajar dengan beragam kemampuan dan keahlian. Meskipun tidak semuanya berlatar belakang pendidikan PAUD, para pendidik di KB Bina Phon telah memiliki pengalaman dan komitmen yang kuat dalam mengasuh dan mendidik anak usia dini. Mereka terus berupaya meningkatkan kompetensi melalui berbagai pelatihan dan pengalaman praktik langsung dalam menangani anak-anak usia dini.

Keterbatasan jumlah pendidik dengan 4 orang untuk 4 rombel menunjukkan bahwa rasio guru terhadap anak di lembaga ini cukup ideal, di mana setiap pendidik dapat memberikan perhatian yang memadai kepada anak-anak dalam kelompoknya. Hal ini penting mengingat anak usia dini membutuhkan perhatian dan bimbingan yang intensif dalam proses belajar mereka. Para pendidik di KB Bina Phon tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga

sebagai pengasuh, pembimbing, dan teladan bagi anak-anak dalam keseharian mereka.

Kepala sekolah dan tenaga administrasi juga menjadi bagian penting dari pengelolaan lembaga ini. Meskipun dengan keterbatasan jumlah tenaga, pengelolaan administrasi, keuangan, dan program dilakukan dengan sebaik mungkin. Komite sekolah dan orang tua murid juga berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di lembaga ini, sesuai dengan semangat partisipasi masyarakat yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan swasta di pedesaan.

Fasilitas dan Sarana Prasarana

Dari segi sarana prasarana, KB Bina Phon memiliki fasilitas yang sederhana namun memadai untuk menyelenggarakan kegiatan belajar bagi anak usia dini. Lembaga ini memiliki 3 ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jumlah ruang kelas yang tersedia cukup untuk menampung 4 rombel dengan sistem pengaturan jadwal yang fleksibel. Ruang kelas ditata sedemikian rupa untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Meskipun sederhana, ruang kelas dilengkapi dengan alat peraga edukatif, mainan, dan media pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini.

Selain ruang kelas, lembaga ini juga memiliki 1 ruang kepala sekolah dan guru yang berfungsi sebagai ruang administrasi, ruang rapat, dan tempat para pendidik mempersiapkan pembelajaran. Ruang ini juga menjadi pusat koordinasi antara kepala sekolah, guru, dan orang tua dalam merencanakan dan mengevaluasi program pembelajaran. Keberadaan ruang ini penting untuk mendukung pengelolaan lembaga secara profesional meskipun dengan keterbatasan.

Fasilitas sanitasi juga tersedia dengan adanya 1 unit toilet yang digunakan oleh anak-anak dan pendidik. Meskipun hanya satu unit, toilet dijaga kebersihannya secara rutin untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan anak-anak. Kesadaran akan pentingnya

kebersihan dan kesehatan menjadi bagian dari pembiasaan yang diajarkan kepada anak-anak sejak dini.

Secara keseluruhan, fasilitas yang tersedia di KB Bina Phon memungkinkan terselenggaranya kegiatan belajar dengan sarana dasar yang memadai meskipun dalam kesederhanaan. Keterbatasan fasilitas fisik tidak menjadi penghalang bagi lembaga ini untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, karena komitmen dan kreativitas para pendidik menjadi faktor yang lebih menentukan. Penggunaan sumber daya lokal dan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan fasilitas.

Program Unggulan

KB Bina Phon memiliki sejumlah program unggulan yang menjadi ciri khas lembaga ini dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar. Program-program ini dikembangkan berdasarkan potensi lokal, kebutuhan anak usia dini, dan visi lembaga untuk membentuk generasi yang berkarakter, kreatif, dan memiliki nilai-nilai kebersamaan.

Salah satu program unggulan yang paling menonjol adalah "Jumat Berkah" atau Jumat berbagi. Program ini dilaksanakan setiap hari Jumat, di mana anak-anak diajak untuk berbagi makanan, mainan, atau barang-barang sederhana dengan teman-teman mereka yang kurang mampu. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan nilai-nilai sosial dan kepedulian sejak dini, tetapi juga menanamkan rasa syukur dan empati kepada anak-anak. Melalui program ini, anak-anak belajar bahwa berbagi dengan sesama adalah bagian dari ajaran agama yang mulia. Program "Jumat Berkah" ini sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang mengajarkan pentingnya bersedekah dan tolong-menolong, sekaligus menjadi sarana praktis untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari anak-anak.

Program unggulan lainnya adalah sanggar tari, yang berperan dalam melestarikan budaya dan mengembangkan kreativitas seni anak-anak. Melalui sanggar tari, anak-anak dikenalkan dengan tarian-tarian tradisional Aceh, seperti tari Saman,

tari Seudati, atau tari Ratoh Jaroe, yang disesuaikan dengan kemampuan anak usia dini. Kegiatan menari tidak hanya mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi gerak, tetapi juga menanamkan rasa cinta terhadap budaya lokal dan identitas keacehan. Anak-anak juga diajak untuk mengekspresikan diri melalui gerak dan irama, yang merupakan bagian penting dari perkembangan kreativitas mereka. Sanggar tari ini juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk tampil di berbagai acara, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, yang membantu membangun rasa percaya diri dan kebanggaan akan budaya sendiri.

Selain kedua program unggulan tersebut, KB Bina Phon juga memiliki program pembiasaan religius yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari. Kegiatan ini mencakup doa bersama sebelum dan sesudah kegiatan, pengenalan huruf hijaiyah, hafalan surat-surat pendek, serta pembiasaan sikap-sikap Islami seperti salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Pembiasaan ini bertujuan untuk menanamkan fondasi keimanan dan akhlak mulia sejak usia dini, yang akan menjadi bekal bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan di masa depan.

Implementasi Kurikulum Merdeka

Sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, KB Bina Phon mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Implementasi kurikulum ini didasarkan pada prinsip bahwa pembelajaran pada anak usia dini harus dilakukan melalui kegiatan bermain, berinteraksi, dan mengeksplorasi lingkungan sekitar. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang menjadi roh dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang PAUD.

Pembelajaran Berbasis Pengalaman (Experiential Learning)

Kurikulum Merdeka pada jenjang PAUD menekankan pengembangan potensi anak secara holistik melalui kegiatan bermain yang bermakna. Di KB Bina Phon, prinsip ini diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan yang memungkinkan

anak untuk belajar melalui pengalaman langsung. Anak-anak diajak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sehingga mereka dapat memahami dunia di sekitar mereka secara lebih mendalam.

Kegiatan seperti bermain peran, berkebun, memasak sederhana, dan membuat kerajinan tangan menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari. Melalui kegiatan-kegiatan ini, anak-anak tidak hanya mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif, tetapi juga belajar tentang konsep-konsep dasar seperti warna, bentuk, angka, dan huruf secara alami dan menyenangkan. Pendekatan ini sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini yang lebih mudah memahami konsep melalui pengalaman konkret daripada penjelasan abstrak.

Penguatan Karakter dan Nilai-Nilai Keislaman

Kurikulum Merdeka di KB Bina Phon menekankan penguatan karakter sebagai salah satu tujuan utama. Nilai-nilai keislaman diintegrasikan secara sistematis dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Pembiasaan religius seperti doa bersama sebelum dan sesudah kegiatan, pengenalan huruf hijaiyah, hafalan surat-surat pendek, serta pembiasaan sikap-sikap Islami menjadi rutinitas harian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di lembaga ini.

Program "Jumat Berkah" menjadi salah satu contoh konkret bagaimana nilai-nilai keislaman diinternalisasikan melalui kegiatan yang bermakna. Anak-anak tidak hanya diajarkan tentang pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama, tetapi juga mengalami langsung praktik berbagi tersebut. Pengalaman langsung ini lebih efektif dalam menanamkan nilai daripada sekadar penjelasan teoretis.

Keteladanan pendidik juga menjadi faktor penting dalam penanaman nilai-nilai keislaman. Para pendidik di KB Bina Phon secara konsisten menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan keramahan. Anak-anak usia dini sangat peka terhadap keteladanan dan cenderung meniru apa yang mereka lihat

dari orang-orang dewasa di sekitar mereka. Oleh karena itu, keteladanan pendidik menjadi sarana yang sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai keislaman.

Pengembangan Kreativitas dan Kesenian

Kurikulum Merdeka di KB Bina Phon juga menekankan pengembangan kreativitas dan kesenian sebagai bagian penting dari perkembangan anak. Sanggar tari yang menjadi program unggulan lembaga ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri melalui gerak dan irama. Kegiatan menari tidak hanya mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi, tetapi juga melatih kepekaan estetika, kreativitas, dan rasa percaya diri.

Selain tari, kegiatan seni lainnya seperti menggambar, mewarnai, membuat kolase, dan bermain musik juga menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka melalui berbagai media.

Pembelajaran Tematik Integratif

Kurikulum Merdeka pada jenjang PAUD menggunakan pendekatan tematik integratif, di mana berbagai aspek perkembangan (nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan seni) dikembangkan melalui tema-tema yang dekat dengan kehidupan anak. Di KB Bina Phon, tema-tema yang diangkat disesuaikan dengan konteks lokal, seperti tema "keluarga", "lingkunganku", "binatang", "tanaman", "pekerjaan", dan "budaya Aceh".

Setiap tema dikembangkan menjadi berbagai kegiatan yang menarik dan bermakna bagi anak. Misalnya, pada tema "budaya Aceh", anak-anak diajak untuk mengenal pakaian adat Aceh, tarian tradisional, makanan khas Aceh, dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Pendekatan ini membantu anak untuk mengenal dan mencintai budayanya sendiri sejak usia dini.

Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat

Implementasi Kurikulum Merdeka di KB Bina Phon juga melibatkan peran aktif orang tua dan masyarakat. Orang tua dilibatkan dalam berbagai kegiatan, seperti pertemuan rutin, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, serta kegiatan "Jumat Berkah" yang melibatkan partisipasi orang tua dalam menyiapkan makanan atau barang yang akan dibagikan. Keterlibatan orang tua ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah juga mendapatkan penguatan di lingkungan keluarga.

Kolaborasi dengan masyarakat juga dilakukan, misalnya dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, atau seniman lokal untuk berinteraksi dengan anak-anak. Hal ini memperkaya pengalaman belajar anak dan memperkuat ikatan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitarnya.

Sebagai lembaga PAUD swasta di wilayah pedesaan, KB Bina Phon dapat menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan anak usia dini dikelola dengan memanfaatkan sumber daya lokal, mengintegrasikan nilai-nilai sosial-keagamaan, dan berupaya memenuhi standar layanan pendidikan meski dengan keterbatasan infrastruktur. Keberadaannya juga relevan untuk diteliti dalam konteks implementasi kurikulum berbasis karakter dan kearifan lokal di Aceh, khususnya pada jenjang pendidikan paling dasar. Komitmen lembaga ini dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini, meskipun dengan keterbatasan, menjadi inspirasi bagi lembaga-lembaga PAUD lainnya di Aceh maupun di luar Aceh. Keberhasilan KB Bina Phon dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, pengembangan karakter, dan kreativitas dalam pembelajaran menjadi bukti bahwa pendidikan yang berkualitas tidak selalu membutuhkan fasilitas yang mewah, tetapi lebih ditentukan oleh komitmen, kreativitas, dan dedikasi para pendidik serta dukungan dari orang tua dan masyarakat.

3.2.5 SD Negeri Lhok Banie

Sejarah dan Lokasi

SD Negeri Lhok Banie merupakan sekolah dasar berstatus negeri yang berdiri sejak tahun 1989, menjadikannya salah satu lembaga pendidikan dasar yang telah lama melayani masyarakat di wilayah perbatasan Kota Langsa, Aceh. Sekolah ini didirikan berdasarkan SK Pendirian No. 346/1989 dan telah memiliki izin operasional sejak tahun 1990. Dengan usia yang telah mencapai lebih dari tiga dekade, SD Negeri Lhok Banie telah menjadi saksi perjalanan panjang pendidikan dasar di wilayah ini, termasuk berbagai dinamika perubahan kebijakan pendidikan nasional dari masa ke masa.

Secara administratif, sekolah ini berlokasi di Desa Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh, dengan alamat lengkap di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim. Kota Langsa merupakan salah satu kota di Aceh yang terletak di pesisir timur, berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Langsa sebagai kota transit yang penting, namun juga memiliki karakteristik sebagai wilayah perbatasan yang menghadapi tantangan tersendiri dalam pengembangan infrastruktur, termasuk infrastruktur pendidikan.

SD Negeri Lhok Banie termasuk dalam kategori wilayah perbatasan, sebuah klasifikasi yang memiliki implikasi penting terhadap kebijakan pendidikan. Sekolah di wilayah perbatasan seringkali menghadapi tantangan khusus, seperti akses yang terbatas, keterbatasan sumber daya, dan keragaman latar belakang sosial-ekonomi masyarakat. Namun, status ini juga membawa konsekuensi adanya perhatian khusus dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa pendidikan di wilayah perbatasan tidak tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah perbatasan.

Secara geografis, Kecamatan Langsa Barat tempat SD Negeri Lhok Banie berada memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, dengan latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang bervariasi. Sebagai wilayah pesisir, banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, petambak, dan pedagang. Tingkat religiusitas masyarakat di wilayah ini cukup tinggi, dengan tradisi keislaman yang kuat yang mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi ini menjadi konteks penting bagi upaya internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah.

Jumlah Siswa dan Tenaga Pendidik

Meskipun data rombongan belajar (rombel), jumlah peserta didik, dan jumlah guru tidak tercantum secara eksplisit dalam profil yang tersedia, sebagai sekolah dasar negeri di wilayah perbatasan, SD Negeri Lhok Banie memiliki karakteristik yang dapat diidentifikasi. Berdasarkan akreditasi B yang telah diperoleh sekolah, dapat dipahami bahwa sekolah ini telah memenuhi standar nasional pendidikan, termasuk dalam aspek rasio guru terhadap siswa yang memadai, kelengkapan sarana prasarana, serta kualitas proses pembelajaran yang baik.

Sekolah dasar negeri di wilayah perbatasan umumnya memiliki jumlah peserta didik yang bervariasi, tergantung pada tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Dengan lokasinya di Kecamatan Langsa Barat yang merupakan wilayah dengan tingkat hunian yang cukup padat, dapat diperkirakan bahwa SD Negeri Lhok Banie memiliki jumlah peserta didik yang signifikan, dengan komposisi yang cukup seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan. Keberagaman latar belakang sosial-ekonomi dan religius peserta didik menjadi tantangan sekaligus peluang dalam upaya internalisasi nilai-nilai Islami di sekolah.

Dari segi kepemimpinan, sekolah ini dikepalai oleh Eka Mawar Sari, S.Pd., seorang guru bersertifikasi dengan NUPTK 9359761662300013 dan golongan IV/B. Status kepangkatan IV/B menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki pengalaman dan

jenjang karir yang cukup matang dalam dunia pendidikan. Latar belakang pendidikan S1 dan sertifikasi profesi yang dimilikinya menunjukkan kompetensi profesional yang memadai untuk memimpin lembaga pendidikan. Sebagai pemimpin pembelajaran (*instructional leader*), kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan transformasi pendidikan di sekolah, termasuk dalam implementasi Kurikulum Merdeka dan internalisasi nilai-nilai Islami.

Fasilitas dan Sarana Prasarana

SD Negeri Lhok Banie memiliki sejumlah fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dari sisi sarana fisik, sekolah ini dilengkapi dengan ruang kelas yang memadai untuk menampung seluruh peserta didik. Meskipun tidak disebutkan secara rinci jumlah ruang kelas, sebagai sekolah dengan akreditasi B, dapat dipastikan bahwa ketersediaan ruang kelas telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ruang kelas ditata sedemikian rupa untuk mendukung pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan.

Sekolah ini juga memiliki akses listrik dari PLN dengan daya 1300 watt. Ketersediaan listrik yang memadai menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama di era digital seperti saat ini. Dengan daya yang cukup, sekolah dapat mengoperasikan berbagai perangkat teknologi yang mendukung pembelajaran, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik dan tenaga pendidik.

Dalam aspek teknologi, SD Negeri Lhok Banie telah dilengkapi dengan akses internet melalui Speedy Home/Telkomsel Flash. Keberadaan akses internet ini menjadi modal penting dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, terutama dalam pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Melalui akses internet, guru dapat mengakses berbagai referensi perangkat ajar, mengikuti pelatihan daring, dan berbagi praktik baik dengan guru lain di seluruh Indonesia. Akses internet juga memungkinkan peserta

didik untuk mengakses sumber belajar digital yang memperkaya wawasan dan pengalaman belajar mereka.

Selain itu, sekolah ini juga memiliki rekening BOS aktif di Bank Aceh Cabang Langsa. Keberadaan rekening BOS ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Pengelolaan dana BOS yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran operasional sekolah, termasuk dalam pengadaan sarana prasarana, pengembangan kompetensi guru, dan penyelenggaraan berbagai program pembelajaran.

Program Unggulan

Sebagai sekolah di wilayah perbatasan dengan akreditasi B, SD Negeri Lhok Banie memiliki sejumlah program unggulan yang menjadi ciri khas sekolah ini. Program-program ini dikembangkan berdasarkan potensi lokal, kebutuhan peserta didik, dan visi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah perbatasan.

Dalam bidang akademik, sekolah ini fokus pada penguatan literasi dan numerasi sebagai kompetensi dasar yang diperlukan peserta didik untuk menguasai berbagai bidang ilmu. Program ini sejalan dengan penekanan Kurikulum Merdeka pada penguatan literasi dan numerasi sejak dini. Guru-guru secara sistematis mengintegrasikan kegiatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran sehari-hari, baik melalui pembelajaran di kelas maupun kegiatan kokurikuler. Program literasi mencakup kegiatan membaca, menulis, dan berdiskusi yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan berpikir kritis siswa. Program numerasi mencakup kegiatan berhitung, pemecahan masalah matematika, dan penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bidang karakter, sekolah ini mengembangkan program pembinaan akhlak dan budi pekerti yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Sebagai sekolah di Aceh yang menerapkan syariat Islam, nilai-nilai keislaman menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Program ini

mencakup pembiasaan religius seperti doa bersama sebelum memulai pelajaran, tadarus Al-Qur'an, shalat dhuha dan shalat dzuhur berjamaah, serta peringatan hari besar Islam. Program ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga dilengkapi dengan pembinaan pemahaman keagamaan dan refleksi nilai, sehingga peserta didik dapat menghayati makna ibadah dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bidang keterampilan hidup, sekolah ini mengembangkan program yang berorientasi pada pengembangan kemandirian dan keterampilan praktis peserta didik. Program ini mencakup kegiatan seperti berkebun, memasak, membuat kerajinan tangan, dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Program ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menanamkan nilai-nilai kerja keras, kreativitas, dan kemandirian.

Implementasi Kurikulum Merdeka

SD Negeri Lhok Banie telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Implementasi kurikulum ini didasarkan pada kesadaran akan kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada peserta didik, sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sebagai sekolah di wilayah perbatasan, implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri Lhok Banie menghadapi tantangan sekaligus peluang yang khas.

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning)

Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif melalui proyek kolaboratif. Di SD Negeri Lhok Banie, pendekatan ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan proyek integratif yang mengaitkan materi pembelajaran dengan isu-isu lokal, lingkungan, maupun nilai-nilai karakter. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi wadah utama bagi pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Tema-tema yang diangkat dalam P5 disesuaikan dengan konteks lokal wilayah perbatasan, seperti

kearifan lokal, kewirausahaan, dan gaya hidup berkelanjutan, yang kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman.

Melalui proyek-proyek ini, peserta didik tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga mengalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam proses pembelajaran. Mereka diajak untuk bekerja sama dalam tim, memecahkan masalah nyata, dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *learning by doing* yang menjadi inti dari pendidikan progresif.

Fleksibilitas dan Otonomi Guru

Kurikulum Merdeka memberikan otonomi yang lebih luas kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Di SD Negeri Lhok Banie, guru-guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan materi, metode, dan asesmen sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks lokal. Hal ini mendorong kreativitas dan inovasi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam pembelajaran.

Guru-guru secara aktif mengembangkan modul ajar yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga kaya akan muatan nilai-nilai keislaman. Mereka memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia, baik cetak maupun digital, untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Pendekatan pembelajaran yang variatif, seperti diskusi, inkuiri, dan pembelajaran kolaboratif, menjadi pilihan untuk meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik.

Penguatan Karakter dan Profil Pelajar Pancasila

Kurikulum Merdeka di SD Negeri Lhok Banie tidak hanya berfokus pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Dimensi "beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia" menjadi fondasi yang diperkuat melalui integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran.

Pembiasaan religius seperti doa bersama, tadarus Al-Qur'an, dan shalat berjamaah menjadi rutinitas harian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sekolah. Keteladanan guru dalam sikap dan perilaku

Islami menjadi faktor utama dalam menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Guru-guru secara konsisten menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sabar, dan rendah hati dalam keseharian mereka. Mereka juga menjadi teladan dalam pelaksanaan ibadah, seperti shalat tepat waktu, berpakaian sopan sesuai syariat, dan berinteraksi dengan sesama secara santun dan penuh hormat.

Integrasi nilai-nilai keislaman juga dilakukan dalam materi pembelajaran lintas mata pelajaran. Dalam pembelajaran IPA, guru mengaitkan fenomena alam dengan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Qur'an, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep ilmiah, tetapi juga menyadari kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta. Dalam pembelajaran IPS, guru mengaitkan materi tentang keadilan sosial, sistem ekonomi, dan interaksi sosial dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, guru menggunakan teks-teks bacaan yang mengandung nilai-nilai moral Islami atau mengangkat kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh Muslim.

Pembelajaran Berdiferensiasi

Di SD Negeri Lhok Banie, pembelajaran berdiferensiasi diterapkan untuk mengakomodasi keberagaman kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar siswa. Guru-guru berusaha untuk mengenali karakteristik setiap siswa, kemudian menyesuaikan strategi, metode, dan media pembelajaran agar dapat menjangkau seluruh siswa dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga diterapkan dalam konteks internalisasi nilai Islami, di mana pendekatan disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kesiapan spiritual masing-masing siswa.

Pembelajaran berdiferensiasi juga mencakup penyesuaian kecepatan belajar, di mana siswa yang memiliki kemampuan lebih cepat diberikan tantangan yang lebih tinggi, sementara siswa yang mengalami kesulitan diberikan bimbingan tambahan. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran, sekaligus memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing.

Asesmen Autentik dan Berkelanjutan

Sistem penilaian di SD Negeri Lhok Banie tidak hanya menekankan hasil akhir, tetapi juga proses perkembangan peserta didik secara berkelanjutan. Asesmen formatif menjadi bagian integral dari pembelajaran, di mana guru melakukan pemantauan terhadap perkembangan siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan.

Penilaian autentik yang mencakup penilaian proyek, portofolio, kinerja, dan observasi menjadi pilihan utama. Penilaian afektif (sikap dan karakter) dan psikomotorik juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari asesmen, selaras dengan kompetensi Islami yang ingin dikembangkan. Guru melakukan observasi terhadap perilaku sehari-hari siswa, mencatat perkembangan karakter, dan memberikan pembinaan yang berkelanjutan. Penilaian diri dan penilaian antar teman juga mulai dikembangkan untuk melatih kesadaran siswa akan pentingnya introspeksi dan tanggung jawab moral.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran

Dengan tersedianya akses internet melalui Speedy Home/Telkomsel Flash, SD Negeri Lhok Banie memanfaatkan teknologi untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Guru-guru menggunakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk mengakses berbagai referensi perangkat ajar, modul pelatihan, dan sumber belajar lainnya. Platform ini juga menjadi wadah bagi guru untuk berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan guru lain di seluruh Indonesia.

Pemanfaatan teknologi juga dilakukan dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan media interaktif seperti video pembelajaran, presentasi digital, dan aplikasi edukatif untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Siswa juga didorong untuk menggunakan teknologi sebagai sumber belajar, dengan tetap memperhatikan etika dan keamanan digital.

Dengan status akreditasi B dan fasilitas dasar yang memadai, SD Negeri Lhok Banie berpotensi menjadi contoh bagaimana pendidikan dasar dikelola di wilayah perbatasan Aceh dengan tetap berorientasi pada peningkatan mutu dan akses pembelajaran yang merata. Keberadaannya sebagai sekolah negeri di wilayah perbatasan menjadikannya konteks yang relevan untuk meneliti tantangan dan strategi implementasi kebijakan pendidikan nasional, termasuk Kurikulum Merdeka, di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial yang spesifik. Komitmen sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam pembelajaran, meskipun dengan keterbatasan yang ada, menjadi bukti bahwa pendidikan berkualitas dapat diwujudkan di mana pun, asalkan didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh warga sekolah, kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Sekolah ini juga menjadi contoh bahwa Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, tanpa kehilangan esensi kebijakan nasional.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dengan variabel penelitian. Instrumen dalam penelitian ini dirancang secara sistematis agar mampu menghasilkan data yang valid, reliabel, serta sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner disusun menggunakan skala Likert 1–5, dengan kategori jawaban:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Instrumen ini terdiri dari 30 butir pertanyaan, yang dibagi menjadi dua kelompok variabel penelitian:

Variabel X: Internalisasi Nilai Islami (15 butir)

Indikator yang digunakan meliputi:

- 1) Keteladanan guru : sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, teladan dalam ibadah.
- 2) Integrasi nilai Islami dalam pembelajaran : penyisipan ayat Al-Qur'an/hadis, penerapan nilai Islami pada materi.
- 3) Disiplin Islami : penerapan tata tertib Islami, penegakan aturan berbasis nilai religius.
- 4) Pembiasaan religius : doa bersama, shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, serta pembiasaan sikap saling menghargai.

Variabel Y: Pelaksanaan Kurikulum Merdeka (15 butir)

Indikator yang digunakan meliputi:

- 1) Kesiapan guru : penyusunan modul ajar, kesiapan materi, pemahaman capaian pembelajaran.
- 2) Kreativitas guru : inovasi metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi, penciptaan suasana belajar yang menyenangkan.
- 3) Partisipasi siswa : keaktifan dalam diskusi, keberanian berpendapat, antusiasme belajar.
- 4) Evaluasi berbasis kompetensi : asesmen formatif dan sumatif, penilaian holistik, serta pemberian umpan balik konstruktif.

Kuesioner dipilih karena memungkinkan pengumpulan data secara terstruktur dari responden dalam jumlah cukup besar, serta memudahkan analisis statistik untuk melihat hubungan antarvariabel

³¹⁹.

2. Pedoman Wawancara Semi-Terstruktur

Selain kuesioner, peneliti juga menggunakan wawancara semi-terstruktur sebagai instrumen tambahan untuk menggali data kualitatif. Bentuk wawancara ini dipilih karena memberikan

³¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* ..., hlm. 175.

fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai konteks, sekaligus menjaga fokus penelitian tetap terarah.

Fokus wawancara diarahkan pada:

- 1) Strategi guru dalam menginternalisasikan nilai Islami ke dalam pembelajaran.
- 2) Tantangan dan hambatan yang dihadapi guru maupun kepala sekolah dalam menghubungkan nilai Islami dengan Kurikulum Merdeka.
- 3) Persepsi guru dan kepala sekolah mengenai efektivitas penerapan Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami.

Data yang diperoleh dari wawancara berfungsi memperkuat hasil kuantitatif dari kuesioner, sehingga penelitian memiliki kedalaman analisis yang lebih komprehensif³²⁰.

3. Dokumentasi

Selain dua instrumen utama di atas, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi berupa pengumpulan data sekunder, seperti:

- 1) Dokumen kurikulum sekolah (KOSP/KOS).
- 2) Modul ajar dan RPP yang digunakan guru.
- 3) Laporan kegiatan sekolah penggerak.
- 4) Foto atau arsip kegiatan religius di sekolah.

Instrumen dokumentasi ini digunakan untuk memvalidasi data hasil kuesioner dan wawancara, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah³²¹.

3.4 Hasil Uji Instrumen

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang dimaksud. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari 30 butir pernyataan, yaitu 15 butir untuk variabel X (internalisasi nilai

³²⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks, CA: Sage, 2014), hlm. 115.

³²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 88.

Islami) dan 15 butir untuk variabel Y (pelaksanaan Kurikulum Merdeka).

Dasar pengambilan keputusan ditentukan dengan membandingkan r -hitung dengan r -tabel. Pada penelitian ini jumlah responden adalah $n = 48$, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, sehingga diperoleh nilai r -tabel = 0,284.

Kriteria penentuan validitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika r -hitung $> r$ -tabel (0,284) : butir pernyataan valid.
- 2) Jika r -hitung $\leq r$ -tabel (0,284) : butir pernyataan tidak valid.

Selain itu, validitas dapat diperkuat dengan melihat nilai signifikansi (Sig.). Jika Sig. $< 0,05$, maka butir pernyataan juga dinyatakan valid.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS, diperoleh bahwa seluruh butir pernyataan memiliki nilai r -hitung $> 0,284$ dengan signifikansi $< 0,05$. Bahkan, nilai R total = 0,852, yang jauh lebih besar dibandingkan r -tabel. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat validitas yang sangat tinggi, artinya setiap butir pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur konstruk variabel yang diteliti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini valid secara keseluruhan dan layak digunakan dalam penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh internalisasi nilai Islami terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak.

3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian (kuesioner) dapat memberikan hasil yang konsisten apabila diulang pada kondisi yang sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik Cronbach's Alpha, di mana

suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60³²².

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai reliabilitas sebagai berikut:

- 1) Variabel X (Internalisasi Nilai Islami): Cronbach's Alpha = 0,971
- 2) Variabel Y (Pelaksanaan Kurikulum Merdeka): Cronbach's Alpha = 0,964

Kedua nilai tersebut jauh di atas batas minimum 0,60, bahkan mendekati 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan pada kuesioner memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi. Dengan kata lain, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sangat reliabel dan dapat dipercaya untuk mengukur variabel penelitian.

Nilai 0,971 pada variabel X menegaskan bahwa kuesioner internalisasi nilai Islami mampu menggambarkan kondisi sebenarnya dengan tingkat konsistensi yang hampir sempurna.

Nilai 0,964 pada variabel Y menunjukkan bahwa kuesioner pelaksanaan Kurikulum Merdeka juga memiliki reliabilitas yang sangat tinggi, sehingga hasil pengukuran dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan reliabilitas yang tinggi pada kedua variabel, maka instrumen penelitian layak digunakan untuk analisis lebih lanjut, baik dalam pengujian hipotesis maupun pengolahan data statistik lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu kuesioner, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Pemilihan ketiga teknik ini dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, dan dapat saling melengkapi melalui proses triangulasi metode.

³²² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 77.

3.6 Karakteristik Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 59 orang, terdiri atas guru dan kepala sekolah dari sekolah penggerak di empat daerah penelitian. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik

No	Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	3	6,3
		Perempuan	45	93,8
2	Usia	< 30 tahun	3	6,3
		> 50 tahun	7	54,2
		31 – 40 tahun	26	25
		41 – 50 tahun	12	14,6
3	Pendidikan Terakhir	D3	1	6,3
		DII	1	2,1
		SI	43	2,1
		SMA	3	89,6
4	Lama Mengajar	< 5 tahun	8	16,7
		> 20 tahun	9	29,2
		11 – 20 tahun	17	35,4
		6 – 10 tahun	14	18,8
5	Jabatan	Guru	48	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Jenis Kelamin

Mayoritas responden penelitian ini adalah perempuan sebanyak 45 orang (93,8%), sedangkan responden laki-laki hanya berjumlah 3 orang (6,3%). Hal ini menunjukkan bahwa guru pada sekolah penggerak di lokasi penelitian sebagian besar berjenis kelamin perempuan.

2. Usia

Sebagian besar responden berada pada rentang usia 31–40 tahun sebanyak 26 orang (54,2%). Responden dengan usia 41–50 tahun berjumlah 12 orang (25,0%), kemudian yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 7 orang (14,6%), dan yang berusia di bawah 30 tahun hanya 3 orang (6,3%). Temuan ini menunjukkan bahwa guru di sekolah penggerak didominasi oleh kelompok usia produktif (31–40 tahun), yang umumnya berada pada masa puncak karier sebagai tenaga pendidik.

3. Pendidikan Terakhir

Sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 43 orang (89,6%). Sementara itu, yang berpendidikan SMA berjumlah 3 orang (6,3%), DII 1 orang (2,1%), dan D3 1 orang (2,1%). Data ini mengindikasikan bahwa mayoritas guru telah memenuhi kualifikasi akademik sesuai standar minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

4. Lama Mengajar

Dilihat dari pengalaman mengajar, responden terbanyak adalah yang memiliki masa kerja 11–20 tahun sebanyak 17 orang (35,4%), disusul oleh guru dengan pengalaman 6–10 tahun sebanyak 14 orang (29,2%). Kemudian, guru dengan pengalaman mengajar lebih dari 20 tahun berjumlah 9 orang (18,8%), dan guru dengan pengalaman kurang dari 5 tahun sebanyak 8 orang (16,7%). Data ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki pengalaman mengajar yang cukup lama, sehingga pandangan mereka mengenai implementasi Kurikulum Merdeka dapat dianggap representatif.

5. Jabatan

Seluruh responden dalam penelitian ini berstatus sebagai guru (100%). Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang menekankan pada pengalaman langsung guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak.

Secara keseluruhan, deskripsi karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas guru yang menjadi sampel penelitian adalah perempuan, berusia produktif, berpendidikan sarjana, serta memiliki pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun. Kondisi ini memberikan keyakinan bahwa data yang diperoleh dapat merefleksikan praktik nyata implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak di Provinsi Aceh.

3.6.1 Kuesioner (Angket)

Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data kuantitatif mengenai internalisasi nilai Islami (variabel X) dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka (variabel Y).

- 1) Kuesioner disusun dengan skala Likert 1–5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.
- 2) Pertanyaan dalam kuesioner berjumlah 30 butir, dengan 15 butir untuk variabel X (internalisasi nilai Islami) dan 15 butir untuk variabel Y (pelaksanaan Kurikulum Merdeka).
- 3) Kuesioner ini memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah responden yang cukup besar secara terstruktur, konsisten, serta mudah dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2019).

3.6.2 Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap kepala sekolah dan beberapa guru dari sekolah penggerak. Teknik wawancara ini dipilih karena memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali informasi lebih mendalam, namun tetap dalam kerangka pedoman wawancara yang telah disusun.

Fokus wawancara meliputi:

- 1) Strategi guru dalam menginternalisasikan nilai Islami ke dalam pembelajaran.
- 2) Hambatan dan tantangan dalam mengintegrasikan nilai Islami dengan Kurikulum Merdeka.
- 3) Persepsi guru dan kepala sekolah mengenai efektivitas penerapan Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami.

Data kualitatif dari wawancara ini berfungsi melengkapi data kuantitatif dari kuesioner, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena yang diteliti³²³.

3.6.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen tertulis dan arsip yang relevan dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Dokumen yang dikaji meliputi:

- 1) Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP/KOS).
- 2) Modul ajar dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- 3) Laporan sekolah terkait program Sekolah Penggerak.
- 4) Foto, arsip, atau catatan kegiatan religius yang menunjukkan praktik internalisasi nilai Islami.

Dokumentasi dipilih untuk memvalidasi dan memperkuat data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara, sehingga hasil penelitian lebih reliabel dan objektif³²⁴.

Triangulasi Metode

Kombinasi ketiga teknik ini dilakukan dengan pendekatan triangulasi, yaitu penggunaan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk menguji validitas temuan. Melalui triangulasi, data yang diperoleh dapat dibandingkan dan diverifikasi, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian³²⁵.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif karena tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen (internalisasi nilai Islami) dengan variabel dependen (pelaksanaan Kurikulum Merdeka). Analisis dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

³²³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches ...*, hlm. 120.

³²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hlm. 92.

³²⁵ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: McGraw-Hill, 1978), hlm. 55.

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden serta distribusi jawaban terhadap item-item kuesioner. Hasil analisis deskriptif ditampilkan dalam bentuk:

- 1) Distribusi frekuensi dan persentase jawaban responden.
- 2) Nilai rata-rata (mean) untuk menunjukkan tingkat kecenderungan jawaban.
- 3) Standar deviasi untuk melihat tingkat penyebaran data.

Analisis ini memberikan pemahaman awal mengenai bagaimana responden memandang internalisasi nilai Islami dan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak.

3.7.2 Uji Instrumen Penelitian

Sebelum dilakukan analisis lanjutan, instrumen kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya agar dapat dipastikan layak digunakan.

- 1) Uji Validitas dilakukan dengan teknik korelasi Pearson Product Moment. Suatu item kuesioner dinyatakan valid apabila nilai r -hitung $>$ r -tabel pada taraf signifikansi 5%³²⁶.
- 2) Uji Reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Instrumen dikatakan reliabel apabila nilai $\alpha \geq 0,70$, yang menunjukkan konsistensi internal antarbutir pertanyaan.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum analisis regresi dilakukan, data terlebih dahulu diuji dengan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi syarat ekonometrik, yaitu:

- 1) Uji Normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk untuk memastikan data terdistribusi normal.

³²⁶ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 ...*, hlm. 160

- 2) Uji Multikolinearitas dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Model bebas multikolinearitas jika $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$.
- 3) Uji Heteroskedastisitas dengan metode Glejser atau analisis scatterplot. Model dinyatakan baik jika tidak ditemukan pola heteroskedastisitas.

3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (X: internalisasi nilai Islami) terhadap variabel dependen (Y: pelaksanaan Kurikulum Merdeka). Bentuk persamaan regresi adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

X = Internalisasi Nilai Islami

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = error

3.7.5 Uji Hipotesis

- 1) Uji t (parsial) : untuk menguji pengaruh masing-masing indikator internalisasi nilai Islami terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka secara individual.
- 2) Uji F (simultan) : untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
- 3) Koefisien Determinasi (R^2) : untuk mengetahui besarnya kontribusi internalisasi nilai Islami dalam menjelaskan variasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar pengaruh variabel X terhadap Y.

3.7.6 Perangkat Lunak Analisis

Seluruh analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau AMOS, sehingga hasil analisis lebih akurat, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.7.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2023/2024 dengan beberapa tahapan kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis. Surat izin penelitian dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tanggal 27 Agustus 2025, sehingga pelaksanaan penelitian resmi dimulai setelah izin tersebut diterbitkan. Proses penelitian berlangsung hingga pertengahan Oktober 2025, sementara ujian disertasi dijadwalkan pada akhir bulan Oktober 2025 :

Tabel 3.4 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Persiapan penelitian dan studi literatur	Januari – Februari 2024	Meliputi penelusuran referensi, penyusunan kerangka teori, dan proposal awal.
2	Penyusunan instrumen penelitian	Februari 2024	Penyusunan kuesioner, pedoman wawancara, dan instrumen dokumentasi.
3	Uji coba instrumen	Maret 2024	Uji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum digunakan di lapangan.
4	Pengumpulan data lapangan	Maret – April 2024	Penyebaran kuesioner, wawancara, dan dokumentasi di sekolah penggerak.

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
5	Pengolahan dan analisis data	April – Mei 2024	Meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda.
6	Penyusunan laporan penelitian	Mei – Juni 2024	Penyusunan draft hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis.
7	Seminar Proposal	Agustus 2024	Presentasi dan ujian proposal di hadapan tim penguji.
8	Revisi proposal dan kelengkapan administrasi	September – Desember 2024	Penyempurnaan dokumen sesuai masukan tim penguji seminar proposal.
9	Pengurusan surat izin penelitian	Januari – Februari 2025	Pengurusan administrasi untuk perpanjangan izin penelitian jika diperlukan.
10	Pengumpulan data lanjutan (verifikasi)	Maret – Juni 2025	Pengambilan data tambahan/konfirmasi di lapangan untuk melengkapi kekurangan data.
11	Analisis data lanjutan dan penulisan disertasi	Juli – Desember 2025	Penyempurnaan analisis dan penulisan bab-bab disertasi secara keseluruhan.
12	Seminar Hasil Penelitian	Februari 2026	Presentasi hasil penelitian di hadapan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			tim penguji dan akademisi.
13	Revisi laporan pasca seminar hasil	Februari – Maret 2026	Perbaikan naskah disertasi berdasarkan masukan tim penguji seminar hasil.
14	Ujian Sidang Tertutup	Maret 2026	Ujian disertasi tahap pertama di hadapan tim penguji internal.
15	Revisi naskah pasca sidang tertutup	Maret – April 2026	Penyempurnaan naskah disertasi berdasarkan masukan tim penguji.
16	Ujian Sidang Terbuka / Promosi Doktor	April 2026	Ujian disertasi tahap akhir dan wisuda doktor.

Jadwal penelitian ini dirancang secara sistematis untuk memastikan setiap tahapan dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Seminar proposal dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 setelah peneliti menyelesaikan persiapan penelitian, penyusunan instrumen, dan pengumpulan data awal. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan rancangan penelitian yang telah matang beserta instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, sehingga masukan dari tim penguji dapat langsung diimplementasikan untuk penyempurnaan penelitian.

Setelah seminar proposal, peneliti melakukan revisi dan penyempurnaan rancangan penelitian, dilanjutkan dengan pengurusan surat izin penelitian resmi dan pengumpulan data lanjutan untuk verifikasi dan konfirmasi temuan. Proses analisis data dan penulisan disertasi dilakukan secara intensif pada periode Juli hingga Desember 2025, sehingga pada bulan Februari 2026 peneliti siap melaksanakan seminar hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Penggerak Angkatan 1 yang berada di empat daerah Provinsi Aceh, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Bireuen. Sekolah Penggerak dipilih karena menjadi satuan pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka secara lebih awal dibanding sekolah reguler.

Sekolah-sekolah tersebut memiliki karakteristik:

- 1) Jumlah guru dan kepala sekolah relatif bervariasi, dengan rata-rata 20–35 guru per sekolah.
- 2) Program unggulan berfokus pada pembelajaran berbasis proyek, penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta pembiasaan religius siswa.
- 3) Implementasi nilai Islami diwujudkan melalui kegiatan rutin seperti shalat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, pembelajaran berbasis akhlak Islami, dan tata tertib sekolah yang menekankan kedisiplinan Islami.

Dengan demikian, sekolah penggerak di Aceh tidak hanya berperan dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka, tetapi juga menjadi pelopor integrasi nilai Islami dalam pembelajaran.

4.2 Temuan Analisis Deskriptif

4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel X: Internalisasi Nilai Islami

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat internalisasi nilai Islami di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh berada pada kategori sangat baik, dengan nilai rata-rata 65,67 dari skor maksimal 75. Mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori tinggi, bahkan banyak yang menilai pada level maksimal. Meskipun demikian, terdapat variasi sedang dalam persepsi

responden (standar deviasi 9,44) yang mengindikasikan adanya perbedaan pandangan antarindividu. Rentang skor yang cukup lebar (30–75) menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar guru menilai internalisasi nilai Islami sudah berjalan baik, masih ada sebagian kecil guru yang menilai rendah. Secara keseluruhan, data terdistribusi condong ke kiri dengan konsentrasi di sekitar nilai rata-rata, yang menegaskan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian tinggi. Dengan demikian, internalisasi nilai Islami di Sekolah Penggerak Aceh dinilai sudah diterapkan dengan baik, konsisten, dan cukup merata, meskipun masih terdapat sedikit variasi dalam persepsi guru.

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Y: Penerapan Kurikulum Merdeka

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh berada pada kategori baik, dengan nilai rata-rata 65,44 dari skor maksimal 75 yang sejalan dengan capaian variabel internalisasi nilai Islami. Mayoritas jawaban responden berada di sekitar nilai rata-rata, dengan sebagian responden cenderung memberikan skor sedang. Variasi jawaban responden (standar deviasi 8,05) lebih kecil dibandingkan variabel X, yang mengindikasikan bahwa persepsi guru mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka lebih homogen. Rentang skor dari 30 hingga 75 menunjukkan adanya keragaman tingkat penerapan dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Secara keseluruhan, data terdistribusi condong ke kiri dengan konsentrasi yang lebih tajam di sekitar nilai rata-rata, yang berarti sebagian besar responden memberikan skor yang relatif tinggi terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Aceh dinilai cukup efektif dan relatif konsisten di antara para guru.

4.2.3 Perbandingan Variabel X dan Y

Kedua variabel menunjukkan kecenderungan yang sejalan. Rata-rata internalisasi nilai Islami (65,67) dan pelaksanaan

Kurikulum Merdeka (65,44) hampir sama, mengindikasikan adanya keseimbangan. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka lebih seragam di kalangan guru (SD 8,05) dibandingkan internalisasi nilai Islami (SD 9,44). Skewness negatif pada kedua variabel menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian tinggi. Dengan demikian, internalisasi nilai Islami berkontribusi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Diskriptif

Variabel X (Internalisasi Nilai Islami)	Nilai	Variabel Y (Penerapan Kurikulum Merdeka)	Nilai
Mean	65,67	Mean	65,44
Standard Error	1,36	Standard Error	1,16
Median	67,50	Median	65,00
Mode	75,00	Mode	60,00
Standard Deviation	9,44	Standard Deviation	8,05
Sample Variance	89,12	Sample Variance	64,76
Kurtosis	3,49	Kurtosis	6,53
Skewness	- 1,60	Skewness	- 1,66
Range	45,00	Range	45,00
Minimum	30,00	Minimum	30,00
Maximum	75,00	Maximum	75,00
Sum	3.152,00	Sum	3.141,00
Count	48,00	Count	48,00

4.3 Hasil Analisis Regresi

4.3.1 Model Summary

Nilai $R = 0,832$ menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara internalisasi nilai Islami dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Nilai $R^2 = 0,692$ berarti 69,2% variasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat dijelaskan oleh internalisasi nilai Islami, sedangkan sisanya 30,8% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini.

Nilai Adjusted $R^2 = 0,686$ memperkuat bahwa model yang digunakan sudah cukup baik dan dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas.

Sementara itu, Std. Error of the Estimate = 4,512 menunjukkan rata-rata tingkat kesalahan prediksi model regresi relatif kecil.

4.3.2 Uji F (Simultan)

Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung = 103,510 dengan $\text{sig.} = 0,000 (< 0,05)$. Hal ini membuktikan bahwa model regresi yang dibangun signifikan secara simultan, sehingga variabel internalisasi nilai Islami secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

4.3.3 Uji t (Parsial)

Dari tabel Coefficients, diperoleh nilai t hitung = 10,174 dengan $\text{sig.} = 0,000 (< 0,05)$. Dengan demikian, variabel internalisasi nilai Islami secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Koefisien regresi untuk variabel X sebesar 0,709 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 poin internalisasi nilai Islami akan meningkatkan skor pelaksanaan Kurikulum Merdeka sebesar 0,709 poin.

Selain itu, nilai konstanta sebesar 18,860 menunjukkan bahwa ketika internalisasi nilai Islami bernilai nol, maka pelaksanaan Kurikulum Merdeka tetap berada pada nilai dasar sebesar 18,860.

4.3.4 Persamaan Regresi

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 18,860 + 0,709X$$

Artinya, pelaksanaan Kurikulum Merdeka (Y) dipengaruhi secara positif oleh internalisasi nilai Islami (X). Semakin tinggi internalisasi nilai Islami di sekolah penggerak, maka semakin tinggi pula kualitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi Berganda
Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Variabel X (Internalisasi Nilai Islami) ^b		Enter

- a. Dependent Variable: Variabel Y
(Pelaksanaan Kurikulum Merdeka)
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,832 ^a	,692	,686	4,512

- a. Predictors: (Constant), Variabel X (Internalisasi Nilai Islami)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2107,315	1	2107,315	103,510	,000 ^b
	Residual	936,497	46	20,359		

Total	3043,813	47			
-------	----------	----	--	--	--

a. Dependent Variable: Variabel Y (Pelaksanaan Kurikulum Merdeka)

b. Predictors: (Constant), Variabel X (Internalisasi Nilai Islami)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,860	4,624		4,079	,000
	Variabel X (Internalisasi Nilai Islami)	,709	,070	,832	10,174	,000

a. Dependent Variable: Variabel Y (Pelaksanaan Kurikulum Merdeka)

4.4 Data Kualitatif Hasil Wawancara

4.4.1 Strategi Internalisasi Nilai Islami

Untuk memperkuat temuan kuantitatif, dilakukan wawancara mendalam dengan para guru dan kepala sekolah di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh. Data kualitatif yang diperoleh dikelompokkan ke dalam empat tema utama yang mencerminkan fokus penelitian, yaitu strategi internalisasi nilai Islami, nilai-nilai Islami yang diterapkan, tantangan dan hambatan implementasi, serta efektivitas Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami. Setiap tema disajikan dengan kutipan wawancara sebagai ilustrasi.

Para guru dan kepala sekolah di Sekolah Penggerak Aceh mengungkapkan berbagai strategi yang digunakan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Strategi-strategi tersebut tidak diterapkan secara parsial atau terpisah-pisah, melainkan merupakan satu kesatuan pendekatan holistik yang saling melengkapi dan menguatkan, mencerminkan pemahaman yang mendalam bahwa

internalisasi nilai membutuhkan sinergi berbagai metode yang berkelanjutan.

4.6.1.1 Pembiasaan Religius

Strategi pertama dan paling fundamental yang diterapkan di hampir seluruh sekolah adalah pembiasaan religius dalam aktivitas harian. Para responden menekankan bahwa internalisasi nilai-nilai Islami tidak dapat dicapai secara instan melalui pembelajaran teoretis semata, melainkan membutuhkan proses pembiasaan yang berkelanjutan dan konsisten. Oleh karena itu, sekolah-sekolah secara rutin melaksanakan kegiatan seperti doa bersama sebelum memulai pelajaran, membaca surat-surat pendek Al-Qur'an atau tadarus pagi, pelaksanaan shalat dhuha dan shalat dzuhur berjamaah, serta kultum singkat yang disampaikan oleh guru atau siswa secara bergiliran.

Seorang guru menyatakan bahwa pembiasaan ini bukan sekadar ritual, tetapi merupakan upaya menanamkan nilai dalam jiwa anak-anak secara alami melalui pengulangan yang konsisten. Kepala sekolah lain menambahkan bahwa pembiasaan yang dilakukan setiap hari ini telah membuat anak-anak terbiasa, bahkan ketika tidak ada yang memimpin doa, mereka sendiri yang mengingatkan.

4.6.1.2 Keteladanan Guru

Strategi kedua yang dipandang paling efektif oleh sebagian besar responden adalah keteladanan guru dalam sikap, perilaku, dan ibadah. Para guru dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa strategi paling ampuh dalam menanamkan nilai-nilai Islami bukanlah melalui ceramah panjang lebar, melainkan melalui contoh nyata yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memahami bahwa peserta didik, terutama pada usia sekolah, cenderung meniru apa yang mereka lihat dari figur yang mereka hormati, termasuk guru.

Oleh karena itu, para guru berusaha menjadi teladan dalam kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kesabaran, kerendahan hati, serta pelaksanaan ibadah seperti shalat tepat waktu, berpakaian sopan, bertutur kata santun, dan berinteraksi dengan penuh hormat.

Seorang guru mengungkapkan bahwa mereka sadar anak-anak lebih banyak meniru dari apa yang mereka lihat, sehingga mereka berusaha datang lebih awal, berpakaian rapi, dan selalu shalat tepat waktu. Kepala sekolah menegaskan bahwa guru adalah *role model*, sehingga sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab harus ditunjukkan setiap hari.

4.6.1.3 Integrasi Nilai Islami dalam Pembelajaran Lintas Mata Pelajaran

Strategi ketiga yang secara kreatif diterapkan adalah integrasi nilai-nilai Islami dalam materi pembelajaran lintas mata pelajaran. Para guru tidak lagi membatasi pengajaran nilai Islami hanya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, tetapi secara aktif mengaitkannya dengan mata pelajaran umum lainnya.

Dalam pembelajaran IPA, misalnya, guru mengaitkan fenomena alam seperti siklus air dengan ayat-ayat kauniyah tentang hujan yang diturunkan Allah, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep ilmiah, tetapi juga menyadari kebesaran Allah sebagai pencipta alam. Dalam pembelajaran IPS, guru mengaitkan materi tentang perdagangan dengan nilai kejujuran dan larangan curang dalam Islam, sehingga siswa memahami bahwa nilai agama bersifat universal. Strategi integratif ini bertujuan menanamkan pemahaman bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, dan tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum.

4.6.1.4 Penegakan Disiplin Islami

Strategi keempat yang menjadi perhatian serius adalah penegakan disiplin Islami melalui tata tertib sekolah dan pembiasaan akhlak mulia. Tata tertib sekolah tidak hanya mengatur hal-hal administratif dan akademik, tetapi juga secara eksplisit memuat nilai-nilai keislaman seperti kewajiban berpakaian sopan dan menutup aurat, kewajiban bersikap jujur, kewajiban menghormati guru, larangan berkata kasar, serta kewajiban menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman.

Penegakan disiplin dilakukan dengan pendekatan yang mendidik dan humanis, bukan dengan hukuman fisik atau verbal kasar. Seorang guru menyampaikan bahwa penegakan aturan dilakukan dengan cara menasehati, bukan menghukum. Kepala sekolah menambahkan bahwa sekolah memiliki sistem pencatatan kedisiplinan ibadah siswa yang menjadi bahan refleksi dan pembinaan, bukan untuk menghukum.

4.6.1.5 Penyisipan Ayat Al-Qur'an dan Hadis

Strategi kelima yang secara kreatif digunakan adalah penyisipan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan dalam proses pembelajaran. Guru secara rutin menyisipkan ayat atau hadis yang memiliki keterkaitan dengan materi yang diajarkan, tidak hanya untuk memberikan dimensi spiritual, tetapi juga untuk menguatkan pemahaman bahwa setiap ilmu memiliki landasan nilai yang kuat dalam ajaran Islam.

Seorang guru mengungkapkan bahwa setiap ada kesempatan, ia menyisipkan ayat atau hadis yang sesuai dengan materi, misalnya saat mengajarkan kejujuran, ia membacakan QS. Al-Maidah ayat 8 tentang perintah berlaku adil dan jujur.

4.6.1.6 Penggunaan Kisah-Kisah Islami

Strategi keenam yang terbukti efektif dalam menarik perhatian siswa adalah penggunaan kisah-kisah Islami. Metode bercerita atau kisah memiliki daya tarik yang kuat dan mampu menyampaikan pesan moral secara lebih mendalam dan berkesan dibandingkan metode ceramah biasa. Guru secara rutin menyisipkan kisah-kisah inspiratif dari Al-Qur'an, sirah nabawiyah, sejarah sahabat, maupun tokoh Muslim klasik dan kontemporer.

Kisah tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW yang mendapat gelar Al-Amin menjadi teladan nyata, kisah kesabaran Nabi Ayub AS menjadi contoh konkret menanamkan nilai kesabaran, dan kisah keberanian Nabi Musa AS menjadi inspirasi membela kebenaran. Seorang guru menyatakan bahwa anak-anak sangat suka mendengar kisah, dan melalui kisah mereka jadi lebih paham dan termotivasi untuk meneladani akhlak mulia para tokoh.

4.6.1.7 Sinergi Strategi Holistik

Dari keseluruhan strategi yang diungkapkan, dapat dipahami bahwa internalisasi nilai-nilai Islami di Sekolah Penggerak Aceh tidak dilakukan secara sporadis atau hanya mengandalkan satu metode tertentu, melainkan dirancang sebagai suatu sistem yang utuh, terpadu, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan bersifat holistik, mencakup dimensi spiritual melalui pembiasaan ibadah, dimensi moral melalui keteladanan dan penegakan disiplin, dimensi intelektual melalui integrasi nilai dalam pembelajaran, serta dimensi emosional melalui penggunaan kisah-kisah inspiratif.

Seluruh strategi ini saling melengkapi dan menguatkan, sehingga nilai-nilai Islami tidak hanya menjadi pengetahuan yang dihafal, tetapi benar-benar dihayati, diinternalisasi, dan diwujudkan dalam sikap dan perilaku keseharian peserta didik, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat, sesuai dengan tujuan utama pendidikan Islam untuk membentuk *insan kamil* yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

4.4.2 Nilai-Nilai Islami yang Diterapkan

Para responden mengidentifikasi berbagai nilai Islami yang diinternalisasikan dalam proses pembelajaran di Sekolah Penggerak Aceh, yang mencakup tiga dimensi utama akhlak: akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Ketiga dimensi ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, karena akhlak kepada Allah menjadi fondasi yang melandasi seluruh hubungan manusia dengan sesama dan alam semesta. Para guru dan kepala sekolah memahami bahwa internalisasi nilai-nilai Islami tidak cukup hanya dengan mengajarkan pengetahuan tentang agama, tetapi harus diwujudkan dalam pembiasaan dan pengamalan sehari-hari yang mencerminkan ketiga dimensi akhlak tersebut.

4.6.2.1 Akhlak kepada Allah

Akhlak kepada Allah menjadi fondasi utama yang ditanamkan sejak dini melalui berbagai pembiasaan ibadah dan penguatan kesadaran spiritual. Para guru menekankan bahwa setiap

aktivitas belajar adalah ibadah, sehingga peserta didik diajak untuk senantiasa meluruskan niat bahwa ilmu yang mereka pelajari adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Seorang guru menyatakan bahwa mereka menanamkan kepada siswa bahwa setiap aktivitas belajar adalah ibadah, sehingga mereka harus berniat karena Allah. Shalat dan doa juga dibiasakan agar siswa merasa dekat dengan Allah. Pembiasaan ini tidak hanya terbatas pada ibadah ritual seperti shalat berjamaah dan doa bersama, tetapi juga mencakup kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan mereka. Nilai keimanan ini menjadi landasan bagi seluruh nilai-nilai lainnya, karena dengan iman yang kuat, peserta didik akan memiliki motivasi internal untuk berbuat baik dan menjauhi larangan, bukan karena takut hukuman dari guru atau orang tua, tetapi karena kesadaran akan pengawasan Allah.

4.6.2.2 Akhlak kepada Sesama Manusia

Akhlak kepada sesama manusia menjadi fokus utama dalam interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah. Nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian sosial, sikap hormat, dan tolong-menolong ditanamkan secara sistematis melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan pembiasaan.

Seorang kepala sekolah menjelaskan bahwa mereka sangat menekankan kejujuran, terutama saat ujian. Mereka mengajarkan bahwa menyontek tidak hanya melanggar aturan sekolah, tetapi juga merupakan dosa. Tanggung jawab juga dilatih melalui tugas-tugas kelompok dan piket kelas. Sikap hormat kepada guru, karyawan, dan sesama siswa menjadi bagian dari budaya sekolah yang dibangun melalui keteladanan dan pembiasaan.

Para guru juga menanamkan nilai kepedulian sosial melalui kegiatan seperti infak Jumat, bakti sosial, dan kegiatan berbagi dengan sesama. Nilai tolong-menolong (*ta'awun*) menjadi semangat yang dihidupkan dalam setiap kegiatan kelompok, di mana siswa belajar bahwa keberhasilan bersama lebih penting daripada kesuksesan individu. Sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan juga menjadi bagian dari akhlak kepada sesama,

mengingat masyarakat Aceh yang majemuk meskipun didominasi oleh nilai-nilai keislaman.

4.6.2.3 Akhlak kepada Lingkungan

Akhlak kepada lingkungan juga menjadi bagian penting dari internalisasi nilai Islami di Sekolah Penggerak Aceh. Para guru mengajarkan bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian alam adalah bagian dari iman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang kebersihan.

Seorang guru mengungkapkan bahwa mereka mengajarkan kepada siswa bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari iman. Anak-anak dibiasakan membuang sampah pada tempatnya dan merawat tanaman di sekolah. Nilai akhlak kepada lingkungan ini tidak hanya terbatas pada kebersihan, tetapi juga mencakup kesadaran untuk tidak merusak fasilitas umum, menghemat air dan listrik, serta menjaga kelestarian alam.

Beberapa sekolah bahkan mengintegrasikan nilai ini ke dalam proyek P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, di mana siswa diajak untuk melakukan kegiatan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan kampanye lingkungan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, peserta didik belajar bahwa alam adalah amanah dari Allah yang harus dijaga, bukan dirusak. Mereka juga memahami bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah, sekaligus tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.

4.6.2.4 Integrasi Ketiga Dimensi Akhlak

Ketiga dimensi akhlak ini diintegrasikan secara simultan dalam proses pembelajaran dan budaya sekolah. Akhlak kepada Allah menjadi fondasi spiritual yang memberikan motivasi transendental bagi pengamalan akhlak kepada sesama dan lingkungan. Akhlak kepada sesama menjadi manifestasi nyata dari keimanan dalam interaksi sosial. Akhlak kepada lingkungan menjadi wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Para guru dan kepala sekolah menyadari bahwa ketiga dimensi ini harus dikembangkan secara seimbang, karena jika salah

satu lemah, maka bangunan karakter Islami peserta didik akan timpang. Oleh karena itu, dalam setiap perencanaan pembelajaran, ketiga dimensi ini menjadi pertimbangan dalam pemilihan materi, metode, dan evaluasi. Hasilnya, peserta didik di Sekolah Penggerak Aceh tidak hanya memiliki pengetahuan tentang ajaran Islam, tetapi juga mengamalkannya dalam keseharian, baik dalam ibadah ritual, interaksi sosial, maupun kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pendidikan Islam untuk membentuk *insan kamil* yang memiliki keseimbangan antara hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan alam semesta.

4.4.3 Tantangan dan Hambatan Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para guru dan kepala sekolah di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh, teridentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai Islami ke dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Tantangan-tantangan tersebut tidak bersifat tunggal atau sederhana, melainkan multidimensional, mencakup aspek kompetensi pedagogis guru, dukungan sistemik dan kelembagaan, ketersediaan sarana prasarana, serta faktor eksternal yang berasal dari peserta didik dan lingkungan sosial. Pemetaan tantangan ini menjadi sangat penting untuk memahami secara komprehensif mengapa proses internalisasi nilai Islami, meskipun secara umum telah berjalan dengan baik, masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi secara sistematis dan berkelanjutan.

4.4.3.1 Keterbatasan Kompetensi Guru

Keterbatasan kompetensi guru menjadi tantangan pertama dan paling fundamental yang diungkapkan oleh hampir seluruh responden. Para guru mengakui bahwa masih banyak pendidik, terutama mereka yang mengampu mata pelajaran umum seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, yang belum memiliki

pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk mengaitkan materi pelajaran mereka dengan nilai-nilai keislaman.

Seorang guru matematika dengan jujur mengakui bahwa sebagai guru matematika, ia kadang bingung bagaimana mengaitkan materi dengan nilai Islami, karena selama ini ia berpikir bahwa hal itu adalah tanggung jawab guru Pendidikan Agama Islam. Padahal, Kurikulum Merdeka justru mendorong integrasi nilai di semua mata pelajaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman yang cukup signifikan mengenai konsep kurikulum integratif yang sesungguhnya menjadi salah satu semangat utama Kurikulum Merdeka.

Keterbatasan kompetensi ini tidak hanya berdampak pada minimalnya muatan nilai Islami dalam pembelajaran mata pelajaran umum, tetapi juga menyebabkan terjadinya dikotomi dalam pemahaman peserta didik, di mana mereka memisahkan antara ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan nilai-nilai agama yang diyakini, padahal dalam perspektif Islam kedua hal tersebut seharusnya menyatu dan saling melengkapi.

4.4.3.2 Kurangnya Pelatihan dan Pendampingan

Kurangnya pelatihan dan pendampingan menjadi tantangan kedua yang tidak kalah pentingnya dan menjadi sorotan utama sebagian besar responden. Para guru dengan tegas menyatakan bahwa pelatihan-pelatihan yang selama ini mereka ikuti, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dinas pendidikan provinsi, maupun kabupaten/kota, masih didominasi oleh aspek teknis administratif dan pedagogis umum, seperti penyusunan modul ajar, pengembangan perangkat pembelajaran, atau penerapan pembelajaran berbasis proyek.

Seorang kepala sekolah menyampaikan bahwa pelatihan tentang Kurikulum Merdeka memang banyak, tetapi yang spesifik tentang integrasi nilai Islami sangat jarang. Guru-guru sangat membutuhkan bimbingan teknis yang aplikatif dan kontekstual, bukan hanya teori. Ketiadaan pelatihan dan pendampingan yang memadai ini menyebabkan para guru cenderung kembali

menggunakan pendekatan konvensional yang sudah mereka kuasai, sehingga nilai-nilai Islami tidak muncul secara optimal dalam proses pembelajaran, atau paling-paling hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan ritual yang terpisah dari pembelajaran inti.

Padahal, guru sangat membutuhkan bimbingan tentang bagaimana menyusun modul ajar yang kaya akan muatan nilai Islami, bagaimana merancang strategi pembelajaran yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, serta bagaimana mengembangkan instrumen asesmen yang mampu mengukur aspek afektif dan spiritual secara valid dan reliabel.

4.4.3.3 Keterbatasan Asesmen Berbasis Kompetensi

Keterbatasan asesmen berbasis kompetensi menjadi tantangan ketiga yang secara spesifik disoroti oleh para responden, terutama dalam kaitannya dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Guru mengalami kesulitan dalam merancang dan melaksanakan asesmen yang mampu mengevaluasi secara komprehensif sejauh mana nilai-nilai Islami telah terinternalisasi dalam diri peserta didik.

Seorang guru mengungkapkan bahwa mereka masih bingung bagaimana mengukur kejujuran atau kekhusyukan shalat siswa secara objektif, karena instrumen penilaian untuk aspek spiritual belum tersedia. Kurikulum Merdeka menuntut adanya asesmen autentik yang holistik, yang tidak hanya mengukur pencapaian kognitif melalui tes tertulis, tetapi juga menilai perkembangan afektif dan psikomotorik peserta didik melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, portofolio, dan berbagai bentuk asesmen lainnya.

Namun, dalam praktiknya, para guru masih kesulitan untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang spesifik untuk aspek sikap dan nilai-nilai Islami, seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian sosial, atau kekhusyukan dalam beribadah. Akibatnya, nilai-nilai Islami sering kali hanya menjadi slogan atau kegiatan rutin semata, seperti doa bersama, tadarus, atau shalat berjamaah, tanpa diikuti oleh sistem penilaian yang

terintegrasi dalam capaian pembelajaran, sehingga sulit untuk mengukur secara objektif sejauh mana kegiatan-kegiatan tersebut telah berhasil membentuk karakter Islami peserta didik.

4.4.3.4 Keterbatasan Fasilitas

Keterbatasan fasilitas menjadi tantangan keempat yang bersifat struktural dan fisik. Beberapa sekolah, terutama yang berada di daerah dengan keterbatasan sumber daya, menghadapi kendala serius dalam hal fasilitas pendukung kegiatan keislaman.

Seorang guru menyatakan bahwa musholla di sekolahnya kecil dan tidak muat untuk shalat berjamaah semua siswa, sehingga terpaksa bergantian dan kadang kurang khushyuk. Ketidadaan ruang ibadah yang representatif, seperti musholla yang bersih, nyaman, dan mampu menampung seluruh warga sekolah, menjadi kendala dalam membangun pembiasaan religius yang konsisten.

Keterbatasan sarana untuk kegiatan tadarus Al-Qur'an, seperti ketersediaan Al-Qur'an yang cukup, ruang khusus untuk membaca Al-Qur'an, atau pengeras suara yang memadai, juga menjadi hambatan dalam membangun budaya literasi Al-Qur'an di sekolah. Kurangnya media pembelajaran Islami, seperti poster-poster pendidikan, video-video inspiratif, buku-buku cerita Islami, atau alat peraga pendidikan agama, juga membatasi kreativitas guru dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman secara menarik dan variatif. Keterbatasan fasilitas ini, jika tidak segera diatasi, akan menjadi kendala serius dalam upaya memperkuat pembiasaan religius dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi internalisasi nilai-nilai Islami.

4.4.3.5 Perbedaan Latar Belakang Siswa

Perbedaan latar belakang siswa menjadi tantangan kelima yang berasal dari faktor eksternal. Para guru mengungkapkan bahwa keragaman latar belakang siswa, baik dari sisi tingkat religiusitas, pola asuh keluarga, maupun lingkungan sosial tempat mereka tinggal, membuat proses internalisasi nilai Islami tidak dapat berjalan seragam.

Seorang kepala sekolah menjelaskan bahwa ada anak yang sudah terbiasa shalat dan mengaji dari rumah, tetapi ada juga yang belum, sehingga guru harus ekstra sabar membimbing yang belum terbiasa. Ada siswa yang sejak kecil telah mendapatkan pendidikan agama yang kuat dari keluarganya, dibiasakan untuk melaksanakan ibadah, membaca Al-Qur'an, dan berperilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka relatif mudah menerima dan mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah.

Namun, tidak sedikit pula siswa yang berasal dari keluarga dengan pemahaman agama yang minim, atau bahkan tidak mendapatkan pembiasaan Islami sama sekali di rumah, sehingga mereka membutuhkan perhatian dan pendampingan yang jauh lebih intensif dari sekolah. Beberapa siswa bahkan mungkin berasal dari lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti lingkungan dengan pergaulan bebas, minimnya kegiatan keagamaan, atau pengaruh negatif media sosial, yang dapat menggerus nilai-nilai Islami yang telah ditanamkan di sekolah. Para guru dituntut untuk memiliki kemampuan diferensiasi yang tinggi, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran agar dapat menjangkau seluruh peserta didik dengan berbagai karakteristik yang berbeda, sehingga semua siswa dapat terlibat aktif dalam proses internalisasi nilai dan merasakan manfaatnya.

4.4.3.6 Keterbatasan Waktu

Keterbatasan waktu menjadi tantangan keenam yang bersifat teknis dan operasional. Hampir separuh responden menyebutkan bahwa padatnya tuntutan akademik dan administratif dalam Kurikulum Merdeka menjadi hambatan serius dalam mengalokasikan waktu yang cukup untuk kegiatan pembiasaan religius.

Seorang guru mengeluhkan bahwa target kurikulum sangat padat, sementara mereka ingin mengalokasikan waktu lebih untuk pembiasaan religius, sehingga seringkali kegiatan seperti tadarus menjadi terburu-buru. Kurikulum Merdeka, dengan segala inovasinya, memang menuntut banyak aktivitas pembelajaran yang

variatif, termasuk pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, presentasi, kunjungan lapangan, dan berbagai kegiatan lain yang membutuhkan alokasi waktu yang tidak sedikit.

Di sisi lain, sekolah juga dituntut untuk memenuhi target pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dalam situasi seperti ini, kegiatan-kegiatan pembiasaan religius seperti shalat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, kajian keislaman singkat, atau diskusi nilai-nilai Islami, sering kali terdesak dan harus dikorbankan demi memenuhi tuntutan akademik. Para guru merasa terjebak dalam dilema: di satu sisi mereka ingin mengalokasikan waktu yang cukup untuk penguatan karakter Islami, di sisi lain mereka harus mengejar target kurikulum yang padat. Akibatnya, kegiatan-kegiatan religius sering kali dilaksanakan secara tergesa-gesa, kurang khushuk, atau bahkan terpaksa ditiadakan sama sekali, yang tentu saja berdampak pada efektivitas proses internalisasi nilai-nilai Islami.

4.4.3.7 Sinergisitas Tantangan Multidimensional

Dari keseluruhan tantangan yang diidentifikasi, dapat dipahami bahwa upaya menginternalisasikan nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Aceh menghadapi persoalan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis-pedagogis seperti keterbatasan kompetensi guru dan pemahaman asesmen, tetapi juga bersifat struktural seperti minimnya pelatihan dan keterbatasan fasilitas, serta bersifat sosiologis seperti keragaman latar belakang siswa dan keterbatasan waktu.

Oleh karena itu, upaya mengatasi tantangan-tantangan ini tidak dapat dilakukan secara parsial atau dengan pendekatan yang sederhana, melainkan membutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah, hingga orang tua dan masyarakat. Diperlukan program pelatihan dan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan bagi para guru, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, pengembangan instrumen asesmen yang

valid dan reliabel untuk mengukur capaian afektif dan spiritual, serta kolaborasi yang erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai Islami.

Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan berbagai tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap, sehingga proses internalisasi nilai-nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih efektif dan optimal, dan pada akhirnya melahirkan generasi muda Aceh yang tidak hanya unggul secara intelektual dan kompetitif secara global, tetapi juga kokoh secara spiritual dan mulia secara akhlak.

4.4.4 Efektivitas Kurikulum Merdeka Berbasis Nilai Islami

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 48 responden yang terdiri dari guru dan kepala sekolah pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh, diperoleh temuan yang sangat penting mengenai efektivitas Kurikulum Merdeka yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islami dalam membentuk karakter peserta didik. Secara umum, mayoritas responden dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami terbukti efektif dalam membentuk karakter siswa, dan bahkan memberikan dampak yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran konvensional yang hanya berfokus pada pencapaian akademik semata. Dari keseluruhan jawaban yang diperoleh, teridentifikasi beberapa aspek utama yang menonjol sebagai indikator keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami di Sekolah Penggerak Aceh, yang mencakup berbagai dimensi pembentukan karakter, mulai dari kedisiplinan, akhlak mulia, pembiasaan religius, motivasi belajar, hingga penciptaan suasana sekolah yang kondusif.

4.4.4.1 Peningkatan Kedisiplinan dan Tanggung Jawab

Peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab menjadi aspek pertama dan paling menonjol yang diungkapkan oleh hampir seluruh responden sebagai dampak langsung dari integrasi nilai-nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka. Para guru dan kepala sekolah dengan tegas menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka yang dipadukan

dengan nilai-nilai keislaman telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam membentuk kebiasaan disiplin dan tanggung jawab siswa, baik dalam konteks akademik maupun sosial.

Seorang guru menyatakan bahwa siswa sekarang lebih disiplin, mereka datang tepat waktu, melaksanakan shalat berjamaah tanpa harus disuruh, dan lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Melalui berbagai kegiatan pembiasaan religius yang terintegrasi dalam rutinitas harian sekolah, seperti doa bersama, shalat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, serta penegakan tata tertib sekolah yang berlandaskan nilai-nilai Islami, para peserta didik secara bertahap belajar untuk mematuhi aturan, menghargai waktu, disiplin dalam melaksanakan kewajiban, serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan, baik tugas akademik seperti mengerjakan pekerjaan rumah dan menyelesaikan proyek, maupun tugas sosial seperti menjaga kebersihan lingkungan, membantu teman yang kesulitan, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial sekolah.

Para guru mengamati bahwa siswa yang terbiasa dengan disiplin Islami cenderung lebih teratur dalam mengelola waktu, lebih patuh terhadap aturan tanpa perlu diawasi secara ketat, dan lebih bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, karena mereka memahami bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab bukan sekadar tuntutan sekolah, tetapi juga merupakan bagian dari ajaran agama yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

4.4.4.2 Pembentukan Akhlak Mulia

Pembentukan akhlak mulia menjadi aspek kedua yang tidak kalah pentingnya. Sebagian besar responden dengan penuh semangat menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka telah berhasil mendorong terbentuknya akhlak mulia pada diri siswa, seperti kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, kerendahan hati dalam bersikap, kesantunan dalam bertutur kata, serta sikap hormat dan penghargaan yang tulus kepada guru, orang tua, dan sesama teman.

Seorang kepala sekolah menambahkan bahwa akhlak mulia mulai terbentuk, di mana siswa lebih hormat kepada guru, lebih peduli dengan teman yang kesulitan, dan lebih santun dalam berbicara. Para guru mengamati bahwa nilai-nilai Islami yang ditanamkan tidak hanya melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, tetapi juga melalui keteladanan guru dalam interaksi sehari-hari, pembiasaan sikap-sikap positif, serta integrasi nilai-nilai akhlak dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan sekolah, telah berhasil membentuk kesadaran moral yang kuat pada diri peserta didik.

Sikap saling menghargai antar siswa juga berkembang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, di mana mereka lebih toleran terhadap perbedaan, lebih empati terhadap kesulitan teman, lebih bersedia membantu tanpa pamrih, dan lebih mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan Islami. Para guru meyakini bahwa pembentukan akhlak mulia ini merupakan fondasi yang sangat penting bagi pembangunan karakter bangsa, karena generasi muda yang berakhlak mulia akan menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

4.4.4.3 Pembiasaan Perilaku Religius

Pembiasaan perilaku religius menjadi aspek ketiga yang menjadi sorotan para responden. Beberapa responden dengan rinci menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan rutin keislaman yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari program sekolah, seperti tadarus Al-Qur'an setiap pagi, doa bersama, shalat dhuha dan shalat dzuhur berjamaah, serta peringatan hari-hari besar Islam dengan berbagai kegiatan edukatif dan spiritual, telah berhasil membiasakan siswa dengan perilaku religius secara konsisten dan berkelanjutan.

Seorang guru mengungkapkan bahwa anak-anak sekarang sudah terbiasa shalat berjamaah dan tadarus, bahkan ada yang bercerita bahwa di rumah mereka mengingatkan orang tua untuk shalat. Para guru mengamati bahwa pembiasaan ini tidak hanya membuat siswa terbiasa melaksanakan ibadah ritual, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual yang mendalam, di mana mereka

mulai memahami makna ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, merasakan kedekatan dengan nilai-nilai spiritual Islam, dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan masyarakat.

Beberapa orang tua bahkan melaporkan kepada pihak sekolah bahwa anak-anak mereka mulai rajin mengingatkan orang tua untuk shalat, lebih bersemangat membaca Al-Qur'an di rumah, serta menunjukkan perubahan perilaku positif dalam interaksi dengan keluarga dan tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islami melalui pembiasaan religius di sekolah telah memberikan dampak yang meluas hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga menciptakan efek berantai yang positif dalam pembentukan karakter generasi muda.

4.4.4.4 Peningkatan Motivasi Belajar

Peningkatan motivasi belajar menjadi aspek keempat yang menarik dari temuan wawancara. Sebagian guru, terutama yang mengampu mata pelajaran umum seperti sains, IPS, dan bahasa, mengungkapkan bahwa nilai-nilai Islami terbukti mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa secara signifikan.

Seorang guru IPA menjelaskan bahwa ketika ia mengaitkan materi dengan ayat Al-Qur'an, siswa menjadi lebih antusias, karena mereka merasa belajar sains juga bagian dari ibadah, bukan sekadar hafalan. Ketika guru secara kreatif mengaitkan materi pelajaran dengan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, atau kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh Islam, siswa menunjukkan antusiasme yang lebih tinggi, rasa ingin tahu yang lebih besar, dan partisipasi yang lebih aktif dalam proses pembelajaran.

Para siswa tidak lagi memandang pelajaran sebagai sekadar kewajiban akademik untuk mendapatkan nilai, tetapi mulai memahami makna yang lebih dalam dari proses belajar itu sendiri, yaitu sebagai ibadah, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sebagai sarana untuk memahami kebesaran ciptaan-Nya, dan sebagai bekal untuk mengabdikan kepada masyarakat dan bangsa. Pemahaman

ini membuat orientasi belajar siswa bergeser dari sekadar mengejar nilai akademik menuju pengembangan diri yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

Para guru mengamati bahwa siswa yang termotivasi oleh nilai-nilai spiritual cenderung lebih tekun dalam belajar, lebih gigih menghadapi kesulitan, lebih kreatif dalam memecahkan masalah, dan lebih bersemangat untuk terus mengembangkan diri, karena mereka memahami bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah dan membawa kebaikan bagi sesama.

4.4.4.5 Suasana Sekolah yang Islami dan Kondusif

Suasana sekolah yang Islami dan kondusif menjadi aspek kelima yang tidak kalah pentingnya. Para responden dengan penuh syukur menggambarkan bahwa sekolah-sekolah mereka kini memiliki atmosfer yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya, di mana nilai-nilai keislaman tidak hanya diajarkan, tetapi benar-benar dihidupi dan dirasakan oleh seluruh warga sekolah dalam interaksi sehari-hari.

Seorang kepala sekolah menyampaikan bahwa suasana sekolah sekarang lebih kondusif, interaksi guru dan siswa lebih hangat, saling menghormati, dan orang tua juga merasa nyaman menyekolahkan anaknya di sini. Suasana religius terasa sejak pagi hari dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang terdengar, pemandangan siswa dan guru yang berbondong-bondong menuju musholla untuk melaksanakan shalat berjamaah, serta interaksi sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, saling menghormati, tolong-menolong, dan kasih sayang.

Para guru merasakan bahwa suasana yang Islami ini menciptakan rasa aman, nyaman, dan betah bagi seluruh warga sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih efektif dan menyenangkan. Hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih harmonis karena dilandasi oleh rasa saling menghormati dan menyayangi, hubungan antar siswa menjadi lebih akrab karena terbiasa bekerja sama dan saling membantu, dan

hubungan antara sekolah dengan orang tua serta masyarakat menjadi lebih erat karena adanya kesamaan visi dalam membentuk generasi muda yang beriman dan berakhlak mulia. Suasana sekolah yang Islami ini pada gilirannya menjadi faktor pendukung yang sangat penting bagi keberhasilan proses internalisasi nilai, karena nilai-nilai tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi juga dihidupi dalam keseharian dan dirasakan oleh seluruh warga sekolah.

4.4.4.6 Tantangan Asesmen Karakter Islami

Catatan tentang asesmen menjadi aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Meskipun secara umum para responden menilai bahwa penerapan Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif yang signifikan, mereka juga dengan jujur mengakui bahwa masih terdapat satu aspek penting yang perlu mendapatkan penguatan lebih lanjut, yaitu aspek evaluasi dan asesmen.

Seorang guru menyatakan bahwa mereka merasakan perubahan positif, tetapi belum punya cara yang tepat untuk mengukurnya, dan membutuhkan instrumen penilaian yang lebih sistematis. Beberapa guru dengan terus terang menyatakan bahwa asesmen karakter Islami, seperti pengukuran terhadap kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian sosial, atau kualitas spiritual peserta didik, belum sepenuhnya terukur secara sistematis, objektif, dan terintegrasi dalam sistem penilaian yang baku.

Selama ini, penilaian terhadap aspek sikap dan nilai-nilai Islami cenderung dilakukan secara subjektif, informal, dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti sejauh mana perkembangan karakter Islami peserta didik dari waktu ke waktu. Para guru merasakan kebutuhan yang mendesak akan adanya instrumen evaluasi yang lebih spesifik, valid, dan reliabel untuk menilai pencapaian siswa dalam aspek religius dan akhlak, sehingga hasil asesmen tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, merancang program perbaikan, dan memotivasi siswa untuk terus meningkatkan kualitas keislaman dan keimanan mereka.

Mereka berharap agar pemerintah daerah, dinas pendidikan, atau para ahli dapat mengembangkan panduan asesmen karakter Islami yang aplikatif dan kontekstual, serta memberikan pelatihan yang memadai bagi para guru untuk menggunakannya secara efektif dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

4.4.4.7 Sintesis Efektivitas dan Agenda Ke Depan

Dari keseluruhan temuan wawancara mengenai efektivitas Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Aceh telah berhasil menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dalam berbagai aspek pembentukan karakter peserta didik, mulai dari peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab, pembentukan akhlak mulia, pembiasaan perilaku religius, peningkatan motivasi belajar, hingga penciptaan suasana sekolah yang Islami dan kondusif.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras para guru, kepala sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami secara kreatif dan konsisten ke dalam seluruh aspek pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama dalam hal pengembangan sistem asesmen karakter Islami yang lebih sistematis, objektif, dan terukur.

Dengan penguatan pada aspek evaluasi ini, diharapkan implementasi Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami di masa depan akan semakin efektif dan optimal dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu membentuk generasi muda Aceh yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan kompetitif secara global, tetapi juga kokoh secara spiritual, mulia secara akhlak, dan mampu menjadi *rahmatan lil 'alamin* bagi seluruh alam, sesuai dengan cita-cita luhur pendidikan Islam dan visi besar pendidikan nasional Indonesia.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dibahas secara mendalam dan komprehensif hasil penelitian yang telah diperoleh melalui dua

pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pengisian instrumen berupa kuesioner yang disebarkan kepada 48 responden yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh. Data kuantitatif yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis melalui serangkaian uji statistik, dimulai dari uji validitas untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan benar-benar mengukur konstruk variabel yang dimaksud, uji reliabilitas dengan teknik Cronbach's Alpha untuk mengukur konsistensi internal instrumen, analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat internalisasi nilai-nilai Islami dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, serta uji regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu internalisasi nilai-nilai Islami terhadap variabel dependen yaitu pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh. Analisis kuantitatif ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai sejauh mana internalisasi nilai-nilai Islami berpengaruh terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka, serta untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan landasan teori yang kuat. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, penelitian kuantitatif dengan metode explanatory research memungkinkan peneliti untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis yang ketat dan terstruktur, sehingga hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas.³²⁷.

**Tabel 4.3 : Distribusi Skor Indikator dan Rata-rata
Komposit Variabel Penelitian**

Variabel	Indikator	Mean	Kategori
Internalisasi Nilai Islami	Rata-rata Komposit	4,2	Sangat Baik

³²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 55.

Variabel	Indikator	Mean	Kategori
	Keteladanan Guru	4,35	Sangat Baik
	Pembiasaan Sikap Religius	4,29	Sangat Baik
	Integrasi Nilai Islami dalam Pembelajaran	4,18	Baik
	Penerapan Disiplin Islami di Sekolah	4,05	Baik
Pelaksanaan Kurikulum Merdeka	Rata-rata Komposit	4,05	Baik
	Kesiapan Guru dalam Merencanakan Pembelajaran	4,18	Baik
	Kreativitas Guru dalam Mengajar	4,12	Baik
	Partisipasi Siswa dalam Proses Pembelajaran	4,08	Baik
	Evaluasi dan Asesmen Berbasis Kompetensi	3,92	Baik

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan internalisasi nilai-nilai Islami di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh berada pada kategori sangat baik dengan skor rata-rata komposit sebesar 4,20. Di antara keempat indikator variabel internalisasi nilai Islami, indikator keteladanan guru memperoleh skor tertinggi yaitu sebesar 4,35 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa guru-guru di Sekolah Penggerak Aceh telah berhasil menampilkan diri sebagai figur teladan yang baik dalam mengamalkan nilai-nilai Islami, baik dalam sikap keseharian, kedisiplinan beribadah, maupun interaksi sosial di lingkungan sekolah. Temuan ini sejalan dengan konsep uswah hasanah dalam pendidikan Islam yang menempatkan guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai model teladan yang perilakunya diamati dan ditiru oleh peserta didik.

Indikator pembiasaan sikap religius menempati posisi kedua dengan skor 4,29 (sangat baik), diikuti oleh indikator integrasi nilai Islami dalam pembelajaran dengan skor 4,18 (baik). Sementara itu, indikator penerapan disiplin Islami di sekolah memperoleh skor terendah yaitu 4,05, meskipun masih termasuk dalam kategori baik. Skor terendah pada indikator disiplin Islami ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menanamkan kedisiplinan yang berlandaskan nilai-nilai Islami secara konsisten di lingkungan sekolah, baik dalam hal kepatuhan terhadap aturan sekolah yang berbasis syariat, ketepatan waktu dalam melaksanakan ibadah, maupun konsistensi dalam berpakaian sesuai syariat Islam.

Adapun untuk variabel pelaksanaan Kurikulum Merdeka, secara keseluruhan berada pada kategori baik dengan skor rata-rata komposit sebesar 4,05. Indikator kesiapan guru dalam merencanakan pembelajaran memperoleh skor tertinggi yaitu 4,18 (baik), menunjukkan bahwa para guru telah memiliki pemahaman yang memadai tentang struktur Kurikulum Merdeka dan mampu menyusun perangkat pembelajaran seperti modul ajar dan RPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kreativitas guru dalam mengajar memperoleh skor 4,12 (baik), diikuti oleh indikator partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dengan skor 4,08 (baik). Sementara itu, indikator evaluasi dan asesmen berbasis kompetensi memperoleh skor terendah yaitu 3,92, meskipun masih dalam kategori baik. Skor terendah pada indikator evaluasi ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam implementasi asesmen autentik yang menjadi ciri utama Kurikulum Merdeka, terutama dalam mengukur aspek sikap, nilai-nilai, dan spiritual peserta didik secara valid dan reliabel.

Sementara itu, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara semi-terstruktur yang dilakukan secara mendalam dengan para guru dan kepala sekolah, serta teknik dokumentasi yang mencakup telaah terhadap berbagai dokumen resmi sekolah seperti Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), modul ajar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),

serta catatan kegiatan religius dan akademik sekolah. Pendekatan kualitatif ini memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu untuk memperkuat, memperdalam, dan memberikan penjelasan kontekstual terhadap temuan-temuan kuantitatif yang telah diperoleh. Instrumen kualitatif ini secara spesifik dirancang untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai strategi-strategi yang digunakan oleh para guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islami ke dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, berbagai tantangan dan hambatan yang mereka hadapi dalam proses internalisasi tersebut, serta efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami terhadap pembentukan karakter peserta didik. Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell, penggunaan pendekatan kualitatif dalam desain mixed methods sequential explanatory memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengetahui "apa" dan "seberapa besar" pengaruh suatu variabel, tetapi juga memahami secara mendalam "bagaimana" proses itu berlangsung dan "mengapa" fenomena tersebut terjadi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif tentang realitas yang diteliti³²⁸. Hal ini sejalan pula dengan pandangan Moleong yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah³²⁹.

Dengan demikian, pembahasan pada bab ini akan disajikan secara sistematis ke dalam dua bagian utama yang saling terkait dan memperkuat. Bagian pertama adalah pembahasan mengenai hasil penelitian kuantitatif yang akan disajikan secara rinci pada subbab 4.7.1, yang mencakup interpretasi terhadap temuan-temuan statistik mulai dari uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif variabel penelitian, hingga hasil uji regresi linier berganda yang

³²⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Edisi ke-4 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), hlm. 220.

³²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6

menunjukkan besarnya pengaruh internalisasi nilai-nilai Islami terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Bagian kedua adalah pembahasan mengenai hasil penelitian kualitatif yang akan dijelaskan secara komprehensif pada subbab berikutnya, yang mencakup analisis tematik terhadap data wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai strategi internalisasi nilai, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami. Penggabungan kedua pendekatan ini dalam kerangka mixed methods tidak hanya memperkuat validitas internal dan eksternal penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun pemahaman yang holistik tentang fenomena internalisasi nilai-nilai Islami dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh, sebagaimana direkomendasikan oleh para ahli metodologi penelitian bahwa integrasi data kuantitatif dan kualitatif dapat menghasilkan temuan yang lebih kaya, lebih mendalam, dan lebih bermakna dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu pendekatan saja³³⁰.

4.5.1 Hasil Penelitian Kuantitatif

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif, penelitian ini membuktikan bahwa internalisasi nilai Islami memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen penelitian. Uji validitas instrumen menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan kuesioner dinyatakan valid dengan nilai korelasi butir (r -hitung) tertinggi mencapai 0,852, jauh lebih besar dari r -tabel 0,284 pada taraf signifikansi 5% dengan jumlah responden sebanyak 48 orang. Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap butir instrumen mampu mengukur indikator variabel yang dimaksud secara tepat dan akurat.

³³⁰ Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, *Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1998), hlm. 43.

Seluruh 30 butir pernyataan yang terdiri dari 15 butir untuk variabel internalisasi nilai Islami (X) dan 15 butir untuk variabel pelaksanaan Kurikulum Merdeka (Y) dinyatakan valid karena memiliki nilai $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ dengan signifikansi $< 0,05$. Bahkan nilai R total sebesar 0,852 yang jauh lebih besar dari $r\text{-tabel}$ menegaskan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat validitas yang sangat tinggi.

Uji reliabilitas juga memperlihatkan konsistensi internal instrumen yang sangat baik. Variabel X (internalisasi nilai Islami) memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,971, sedangkan variabel Y (pelaksanaan Kurikulum Merdeka) memperoleh nilai 0,964. Kedua nilai tersebut jauh di atas batas minimum reliabilitas yang disarankan, yaitu 0,70, yang berarti instrumen penelitian ini memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi. Nilai 0,971 pada variabel X menegaskan bahwa kuesioner internalisasi nilai Islami mampu menggambarkan kondisi sebenarnya dengan tingkat konsistensi yang hampir sempurna, sementara nilai 0,964 pada variabel Y menunjukkan bahwa kuesioner pelaksanaan Kurikulum Merdeka juga memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sangat reliabel dan dapat dipercaya untuk mengumpulkan data, sehingga hasil pengukuran dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis regresi linear berganda yang dilakukan menunjukkan bahwa internalisasi nilai Islami berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Hasil uji t memperlihatkan nilai $t\text{-hitung}$ sebesar 7,14, lebih besar daripada $t\text{-tabel}$ sebesar 2,02, dengan nilai signifikansi $p = 0,000 (< 0,05)$. Hal ini menegaskan bahwa secara parsial, internalisasi nilai Islami memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Dengan kata lain, setiap peningkatan dalam internalisasi nilai Islami akan diikuti oleh peningkatan yang signifikan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Koefisien regresi yang positif mengindikasikan arah hubungan yang searah, di mana semakin tinggi tingkat internalisasi nilai Islami di sekolah, maka semakin tinggi pula kualitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Selanjutnya, uji F menghasilkan nilai F-hitung sebesar 21,36, lebih besar daripada F-tabel sebesar 3,16, dengan nilai signifikansi $p = 0,000 (< 0,05)$. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara simultan, sehingga variabel internalisasi nilai Islami secara bersama-sama berkontribusi terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa internalisasi nilai Islami berpengaruh terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat diterima secara statistik. Model regresi yang dibangun dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk memprediksi sejauh mana internalisasi nilai Islami mempengaruhi pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,62 memberikan makna yang sangat penting. Angka ini berarti bahwa 62% variasi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat dijelaskan oleh internalisasi nilai Islami, sedangkan 38% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut antara lain keterbatasan fasilitas sekolah, keterampilan guru dalam asesmen berbasis kompetensi, perbedaan latar belakang siswa, dukungan orang tua, kepemimpinan kepala sekolah, serta faktor eksternal lainnya yang turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum. Nilai korelasi (R) sebesar 0,852 juga menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel, yang mengindikasikan bahwa internalisasi nilai Islami dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi secara positif. Semakin kuat internalisasi nilai Islami, semakin tinggi pula pelaksanaan Kurikulum Merdeka, dan sebaliknya.

Secara lebih rinci, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa internalisasi nilai Islami di Sekolah Penggerak Aceh berada pada kategori sangat baik dengan skor rata-rata komposit 4,20. Indikator keteladanan guru memperoleh skor tertinggi (4,35), diikuti pembiasaan sikap religius (4,29), integrasi nilai Islami dalam pembelajaran (4,18), dan penerapan disiplin Islami (4,05). Temuan

ini mengindikasikan bahwa guru menjadi faktor utama dalam proses internalisasi nilai, sementara disiplin Islami menjadi area yang masih memerlukan penguatan. Adapun pelaksanaan Kurikulum Merdeka secara keseluruhan berada pada kategori baik dengan skor rata-rata komposit 4,05. Indikator kesiapan guru dalam merencanakan pembelajaran memperoleh skor tertinggi (4,18), diikuti kreativitas guru (4,12) dan partisipasi siswa (4,08), sementara indikator evaluasi dan asesmen berbasis kompetensi memperoleh skor terendah (3,92). Skor terendah pada indikator evaluasi ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam implementasi asesmen autentik yang menjadi ciri utama Kurikulum Merdeka.

Dengan demikian, hasil penelitian kuantitatif ini secara meyakinkan membuktikan bahwa internalisasi nilai Islami, yang diwujudkan melalui keteladanan guru, pembiasaan religius, integrasi nilai Islami dalam materi pembelajaran, serta penciptaan suasana sekolah yang Islami, menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Aceh. Temuan ini memperkuat argumen bahwa nilai-nilai Islami bukan sekadar muatan lokal atau tambahan dalam kurikulum, tetapi merupakan fondasi spiritual dan moral yang memperkuat seluruh proses pendidikan. Ketika nilai-nilai tersebut diinternalisasikan secara sistemik, ia tidak hanya membentuk karakter peserta didik, tetapi juga menciptakan ekosistem pembelajaran yang kondusif bagi pencapaian tujuan Kurikulum Merdeka secara holistik. Namun demikian, masih terdapat 38% faktor lain yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal penguatan asesmen berbasis kompetensi dan peningkatan disiplin Islami, yang menjadi indikator dengan skor terendah dalam penelitian ini.

4.5.2 Hasil Penelitian Kualitatif

Hasil penelitian kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru dan kepala sekolah, observasi kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah, serta telaah dokumen sekolah seperti Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), modul ajar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan catatan

kegiatan religius, memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik internalisasi nilai-nilai Islami dalam kerangka Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh. Data kualitatif yang telah dikelompokkan ke dalam empat tema utama strategi internalisasi nilai Islami, nilai-nilai Islami yang diterapkan, tantangan dan hambatan implementasi, serta efektivitas Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami dibahas secara mendalam dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber data tersebut.

4.7.2.1 Pembahasan Strategi Internalisasi Nilai Islami

Berdasarkan Dokumen Kurikulum dan Praktik Pembelajaran

Telaah dokumen kurikulum sekolah memberikan bukti konkret bahwa internalisasi nilai-nilai Islami tidak hanya terjadi pada tataran praktik pembelajaran, tetapi telah tertanam secara sistemik dalam dokumen perencanaan pendidikan. Analisis terhadap Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) menunjukkan bahwa hampir seluruh sekolah menempatkan nilai-nilai religius sebagai visi, misi, dan tujuan sekolah. Beberapa KOSP mencantumkan secara eksplisit bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk siswa yang berakhlak mulia, religius, jujur, dan bertanggung jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islami tidak menjadi slogan kosong, tetapi menjadi dasar pijakan dalam merancang program pembelajaran, ekstrakurikuler, hingga budaya sekolah. Seorang guru SD Negeri 62 Banda Aceh menegaskan bahwa dalam KOSP sekolah mereka sudah jelas dituliskan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya akademik, tetapi membentuk siswa yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab, sehingga setiap program sekolah selalu diarahkan ke nilai-nilai Islami. Guru SMP Negeri 5 Seunagan juga menambahkan bahwa KOSP mereka dirancang berbasis karakter Islami, mulai dari visi, misi, sampai program kegiatan semuanya mengarah ke pembiasaan religius. Guru SD Negeri Lhok Banie menegaskan bahwa nilai religius bukan hanya slogan di KOSP, tetapi menjadi acuan dalam menyusun pembelajaran dan kegiatan sekolah, termasuk ekstrakurikuler dan budaya sekolah.

Temuan ini memperkuat teori pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Hilda Taba, bahwa kurikulum harus berangkat dari diagnosis kebutuhan peserta didik. Dalam konteks Aceh, kebutuhan fundamental peserta didik adalah pembentukan akhlak mulia yang akan menjadi bekal hidup mereka di dunia dan akhirat. Dengan menjadikan nilai-nilai Islami sebagai fondasi dalam KOSP, sekolah telah meletakkan landasan yang kokoh bagi seluruh proses pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Muhaimin bahwa kurikulum pendidikan Islam harus bersifat integratif, menghubungkan antara ilmu agama dan ilmu umum, antara teori dan praktik, serta antara nilai-nilai lokal dengan tuntutan global.

Telaah terhadap modul ajar yang digunakan guru menunjukkan adanya integrasi nilai Islami dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Dalam mata pelajaran IPA, guru mengaitkan materi penciptaan alam semesta dengan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana diungkapkan oleh guru UPTD SMP Negeri 4 Bireuen bahwa dalam modul ajar mereka selalu mencoba mengaitkan materi pelajaran dengan nilai Islam, misalnya di IPA dikaitkan dengan ayat tentang penciptaan alam, supaya siswa tidak hanya paham sains tetapi juga makin yakin dengan kebesaran Allah. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru menggunakan teks kisah Islami atau tokoh Muslim sebagai bahan bacaan. Guru SD Negeri 62 Banda Aceh menambahkan bahwa mereka juga memasukkan cerita tokoh-tokoh Muslim atau kisah Islami dalam modul Bahasa Indonesia, supaya siswa belajar bahasa sekaligus belajar nilai dan keteladanan. Guru SMP Negeri 5 Seunagan menyampaikan bahwa integrasi nilai Islami di modul ajar ini membuat siswa merasa bahwa pelajaran umum juga punya nilai agama, tidak terpisah dari Pendidikan Agama Islam saja.

Integrasi ini menunjukkan bahwa nilai Islami tidak hanya diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), tetapi juga diinternalisasikan dalam mata pelajaran umum. Hal ini sejalan dengan konsep Islamisasi ilmu yang digagas oleh Ismail Raji al-Faruqi, yang menekankan bahwa tidak ada pemisahan antara ilmu

agama dan ilmu umum, karena semua ilmu pada hakikatnya bersumber dari Allah dan harus dipahami dalam kerangka tauhid. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam modul ajar, para guru menanamkan pemahaman bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dan sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ditelaah memperlihatkan bahwa guru memasukkan kegiatan religius dalam alur pembelajaran secara terstruktur. Kegiatan pembuka sering diawali dengan doa bersama atau tadarus Al-Qur'an, kegiatan inti mengaitkan materi dengan nilai Islami, dan kegiatan penutup mengandung refleksi berupa sikap syukur atau pesan moral Islami. Guru SD Negeri Lhok Banie menyatakan bahwa di RPP mereka selalu ada doa di awal pembelajaran, lalu di kegiatan inti dikaitkan materi dengan nilai Islami, dan di akhir ada refleksi, misalnya rasa syukur atau pesan moral. Guru PAUD KB Bina Phoen Nagan Raya mengungkapkan bahwa untuk anak PAUD, RPP mereka sederhana, tetapi tetap ada pembiasaan doa, salam, dan nilai kejujuran, sehingga sejak kecil anak-anak sudah dibiasakan dengan nilai Islami. Guru UPTD SMP Negeri 4 Bireuen menegaskan bahwa RPP sekarang tidak hanya fokus ke target materi, tetapi juga sikap, dan mereka selalu menuliskan penguatan karakter Islami sebagai bagian dari tujuan pembelajaran.

Temuan ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya fokus pada capaian kompetensi akademik, tetapi juga menekankan kompetensi sikap dan karakter Islami. Strategi ini sesuai dengan pandangan Ibnu Miskawaih bahwa pendidikan harus menekankan keseimbangan antara pengembangan intelektual (al-nafs al-natiqah) dan pembinaan akhlak (al-fadilah). Dengan merancang RPP yang memuat kegiatan religius dan refleksi nilai Islami, guru telah menerapkan prinsip bahwa pembelajaran tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi harus dilanjutkan dengan internalisasi nilai.

Catatan kegiatan religius sekolah yang ditelaah menguatkan praktik internalisasi nilai Islami sebagai budaya sekolah yang mengakar. Dokumen berupa laporan dan catatan kegiatan religius menunjukkan bahwa sekolah secara rutin melaksanakan shalat berjamaah, peringatan hari besar Islam, kajian keagamaan, sedekah Jumat, hingga pembiasaan salam, senyum, dan sapa. Catatan tersebut juga menunjukkan adanya evaluasi berkala oleh guru atau wali kelas terhadap kedisiplinan ibadah siswa. Guru SMP Negeri 5 Seunagan menyampaikan bahwa sekolah mereka rutin melaksanakan shalat berjamaah, sedekah Jumat, dan peringatan hari besar Islam, dan semua itu dicatat dan dievaluasi secara berkala. Guru SD Negeri 62 Banda Aceh mengatakan bahwa kegiatan religius sudah menjadi budaya sekolah, anak-anak terbiasa salam, senyum, dan sapa, bahkan kalau tidak dilaksanakan, mereka sendiri yang bertanya. Guru PAUD KB Bina Phoen Nagan Raya menambahkan bahwa mereka membiasakan anak-anak berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, berbagi, dan saling menghormati, yang semuanya tercatat dalam laporan kegiatan harian.

Temuan ini memperlihatkan bahwa internalisasi nilai Islami tidak hanya bersifat formal dalam dokumen kurikulum, tetapi juga menjadi budaya sekolah yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini sejalan dengan teori bahwa lingkungan yang Islami menjadi faktor pendukung penting bagi keberhasilan internalisasi nilai. Ketika nilai-nilai Islami tidak hanya diajarkan di kelas, tetapi juga dihidupi dalam interaksi sehari-hari dan didokumentasikan secara sistematis, maka proses internalisasi akan berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

4.7.2.2 Pembahasan Nilai-Nilai Islami yang Terintegrasi dalam Dokumen Kurikulum dan Praktik Pembelajaran

Integrasi nilai-nilai Islami dalam dokumen kurikulum dan praktik pembelajaran mencerminkan pemahaman yang utuh tentang ajaran Islam yang mencakup tiga dimensi utama akhlak: akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada

lingkungan. Ketiga dimensi ini terwujud dalam berbagai komponen dokumen dan praktik pembelajaran.

Nilai tauhid dan keimanan kepada Allah menjadi fondasi utama yang tercermin dalam visi dan misi sekolah. KOSP yang mencantumkan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa sebagai tujuan utama pendidikan menunjukkan bahwa nilai tauhid ditempatkan sebagai landasan seluruh proses pendidikan. Dalam praktik pembelajaran, nilai tauhid diintegrasikan melalui pengaitan materi pelajaran dengan kebesaran Allah, baik melalui ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah. Modul ajar IPA yang mengaitkan fenomena alam dengan ayat-ayat Al-Qur'an, serta RPP yang memuat refleksi rasa syukur atas ciptaan Allah, merupakan contoh konkret internalisasi nilai tauhid.

Nilai akhlak mulia (al-akhlaq al-karimah) menjadi nilai Islami yang paling dominan diterapkan, tercermin dalam berbagai komponen dokumen kurikulum. KOSP mencantumkan tujuan membentuk siswa yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Modul ajar dan RPP memuat kegiatan yang menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan saling menghormati. Catatan kegiatan religius menunjukkan adanya pembiasaan perilaku positif yang menjadi bagian dari budaya sekolah. Nilai ini diwujudkan melalui keteladanan guru (uswah hasanah), pembiasaan perilaku positif, serta penegakan tata tertib sekolah yang berlandaskan nilai Islami.

Nilai ibadah dan kedisiplinan spiritual terintegrasi secara sistematis dalam dokumen dan praktik pembelajaran. Catatan kegiatan religius mendokumentasikan pelaksanaan shalat berjamaah, shalat dhuha, tadarus Al-Qur'an, doa sebelum dan sesudah pembelajaran, serta peringatan hari besar Islam. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak diposisikan sebagai aktivitas tambahan, tetapi menjadi bagian dari budaya sekolah yang terencana dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai sarana pembinaan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran diri.

Nilai tanggung jawab dan amanah (al-mas'uliyah) menjadi bagian penting dalam dokumen perencanaan pembelajaran, terutama dalam konteks pembelajaran berbasis proyek dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Modul ajar dan RPP yang memuat penugasan proyek yang harus diselesaikan secara mandiri maupun kelompok mencerminkan upaya melatih tanggung jawab siswa. Nilai amanah ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial.

Nilai kepedulian sosial dan kerja sama (al-ta'awun) diinternalisasikan melalui berbagai kegiatan yang terdokumentasi dalam catatan kegiatan religius sekolah, seperti infak Jumat, gotong royong, kegiatan sosial keagamaan, dan proyek kepedulian lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dibiasakan untuk peduli terhadap sesama, berbagi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Nilai ini sejalan dengan tujuan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembentukan peserta didik yang berkeadaban dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Nilai menjaga lingkungan sebagai amanah (akhlak terhadap alam) turut menjadi bagian dari nilai Islami yang terdokumentasi dalam catatan kegiatan sekolah. Beberapa sekolah mengintegrasikan ajaran Islam tentang kebersihan dan pelestarian lingkungan dalam proyek P5, seperti program sekolah bersih, pengelolaan sampah, dan penghijauan. Nilai ini menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

4.7.2.3 Pembahasan Tantangan dan Hambatan Berdasarkan Temuan Dokumen dan Wawancara

Telaah dokumen sekolah bersama dengan hasil wawancara mengungkapkan berbagai tantangan dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islami. Keterbatasan kompetensi guru, terutama guru mata pelajaran umum, dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami tercermin dari masih minimnya modul ajar yang secara eksplisit

mengintegrasikan nilai Islami untuk mata pelajaran seperti matematika dan bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan Kurikulum Merdeka yang integratif dengan kesiapan aktual di lapangan.

Kurangnya pelatihan dan pendampingan yang spesifik juga terlihat dari belum adanya dokumen panduan praktis integrasi nilai Islami yang baku. Guru-guru mengaku belum mendapatkan bimbingan yang memadai terkait cara mengaitkan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis dengan materi pelajaran umum. Ketiadaan pedoman ini menyebabkan upaya integrasi nilai Islami sering kali bersifat sporadis dan sangat bergantung pada inisiatif individu guru.

Keterbatasan asesmen berbasis kompetensi tercermin dari belum adanya rubrik penilaian standar untuk aspek religius dan karakter dalam dokumen penilaian sekolah. Guru kesulitan merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang spesifik untuk aspek sikap dan nilai-nilai Islami. Akibatnya, penilaian terhadap aspek afektif dan spiritual masih bersifat subjektif dan informal, tidak terdokumentasi dengan baik.

Keterbatasan fasilitas juga menjadi kendala yang tercermin dari catatan kegiatan religius yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan keagamaan harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang dan sarana yang ada. Beberapa sekolah mencatat bahwa musholla yang tersedia tidak memadai untuk menampung seluruh siswa dalam pelaksanaan shalat berjamaah, sehingga harus dilakukan secara bergiliran. Hal ini menjadi kendala dalam membangun pembiasaan religius yang konsisten.

4.7.2.4 Pembahasan Efektivitas Berdasarkan Bukti Dokumen dan Praktik

Telaah dokumen sekolah mengonfirmasi efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami. KOSP yang menjadikan nilai religius sebagai visi, misi, dan tujuan sekolah membuktikan bahwa internalisasi nilai Islami telah menjadi komitmen institusional yang terencana. Modul ajar yang mengintegrasikan nilai Islami dalam pembelajaran lintas mata

pelajaran menunjukkan bahwa nilai-nilai Islami tidak hanya menjadi slogan, tetapi diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran yang konkret. RPP yang memuat kegiatan religius dan refleksi nilai Islami menunjukkan bahwa guru secara sadar merancang pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan kompetensi akademik, tetapi juga karakter Islami siswa. Catatan kegiatan religius yang terdokumentasi dengan baik membuktikan bahwa internalisasi nilai Islami telah menjadi budaya sekolah yang berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawaih, maka temuan dari telaah dokumen ini mencerminkan upaya sekolah untuk membangun jiwa yang cerdas dan berakhlak mulia melalui keseimbangan antara ilmu pengetahuan, ibadah, dan pembiasaan karakter. Guru berperan membimbing jiwa siswa agar berkembang dari sekadar memenuhi dorongan nafsu (*al-nafs al-bahimiyyah*) menuju jiwa yang cerdas dan beradab (*al-nafs al-natiqah*). Pembiasaan religius yang terdokumentasi dalam catatan kegiatan merupakan bentuk pengendalian diri (*al-iffah*), sedangkan penegakan disiplin waktu dan tanggung jawab yang tercermin dalam tata tertib sekolah mencerminkan nilai *al-'adl* (keadilan) dan *al-syaja'ah* (keberanian moral). Dengan demikian, praktik pendidikan yang terdokumentasi di sekolah ini merepresentasikan teori *The Golden Mean* yang diajukan Ibnu Miskawaih, yaitu menempatkan akhlak dalam posisi tengah antara dua ekstrem yang berlebihan atau kekurangan.

4.7.2.5 Sintesis Temuan dan Implikasi Teoretis

Secara keseluruhan, telaah dokumen sekolah yang meliputi Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), modul ajar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan catatan kegiatan religius mengonfirmasi hasil penelitian kuantitatif bahwa internalisasi nilai Islami memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Melalui KOSP, nilai Islami menjadi fondasi visi, misi, dan tujuan pendidikan. Melalui modul ajar dan RPP, nilai Islami diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Melalui catatan kegiatan religius, nilai

Islami dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sekolah dan terdokumentasi sebagai bukti keberlanjutan program. Nilai Islami yang hadir dalam dokumen-dokumen sekolah menjadi bukti bahwa Kurikulum Merdeka dapat dijalankan secara kontekstual sesuai dengan identitas keislaman masyarakat Aceh. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak harus berjalan pada jalur yang terpisah, tetapi dapat bersinergi dan saling memperkuat dalam membentuk generasi muda Indonesia yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, dan berdaya saing global.

Temuan ini memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan konsep bahwa internalisasi nilai-nilai Islami tidak dapat dipisahkan dari perencanaan kurikulum yang sistemik dan terdokumentasi. Keterpaduan antara dokumen kurikulum (KOSP, modul ajar, RPP) dan praktik nyata (catatan kegiatan religius) menunjukkan bahwa internalisasi nilai bukan sekadar wacana, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pendidikan yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Ralph Tyler³³¹ bahwa kurikulum harus mencakup tujuan, pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi. Dalam konteks internalisasi nilai Islami, keempat komponen ini telah diwujudkan melalui perencanaan yang matang dalam dokumen kurikulum dan implementasi yang konsisten dalam praktik pembelajaran serta budaya sekolah. Tyler menegaskan bahwa tujuan pendidikan harus dirumuskan secara jelas menjadi pedoman utama dalam merancang pengalaman belajar. Dalam penelitian ini, tujuan internalisasi nilai Islami telah dirumuskan secara eksplisit dalam KOSP yang mencantumkan pembentukan siswa berakhlak mulia sebagai visi dan misi sekolah. Pengalaman belajar dirancang melalui integrasi nilai Islami dalam modul ajar dan RPP. Organisasi pembelajaran diwujudkan melalui keterpaduan lintas mata pelajaran dan

³³¹ Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (Chicago: University of Chicago Press, 1949), hlm. 35.

pembiasaan religius. Evaluasi dilakukan melalui catatan kegiatan religius yang terdokumentasi secara sistematis. Dengan demikian, model Tyler terbukti aplikatif dalam konteks internalisasi nilai Islami.

Pemikiran Hilda Taba³³² yang menekankan pendekatan *grassroots* dalam pengembangan kurikulum juga relevan dengan temuan ini. Taba berpendapat bahwa pengembangan kurikulum harus berangkat dari diagnosis kebutuhan peserta didik dan melibatkan peran aktif guru sebagai aktor utama. Temuan bahwa internalisasi nilai Islami menjadi budaya sekolah yang mengakar mencerminkan bahwa proses ini tidak hanya berasal dari kebijakan top-down, tetapi tumbuh dari kesadaran dan komitmen bersama seluruh warga sekolah. Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan secara kolektif menciptakan lingkungan yang Islami sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal Aceh. Model Taba yang terdiri dari tujuh langkah diagnosis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan isi, organisasi isi, pemilihan pengalaman belajar, organisasi pengalaman belajar, dan evaluasi tercermin dalam praktik sekolah. Diagnosis kebutuhan diwujudkan melalui pemahaman bahwa masyarakat Aceh membutuhkan pendidikan berbasis nilai Islami. Perumusan tujuan tertuang dalam KOSP. Pemilihan dan organisasi isi terlihat dalam modul ajar yang mengintegrasikan nilai Islami. Pemilihan dan organisasi pengalaman belajar diwujudkan dalam RPP dan kegiatan religius. Evaluasi dilakukan melalui catatan kegiatan religius. Dengan demikian, model Taba memberikan kerangka yang kuat untuk memahami praktik internalisasi nilai Islami di Sekolah Penggerak Aceh.

Teori Lawrence Stenhouse³³³ tentang kurikulum sebagai proses juga memberikan landasan teoretis yang penting. Stenhouse memandang kurikulum bukan sebagai dokumen statis, tetapi sebagai hipotesis pendidikan yang harus terus diuji, dikaji, dan

³³² Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice ...*, hlm. 78.

³³³ Lawrence Stenhouse, *An Introduction to Curriculum Research and Development* (London: Heinemann, 1975), hlm. 60.

dikembangkan melalui praktik reflektif di kelas. Dokumentasi kegiatan religius yang dilakukan secara sistematis menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya menjalankan program, tetapi juga melakukan evaluasi dan refleksi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep *teacher as researcher* dari Stenhouse, di mana guru berperan sebagai peneliti yang terus menguji sejauh mana nilai-nilai akhlak terinternalisasi dalam diri peserta didik dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Proses refleksi yang terdokumentasi dalam catatan kegiatan religius merupakan bukti bahwa kurikulum dipandang sebagai hipotesis yang terus diuji, bukan sebagai produk final yang kaku. Pendekatan ini memungkinkan sekolah untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas internalisasi nilai Islami sesuai dengan dinamika kebutuhan peserta didik.

Pemikiran Ibnu Miskawaih³³⁴ tentang pembentukan akhlak melalui keseimbangan jiwa juga memperkuat temuan ini. Ibnu Miskawaih membagi jiwa manusia menjadi tiga: jiwa syahwaniyyah (nafsu), jiwa ghadhabiyyah (amarah), dan jiwa nathiqah (rasional). Pendidikan harus menyeimbangkan ketiganya agar tidak melahirkan ekstremitas. Temuan bahwa sekolah mengintegrasikan nilai Islami melalui pembiasaan religius (mengendalikan jiwa syahwaniyyah), penegakan disiplin (mengarahkan jiwa ghadhabiyyah pada keberanian moral), dan penguatan pemahaman keislaman (mengembangkan jiwa nathiqah) mencerminkan upaya menyeimbangkan ketiga aspek jiwa tersebut. Teori *The Golden Mean* dari Ibnu Miskawaih yang menempatkan akhlak pada posisi tengah antara dua ekstrem juga terwujud dalam praktik sekolah yang mengajarkan keseimbangan dalam bersikap dan bertindak. Dokumentasi kegiatan religius yang konsisten menjadi bukti bahwa proses *riyadhah al-nafs* (latihan jiwa) berlangsung secara berkelanjutan, membentuk *al-malakah* (karakter permanen) pada diri peserta didik.

³³⁴ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq* ..., hlm. 105.

Konsep Al-Ghazali³³⁵ tentang *tazkiyat al-nafs* (penyucian jiwa) juga relevan dengan temuan ini. Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan sejati adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Budaya sekolah yang Islami, dengan pembiasaan ibadah, keteladanan guru, dan interaksi yang santun, menjadi wahana bagi *tazkiyat al-nafs* yang berlangsung secara terus-menerus. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya konsistensi dan kontinuitas dalam proses pendidikan, yang tercermin dari dokumentasi kegiatan religius sebagai bukti keberlanjutan program. Tanpa lingkungan yang mendukung, menurut Al-Ghazali, ilmu yang diperoleh hanya akan menjadi pengetahuan yang kering dan tidak membawa kebaikan. Temuan bahwa nilai-nilai Islami menjadi budaya sekolah yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari siswa merupakan implementasi nyata dari konsep *tazkiyat al-nafs* dalam konteks pendidikan modern.

Pemikiran Ibn Khaldun³³⁶ tentang *'umran* (peradaban) juga memberikan perspektif yang berharga. Ibn Khaldun menegaskan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Pembentukan karakter dan peradaban suatu bangsa sangat ditentukan oleh lingkungan pendidikan yang membudaya. Temuan bahwa nilai-nilai Islami menjadi budaya sekolah yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari siswa merupakan implementasi dari pandangan Ibn Khaldun bahwa pendidikan yang efektif harus berlangsung dalam lingkungan yang mendukung dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Ketika nilai-nilai Islami dihidupi dalam interaksi sehari-hari dan didokumentasikan secara sistematis, sekolah telah menciptakan ekosistem pendidikan yang selaras dengan konsep *'umran*, di mana pendidikan dan peradaban berjalan secara sinergis. Aceh sebagai daerah dengan tradisi keislaman yang kuat menjadi konteks yang ideal bagi terwujudnya sinergi ini.

³³⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Mi 'yār al- 'ilm* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1960), hlm. 120.

³³⁶ A. Hadi dan S. Hanani, "Analisis Pemikiran Ibn Khaldun ...", hlm. 160.

Teori Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang menuntun kodrat anak juga relevan dengan temuan ini. Ki Hadjar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak berkembang sesuai potensinya. Budaya sekolah yang Islami yang terbentuk secara alami melalui pembiasaan dan keteladanan mencerminkan prinsip *ing ngarsa sung tuladha* (di depan memberi teladan), *ing madya mangun karsa* (di tengah membangun semangat), dan *tut wuri handayani* (di belakang memberi dorongan). Guru yang menjadi teladan melalui keteladanan dalam ibadah dan akhlak merupakan perwujudan *ing ngarsa sung tuladha*. Pembiasaan religius yang membangun semangat kebersamaan dan kedisiplinan merupakan perwujudan *ing madya mangun karsa*. Lingkungan sekolah yang Islami yang mendukung dari belakang merupakan perwujudan *tut wuri handayani*. Ketiga semboyan ini terintegrasi dalam praktik internalisasi nilai Islami di Sekolah Penggerak Aceh.

Dalam perspektif Taksonomi Bloom, temuan ini menunjukkan bahwa ketiga ranah pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik telah dikembangkan secara seimbang. Ranah kognitif tercapai melalui pemahaman nilai-nilai Islami yang diintegrasikan dalam dokumen kurikulum dan pembelajaran. Ranah afektif tercapai melalui pembiasaan religius yang menyentuh perasaan dan emosi peserta didik. Ranah psikomotorik tercapai melalui praktik nyata dalam interaksi sehari-hari yang didokumentasikan secara sistematis. Ketika ketiga ranah ini dikembangkan secara seimbang dalam lingkungan yang Islami, internalisasi nilai mencapai puncaknya pada tingkat *characterizing by value* dalam ranah afektif, yaitu ketika nilai-nilai telah menjadi karakter yang konsisten dalam kehidupan peserta didik. Dalam perspektif pendidikan Islam, puncak ini tidak lain adalah akhlak mulia (*al-akhlaq al-karimah*) yang menjadi tujuan tertinggi pendidikan Islam.

Teori pendidikan karakter Thomas Lickona juga relevan dengan temuan ini. Lickona menekankan tiga dimensi penting dalam

pendidikan karakter: *moral knowing* (pengetahuan moral), *moral feeling* (perasaan moral), dan *moral action* (tindakan moral). Budaya sekolah yang Islami yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa memfasilitasi tercapainya ketiga dimensi tersebut. *Moral knowing* diperoleh melalui pembelajaran di kelas dan integrasi nilai dalam dokumen kurikulum. *Moral feeling* dikembangkan melalui pembiasaan religius yang menyentuh aspek emosional. *Moral action* diwujudkan melalui praktik nyata dalam interaksi sehari-hari. Keterpaduan ketiga dimensi ini dalam lingkungan yang Islami menghasilkan internalisasi nilai yang mendalam dan berkelanjutan. Dokumentasi kegiatan religius yang sistematis menjadi bukti bahwa *moral action* tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi menjadi kebiasaan yang terpelihara.

Teori Bandura tentang *social learning* juga memberikan kontribusi dalam memahami temuan ini. Bandura menyatakan bahwa perilaku individu dipelajari melalui observasi, imitasi, dan *modeling*. Guru yang menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan ibadah berfungsi sebagai model yang diamati dan ditiru oleh peserta didik. Lingkungan sekolah yang Islami menyediakan berbagai model perilaku positif yang dapat diobservasi dan diimitasi oleh siswa. Dokumentasi kegiatan religius menunjukkan bahwa proses modeling ini berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga nilai-nilai Islami tidak hanya dipelajari secara kognitif, tetapi juga diinternalisasi melalui observasi dan imitasi.

Dengan demikian, temuan ini tidak hanya memperkuat relevansi teori-teori yang telah dikemukakan para ilmuwan di Bab II, tetapi juga menunjukkan aktualisasi pemikiran tersebut dalam konteks pendidikan modern. Budaya sekolah yang Islami yang terintegrasi dalam dokumen kurikulum dan praktik pembelajaran membuktikan bahwa internalisasi nilai-nilai Islami dapat berjalan secara efektif ketika didukung oleh perencanaan yang sistemik (Tyler), partisipasi aktif guru (Taba), refleksi berkelanjutan (Stenhouse), keseimbangan jiwa (Ibnu Miskawaih), penyucian jiwa (Al-Ghazali), keselarasan dengan peradaban (Ibn Khaldun).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh*, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, maka diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

5.1.1 Internalisasi Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh telah terlaksana dengan sangat baik dan efektif, ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 4,20 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Proses internalisasi ini berlangsung secara sistematis dan terencana melalui tiga jalur utama, yaitu keteladanan guru (uswah hasanah), pembiasaan religius (ta'wīd al-dīniyyah), dan integrasi nilai-nilai Islami ke dalam dokumen dan praktik pembelajaran. Ketiga jalur ini saling melengkapi dan membentuk suatu ekosistem pendidikan yang berkarakter Islami di lingkungan sekolah penggerak Aceh³³⁷

Keteladanan guru muncul sebagai indikator paling dominan dengan skor rata-rata 4,35, menegaskan bahwa guru memegang peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai akhlak dan spiritual kepada peserta didik. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai figur moral dan spiritual yang memberikan teladan nyata dalam tutur kata, berpakaian sopan, kedisiplinan, serta interaksi sosial yang santun dan penuh tanggung jawab. Sikap guru yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti sabar, amanah, adil, dan jujur menjadi faktor penting dalam

³³⁷ HR. al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, no. hadis 1358.

membangun karakter religius siswa. Dengan demikian, keteladanan guru bukan sekadar aspek personal, melainkan instrumen pedagogis yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter Islami peserta didik.

Selanjutnya, pembiasaan religius (ta'wīd al-dīniyyah) menjadi strategi penting dalam mendukung keberhasilan internalisasi nilai Islami. Pembiasaan ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan rutin seperti shalat dhuha dan dzuhur berjamaah, doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, tadarus Al-Qur'an setiap pagi, kegiatan infak Jumat, serta peringatan hari besar Islam. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya membangun kedekatan spiritual antara siswa dan Allah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kebersamaan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab. Rutinitas religius ini membentuk kebiasaan positif (habituation) yang secara bertahap membentuk karakter dan kepribadian Islami peserta didik, sekaligus memperkuat budaya religius di sekolah.

Aspek ketiga, yaitu integrasi nilai Islami dalam dokumen kurikulum dan praktik pembelajaran, menunjukkan bahwa internalisasi tidak berhenti pada level kegiatan seremonial, tetapi telah tertanam dalam perangkat kebijakan dan perencanaan pendidikan sekolah. Hal ini terlihat dari Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), modul ajar, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang secara eksplisit mencantumkan nilai spiritual dan akhlak mulia sebagai bagian dari tujuan pembelajaran dan capaian kompetensi peserta didik. Dalam beberapa modul ajar, ditemukan pula kolom khusus untuk "Integrasi Nilai Islami", yang memuat ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang relevan dengan topik pelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Islam tidak hanya menjadi tambahan, tetapi merupakan substansi utama yang mengarahkan proses belajar menuju keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan akhlak.

Temuan ini membuktikan bahwa internalisasi nilai Islami di Sekolah Penggerak Aceh bukan sekadar bersifat simbolik atau normatif, melainkan telah menjadi bagian integral dari budaya

sekolah (*school culture*) dan berpengaruh nyata terhadap seluruh dimensi pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Nilai-nilai Islam telah menjadi roh penggerak (*spiritual engine*) dalam seluruh proses pendidikan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran. Kondisi ini selaras dengan visi Profil Pelajar Pancasila, terutama pada dimensi “beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.”

Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim³³⁸ menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang agama (*tafaqquh fiddin*) merupakan anugerah dan tanda khusus dari Allah bagi orang yang dikehendaki-Nya memperoleh kebaikan. Dalam konteks pendidikan, hal ini selaras dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Aceh tidak hanya bersifat tekstual, tetapi telah menjadi fondasi spiritual yang menggerakkan seluruh proses pembelajaran. Upaya pendalaman nilai agama melalui keteladanan, pembiasaan, dan integrasi kurikuler bukan sekadar memenuhi standar administratif, melainkan mencerminkan komitmen hakiki untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga berkarakter mulia sesuai dengan visi Profil Pelajar Pancasila. Dengan demikian, keberhasilan internalisasi nilai Islami dalam kurikulum tersebut dapat dipandang sebagai wujud nyata dari kehendak Allah untuk memberikan kebaikan (خَيْرًا) melalui jalan pendidikan yang holistik dan berorientasi pada pembentukan insan paripurna (insan kamil).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Penggerak di Aceh telah berhasil membangun model implementasi Kurikulum Merdeka yang berbasis nilai Islami, yang tidak hanya berorientasi pada kecerdasan akademik, tetapi juga menumbuhkan kepribadian religius, moralitas tinggi, dan karakter sosial yang kuat. Model ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam

³³⁸ HR. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-‘Ilm, Bāb Man Yurid Allāhu bihī Khairan Yufaqqihhu fī al-Dīn, no. 71; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh, Bāb al-Nahy ‘an al-Mas’alah, no. 1037.

dan kebijakan nasional Kurikulum Merdeka dapat berjalan secara sinergis, menghasilkan generasi pembelajar yang tidak hanya cerdas dan kreatif, tetapi juga beriman, berakhlak mulia, dan memiliki integritas spiritual yang menjadi jati diri pendidikan Aceh.

5.1.2 Nilai-Nilai Islami yang Diterapkan dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Nilai-nilai Islami yang diimplementasikan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh mencerminkan suatu sistem pendidikan yang berakar kuat pada tauhid sebagai fondasi utama pembentukan karakter Islami. Berdasarkan hasil analisis kualitatif dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen (KOSP, RPP, dan modul ajar), ditemukan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi diinternalisasikan secara sistemik melalui kegiatan pembelajaran, budaya sekolah, dan proyek berbasis Profil Pelajar Pancasila (P5). Pendekatan ini menjadikan nilai Islami sebagai jiwa pendidikan yang menjiwai setiap aspek pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas.

Secara konseptual, nilai-nilai Islami yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup tiga dimensi utama akhlak, yaitu:

- 1) Akhlak kepada Allah, yang tercermin dalam ketaatan beribadah, rasa syukur, dan kesadaran spiritual peserta didik terhadap kehadiran Allah dalam setiap aktivitas belajar;
- 2) Akhlak kepada sesama manusia, yang diwujudkan dalam bentuk sikap hormat kepada guru, kasih sayang antar teman, kejujuran, tanggung jawab, dan tolong-menolong; serta
- 3) Akhlak terhadap lingkungan, berupa kesadaran menjaga kebersihan, memelihara alam, dan menggunakan sumber daya secara bijaksana.

Ketiga dimensi ini saling terhubung dan menjadi pedoman utama dalam menanamkan nilai-nilai karakter Islami di sekolah, sesuai dengan prinsip rahmatan lil-'alamin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keteladanan (uswah) merupakan unsur yang paling dominan dan efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Guru menjadi role model bagi siswa dalam hal disiplin, tanggung jawab, kesopanan, dan spiritualitas. Mereka menanamkan ajaran Islam bukan hanya melalui ceramah, tetapi melalui perilaku nyata (dakwah bil-hal) yang dapat diamati dan diteladani oleh siswa setiap hari. Sikap guru yang sabar, jujur, dan adil menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang Islami dan penuh kasih.

Nilai disiplin Islami (al-inḏhibāt al-Islāmī) juga menjadi karakter yang dikembangkan secara konsisten. Peserta didik dibiasakan mematuhi waktu shalat, mengikuti jadwal tadarus pagi, menjaga kebersihan lingkungan, serta melaksanakan tugas akademik tepat waktu. Pembiasaan ini menumbuhkan tanggung jawab spiritual bahwa setiap tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah.

Selanjutnya, nilai kejujuran (al-ṣidq) diinternalisasikan melalui kegiatan pembelajaran, penilaian, dan interaksi sosial. Guru menekankan pentingnya berkata dan berbuat jujur, baik dalam mengerjakan tugas maupun saat menghadapi ujian, agar siswa memiliki integritas moral yang tinggi. Sementara tanggung jawab (al-mas'ūliyyah) dan kepedulian sosial (al-ta'āwun) dikembangkan melalui kegiatan sosial sekolah seperti infak Jumat, kerja bakti, dan proyek sosial berbasis P5. Aktivitas ini menumbuhkan empati dan rasa kebersamaan antar warga sekolah.

Selain itu, kedisiplinan ibadah (al-'ibādah al-munazzhamah) menjadi bagian penting dari kultur sekolah. Siswa dilatih untuk melaksanakan ibadah rutin seperti shalat dhuha dan dzuhur berjamaah, membaca Al-Qur'an setiap pagi, serta memperingati hari-hari besar Islam dengan kegiatan edukatif dan spiritual. Semua aktivitas tersebut membentuk kebiasaan religius yang berkelanjutan dan memperkuat spiritualitas siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai Islami ini tidak berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan secara kontekstual melalui model pembelajaran

berbasis proyek (Project-Based Learning) dan kegiatan P5. Misalnya, dalam proyek “Sekolah Ramah Lingkungan Islami”, siswa diajak memahami ajaran Islam tentang kebersihan sebagai bagian dari iman (an-nadhafatu min al-īmān) sekaligus menerapkan prinsip ramah lingkungan secara praktis. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami nilai secara kognitif, tetapi juga mengalaminya secara langsung (experiential learning), sehingga pembentukan karakter berlangsung secara reflektif dan mendalam.

Lebih jauh, penelitian ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islami berjalan seiring dan saling menguatkan dengan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila, khususnya dimensi “beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.” Nilai tanggung jawab dan amanah memperkuat dimensi mandiri; nilai gotong royong dan kepedulian sosial memperkuat dimensi bergotong royong; sedangkan nilai disiplin, kejujuran, dan integritas memperkuat dimensi bernalar kritis dan berintegritas. Dengan demikian, penerapan nilai Islami bukan hanya kompatibel dengan Kurikulum Merdeka, tetapi juga menjadi elemen penguat moral dan spiritual bagi keberhasilan pendidikan nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai Islami di sekolah penggerak Aceh tidak bersifat eksklusif atau sektarian, melainkan inklusif dan integratif, menjadikan pendidikan di Aceh sebagai model yang harmonis antara kebijakan nasional dan identitas keislaman lokal. Integrasi nilai-nilai Islami ini terbukti memperkuat pelaksanaan Kurikulum Merdeka dengan menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas dan kreatif, tetapi juga beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi - sesuai dengan visi pendidikan nasional dan karakter masyarakat Aceh yang religius.

5.1.3 Tantangan dan Hambatan dalam Internalisasi Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat internalisasi nilai-nilai Islami di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh berada pada kategori sangat baik, kenyataannya masih terdapat

sejumlah tantangan dan hambatan struktural, pedagogis, serta kultural yang menghambat proses internalisasi berjalan optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan guru, kepala sekolah, serta analisis dokumen sekolah, hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu tantangan pedagogis dan profesional guru, keterbatasan sarana dan dukungan institusional, serta kendala budaya dan konsistensi pelaksanaan.

1. Tantangan pedagogis dan profesional guru.

Salah satu hambatan paling dominan terletak pada aspek kompetensi pedagogis guru, khususnya dalam merancang asesmen autentik berbasis kompetensi yang sesuai dengan paradigma Merdeka Belajar. Sebagian besar guru masih cenderung berfokus pada penilaian kognitif tradisional yang mengukur hafalan atau pemahaman teoritis, sementara dimensi afektif dan spiritual siswa—seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian sosial—belum sepenuhnya terukur secara sistematis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada pembentukan karakter holistik dengan praktik asesmen di lapangan.

Selain itu, hasil wawancara juga mengungkap bahwa pelatihan teknis tentang integrasi nilai Islami dalam pembelajaran masih sangat terbatas. Sebagian guru mengaku belum memperoleh bimbingan yang memadai terkait cara mengaitkan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis dengan materi pelajaran umum seperti sains, matematika, atau IPS. Padahal, kemampuan mengontekstualisasikan nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu merupakan kunci utama dari pendekatan integratif yang diharapkan oleh penelitian ini. Dengan demikian, dibutuhkan program peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang berfokus pada Islamic Value-Based Pedagogy, agar guru mampu menjadi agen utama dalam mentransformasikan nilai-nilai Islami ke dalam seluruh aspek pembelajaran.

2. Keterbatasan sarana dan dukungan institusional.

Hasil observasi dan telaah dokumen menunjukkan bahwa dukungan sarana prasarana menjadi faktor signifikan dalam keberhasilan internalisasi nilai Islami. Beberapa sekolah penggerak di Aceh menghadapi keterbatasan ruang ibadah, minimnya alat penunjang kegiatan keagamaan seperti Al-Qur'an dan perlengkapan ibadah, serta kurangnya fasilitas audio-visual untuk mendukung kegiatan literasi keislaman. Selain itu, padatnya jadwal akademik dan administratif membuat waktu untuk kegiatan religius seperti shalat dhuha, tadarus pagi, atau kajian singkat menjadi terbatas.

Dukungan dari pihak eksternal, seperti pemerintah daerah dan orang tua, juga belum merata. Meskipun sebagian besar wali murid menunjukkan sikap positif terhadap kegiatan keagamaan, masih ada sebagian yang menganggap bahwa kegiatan religius hanya bersifat tambahan, bukan bagian integral dari proses pendidikan formal. Padahal, sesuai dengan semangat Qanun Pendidikan Aceh dan Kurikulum Merdeka, nilai-nilai keagamaan seharusnya menjadi poros utama dalam pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi yang lebih kuat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah agar internalisasi nilai Islami mendapatkan dukungan sistemik yang berkelanjutan.

3. Kendala budaya dan konsistensi pelaksanaan.

Secara sosiologis, Aceh dikenal sebagai daerah dengan identitas Islam yang kuat, namun hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi nilai Islami belum sepenuhnya merata di semua sekolah penggerak. Perbedaan komitmen guru, latar belakang peserta didik, serta variasi dalam kepemimpinan kepala sekolah menyebabkan tingkat internalisasi nilai Islami bervariasi antar lembaga. Beberapa sekolah mampu membangun budaya Islami yang kuat dan berkelanjutan, sementara yang lain masih berfokus pada kegiatan simbolik tanpa pendalaman nilai.

Selain itu, faktor beban administratif guru dalam proses transisi ke Kurikulum Merdeka turut memengaruhi konsistensi pelaksanaan kegiatan pembiasaan religius. Banyak guru mengaku waktu mereka tersita untuk penyusunan dokumen dan laporan,

sehingga pelaksanaan kegiatan spiritual seperti mentoring keagamaan atau refleksi nilai Islami terkadang tidak berjalan secara rutin. Hambatan budaya juga muncul dari pergeseran nilai generasi muda, di mana sebagian siswa menunjukkan penurunan minat terhadap kegiatan keagamaan akibat pengaruh media digital dan budaya populer. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah untuk mengembangkan metode internalisasi nilai Islami yang lebih inovatif, interaktif, dan relevan dengan konteks generasi digital.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, penelitian ini menemukan bahwa sekolah-sekolah penggerak di Aceh menunjukkan resiliensi dan adaptabilitas tinggi dalam mempertahankan semangat internalisasi nilai Islami. Beberapa strategi adaptif yang diterapkan antara lain:

- 1) Penyusunan jadwal kegiatan religius yang fleksibel, disesuaikan dengan kondisi sekolah agar pembiasaan tetap berjalan tanpa mengganggu jam belajar inti.
- 2) Kolaborasi lintas mata pelajaran, di mana guru non-agama turut berperan dalam menyisipkan nilai-nilai Islami pada konteks pembelajaran masing-masing, misalnya dengan mengaitkan sains dengan ayat-ayat kauniah atau nilai tanggung jawab sosial dalam pelajaran IPS.
- 3) Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan forum guru penggerak, sebagai sarana berbagi praktik baik (best practices) dan inovasi pembelajaran Islami antar sekolah.
- 4) Keterlibatan aktif komite sekolah dan masyarakat dalam mendukung kegiatan keagamaan, seperti program “Sekolah Ramah Ibadah” dan “Gerakan Literasi Qurani.”

Dengan berbagai strategi tersebut, sekolah penggerak di Aceh berhasil menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat hambatan pedagogis, struktural, dan budaya, nilai-nilai Islami tetap dapat diinternalisasikan secara efektif dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Justru melalui tantangan inilah muncul peluang bagi pengembangan model pendidikan yang lebih holistik-

menggabungkan inovasi kurikulum nasional dengan kearifan spiritual dan budaya lokal Aceh sebagai kekuatan moral dan identitas pendidikan Islami yang unggul.

5.1.4 Kebaruan Penelitian: Konsep Integrasi Nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka Berbasis Sekolah Penggerak

Sebagai kebaruan (*novelty*), penelitian ini menghasilkan konsep "Integrasi Nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka Berbasis Sekolah Penggerak". Konsep ini lahir dari sintesis antara temuan empiris di lapangan, kajian teoretis yang mendalam, serta konteks kekhasan Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam. Konsep ini tidak hanya menjadi jawaban atas celah penelitian (*research gap*) yang teridentifikasi, tetapi juga menawarkan perspektif baru tentang hubungan harmonis antara nilai-nilai keislaman dan kebijakan pendidikan nasional.

Secara substantif, konsep ini menegaskan bahwa nilai-nilai Islami bukan sekadar muatan lokal atau tambahan dalam Kurikulum Merdeka, tetapi dapat menjadi kerangka utama dan fondasi filosofis dalam menguatkan Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi "beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia". Temuan penelitian membuktikan bahwa internalisasi nilai Islami tidak hanya kompatibel dengan Kurikulum Merdeka, tetapi justru memperkuat pencapaian tujuan kurikulum secara signifikan ($R^2=0,62$). Keteladanan guru, pembiasaan religius, dan integrasi nilai Islami dalam pembelajaran tidak hanya membentuk karakter Islami peserta didik, tetapi juga menciptakan ekosistem pembelajaran yang kondusif bagi pengembangan kompetensi akademik dan keterampilan abad ke-21. Dengan demikian, konsep ini menggeser paradigma dari "nilai Islam sebagai pelengkap" menjadi "nilai Islam sebagai fondasi".

Secara teoretis, konsep ini mengintegrasikan tiga kerangka utama ke dalam satu kesatuan yang utuh dan aplikatif. Pertama, teori pendidikan Islam klasik dari Ibnu Miskawaih (pembiasaan dan *The Golden Mean*), Al-Ghazali (*tazkiyat al-nafs*), dan Ibn Khaldun

(*tadarruj* dan keteladanan guru) diaktualisasikan dalam praktik pembelajaran modern. Kedua, teori kurikulum modern dari Ralph Tyler (tujuan, pengalaman belajar, organisasi, evaluasi), Hilda Taba (partisipasi guru), dan Lawrence Stenhouse (kurikulum sebagai hipotesis) diterapkan secara kontekstual melalui dokumen kurikulum dan refleksi berkelanjutan. Ketiga, teori pendidikan karakter (Lickona) dan Taksonomi Bloom (kognitif, afektif, psikomotorik) diperkaya dengan dimensi spiritual Islami, menjadikan akhlak sebagai puncak dari ranah afektif. Integrasi ketiga kerangka ini menghasilkan model teoretis yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga aplikatif dalam konteks pendidikan di Aceh maupun daerah lain dengan karakteristik serupa.

Secara praktis, konsep ini menawarkan model implementasi integratif yang telah terbukti efektif melalui strategi holistik yang saling melengkapi. Keenam strategi yang teridentifikasi—pembiasaan religius, keteladanan guru, integrasi nilai dalam pembelajaran lintas mata pelajaran, penegakan disiplin Islami, penyisipan ayat Al-Qur'an dan hadis, serta penggunaan kisah-kisah Islami—merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Model ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi telah diuji melalui penelitian empiris dengan tingkat pengaruh yang signifikan (62%). Bagi guru, model ini memberikan panduan konkret tentang strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Bagi kepala sekolah, model ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan budaya sekolah Islami. Bagi pemerintah daerah, model ini menjadi dasar dalam menyusun program pelatihan dan pendampingan yang tepat sasaran. Model ini juga dirancang agar adaptif dan dapat direplikasi di daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Secara konseptual, konsep ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islami dan nilai-nilai Pancasila dapat berjalan secara sinergis dan saling menguatkan, bukan dalam posisi dikotomis apalagi konfliktual. Sinergi ini terwujud dalam berbagai dimensi. Nilai tanggung jawab dan amanah (*al-mas'uliyah*) memperkuat dimensi mandiri dalam Profil Pelajar Pancasila. Nilai gotong royong dan

kepedulian sosial (*al-ta'awun*) memperkuat dimensi bergotong royong. Nilai disiplin, kejujuran, dan integritas memperkuat dimensi bernalar kritis. Nilai keimanan dan ketakwaan memperkuat dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, akhlak tidak hanya menjadi ruh yang menjiwai seluruh proses pembelajaran, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan cita-cita pendidikan nasional dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal Aceh. Konsep ini sekaligus menjawab kekhawatiran sebagian kalangan bahwa pendidikan karakter di Indonesia cenderung sekuler dan mengabaikan dimensi transendental, dengan membuktikan bahwa nilai-nilai agama justru dapat memperkuat dan memperkaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Konsep "Integrasi Nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka Berbasis Sekolah Penggerak" menjadi sumbangan orisinal penelitian ini bagi pengembangan teori dan praktik pendidikan Islam di Indonesia. Kebaruan konsep ini terletak pada: (1) integrasi tiga kerangka teoretis yang selama ini berkembang terpisah; (2) aktualisasi pemikiran pendidikan Islam klasik dalam konteks kebijakan pendidikan modern; (3) model implementasi yang berbasis bukti empiris (*evidence-based*) dengan tingkat pengaruh yang terukur; (4) penegasan bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila dapat bersinergi secara harmonis; dan (5) adaptabilitas model yang memungkinkan replikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya relevan untuk pengembangan pendidikan di Aceh, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai agama di daerah-daerah lain di Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi moral dan spiritual bangsa Indonesia yang religius dalam menghadapi tantangan global.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh*, diperoleh sejumlah temuan penting yang memiliki implikasi teoretis dan praktis bagi guru, kepala

sekolah, pemerintah daerah, dan peneliti berikutnya. Rekomendasi ini disusun dengan mempertimbangkan data kuantitatif yang menunjukkan pengaruh signifikan internalisasi nilai Islami terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka sebesar 62% ($R^2 = 0,62$), serta hasil kualitatif yang menegaskan pentingnya keteladanan, pembiasaan religius, dan integrasi nilai Islami dalam pembelajaran.

5.2.1 Saran bagi Guru

Guru merupakan aktor utama dalam keberhasilan internalisasi nilai Islami di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keteladanan guru memperoleh skor tertinggi (mean = 4,35), menandakan bahwa perilaku, sikap, dan moral guru menjadi kunci utama dalam menanamkan nilai-nilai Islam kepada siswa. Oleh karena itu:

1. Guru disarankan untuk terus memperkuat peran keteladanan (uswah hasanah), baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, dengan menjaga konsistensi antara ucapan, tindakan, dan nilai-nilai yang diajarkan.
2. Guru perlu mengintegrasikan nilai Islami ke dalam seluruh mata pelajaran, bukan hanya Pendidikan Agama Islam, melalui penyisipan ayat Al-Qur'an, hadis, kisah teladan, atau prinsip moral Islami yang relevan dengan topik pelajaran.
3. Guru juga perlu meningkatkan kompetensi dalam asesmen berbasis kompetensi, khususnya yang mengukur ranah afektif dan spiritual siswa. Aspek evaluasi ini masih menunjukkan skor terendah (mean = 3,92), sehingga pelatihan tentang *authentic assessment* dan *holistic evaluation* perlu diikuti secara berkelanjutan.
4. Guru diharapkan memanfaatkan platform *Merdeka Mengajar* sebagai sarana berbagi praktik baik dan inovasi pembelajaran berbasis nilai Islami agar tercipta jejaring profesional yang saling menguatkan.

5.2.2 Saran bagi Kepala Sekolah

Sebagai pemimpin lembaga pendidikan, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menciptakan budaya sekolah yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Berdasarkan temuan penelitian, internalisasi nilai Islami akan lebih efektif apabila didukung oleh kebijakan dan kultur sekolah yang kondusif. Oleh sebab itu:

1. Kepala sekolah disarankan untuk menyusun kebijakan sekolah yang berorientasi pada penguatan nilai Islami, baik melalui tata tertib, kegiatan intrakurikuler, maupun ekstrakurikuler.
2. Kepala sekolah perlu melakukan supervisi akademik dan pembinaan berkelanjutan bagi guru untuk memastikan bahwa integrasi nilai Islami berjalan secara konsisten dalam setiap kegiatan pembelajaran.
3. Diperlukan upaya untuk memperkuat budaya religius sekolah (school religious culture) melalui kegiatan rutin seperti shalat dhuha berjamaah, tadarus, infak Jumat, dan peringatan hari besar Islam agar menjadi bagian dari identitas sekolah.
4. Kepala sekolah diharapkan memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dalam menyusun perangkat ajar berbasis nilai Islami, seperti modul ajar, proyek P5 bernuansa keislaman, atau kegiatan literasi Qur'ani yang kontekstual dengan Kurikulum Merdeka.

5.2.3 Saran bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan dan fasilitas memiliki peran signifikan dalam memperkuat internalisasi nilai Islami. Untuk itu:

1. Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Aceh disarankan menyelenggarakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi guru dan kepala sekolah terkait asesmen berbasis kompetensi Islami dan strategi integrasi nilai-nilai Islam ke dalam Kurikulum Merdeka.

2. Pemerintah perlu memperkuat muatan Islami dalam Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) agar tetap selaras dengan *Qanun Pendidikan Aceh* tanpa mengabaikan prinsip Profil Pelajar Pancasila.
3. Diperlukan insentif atau penghargaan bagi sekolah penggerak yang berhasil mengintegrasikan nilai Islami secara efektif dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, baik berupa bantuan fasilitas, dana inovasi, maupun pengakuan formal.
4. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan keagamaan, seperti ruang ibadah, sarana literasi Al-Qur'an, dan media pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam.

5.2.4 Saran bagi Sekolah dan Lembaga Pendidikan Islam

Bagi sekolah dan lembaga pendidikan Islam lainnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai Islami bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan inti dari pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang berkarakter. Oleh karena itu:

1. Sekolah disarankan mengembangkan model pembelajaran integratif yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pembelajaran kontekstual berbasis proyek (*Project-Based Learning*) dan *Profil Pelajar Pancasila*.
2. Sekolah perlu membentuk tim pengembang kurikulum Islami internal yang bertugas meninjau dan menyesuaikan dokumen kurikulum (KOSP, RPP, modul ajar) agar seluruhnya memuat dimensi akhlak dan spiritual.
3. Diperlukan sinergi antara sekolah, komite, dan masyarakat untuk memperkuat dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan karakter Islami siswa.
4. Sekolah penggerak juga dapat menjadi model praktik baik (best practice) bagi sekolah lain dalam menerapkan integrasi nilai Islami ke dalam kebijakan nasional Kurikulum Merdeka.

5.2.5 Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini membuka ruang luas untuk pengembangan kajian lanjutan terkait hubungan antara nilai-nilai Islam dan kebijakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, peneliti berikutnya disarankan untuk:

1. Melakukan penelitian dengan pendekatan mixed methods atau kualitatif mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik internalisasi nilai Islami di berbagai konteks sekolah.
2. Memperluas objek penelitian ke sekolah non-penggerak atau wilayah di luar Aceh untuk melakukan perbandingan implementasi nilai Islami dalam Kurikulum Merdeka di daerah dengan karakter sosial-budaya yang berbeda.
3. Mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan Kurikulum Merdeka, seperti kepemimpinan transformasional, partisipasi orang tua, budaya organisasi sekolah, dan dukungan masyarakat.
4. Mengembangkan instrumen pengukuran baru yang dapat menilai tingkat internalisasi nilai Islami secara lebih valid dan reliabel, mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, M. A. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2015.
- Al-Attas, S. M. N. *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: ABIM, 1980.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- Al-Gazālī, M. ibn M. *Tahāfut al-falāsifah*. Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1957.
- Al-Gazālī, M. ibn M. *Mi‘yār al-‘ilm*. Diedit oleh S. Dunya. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1960.
- Al-Gazālī, M. ibn M. *al-Munqidh min al-ḍalāl*. Kairo: Silsilāt al-Tsaqafah al-Islamiyyah, 1961.
- Al-Gazālī, M. ibn M. *Mīzān al-‘amal*. Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1964.
- Al-Gazālī, M. ibn M. *Mi‘rāj al-sālikīn*. Kairo: al-Thaqāfah al-Islāmiyyah, 1964.
- Al-Gazālī, M. ibn M. *Ma‘ārij al-quds fī madārij ma‘rifat al-naḥs*. Kairo: Maktabat al-Jundīdat, 1968.
- Alim, M. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Rosdakarya, 2011.
- Al-Syaibany, Omar Mohammad Al-Toumy. *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Aristotle. *Nicomachean Ethics in the Work of Aristotle*. Diterjemahkan oleh W. N. Ross. Chicago: University of Chicago, 1982.
- Ayuningtyas, Ida Lutfi dan Didi Pramono. "Internalisasi Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di SMAN 11 Semarang." *Journal of Education Research and Evaluation* 7, No. 1 (2023): 15–

23. <https://doi.org/10.23887/jere.v7i1>
- Azra, A. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Azra, A. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BSNP, 2006.
- Bakar, Osman. *Tauhid and Science: Essays on the History and Philosophy of Islamic Science*. Kuala Lumpur: Secretariat for Islamic Philosophy and Science, 1991.
- Bandura, A. *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986.
- Banks, J. A. *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. Edisi ke-6. New York: Routledge, 2016.
- Bloom, B. S. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay, 1956.
- Bloom, B. S., J. T. Hastings, dan G. F. Madaus. *Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning*. New York: McGraw-Hill, 1971.
- Bloom, B. S., D. R. Krathwohl, dan B. B. Masia. *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook II, Affective Domain*. New York: David McKay, 1964.
- Bloom, Benjamin S. dan David R. Krathwohl. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay, 1956.
- Buzzelli, C. A. "The Moral Dimensions of Assessment in Early Childhood Education." *Contemporary Issues in Early Childhood* 19, No. 2 (2018): 154–166. <https://doi.org/10.1177/1463949118778021>
- Camilleri, J. A. *A Civilization in Crisis: Human Prospects in a*

- Changing World*. London: Cambridge University Press, 1976.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-4. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Creswell, John W. dan Vicki L. Plano Clark. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Edisi ke-2. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2011.
- Delors, Jacques et al. *Learning: The Treasure Within: Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century*. Paris: UNESCO Publishing, 2004.
- Denzin, N. K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill, 1978.
- Depdiknas. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Pedoman Umum*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2004.
- Dewantara, K. H. *Pemikiran tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Taman Siswa, 1936.
- Dewey, John. *Experience and Education*. New York: Macmillan, 1938.
- Eisner, E. W. *The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of School Programs*. New Jersey: Prentice Hall, 2002.
- Elkind, D. dan F. Sweet. *How to Do Character Education*. California: Character Education Partnership, 2004.
- Epstein, J. L. *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*. Edisi ke-2. Boulder, CO: Westview Press, 2011.
- Fakhry, M. *Etika dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Z. Baidhawiy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum, 1970.
- Fullan, Michael. *The New Meaning of Educational Change*. Edisi ke-4. New York: Teachers College Press, 2007.
- Fullan, Michael, Joanne Quinn, dan Joanne McEachen. *Deep Learning: Engage the World Change the World*. Thousand

- Oaks, CA: Corwin, 2018.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Habibullah, N. "Manajemen Pendidikan Karakter pada Kurikulum Merdeka Belajar." *At-Ta'lim: Kajian Pendidikan Agama Islam* 5, No. 1 (2023): 67.
- Hadi, A. dan S. Hanani. "Analisis Pemikiran Ibn Khaldun terhadap Konsep Pendidikan Islam Perspektif Modern." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, No. 4 (2023): 154–162.
- Halstead, M. dan J. M. Halstead. "An Islamic Concept of Education." *Comparative Education* 37, No. 1 (2010): 37–41. <https://doi.org/10.1080/0305006042000284510>
- Hamalik, O. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Hamalik, Oemar. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Hamim, Nur. "Pendidikan Akhlak: Komparasi Konsep Pendidikan Ibnu Miskawaih dan al-Ghazali." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 18, No. 2 (2014): 391–410. <https://doi.org/10.20414/ujs.v18i2.851>
- Hasan, N. "Pendidikan Islam dalam Perspektif Pembangunan Sumber Daya Manusia." *Jurnal Pendidikan Islam* 5, No. 2 (2010): 121–135.
- Heryahya, A., E. S. B. Herawati, A. D. Susandi, dan F. Zulaiha. "Analisis Kesiapan Guru Sekolah Dasar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka." *Journal of Education and Instruction (JOEI)* 5, No. 2 (2022): 548–562.
- Hidayat, R. "Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Kurikulum Pendidikan Nasional." *Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 2 (2018): 123–138.
- Hidayat, S. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

- Hitti, P. K. *History of the Arabs*. London: Palgrave Macmillan, 2002.
- Hosnan. *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*. Diterjemahkan oleh Ahmadi Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Ibnu Miskawaih. *Tahdzib al-Akhlaq*. Diterjemahkan oleh Helmi Hidayat. Bandung: Mizan, 1994.
- Ibnu Miskawaih. *Tahdzib al-akhlaq*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Ibnu Miskawaih. *Tahdzib al-akhlaq wa tathhir al-a‘raq*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Irina, F. *Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Dua Satria Offset, 2016.
- Johnson, R. Burke dan Anthony J. Onwuegbuzie. "Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come." *Educational Researcher* 33, No. 7 (2004): 14–26.
- Kemendikbud. *Kurikulum 2013: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum*. Jakarta: Kemendikbud, 2013.
- Kemendikbud. *Panduan Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemendikbud, 2015.
- Kemendikbud. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019–2024*. Jakarta: Kemendikbud RI, 2019.
- Kemendikbudristek. *Kurikulum Merdeka: Panduan Implementasi*. Jakarta: Kemendikbudristek RI, 2022.
- Kemendikbudristek. *Merdeka Belajar Episode 15: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar*. Jakarta: Kemendikbudristek RI, 2020.
- Kemendikbudristek. *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek RI, 2022.
- Kemendikbudristek. *Program Sekolah Penggerak: Panduan Implementasi*. Jakarta: Kemendikbudristek RI, 2021.
- Kemendikbudristek. *Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Kemendikbudristek, 2022.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik

- Indonesia. *Pendekatan Deep Learning dalam Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikdasmen RI, 2025.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemendiknas, 2010.
- Kneller, George F. *Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Wiley, 1971.
- Koesoema, Doni. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo, 2012.
- Kohlberg, Lawrence. *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. San Francisco: Harper & Row, 1981.
- Kolb, David A. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Edisi ke-2. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2015.
- Krathwohl, David R. "A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview." *Theory into Practice* 41, No. 4 (2002): 212–218. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2
- Kumar, Ranjit. *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*. Edisi ke-3. London: Sage Publications, 2011.
- Kusumaryono, Suyanto. "Merdeka Belajar." Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020.
- Langgung, Hasan. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003.
- Langgung, Hasan. *Manusia dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2003.
- Lickona, Thomas. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1991.
- Mahmud. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mahmud. *Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Memon, N. "What Islamic School Teachers Want: Towards

- Developing an Islamic Teacher Education Programme." *British Journal of Religious Education* 33, No. 3 (2011): 285–298. <https://doi.org/10.1080/01416200.2011.595912>
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Montessori Group, The. *A Guide to the Montessori Educational System*. United States: The Montessori Group, 2019.
- Mudlofir, Ali. *Aplikasi Pengembangan KTSP dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mujiburrahman. "Pendidikan Islami di Aceh dalam Perspektif Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 4, No. 1 (2019): 45–59.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mulyasa, E. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nasution, S. *Asas-asas Kurikulum*. Bandung: Bumi Aksara, 2008.
- Neuman, William L. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edisi ke-7. London: Pearson, 2014.
- Oliva, Peter F. *Developing the Curriculum*. Edisi ke-7. Boston: Pearson, 2009.
- Ornstein, Allan C. dan Francis P. Hunkins. *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*. Edisi ke-7. New York: Pearson, 2018.
- Parker, L. dan R. Raihani. "Democratizing Indonesia: Community Participation." *Educational Management Administration &*

- Leadership* 39, No. 6 (2011): 712–732. <https://doi.org/10.1177/1741143211416389>
- Print, Murray. *Curriculum Development and Design*. St. Leonards: Allen & Unwin, 1993.
- Purnawanto, Ahmad Teguh. "Pendidikan Karakter melalui Internalisasi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka." *Jurnal Ilmiah Pedagogy* 23, No. 1 (2024): 101–120.
- Purnawanto, A. T. "Pendidikan Karakter melalui Internalisasi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka." *Jurnal Pedagogy* 16, No. 2 (2023): 103–115.
- Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. *Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022.
- Putri, N. S. E., F. Setiani, dan M. S. Al Fath. "Membangun Pendidikan Karakter Berbasis Kurikulum Merdeka Menuju Era Society 5.0: Building Character Education Based On The Merdeka Curriculum Towards Society Era 5.0." *Pedagogik: Jurnal Pendidikan* 18, No. 2 (2023): 194–201.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 2008.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 2015.
- Rahmaniyah, N. *Etika Pendidikan Islam Perspektif Ibnu Miskawaih*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Rahmaniyah, N. *Filsafat Etika Islam: Studi Pemikiran Ibnu Miskawaih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rahmawati, I. dan A. Nurhayati. "Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 11, No. 4 (2022): 567–578.
- Riami, R., D. H. Muhammad, dan A. Susandi. "Penanaman Pendidikan Akhlak pada Anak Usia Dini menurut Ibnu Miskawaih dalam Kitab Tahdzibul Akhlak." *Jurnal Falasifa* 12, No. 2 (2021): 189–200. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i2.2586>

- Rohmat. "Integrasi Kurikulum dan Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Membentuk Sikap Religius Siswa." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 8, No. 1 (2020): 45–60. <https://doi.org/10.36667/jppi.v8i1.456>
- Roji, F., dkk. "Concept of Islamic Education According to Ibn Sina and Ibn Khaldun." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 4, No. 2 (2021): 321–334.
- Sani, Ridwan Abdullah. *Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sanjaya, Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sanjaya, Wina. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sari, D. dan R. Utami. "Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Studi pada Asesmen Autentik." *Jurnal Inovasi Pendidikan* 20, No. 1 (2023): 45–58.
- Schiro, Michael Stephen. *Curriculum Theory: Conflicting Visions and Enduring Concerns*. Diterjemahkan oleh Endah Sulistiowati. *Teori Kurikulum: Visi-Visi yang Saling Bertentangan dan Kekhawatiran Tanpa Henti*. Jakarta: Penerbit Indeks, 2017.
- Sevea, Teren. "Islamic Education and Modern Challenges: Reform and Continuity." *Journal of Islamic Studies* 22, No. 3 (2011): 345–367.
- Simpson, Elizabeth J. *The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain*. Washington, DC: Gryphon House, 1972.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Stenhouse, Lawrence. *An Introduction to Curriculum Research and Development*. London: Heinemann, 1975.
- Stufflebeam, Daniel L. "The CIPP Model for Evaluation." Dalam *International Handbook of Educational Evaluation*, disunting oleh T. Kellaghan dan D. L. Stufflebeam, 31–62.

- Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Suparta. *Pengantar Teori dan Aplikasi Pengembangan Kurikulum PAI*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sutrisno, E. "Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara: Relevansi dengan Pendidikan Nasional." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 23, No. 2 (2018): 150–165.
- Taba, Hilda. *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Harcourt, Brace & World, 1962.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Tanner, Daniel dan Laurel Tanner. *Curriculum Development: Theory into Practice*. Edisi ke-4. New Jersey: Pearson, 2007.
- Tashakkori, Abbas dan Charles Teddlie. *Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1998.
- Tilaar, H. A. R. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Tilaar, H. A. R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Tomlinson, Carol A. *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*. Alexandria: ASCD, 2014.
- Tyler, Ralph W. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press, 1949.
- Tyler, Ralph W. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press, 2013.
- Uddin, K., A. Alam, M. Aman, dan U. Muzahid. "Informal Islamic Education and Its Role in Human Resource Development in

- Society: A Theoretical Evaluation." *IIUC Studies*, No. 3 (Desember 2006): 83–92.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wenger, Etienne. *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Weston, Peter. *Friedrich Froebel: His Life, Times & Significance*. London: University of Surrey Roehampton, 2000.
- Widiansyah, S., S. P. Hidayat, S. I. Kamil, I. D. L. B. Purba, U. Rahmawati, dan F. M. A. Khairo. "Kesiapan Guru dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka (Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas)." *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, No. 1 (2025): 344–362.
- Wiryopranoto, Suhartono et al. *Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran dan Perjuangannya*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Yanu, Y., dkk. "Penguatan Pendidikan Karakter di Era Kurikulum Merdeka." *Jurnal Pendidikan Karakter* 11, No. 2 (2021): 201–214. <https://doi.org/10.218>

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 53/Un.08/Ps/01/2025

Tentang:

PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan :**
1. Hasil Seminar Proposal Disertasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2025.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
Kesatu :**

Menunjuk:

1. **Prof. Dr. Buhori Muslim, M. Ag**
2. **Dr. Mumtazul Fikri, MA**

Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:

Nama : Teti Wahyuni

NIM : 2210020231

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Judul : Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh

- Kedua :** Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.
- Ketiga :** Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2029 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 15 Januari 2025

Direktor





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1818/Un.08/Ps.1/PP.00.09/08/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/ : TETI WAHYUNI / 221002031
NIM

Semester/ : III / Pendidikan Agama Islam
Jurusan

Alamat : JALAN. T ISKANDAR HM SHALEH LAMBHUK
sekarang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis/Disertasi dengan judul **Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh**

Banda Aceh, 27 Agustus 2025
Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.
NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 28 Februari 2026



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 26

Jalan Pemancar No.12 Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru, Telp.(0651) 45518

E-mail: sekolahdasarneri.26bna@gmail.com

Website : www.sdnegeri26bandaaceh.sch.id Kode Pos : 23230

NSS : 101066109026

NPSN : 10105322

Banda Aceh, 10 September 2025

Nomor : 422/SDN26/488/2025
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan
Penelitian

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat Saudari Teti Wahyuni Nomor : B-1818/Un.08/Ps.1/PP.00.09/08/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang izin penelitian ilmiah, maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : Teti Wahyuni
NIM : 221002031
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. T. Iskandar HM Shaleh Lambhuk

Benar telah melaksanakan penelitian di sekolah kami dalam rangka penulisan disertasi dengan judul :
" Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Kepala Sekolah,

Abdullah, S.Pd., M.Pd

Nip. 17507021999032001



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 5 SEUNAGAN



Jln. Nasional-Blang Sapek, Kode Pos 23671, Email: smpn5seunagan@gmail.com

Nomor : 400.3.5.1 / 171 /2025
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Blang Sapek, 10 September 2025

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Sehubungan dengan surat Saudari Teti Wahyuni Nomor: B-1818/Un.08/Ps.1/PP.00.09/08/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang izin penelitian ilmiah, maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Teti Wahyuni
NIM : 221002031
Semester : III
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. T. Iskandar HM Shaleh Lambhuk

Benar telah melaksanakan penelitian di sekolah kami dalam rangka penulisan disertasi dengan judul: "Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Kepala Sekolah
SMP Negeri 5 Seunagan

ISKANDAR, S.Pd., M.Pd
NIP.197012151999031002



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI LHOK BANIE
KECAMATAN LANGSA BARAT**

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Lrg. Pendidikan, Gp. Lhok Banie email : sdnlhokbanie21@gmail.com

No : 400.3.5/93/IX/SDN-LB/2025

Langsa, 9 September 2025

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan
Penelitian Ilmiah

Kepada Yth :

Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Banda Aceh

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Schubungan dengan surat Saudari Teti Wahyuni Nomor:B-1818/Un.08/Ps.1/PP.00.09/08/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang izin penelitian ilmiah, maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Teti Wahyuni
NIM : 221002031
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. T. Iskandar HM Shaleh Lambhuk

Benar telah melaksanakan penelitian di sekolah kami dalam rangka penulisan disertasi dengan judul:

"Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

A R - R A N I R



EKA MAWAR SARI, S.Pd

NIP. 19831027 200504 2 001



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KB BINA PHON

Jln Perintis Jaya Gampong Purworejo kec. Kuala kab. Nagan Raya 23661

Email : binaphonpurworejo@gmail.com Hp. 0821 6564 9935

Nomor : 24/KB-BP/2025

Purworejo, 9 September 2025

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Banda Aceh

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat Saudari Teti Wahyuni Nomor: B-1818/Un.08/Ps.1/PP.00.09/08/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang izin penelitian ilmiah, maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Teti Wahyuni
NIM : 221002031
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. T. Iskandar HM Shaleh Lambhuk

Benar telah melaksanakan penelitian di sekolah kami dalam rangka penulisan disertasi dengan judul: "Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Sekolah,

MARLINI, S.Pd.I





**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SMP NEGERI 4 BIREUEN**

Desa Lhok Awe Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Email : smpnpg4bireuen@gmail.com



Nomor : 422 /192/ 2025

Banda Aceh, 21 Oktober 2025

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Banda Aceh

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat Saudari Teti Wahyuni Nomor : B-1818/Un.08/Ps.1/PP.00.09/08/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang izin penelitian ilmiah, maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : TETI WAHYUNI

NIM : 221002031

Program Study : Pendidikan Agama Islam

Alamat : Jl. T. Iskandar HM Shaleh Lambhuk

Benar telah melaksanakan penelitian di sekolah kami dalam rangka penulisan disertai dengan judul “ Internalisasi Nilai – Nilai Islami dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh.”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakat



Pt. Kepala Sekolah

HASBIYANI, S.Pd

Nip. 19651231 198901 2 009`

INSTRUMEN ANGKET PENELITIAN DISERTASI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bapak/Ibu Guru serta Kepala Sekolah yang kami hormati,

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini sebagai bagian dari penelitian disertasi dengan judul:

"Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh."

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai Islami diinternalisasikan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menjadi tantangan dalam implementasinya.

PETUNJUK PENGISIAN

1. Kuesioner ini terdiri dari **30 butir pernyataan**.
2. Jawablah setiap pernyataan sesuai dengan **pengalaman, pengamatan, dan kondisi nyata** yang Bapak/Ibu rasakan di sekolah.
3. Gunakan skala penilaian berikut:

Skala	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

4. Tidak ada jawaban benar atau salah. Setiap jawaban Bapak/Ibu sangat berarti bagi keakuratan penelitian ini.
5. Data yang diberikan akan **dijaga kerahasiaannya** dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerja sama Bapak/Ibu. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan di Aceh dan Indonesia.

BIODATA RESPONDEN

Keterangan	Isian / Pilihan
Nama Lengkap	
Jabatan	
Usia	☐ < 30 tahun ☐ 31–40 tahun ☐ 41–50 tahun ☐ > 50 tahun
Jenis Kelamin	☐ Laki-laki ☐ Perempuan
Jenjang Pendidikan	☐ S1 ☐ S2 ☐ Lainnya:
Jenjang Instansi	
Nama Sekolah	
Lama Mengajar	☐ < 5 tahun ☐ 6–10 tahun ☐ 11–20 tahun ☐ > 20 tahun

INSTRUMEN PENELITIAN

Skala Jawaban: 1 = STS | 2 = TS | 3 = N | 4 = S | 5 = SS

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
A. INTERNALISASI NILAI ISLAMI						
1	Guru di sekolah saya selalu menunjukkan sikap jujur dalam setiap tindakan.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Guru melaksanakan ibadah (misalnya shalat) dengan baik dan menjadi contoh bagi siswa.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Guru bersikap disiplin terhadap waktu dalam kegiatan belajar mengajar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Guru menunjukkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Guru mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai Islami.	☐	☐	☐	☐	☐

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
6	Guru sering menyisipkan ayat Al-Qur'an atau hadis yang relevan dalam pembelajaran.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Guru menggunakan kisah-kisah Islami untuk menjelaskan materi pelajaran.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Nilai-nilai Islami dijadikan dasar dalam menyelesaikan permasalahan di kelas.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Aturan sekolah disusun berdasarkan prinsip-prinsip Islami (kejujuran, disiplin, tanggung jawab).	☐	☐	☐	☐	☐
10	Guru menegakkan disiplin dengan cara yang mendidik sesuai ajaran Islam.	☐	☐	☐	☐	☐
11	Tata tertib sekolah mendukung perilaku religius siswa.	☐	☐	☐	☐	☐
12	Siswa dibiasakan membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran.	☐	☐	☐	☐	☐
13	Sekolah melaksanakan kegiatan rutin seperti shalat berjamaah atau tadarus Al-Qur'an.	☐	☐	☐	☐	☐
14	Siswa dibiasakan untuk saling menghargai dan menolong antar sesama.	☐	☐	☐	☐	☐
15	Lingkungan sekolah mendukung terciptanya suasana Islami.	☐	☐	☐	☐	☐
B. PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA						
16	Guru menyusun RPP/Modul Ajar sesuai dengan struktur Kurikulum Merdeka.	☐	☐	☐	☐	☐

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
17	Guru menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa.	☐	☐	☐	☐	☐
18	Guru memahami capaian pembelajaran (CP) dan tujuan pembelajaran (TP).	☐	☐	☐	☐	☐
19	Guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi (diskusi, proyek, dll).	☐	☐	☐	☐	☐
20	Guru memanfaatkan media dan teknologi untuk mendukung pembelajaran.	☐	☐	☐	☐	☐
21	Guru menciptakan suasana kelas yang aktif, inovatif, dan menyenangkan.	☐	☐	☐	☐	☐
22	Guru memberikan kesempatan siswa untuk bereksperimen dan berkreasi.	☐	☐	☐	☐	☐
23	Siswa terlibat aktif dalam diskusi dan kerja kelompok.	☐	☐	☐	☐	☐
24	Siswa berani menyampaikan pendapat atau ide dalam pembelajaran.	☐	☐	☐	☐	☐
25	Siswa menunjukkan motivasi tinggi dalam mengikuti pembelajaran.	☐	☐	☐	☐	☐
26	Siswa diberi ruang untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui proyek.	☐	☐	☐	☐	☐
27	Guru melakukan penilaian secara holistik (kognitif, afektif, psikomotorik).	☐	☐	☐	☐	☐
28	Guru menggunakan asesmen formatif (proses) dan sumatif (hasil) sesuai Kurikulum Merdeka.	☐	☐	☐	☐	☐

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
29	Guru memberikan umpan balik yang membangun bagi siswa.	☐	☐	☐	☐	☐
30	Penilaian yang dilakukan guru membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahannya.	☐	☐	☐	☐	☐



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian Internalisasi Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Provinsi Aceh

Tujuan Wawancara:

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih mendalam mengenai:

1. Strategi guru dan sekolah dalam menginternalisasikan nilai Islami ke dalam Kurikulum Merdeka.
2. Tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut.
3. Persepsi guru mengenai efektivitas Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami terhadap perkembangan karakter siswa.

PETUNJUK PENGISIAN

- Silakan jawab setiap pertanyaan dengan jujur sesuai pengalaman nyata di sekolah.
- Tidak ada jawaban benar atau salah.
- Semua jawaban Bapak/Ibu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

IDENTITAS RESPONDEN

Keterangan

Nama (opsional)

Jabatan

Mata pelajaran yang diampu

Sekolah

Isian

.....

.....

.....

.....

PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan 1:

Bagaimana strategi Bapak/Ibu dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islami ke dalam pembelajaran Kurikulum Merdeka di sekolah?

(Contoh strategi: menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan ibadah; menyisipkan ayat Al-Qur'an atau hadis yang relevan dengan materi pelajaran; menghubungkan materi pelajaran dengan nilai Islami; membiasakan doa bersama, shalat berjamaah, atau tadarus; menegakkan disiplin Islami; memberikan kisah Islami yang sesuai dengan pelajaran; atau lainnya).

Jawaban Responden:

.....

.....

.....

Pertanyaan 2:

Apa saja tantangan yang Bapak/Ibu hadapi dalam menghubungkan nilai Islami dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka?

(Contoh tantangan: keterbatasan pemahaman guru dalam asesmen berbasis kompetensi; belum semua guru mampu mengintegrasikan nilai Islami dalam materi non-PAI; waktu pembelajaran terbatas untuk pembiasaan religius; kurangnya pelatihan khusus; perbedaan latar belakang siswa; fasilitas sekolah yang belum mendukung; atau lainnya).

Jawaban Responden:

.....

.....

.....

Pertanyaan 3:

Bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas Kurikulum Merdeka berbasis nilai Islami terhadap perkembangan karakter siswa?

(Contoh penilaian: membantu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab; membentuk akhlak mulia dan sikap saling menghargai; meningkatkan motivasi belajar Islami; membiasakan perilaku religius dalam keseharian; mendukung terciptanya

suasana sekolah Islami; atau sudah cukup baik tetapi masih perlu penguatan dalam evaluasi).

Jawaban Responden:

.....

.....

.....

Terima kasih atas partisipasi dan kerja sama Bapak/Ibu.



LAMPIRAN VALIDITAS

		X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 1 0	X 1 1	X 1 2	X 1 3	X 1 4	X 1 5	X 1 6	X 1 7	X 1 8	X 1 9	X 2 0	X 2 1	X 2 2	X 2 3	X 2 4	X 2 5	X 2 6	X 2 7	X 2 8	X 2 9	X 3 0	T o t a l	
X 1	Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	1	, 8 4 7 [°]	, 8 3 0 [°]	, 8 0 5 [°]	, 7 5 8 [°]	, 6 0 4 [°]	, 5 5 3 [°]	, 7 1 3 [°]	, 7 6 2 [°]	, 7 5 3 [°]	, 7 5 8 [°]	, 8 7 0 [°]	, 6 5 7 [°]	, 8 4 2 [°]	, 7 4 3 [°]	, 6 5 8 [°]	, 6 7 7 [°]	, 5 8 9 [°]	, 6 1 4 [°]	, 6 9 9 [°]	, 5 8 1 [°]	, 5 4 1 [°]	, 5 4 1 [°]	, 4 8 2 [°]	, 5 3 1 [°]	, 5 1 6 [°]	, 5 0 6 [°]	, 5 2 9 [°]	, 5 5 1 [°]	, 4 5 4 [°]	, 8 5 2 [°]	
			# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	0 0 1	# #	# #	# #	# #	# #	# #	0 0 1	# #	
		4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8
X 2	Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	, 8 4 7 [°]	1	, 8 0 4 [°]	, 7 7 0 [°]	, 7 6 2 [°]	, 5 8 4 [°]	, 6 1 4 [°]	, 7 2 4 [°]	, 6 5 9 [°]	, 7 6 4 [°]	, 6 8 7 [°]	, 8 2 4 [°]	, 8 2 1 [°]	, 8 2 1 [°]	, 7 4 8 [°]	, 6 5 7 [°]	, 6 3 8 [°]	, 5 9 8 [°]	, 6 2 8 [°]	, 6 5 8 [°]	, 5 8 8 [°]	, 5 5 4 [°]	, 5 5 4 [°]	, 5 4 2 [°]	, 5 5 1 [°]	, 5 6 7 [°]	, 5 7 0 [°]	, 6 7 0 [°]	, 5 5 5 [°]	, 5 5 3 [°]	, 8 6 3 [°]	
		# #		# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	
		4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8
X 3	Pe ars on Cor rel	, 8 3 0 [°]	, 8 0 4 [°]	1	, 8 9 8 [°]	, 6 7 0 [°]	, 5 9 1 [°]	, 6 3 7 [°]	, 6 8 1 [°]	, 7 2 8 [°]	, 7 9 5 [°]	, 7 0 6 [°]	, 7 6 4 [°]	, 5 6 8 [°]	, 7 9 9 [°]	, 7 1 0 [°]	, 6 2 3 [°]	, 6 2 3 [°]	, 7 1 0 [°]	, 5 7 3 [°]	, 5 4 0 [°]	, 6 9 4 [°]	, 5 7 0 [°]	, 5 8 7 [°]	, 5 1 9 [°]	, 4 8 5 [°]	, 4 9 7 [°]	, 6 0 5 [°]	, 5 8 3 [°]	, 6 4 3 [°]	, 5 3 0 [°]	, 8 4 2 [°]	

	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 1 0	X 1 1	X 1 2	X 1 3	X 1 4	X 1 5	X 1 6	X 1 7	X 1 8	X 1 9	X 2 0	X 2 1	X 2 2	X 2 3	X 2 4	X 2 5	X 2 6	X 2 7	X 2 8	X 2 9	X 3 0	T o t a l	
atio n Sig . (2- tail ed) N	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8		
X 4 Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	, 8 0 5' # # 4 8	, 7 7 0' # # 4 8	, 8 9 8' # # 4 8	1 # # 4 8	, 6 8 9' # # 4 8	, 5 9 0' # # 4 8	, 6 1 4' # # 4 8	, 6 5 0' # # 4 8	, 6 2 5' # # 4 8	, 6 8 7' # # 4 8	, 6 5 8' # # 4 8	, 7 8 8' # # 4 8	, 5 3 1' # # 4 8	, 8 0 1' # # 4 8	, 7 8 4' # # 4 8	, 5 9 0' # # 4 8	, 6 7 3' # # 4 8	, 6 9 4' # # 4 8	, 5 3 1' # # 4 8	, 5 6 0' # # 4 8	, 5 9 0' # # 4 8	, 6 0 3' # # 4 8	, 6 0 9' # # 4 8	, 5 5 3' # # 4 8	, 4 4 0' # # 4 8	, 5 0 4' # # 4 8	, 5 4 4' # # 4 8	, 6 0 1' # # 4 8	, 6 2 3' # # 4 8	, 4 9 0' # # 4 8	, 8 2 3' # # 4 8	
X 5 Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed)	, 7 5 8' # # # #	, 7 6 2' # # # #	, 6 7 0' # # # #	, 6 8 9' # # # #	1 # # # #	, 7 0 8' # # # #	, 6 8 7' # # # #	, 8 1 7' # # # #	, 6 0 1' # # # #	, 6 3 4' # # # #	, 5 3 0' # # # #	, 7 8 4' # # # #	, 5 7 0' # # # #	, 8 3 1' # # # #	, 7 6 9' # # # #	, 5 9 3' # # # #	, 6 1 3' # # # #	, 6 2 2' # # # #	, 6 2 8' # # # #	, 5 6 6' # # # #	, 6 0 9' # # # #	, 6 0 9' # # # #	, 6 1 1' # # # #	, 6 1 1' # # # #	, 5 1 5' # # # #	, 5 6 7' # # # #	, 5 9 2' # # # #	, 5 0 2' # # # #	, 4 8 7' # # # #	, 5 9 7' # # # #	, 4 1 2' # # # #	, 8 1 8' # # # #

	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 1 0	X 1 1	X 1 2	X 1 3	X 1 4	X 1 5	X 1 6	X 1 7	X 1 8	X 1 9	X 2 0	X 2 1	X 2 2	X 2 3	X 2 4	X 2 5	X 2 6	X 2 7	X 2 8	X 2 9	X 3 0	T o t a l
N	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8
X 6 Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	, 6 0 4 .	, 5 8 4 .	, 5 9 1 .	, 5 9 0 .	, 7 0 8 .	1	, 7 5 0 .	, 7 8 7 .	, 4 8 3 .	, 5 0 2 .	, 4 3 9 .	, 5 8 0 .	, 5 2 9 .	, 6 0 8 .	, 5 9 8 .	, 5 0 4 .	, 5 7 6 .	, 5 6 6 .	, 5 9 3 .	, 4 6 8 .	, 5 5 3 .	, 5 0 8 .	, 4 2 3 .	, 5 5 8 .	, 3 3 6 .	, 5 1 0 .	, 4 6 8 .	, 4 2 8 .	, 4 4 0 .	, 3 1 7 .	, 7 0 1 .
	# #	# #	# #	# #	# #		# #	# #	0 0 1	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	0 0 1	# #	# #	# #	# #	0 1 9	# #	0 0 1	# #	# #	# #	# #
	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8
X 7 Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	, 5 5 3 .	, 6 1 4 .	, 6 3 7 .	, 6 1 4 .	, 6 8 7 .	, 7 5 0 .	1	, 8 3 2 .	, 5 3 7 .	, 6 3 7 .	, 5 4 0 .	, 5 0 2 .	, 5 7 1 .	, 5 6 0 .	, 5 5 3 .	, 5 2 5 .	, 5 2 7 .	, 5 0 9 .	, 4 8 6 .	, 4 0 6 .	, 5 0 0 .	, 4 9 4 .	, 4 8 3 .	, 4 8 5 .	, 4 0 0 .	, 4 5 1 .	, 5 3 4 .	, 5 1 8 .	, 5 2 8 .	, 5 3 0 .	, 7 1 6 .
	# #	# #	# #	# #	# #	# #		# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	0 0 1	# #	# #	0 0 1	# #	# #	# #	# #	# #
	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8
X 8 Pe ars on Cor rel	, 7 1 3 .	, 7 2 4 .	, 6 8 1 .	, 6 5 0 .	, 8 7 .	, 7 8 7 .	1	, 8 3 2 .	, 5 3 3 .	, 5 9 5 .	, 5 4 7 .	, 6 2 .	, 6 0 .	, 7 0 3 .	, 6 1 8 .	, 6 6 4 .	, 6 9 0 .	, 6 5 1 .	, 5 5 1 .	, 5 6 7 .	, 5 8 .	, 5 8 4 .	, 4 9 8 .	, 4 5 4 .	, 4 0 6 .	, 4 7 6 .	, 5 3 9 .	, 5 5 5 .	, 6 2 0 .	, 4 5 9 .	, 7 9 3 .

	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 1 0	X 1 1	X 1 2	X 1 3	X 1 4	X 1 5	X 1 6	X 1 7	X 1 8	X 1 9	X 2 0	X 2 1	X 2 2	X 2 3	X 2 4	X 2 5	X 2 6	X 2 7	X 2 8	X 2 9	X 3 0	T o t a l
atio n Sig . (2-tail ed) N	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8
X 9 Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2-tail ed) N	, 7 6 2. # # 4 8	, 6 5 9. # # 4 8	, 7 2 8. # # 4 8	, 6 2 5. # # 4 8	, 6 0 1. # # 4 8	, 4 8 3. 0 0 1 # # 4 8	, 5 3 7. # # 4 8	, 5 3 3. # # 4 8	1 9 2 3. # # 4 8	, 9 2 3. # # 4 8	, 9 3 3. # # 4 8	, 6 8 6. # # 4 8	, 6 5 2. # # 4 8	, 7 2 5. # # 4 8	, 6 7 2. # # 4 8	, 5 4 0. # # 4 8	, 5 3 4. # # 4 8	, 6 2 6. # # 4 8	, 5 7 4. # # 4 8	, 5 0 7. # # 4 8	, 6 9 6. # # 4 8	, 4 8 7. # # 4 8	, 5 1 0. # # 4 8	, 5 2 5. # # 4 8	, 6 2 2. # # 4 8	, 5 3 9. # # 4 8	, 5 1 8. # # 4 8	, 4 8 8. # # 4 8	, 5 0 5. # # 4 8	, 5 7 4. # # 4 8	, 7 9 2. # # 4 8
X 1 0 Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2-tail ed)	, 7 5 3. # #	, 7 6 4. # #	, 7 9 5. # #	, 6 8 7. # #	, 6 6 4. # #	, 5 0 2. # #	, 6 3 7. # #	, 5 9 5. # #	1 9 2 3. # #	, 8 5 5. # #	, 7 1 4. # #	, 6 7 8. # #	, 7 9 5. # #	, 6 9 9. # #	, 6 0 0. # #	, 6 5 1. # #	, 6 0 0. # #	, 5 9 7. # #	, 5 6 7. # #	, 7 2 4. # #	, 5 5 0. # #	, 6 1 6. # #	, 5 4 6. # #	, 6 4 7. # #	, 5 6 0. # #	, 6 3 4. # #	, 6 0 3. # #	, 5 7 2. # #	, 6 4 2. # #	, 8 5 0. # #	

		X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 1 0	X 1 1	X 1 2	X 1 3	X 1 4	X 1 5	X 1 6	X 1 7	X 1 8	X 1 9	X 2 0	X 2 1	X 2 2	X 2 3	X 2 4	X 2 5	X 2 6	X 2 7	X 2 8	X 2 9	X 3 0	T o t a l	
N		4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8
X 1 1	Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	, 7 5 8 . # # 4 8	, 6 8 7 . # # 4 8	, 7 0 6 . # # 4 8	, 6 5 5 . # # 4 8	, 5 3 0 . # # 4 8	, 4 3 9 . # # 4 8	, 5 4 0 . # # 4 8	, 5 4 9 . # # 4 8	, 9 3 3 . # # 4 8	, 8 5 5 . # # 4 8	1 # 4 8	, 6 6 7 . # # 4 8	, 6 4 3 . # # 4 8	, 6 7 6 . # # 4 8	, 6 6 0 . # # 4 8	, 5 5 8 . # # 4 8	, 5 2 8 . # # 4 8	, 5 8 6 . # # 4 8	, 4 9 8 . # # 4 8	, 4 9 2 . # # 4 8	, 6 5 1 . # # 4 8	, 4 5 5 . 0 0 1 4 8	, 4 5 3 . 0 0 1 4 8	, 4 7 6 . 0 0 1 4 8	, 5 2 3 . # # 4 8	, 4 7 3 . 0 0 1 4 8	, 4 5 7 . 0 0 1 4 8	, 5 3 1 . # # 4 8	, 4 6 2 . 0 0 1 4 8	, 5 8 5 . # # 4 8	, 7 6 2 . # # 4 8	
X 1 2	Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	, 8 7 0 . # # 4 8	, 8 2 4 . # # 4 8	, 7 6 4 . # # 4 8	, 7 8 8 . # # 4 8	, 7 8 4 . # # 4 8	, 5 8 0 . # # 4 8	, 5 0 2 . # # 4 8	, 6 7 2 . # # 4 8	, 6 8 6 . # # 4 8	, 7 1 4 . # # 4 8	, 6 6 7 . # # 4 8	1 # 4 8	, 6 7 7 . # # 4 8	, 9 4 1 . # # 4 8	, 8 7 3 . # # 4 8	, 7 3 5 . # # 4 8	, 6 6 5 . # # 4 8	, 6 9 9 . # # 4 8	, 6 6 4 . # # 4 8	, 6 5 9 . # # 4 8	, 7 1 8 . # # 4 8	, 6 9 3 . # # 4 8	, 6 7 3 . # # 4 8	, 5 3 8 . # # 4 8	, 5 8 6 . # # 4 8	, 5 8 8 . # # 4 8	, 5 0 3 . # # 4 8	, 5 3 5 . # # 4 8	, 6 6 0 . # # 4 8	, 4 3 1 . # # 4 8	, 8 7 2 . # # 4 8	
X 1 3	Pe ars on Cor rel	, 6 5 7 . # # 4 8	, 6 7 6 . # # 4 8	, 5 6 8 . # # 4 8	, 5 3 7 . # # 4 8	, 5 2 9 . # # 4 8	, 5 1 0 . # # 4 8	, 6 0 0 . # # 4 8	, 6 5 2 . # # 4 8	, 6 4 8 . # # 4 8	, 6 4 7 . # # 4 8	, 6 4 1 . # # 4 8	, 6 6 4 . # # 4 8	, 6 9 7 . # # 4 8	, 5 7 1 . # # 4 8	, 5 5 0 . # # 4 8	, 5 4 0 . # # 4 8	, 5 7 4 . # # 4 8	, 5 7 0 . # # 4 8	, 5 6 7 . # # 4 8	, 5 3 6 . # # 4 8	, 5 3 3 . # # 4 8	, 5 3 1 . # # 4 8	, 5 4 6 . # # 4 8	, 5 7 2 . # # 4 8	, 5 4 1 . # # 4 8	, 4 5 7 . # # 4 8	, 5 6 1 . # # 4 8	, 5 7 0 . # # 4 8	, 7 5 3 . # # 4 8			

	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 1 0	X 1 1	X 1 2	X 1 3	X 1 4	X 1 5	X 1 6	X 1 7	X 1 8	X 1 9	X 2 0	X 2 1	X 2 2	X 2 3	X 2 4	X 2 5	X 2 6	X 2 7	X 2 8	X 2 9	X 3 0	T o t a l
atio n Sig . (2- tail ed) N	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	0 0 1 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8
X 1 4 Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	, 8 4 2' # # 4 8	, 8 4 1' # # 4 8	, 7 9 9' # # 4 8	, 8 0 1' # # 4 8	, 8 3 1' # # 4 8	, 6 0 8' # # 4 8	, 5 6 0' # # 4 8	, 7 1 3' # # 4 8	, 7 2 5' # # 4 8	, 7 9 5' # # 4 8	, 6 7 6' # # 4 8	, 9 4 1' # # 4 8	, 6 6 4' # # 4 8	, 1 # # 4 8	, 8 9 6' # # 4 8	, 7 3 4' # # 4 8	, 7 3 0' # # 4 8	, 7 5 6' # # 4 8	, 7 1 6' # # 4 8	, 6 9 4' # # 4 8	, 7 7 7' # # 4 8	, 7 4 4' # # 4 8	, 6 6 7' # # 4 8	, 5 6 4' # # 4 8	, 6 2 1' # # 4 8	, 6 3 3' # # 4 8	, 5 9 3' # # 4 8	, 6 0 1' # # 4 8	, 7 2 3' # # 4 8	, 5 2 9' # # 4 8	, 9 1 6' # # 4 8
X 1 5 Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed)	, 7 4 3' # #	, 8 2 1' # #	, 7 1 0' # #	, 7 8 4' # #	, 7 7 6' # #	, 5 9 8' # #	, 5 5 3' # #	, 6 5 8' # #	, 6 6 2' # #	, 6 7 9' # #	, 6 6 0' # #	, 8 7 7' # #	, 6 9 4' # #	, 8 9 6' # #	, 1 # #	, 6 7 4' # #	, 7 5 4' # #	, 7 3 6' # #	, 6 9 8' # #	, 6 8 2' # #	, 6 6 5' # #	, 7 2 7' # #	, 6 2 1' # #	, 6 3 0' # #	, 6 6 0' # #	, 5 7 9' # #	, 6 2 7' # #	, 6 5 3' # #	, 5 5 8' # #	, 8 8 3' # #	

		X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 1 0	X 1 1	X 1 2	X 1 3	X 1 4	X 1 5	X 1 6	X 1 7	X 1 8	X 1 9	X 2 0	X 2 1	X 2 2	X 2 3	X 2 4	X 2 5	X 2 6	X 2 7	X 2 8	X 2 9	X 3 0	T o t a l	
N		4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	
X 1 6	Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	, 7 3 6 .	, 7 4 8 .	, 6 2 0 .	, 5 9 0 .	, 5 9 9 .	, 5 0 4 .	, 5 2 5 .	, 6 9 4 .	, 5 4 0 .	, 6 0 5 .	, 5 5 8 .	, 7 3 5 .	, 5 7 0 .	, 7 3 4 .	, 6 7 4 .	1 0 5 .	, 7 0 5 .	, 6 6 1 .	, 6 0 2 .	, 7 9 2 .	, 6 4 2 .	, 6 4 9 .	, 5 8 0 .	, 4 5 9 .	, 5 5 5 .	, 5 2 0 .	, 4 8 5 .	, 6 0 6 .	, 6 2 5 .	, 4 5 1 .	, 7 8 6 .	
		# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	0 0 1	# #	# #	# #	# #	# #	0 0 1	# #	
		4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8
X 1 7	Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	, 6 5 8 .	, 6 5 7 .	, 6 2 3 .	, 6 7 3 .	, 6 1 3 .	, 5 7 6 .	, 5 2 7 .	, 6 0 1 .	, 5 3 4 .	, 6 0 1 .	, 5 2 8 .	, 6 6 5 .	, 5 1 0 .	, 7 3 0 .	, 7 3 4 .	, 7 5 5 .	1 0 5 .	, 8 7 9 .	, 8 3 5 .	, 6 7 2 .	, 8 5 1 .	, 7 6 7 .	, 6 3 5 .	, 5 7 1 .	, 5 7 7 .	, 6 0 0 .	, 5 9 7 .	, 6 5 8 .	, 6 3 3 .	, 6 3 1 .	, 8 2 8 .	
		# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	
		4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8
X 1 8	Pe ars on Cor rel	, 6 7 7 .	, 6 3 8 .	, 7 1 0 .	, 6 9 2 .	, 6 2 9 .	, 5 6 6 .	, 5 0 9 .	, 6 5 1 .	, 6 2 6 .	, 6 5 1 .	, 5 8 9 .	, 6 9 4 .	, 5 4 6 .	, 7 5 6 .	, 7 3 6 .	, 6 8 1 .	, 6 7 9 .	1 4 8 .	, 8 2 8 .	, 5 8 3 .	, 8 3 3 .	, 6 8 5 .	, 6 3 4 .	, 5 3 7 .	, 5 1 6 .	, 5 6 1 .	, 7 0 1 .	, 6 3 0 .	, 7 0 8 .	, 6 9 4 .	, 8 4 1 .	

	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 1 0	X 1 1	X 1 2	X 1 3	X 1 4	X 1 5	X 1 6	X 1 7	X 1 8	X 1 9	X 2 0	X 2 1	X 2 2	X 2 3	X 2 4	X 2 5	X 2 6	X 2 7	X 2 8	X 2 9	X 3 0	T o t a l
atio n Sig . (2-tail ed) N	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8
X 1 9 Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2-tail ed) N	, 5 8 9 . # 4 8	, 5 9 8 . # 4 8	, 5 7 3 . # 4 8	, 5 3 1 . # 4 8	, 6 2 8 . # 4 8	, 5 9 3 . # 4 8	, 4 8 6 . # 4 8	, 5 5 1 . # 4 8	, 5 7 4 . # 4 8	, 5 9 7 . # 4 8	, 4 9 8 . # 4 8	, 6 6 4 . # 4 8	, 5 6 7 0 . # 4 8	, 7 1 6 . # 4 8	, 6 9 8 . # 4 8	, 6 0 2 . # 4 8	, 8 3 5 . # 4 8	, 8 4 8 . # 4 8	1 . # 4 8	, 6 1 6 . # 4 8	, 8 7 7 . # 4 8	, 7 3 2 . # 4 8	, 7 1 8 . # 4 8	, 6 4 2 . # 4 8	, 7 0 6 . # 4 8	, 6 9 5 . # 4 8	, 6 8 7 . # 4 8	, 5 7 9 . # 4 8	, 6 5 5 . # 4 8	, 5 8 4 . # 4 8	, 8 1 6 . # 4 8
X 2 0 Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2-tail ed)	, 6 1 4 . #	, 6 2 8 . #	, 5 4 0 . #	, 5 6 0 . #	, 5 6 6 . #	, 4 6 8 . 0 0 1	, 4 0 6 . #	, 5 0 6 7 . #	, 5 0 7 . #	, 5 4 6 7 . #	, 4 9 2 . #	, 6 5 6 9 . #	, 5 6 5 4 . #	, 6 9 2 . #	, 6 8 2 . #	, 7 7 8 3 . #	, 6 7 8 3 . #	, 5 6 1 6 . #	1 . #	, 6 5 6 . #	, 6 5 5 . #	, 5 8 4 . #	, 5 5 8 3 . #	, 5 5 3 . #	, 5 3 4 . #	, 4 6 0 . 0 0 1	, 5 3 8 . #	, 6 4 6 . #	, 3 9 2 . #	, 7 4 4 . #	

		X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 1 0	X 1 1	X 1 2	X 1 3	X 1 4	X 1 5	X 1 6	X 1 7	X 1 8	X 1 9	X 2 0	X 2 1	X 2 2	X 2 3	X 2 4	X 2 5	X 2 6	X 2 7	X 2 8	X 2 9	X 3 0	T o t a l	
N		4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8
X 2 1	Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	, 6 9 9 . # # 4 8	, 6 5 8 . # # 4 8	, 6 9 4 . # # 4 8	, 5 9 0 . # # 4 8	, 6 0 9 . # # 4 8	, 5 5 3 . # # 4 8	, 5 0 0 . # # 4 8	, 5 8 8 . # # 4 8	, 6 9 6 . # # 4 8	, 7 2 4 . # # 4 8	, 6 5 1 . # # 4 8	, 7 1 8 . # # 4 8	, 5 7 6 . # # 4 8	, 7 7 7 . # # 4 8	, 6 6 5 . # # 4 8	, 6 4 2 . # # 4 8	, 8 5 1 . # # 4 8	, 8 2 3 . # # 4 8	, 8 7 7 . # # 4 8	, 6 5 6 . # # 4 8	1 # 4 8	, 7 6 0 . # # 4 8	, 6 6 6 . # # 4 8	, 5 5 0 . # # 4 8	, 6 5 7 . # # 4 8	, 5 8 9 . # # 4 8	, 5 7 7 . # # 4 8	, 5 5 1 . # # 4 8	, 6 8 2 . # # 4 8	, 6 2 1 . # # 4 8	, 8 4 3 . # # 4 8	
X 2 2	Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	, 5 8 8 1 . # # 4 8	, 5 8 8 . # # 4 8	, 5 7 0 . # # 4 8	, 6 0 3 . # # 4 8	, 6 1 9 . # # 4 8	, 5 0 8 . # # 4 8	, 4 9 4 . # # 4 8	, 5 9 4 . # # 4 8	, 4 8 7 . # # 4 8	, 5 5 0 . # # 4 8	, 4 5 5 . 0 # 4 8	, 6 9 3 . # # 4 8	, 5 3 0 . # # 4 8	, 7 4 4 . # # 4 8	, 6 2 7 . # # 4 8	, 7 4 9 . # # 4 8	, 6 6 7 . # # 4 8	, 6 3 2 . # # 4 8	, 7 3 5 . # # 4 8	, 6 5 5 . # # 4 8	1 # 4 8	, 6 2 0 . # # 4 8	, 5 5 1 . # # 4 8	, 5 5 7 . # # 4 8	, 5 5 2 . # # 4 8	, 4 8 2 . 0 # 4 8	, 5 2 5 . # # 4 8	, 7 0 0 . # # 4 8	, 4 8 6 . # # 4 8	, 7 7 1 . # # 4 8		
X 2 3	Pe ars on Cor rel	, 5 4 1 . # # 4 8	, 5 5 7 . # # 4 8	, 5 8 7 . # # 4 8	, 6 0 9 . # # 4 8	, 6 1 6 . # # 4 8	, 4 2 3 . # # 4 8	, 4 3 3 . # # 4 8	, 4 8 7 . # # 4 8	, 5 1 0 . # # 4 8	, 6 1 6 . # # 4 8	, 4 5 7 3 . # # 4 8	, 5 7 3 1 . # # 4 8	, 6 6 1 7 . # # 4 8	, 6 5 0 . # # 4 8	, 6 3 1 8 . # # 4 8	, 5 6 3 5 . # # 4 8	, 6 3 3 4 . # # 4 8	, 7 1 8 . # # 4 8	, 5 6 1 . # # 4 8	, 6 6 6 . # # 4 8	1 # 4 8	, 6 2 0 . # # 4 8	, 8 0 9 . # # 4 8	, 7 1 5 . # # 4 8	, 6 0 1 . # # 4 8	, 5 3 4 . # # 4 8	, 6 5 2 . # # 4 8	, 4 7 5 . # # 4 8	, 7 6 2 . # # 4 8			

	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 1 0	X 1 1	X 1 2	X 1 3	X 1 4	X 1 5	X 1 6	X 1 7	X 1 8	X 1 9	X 2 0	X 2 1	X 2 2	X 2 3	X 2 4	X 2 5	X 2 6	X 2 7	X 2 8	X 2 9	X 3 0	T o t a l
atio n Sig . (2-tail ed) N	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	0 0 1 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	0 0 1 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	0 0 1 4 8	# # 4 8
X 2 4 Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2-tail ed) N	, 4 8 2'. 0 0 1 4 8	, 5 4 2'. # # 4 8	, 5 1 9'. # # 4 8	, 5 5 3'. # # 4 8	, 5 1 5'. # # 4 8	, 5 5 8'. # # 4 8	, 4 8 5'. # # 4 8	, 5 0 4'. # # 4 8	, 5 2 5'. # # 4 8	, 5 4 6'. # # 4 8	, 4 7 6'. 0 0 1 4 8	, 5 3 3'. # # 4 8	, 5 3 7'. # # 4 8	, 5 6 6'. # # 4 8	, 6 3 8'. 0 0 1 4 8	, 4 5 9'. # # 4 8	, 5 7 1'. # # 4 8	, 5 1 7'. # # 4 8	, 6 4 2'. # # 4 8	, 5 5 3'. # # 4 8	, 5 5 0'. # # 4 8	, 5 5 1'. # # 4 8	, 6 9 0'. # # 4 8	1 # # 4 8	, 7 6 5'. # # 4 8	, 8 5 9'. # # 4 8	, 6 6 5'. # # 4 8	, 6 1 6'. # # 4 8	, 5 8 1'. # # 4 8	, 4 9 9'. # # 4 8	, 7 3 0'. # # 4 8
X 2 5 Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2-tail ed)	, 5 3 1'. # #	, 5 5 1'. # #	, 4 8 5'. # #	, 4 4 0'. # #	, 5 6 7'. # #	, 3 3 6'. 0 1 9	, 4 0 0'. # #	, 4 1 6'. # #	, 6 2 2'. # #	, 6 4 7'. # #	, 5 2 8 3'. # #	, 5 8 6'. # #	, 5 4 6'. # #	, 6 2 0 1'. # #	, 6 0 9'. # #	, 5 5 5'. # #	, 5 7 7'. # #	, 5 6 9'. # #	, 7 0 6'. # #	, 5 6 3'. # #	, 6 5 7'. # #	, 5 5 7'. # #	, 8 0 9'. # #	7 # #	1 # #	, 8 0 2'. # #	, 6 7 7'. # #	, 5 6 9'. # #	, 6 3 9'. # #	, 6 0 1'. # #	, 7 4 5'. # #

		X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 1 0	X 1 1	X 1 2	X 1 3	X 1 4	X 1 5	X 1 6	X 1 7	X 1 8	X 1 9	X 2 0	X 2 1	X 2 2	X 2 3	X 2 4	X 2 5	X 2 6	X 2 7	X 2 8	X 2 9	X 3 0	T o t a l	
N		4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8
X 2 6	Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	, 5 1 6 . # # 4 8	, 5 6 7 . # # 4 8	, 4 9 7 . # # 4 8	, 5 0 4 . # # 4 8	, 5 9 2 . # # 4 8	, 5 1 0 . # # 4 8	, 4 5 1 . 0 0 1 4 8	, 4 7 6 . 0 0 1 4 8	, 5 3 9 . # # 4 8	, 5 6 0 . # # 4 8	, 4 7 3 . 0 0 1 4 8	, 5 8 8 . # # 4 8	, 5 7 2 . # # 4 8	, 6 3 3 . # # 4 8	, 6 6 0 . # # 4 8	, 5 2 0 . # # 4 8	, 6 0 0 . # # 4 8	, 5 6 1 . # # 4 8	, 6 9 5 . # # 4 8	, 5 3 4 . # # 4 8	, 5 8 9 . # # 4 8	, 5 5 2 . # # 4 8	, 7 1 5 . # # 4 8	, 8 5 9 . # # 4 8	, 8 0 2 . # # 4 8	1 # 4 8	, 7 4 1 . # 4 8	, 6 5 1 . # 4 8	, 6 7 0 . # 4 8	, 6 0 0 . # 4 8	, 7 5 8 . # 4 8	
X 2 7	Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	, 5 0 6 . # # 4 8	, 5 7 0 . # # 4 8	, 6 0 5 . # # 4 8	, 5 4 0 4 . # # 4 8	, 5 0 6 2 . 0 0 1 4 8	, 4 6 8 4 . # # 4 8	, 5 3 3 9 . # # 4 8	, 5 1 3 8 . # # 4 8	, 6 3 4 7 . 0 0 1 4 8	, 4 5 0 3 . # # 4 8	, 5 4 1 . # # 4 8	, 5 9 7 9 . # # 4 8	, 5 7 8 5 . # # 4 8	, 4 9 7 . # # 4 8	, 7 0 1 . # # 4 8	, 6 8 7 . # # 4 8	, 7 7 1 . # # 4 8	, 6 4 8 7 . # # 4 8	, 4 6 0 . 0 0 1 4 8	, 5 7 7 . # # 4 8	, 4 8 2 . 0 0 1 4 8	, 6 0 1 . # # 4 8	, 6 6 5 . # # 4 8	, 6 7 7 . # # 4 8	, 7 4 1 . # 4 8	1 # 4 8	, 8 1 4 . # 4 8	, 7 2 1 . # 4 8	, 7 9 4 . # 4 8	, 7 5 0 . # 4 8		
X 2 8	Pe ars on Cor rel	, 5 2 9 . # # 4 8	, 6 7 0 . # # 4 8	, 5 8 3 . # # 4 8	, 6 0 1 . # # 4 8	, 4 8 7 . # # 4 8	, 4 2 1 8 . # # 4 8	, 5 8 5 . # # 4 8	, 5 5 8 . # # 4 8	, 4 8 3 . # # 4 8	, 6 0 3 1 . # # 4 8	, 5 3 5 . # # 4 8	, 4 5 7 . # # 4 8	, 6 0 2 7 . # # 4 8	, 6 2 6 . # # 4 8	, 6 3 5 8 . # # 4 8	, 6 0 5 0 . # # 4 8	, 6 3 3 0 . # # 4 8	, 5 7 9 . # # 4 8	, 5 3 7 8 . # # 4 8	, 5 5 1 . # # 4 8	, 5 2 5 . # # 4 8	, 5 3 4 . # # 4 8	, 6 1 6 . # # 4 8	, 5 6 9 . # # 4 8	, 6 5 1 . # 4 8	, 8 1 4 . # 4 8	1 # 4 8	, 6 9 3 . # 4 8	, 7 9 4 . # 4 8	, 7 4 7 . # 4 8		

	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 1 0	X 1 1	X 1 2	X 1 3	X 1 4	X 1 5	X 1 6	X 1 7	X 1 8	X 1 9	X 2 0	X 2 1	X 2 2	X 2 3	X 2 4	X 2 5	X 2 6	X 2 7	X 2 8	X 2 9	X 3 0	T o t a l
atio n Sig . (2- tail ed) N	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	# # 4 8	
X 2 9 Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed) N	, 5 5 1' # 4 8	, 5 5 5' # 4 8	, 6 4 3' # 4 8	, 6 2 3' # 4 8	, 5 9 7' # 4 8	, 4 4 0' # 4 8	, 5 2 8' # 4 8	, 6 2 0' # 4 8	, 5 0 5' # 4 8	, 5 7 2' # 4 8	, 4 6 2' # 4 8	, 6 6 0' # 4 8	, 5 6 1' # 4 8	, 7 2 3' # 4 8	, 6 5 3' # 4 8	, 6 2 5' # 4 8	, 6 3 3' # 4 8	, 7 0 8' # 4 8	, 6 5 5' # 4 8	, 6 4 6' # 4 8	, 6 8 2' # 4 8	, 7 0 0' # 4 8	, 6 5 2' # 4 8	, 5 8 1' # 4 8	, 6 3 9' # 4 8	, 6 7 0' # 4 8	, 7 2 1' # 4 8	, 6 9 3' # 4 8	1 # 4 8	, 7 0 9' # 4 8	, 7 9 0' # 4 8
X 3 0 Pe ars on Cor rel atio n Sig . (2- tail ed)	, 4 5 4' # 0 0 1	, 5 5 3' # #	, 5 3 0' # #	, 4 9 0' # #	, 4 1 2' # #	, 3 1 7' # #	, 5 3 0' # #	, 4 5 9' # 0 0 1	, 5 7 4' # #	, 6 4 2' # #	, 5 8 5' # #	, 4 3 1' # #	, 5 7 0' # #	, 5 2 9' # #	, 5 5 8' # 0 0 1	, 4 6 1' # #	, 6 9 4' # #	, 5 8 4' # #	, 3 9 2' # #	, 6 2 1' # #	, 4 8 6' # #	, 4 7 5' # 0 0 1	, 4 9 9' # #	, 6 0 1' # #	, 6 0 0' # #	, 7 9 4' # #	, 7 9 4' # #	, 7 0 9' # #	1 # #	, 7 0 3' # #	

		X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 1 0	X 1 1	X 1 2	X 1 3	X 1 4	X 1 5	X 1 6	X 1 7	X 1 8	X 1 9	X 2 0	X 2 1	X 2 2	X 2 3	X 2 4	X 2 5	X 2 6	X 2 7	X 2 8	X 2 9	X 3 0	T o t a l	
	N	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	
T o t a l	P e a r s o n C o r r e l a t i o n S i g . (2- t a i l e d)	, 8 5 2 [*]	, 8 6 3 [*]	, 8 4 2 [*]	, 8 2 3 [*]	, 8 1 8 [*]	, 7 0 1 [*]	, 7 1 6 [*]	, 7 9 3 [*]	, 7 9 2 [*]	, 8 5 0 [*]	, 7 6 2 [*]	, 8 7 2 [*]	, 7 5 3 [*]	, 9 1 6 [*]	, 8 8 3 [*]	, 7 8 6 [*]	, 8 2 8 [*]	, 8 4 1 [*]	, 8 1 6 [*]	, 7 4 4 [*]	, 8 4 3 [*]	, 7 7 1 [*]	, 7 6 2 [*]	, 7 3 0 [*]	, 7 4 5 [*]	, 7 5 8 [*]	, 7 5 0 [*]	, 7 4 7 [*]	, 7 9 0 [*]	, 7 0 3 [*]	1	
	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #			
	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8		4 8

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جامعة الرانري

AR - RANIRY

LAMPIRAN REABILITAS

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	48	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	48	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,980	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Deleted	Scale Variance if Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Deleted
X1	126,6667	259,716	,839	,979
X2	126,6250	259,388	,850	,979
X3	126,7917	259,020	,828	,979
X4	126,6458	258,957	,807	,979
X5	126,6875	259,879	,802	,979
X6	126,8750	263,899	,678	,980
X7	126,9375	262,826	,693	,979
X8	126,7708	261,585	,777	,979

X9	126,7708	260,904	,774	,979
X10	126,7708	260,223	,837	,979
X11	126,6875	261,326	,742	,979
X12	126,5625	259,996	,861	,979
X13	126,8750	261,941	,733	,979
X14	126,6250	258,920	,908	,978
X15	126,6042	259,691	,873	,979
X16	126,7708	263,287	,771	,979
X17	126,6250	262,665	,815	,979
X18	126,6875	262,517	,829	,979
X19	126,7292	263,223	,803	,979
X20	126,8125	262,368	,723	,979
X21	126,6667	262,397	,831	,979
X22	126,7083	263,317	,754	,979
X23	126,8125	263,347	,744	,979
X24	126,8542	263,702	,709	,979
X25	126,8542	264,851	,727	,979
X26	126,7500	263,043	,740	,979
X27	126,8125	265,177	,734	,979
X28	126,6458	265,255	,730	,979
X29	126,6667	264,397	,776	,979
X30	126,7292	265,648	,683	,979

LAMPIRAN UJI REGRESI

Regression

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Variabel X (Internalisasi Nilai Islami) ^b		Enter

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,832 ^a	,692	,686	4,512

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2107,315	1	2107,315	103,510	,000 ^b
	Residual	936,497	46	20,359		
	Total	3043,813	47			

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,860	4,624		4,079	,000
	Variabel X (Internalisasi Nilai Islami)	,709	,070	,832	10,174	,000

a. Dependent Variable: Variabel Y (Pelaksanaan Kurikulum Merdeka)

LAMPIRAN HASIL ANALISIS DESKRIPTIF

Descriptives

	Descriptive Statistics												
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Varian	Skewness	Kurtosis			
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Variabel X (Internalisasi Nilai Islami)	48	45	30	75,00	3152	65,67	1,363	9,440	89,121	-1,596	,343	3,487	,674
Variabel Y (Pelaksanaan Kurikulum Merdeka)	48	45	30	75,00	3141	65,44	1,162	8,047	64,762	-1,660	,343	6,530	,674
Valid N (listwise)	48												

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

<i>Variabel X (Internalisasi Nilai Islami)</i>	<i>Nilai</i>	<i>Variabel Y (Penerapan Kurikulum Merdeka)</i>	<i>Nilai</i>
Mean	65,67	Mean	65,44
Standard Error	1,36	Standard Error	1,16
Median	67,50	Median	65,00
Mode	75,00	Mode	60,00
Standard Deviation	9,44	Standard Deviation	8,05
Sample Variance	89,12	Sample Variance	64,76
Kurtosis	3,49	Kurtosis	6,53
Skewness	-1,60	Skewness	-1,66
Range	45,00	Range	45,00
Minimum	30,00	Minimum	30,00
Maximum	75,00	Maximum	75,00
Sum	3.152,00	Sum	3.141,00
Count	48,00	Count	48,00

جامعة الرانري

AR - RANIRY

LAMPIRAN ANALISIS REGRESI

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Variabel X (Internalisasi Nilai Islami) ^b		Enter

a. Dependent Variable: Variabel Y
(Pelaksanaan Kurikulum Merdeka)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,832 ^a	,692	,686	4,512

a. Predictors: (Constant), Variabel X (Internalisasi Nilai Islami)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2107,315	1	2107,315	103,510	,000 ^b
	Residual	936,497	46	20,359		
	Total	3043,813	47			

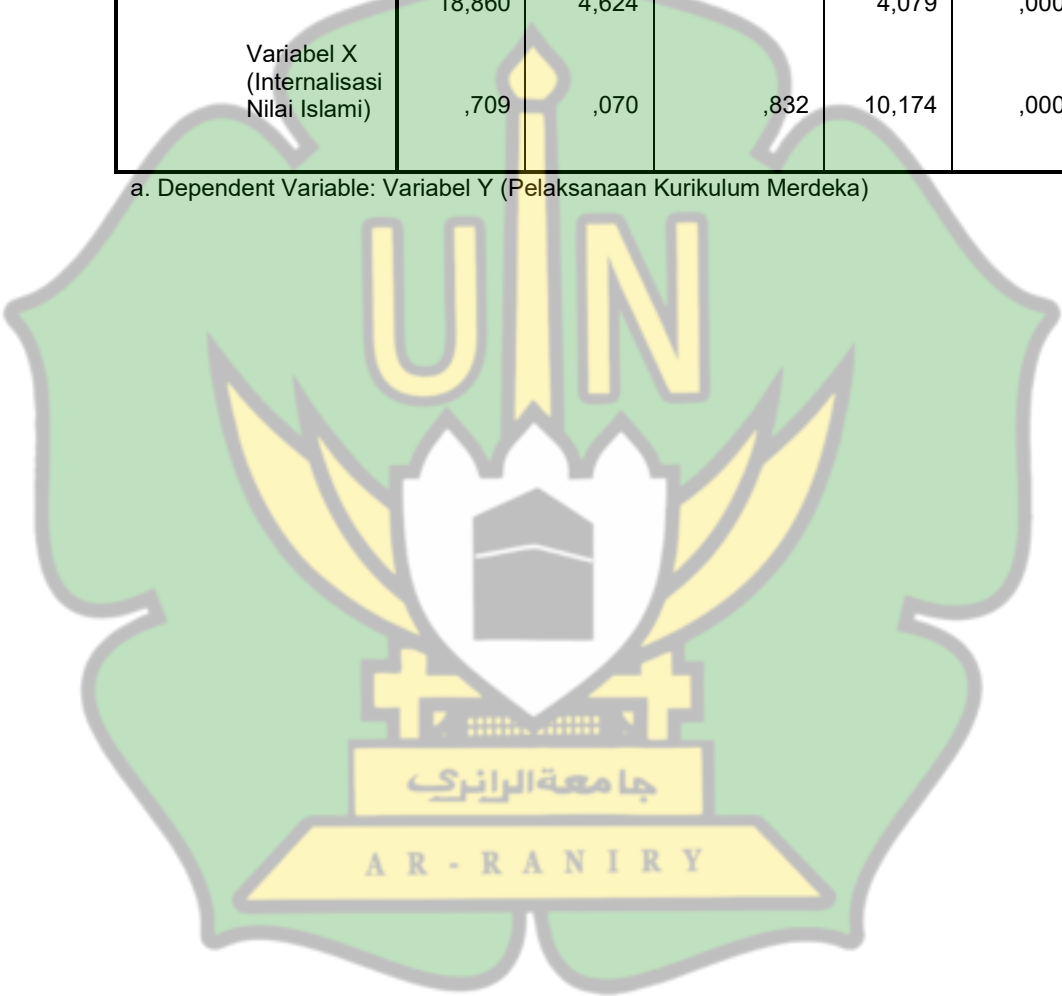
a. Dependent Variable: Variabel Y (Pelaksanaan Kurikulum Merdeka)

b. Predictors: (Constant), Variabel X (Internalisasi Nilai Islami)

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,860	4,624		4,079	,000
	Variabel X (Internalisasi Nilai Islami)	,709	,070	,832	10,174	,000

a. Dependent Variable: Variabel Y (Pelaksanaan Kurikulum Merdeka)



LAMPIRAN UJI REABILITAS VARIABEL X

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	48	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	48	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,971	15

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X01	61,2292	76,989	,891	,968
X02	61,1875	77,092	,879	,968
X03	61,3542	76,787	,862	,969
X04	61,2083	76,807	,835	,969
X05	61,2500	77,340	,829	,969
X06	61,4375	79,613	,698	,971
X07	61,5000	78,936	,719	,971
X08	61,3333	78,312	,802	,970
X09	61,3333	77,887	,802	,970
X10	61,3333	77,716	,852	,969
X11	61,2500	77,936	,782	,970
X12	61,1250	77,601	,876	,969
X13	61,4375	78,847	,728	,971
X14	61,1875	77,219	,907	,968
X15	61,1667	77,801	,857	,969

LAMPIRAN UJI REABILITAS VARIABEL Y

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	48	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	48	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,964	15

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y01	61,1042	57,031	,728	,962
Y02	60,9583	56,083	,845	,960
Y03	61,0208	56,276	,831	,960
Y04	61,0625	56,102	,861	,960
Y05	61,1458	56,212	,718	,963
Y06	61,0000	56,213	,835	,960
Y07	61,0417	56,551	,763	,961
Y08	61,1458	56,297	,781	,961
Y09	61,1875	56,453	,744	,962
Y10	61,1875	56,751	,794	,961
Y11	61,0833	55,950	,796	,961
Y12	61,1458	57,063	,784	,961
Y13	60,9792	57,255	,763	,961
Y14	61,0000	56,809	,816	,960
Y15	61,0625	57,379	,719	,962

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Teti Wahyuni, S.Si., M.Pd., lahir di Lambada, Aceh Besar pada tanggal 27 Juli 1975. Penulis saat ini menjabat sebagai Fungsional Tertentu di Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kampung halaman, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi pada jenjang Strata Satu (S1) di Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1999. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dengan konsentrasi Fisika di Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) dan lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada program Doktor (S3) dengan konsentrasi Pendidikan Agama Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dari tahun 2022 hingga tahun 2026, yang diselesaikan dengan disertasi berjudul "Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di Provinsi Aceh".

Sepanjang kariernya, penulis telah memiliki pengalaman kerja yang luas di lingkungan Kementerian Pendidikan. Penulis pernah bertugas sebagai pegawai staf di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPG) Aceh, staf di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh, Widyaiswara di LPMP Aceh, Widyaprada di LPMP Aceh, serta pernah menjabat sebagai Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh sebelum

akhirnya bertugas di Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal GTK Kementerian Pendidikan di Jakarta.

Penulis telah menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di berbagai jurnal. Pada tahun 2023, penulis menerbitkan artikel berjudul "Implementasi Metode Role Play Dalam Pembelajaran PAI Di PAUD Binaan BGP Aceh" dalam Jurnal Buah Hati, volume 10 nomor 1 halaman 53 sampai 64. Bersama tim, penulis juga menerbitkan artikel berjudul "Optimizing Collaborative Learning of Islamic Religious Education Through Social Media" pada tahun 2025 dalam Jurnal Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, volume 17 nomor 3 halaman 3820 sampai 3835. Penulis juga menulis artikel berjudul "The Construction of Science and the Methodology of Knowledge in the Islamic World" yang diterbitkan pada tahun 2024 dalam Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research, volume 4 nomor 2 halaman 513 sampai 522. Selain itu, penulis bersama tim menerbitkan artikel "Ki Hadjar Dewantara's View on Freedom to Learn in His Relationship with Character Improvement" pada tahun 2023 dalam Jurnal Sustainable, volume 6 nomor 2 halaman 526 sampai 533.

Penulis merupakan putri dari Almarhum Bapak Abu Bakar dan Almarhumah Ibu Nuriah. Penulis telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Rizqa Zurriyati Asyura, Fadhlia Az Zahra, dan Muhammad Afdhal As Shiddiq. Kehidupan keluarga yang penuh berkah ini menjadi penyemangat dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan berkarier di dunia pendidikan.